



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah atas segala rahmat dan petunjukNya sehingga tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2024. Penyusunan LPPD Kota Blitar Tahun 2024 merupakan pelaporan terakhir Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan 2021-2024, selain itu merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD berisi laporan kinerja urusan pemerintahan yang ditangani oleh Kota Blitar, memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2024. Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2024 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan. Namun dengan kerja sama seluruh stakeholder, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan LPPD Kota Blitar ini, semoga dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil-hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar kedepan agar semakin baik.

Blitar, 22 Maret 2025


H. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
1. Undang-undang pembentukan daerah	2
2. Data Geografis Wilayah	4
3. Jumlah Penduduk	6
4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	9
5. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	11
6. Rincian Apartur Sipil Negara	12
7. Realisasi anggaran dan belanja daerah	15
8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	25
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	40
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	55
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	66
2.1 Capaian Kinerja Makro	66
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67
2. Angka Kemiskinan	68
3. Tingkat Pengangguran terbuka	70
4. Pertumbuhan Ekonomi	71
5. PDRB Per Kapita	74
6. Ketimpangan Pendapatan	76
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	77
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	77

1. Pendidikan	77
2. Kesehatan	78
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	79
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	79
6. Sosial	79
7. Tenaga Kerja	80
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	80
9. Pangan	80
10. Pertanahan	80
11. Lingkungan Hidup	81
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81
15. Perhubungan	82
16. Komunikasi Dan Informatika	82
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	82
18. Penanaman Modal	83
19. Kepemudaan dan Olah Raga	83
20. Statistik	83
21. Persandian	83
22. Kebudayaan	83
23. Perpustakaan	84
24. Kearsipan	84
25. Kelautan dan Perikanan	84
26. Pariwisata	84
27. Pertanian	84
28. Kehutanan	85
29. Energi dan Sumber Daya Mineral	85
30. Perdagangan	85
31. Perindustrian	85
32. Transmigrasi	86

2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	86
1.	Perencanaan dan Keuangan	86
2.	Pengadaan	86
3.	Kepegawaian	86
4.	Manajemen Keuangan	87
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	87
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	87
A.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	88
B.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026	98
C.	Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	102
D.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	107
E.	Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	244
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	427
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	432
4.1	Urusan Pendidikan	432
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	432
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	433
4.1.3	Realisasi	433
4.1.4	Alokasi Anggaran	444
4.1.5	Dukungan Personil	455
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	456
4.2	Urusan Kesehatan	457
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	457
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	460
4.2.3	Realisasi	462
4.2.4	Alokasi Anggaran	521
4.2.5	Dukungan Personil	523

4.2.6	Permasalahan dan Solusi	523
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	524
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	524
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	525
4.3.3	Realisasi	526
4.3.4	Alokasi Anggaran	537
4.3.5	Dukungan Personil	544
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	545
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	545
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	545
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	546
4.4.3	Realisasi	547
4.4.4	Alokasi Anggaran	559
4.4.5	Dukungan Personil	563
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	564
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	566
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	566
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	567
4.5.3	Realisasi	568
4.5.4	Alokasi Anggaran	586
4.5.5	Dukungan Personil	600
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	601
4.6	Urusan Sosial	602
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	602
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	602
4.6.3	Realisasi	603
4.6.4	Alokasi Anggaran	633
4.6.5	Dukungan Personil	635
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	637

4.7	Program dan Kegiatan	638
BAB V	PENUTUP	645

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk per Tahun Kota Blitar Tahun 2019 – 2023	7
Tabel 1.3.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar	9
Tabel 1.5.	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar	10
Tabel 1.6.	Unit Organisasi Perangkat Daerah dan PNS Tahun 2024	12
Tabel 1.7.	ASN Pejabat Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	13
Tabel 1.8.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar	16
Tabel 1.9.	Perincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar	16
Tabel 1.10.	Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Blitar	17
Tabel 1.11.	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah Pemerintah Kota Blitar	18
Tabel 1.12.	Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar	21
Tabel 1.13.	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar	22
Tabel 1.14.	Rincian Belanja Modal Pemerintahan Kota Blitar	22
Tabel 1.15.	Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar	23
Tabel 1.16.	Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	24
Tabel 1.17.	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	24
Tabel 1.18.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program 2024	25
Tabel 2.1.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2023– 2024	66
Tabel 2.1.2.	IPM Kota Blitar Tahun 2021 s.d 2024	68
Tabel 2.1.3.	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2024	69
Tabel 2.1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2024	70
Tabel 2.1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar 2019 -2024	71
Tabel 2.1.6.	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 -2024	72
Tabel 2.1.7.	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2024	73
Tabel 2.1.8.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB	74
Tabel 2.1.9.	PDRB Per Kapita Tahun 2018-2024	75
Tabel 2.1.10.	Indeks Gini Kota Blitar dan sekitarnya Tahun 2022 – 2024	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Data Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	7
Gambar 1.2.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Gambar 1.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar	9
Gambar 1.4.	Peta Kecamatan Kota Blitar	10
Gambar 2.1.	IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2021 s.d 2024	68
Gambar 2.2.	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2012 s.d 2024	69
Gambar 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2024	71
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024	72
Gambar 2.5.	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 - 2024	72
Gambar 2.6.	PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2024	75
Gambar 2.7.	Indeks Gini	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari adanya perencanaan pada dokumen RKPD tahun 2024 sebagai penjabaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2025. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui SILPPD. Sedangkan muatan materi LPPD sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tersebut memuat :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
3. capaian kinerja makro;
4. laporan penerapan SPM;
5. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Termasuk didalamnya guna mendukung capaian kinerja tersebut, harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

1.1.1. Penjelasan Umum

1. Undang-undang Pembentukan Daerah

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- k) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- l) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2023;
- m) Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 40)
- n) Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 tanggal 14 Desember 2023;

- o) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 September 2024;
- p) Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 20 September 2024.

2. Data Geografis Wilayah

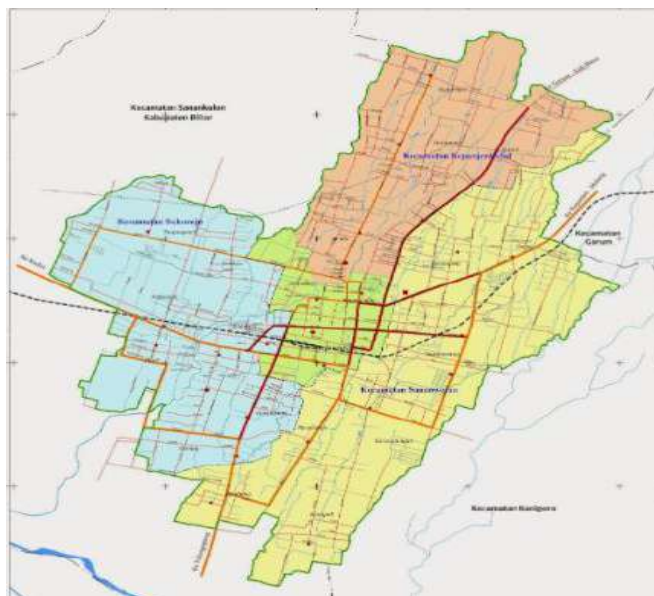
Kota Blitar merupakan salah satu wilayah kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar memiliki luas wilayah 33,203 km², yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.

Dari luas wilayah tersebut, Kecamatan Sananwetan menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 12,648 km², Kecamatan Kepanjenkidul memiliki luas wilayah 10,426 km² dan Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 10.128 km². Wilayah administrasi Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 2). Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 3). Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 4). Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14'-112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°10' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota

DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat



Peta Administratif Kota Blitar

- ☐ Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 159.781 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.812 jiwa/km², termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Berdasarkan sebaran penduduk jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah mencapai 59.640 jiwa (37,32%), Kecamatan Sukorejo sebanyak 54.407 jiwa (34,05%), dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk 45.734 jiwa (28,63%). Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,14% sedangkan penduduk laki-laki sebesar 49,85%, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

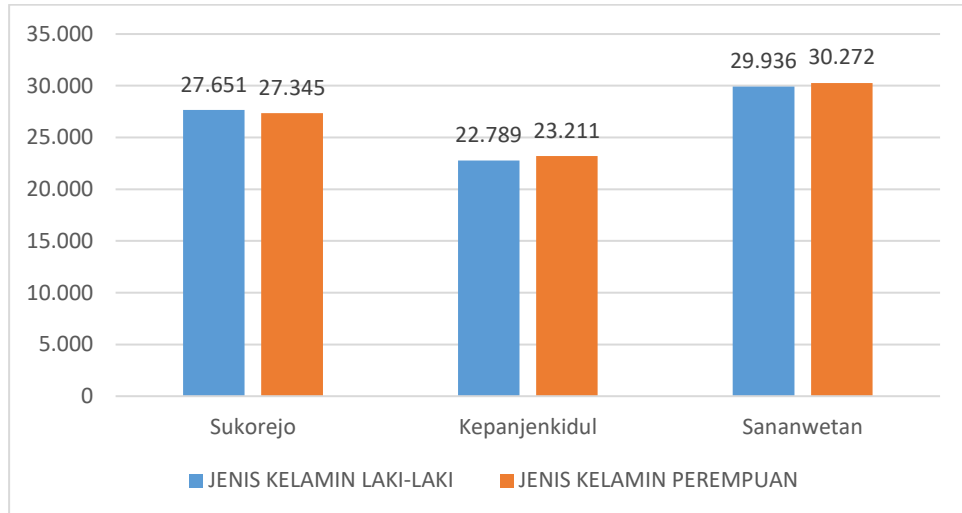
Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kepanjenkidul	22.789	23.211	46.000	4.381
Sukorejo	27.651	27.345	54.996	5.544
Sananwetan	29.936	30.272	60.208	4.955

Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.1

**Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2024**



Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Tabel 1.2.

**Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2024**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
2024	80.376	80.828	161.204	4.855
2023	79.651	80.130	159.781	4.906
2022	78.952	79.606	158.558	4.864
2021	78.820	79.424	158.244	4.859
2020	78.853	79.460	158.313	4.859
2019	78.634	79.275	157.909	4.847

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kementerian Dalam Negeri

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Blitar tahun 2024 sebesar
55.776 KK didominasi oleh Kepala Keluarga laki-laki sebesar 42.643

(76,45%) sedangkan Kepala Keluarga perempuan hanya 13.133 (23,54%).

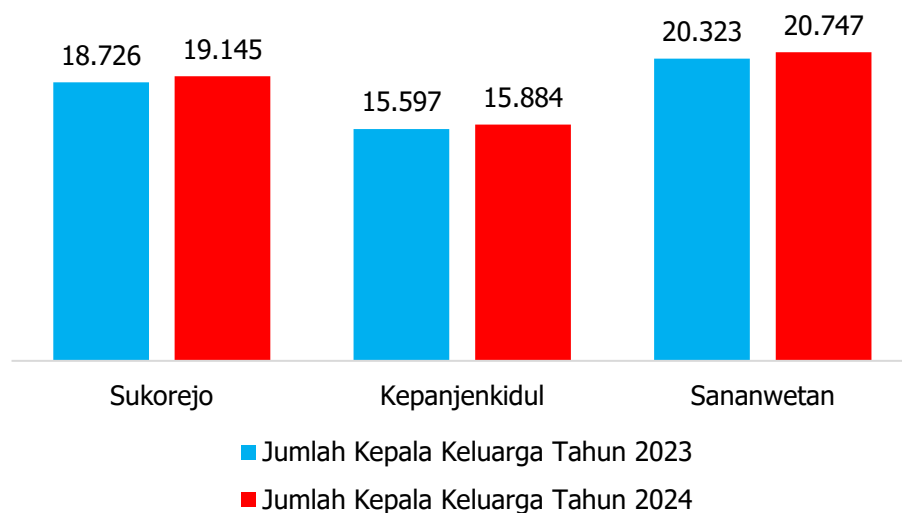
Tabel 1.3

Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPANJEN KIDUL	12.036	3.848	15.884
SUKOREJO	14.614	4.531	19.145
SANANWETAN	15.993	4.754	20.747
KOTA BLITAR	42.643	13.133	55.776

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.2.



Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2025

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Blitar terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 157.909 jiwa, hingga pada tahun 2024 mencapai 161.204 jiwa, atau bertambah sebanyak 3.295 jiwa. Laju pertumbuhan

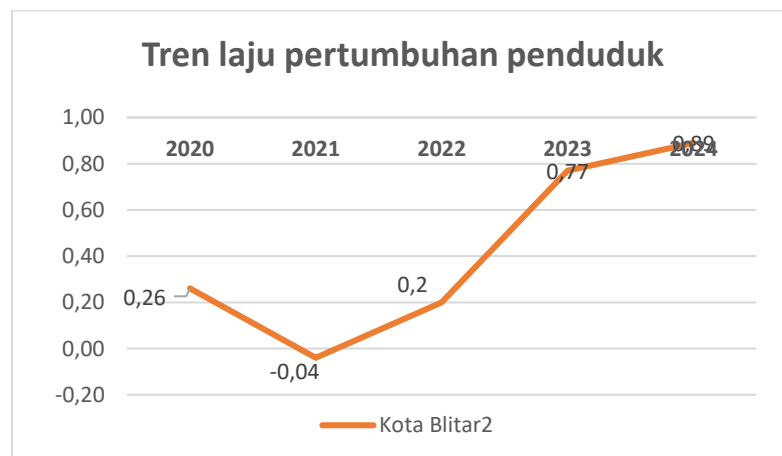
penduduk Kota Blitar selama periode tahun 2019-2024, selengkapnya sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar	157.909	158.313	158.244	158.558	159.781	161.204
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,48%	0,26%	-0,04%	0.20%	0.77%	0.89%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.3



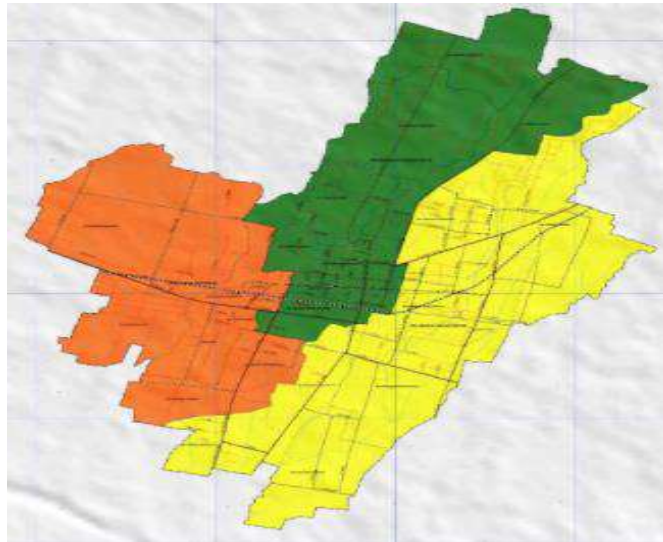
Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Blitar dengan luas 33,203 Km² merupakan wilayah terkecil kedua di wilayah provinsi Jawa Timur dan keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, secara administrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (

dua puluh satu) kelurahan dengan penjelasan gambar peta dan tabel sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Peta Kecamatan Kota Blitar



Tabel 1.5.
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sananwetan	Rembang
		Klampok
		Plosokerep
		Karangtengah
		Sananwetan
		Bendogerit
		Gedog
2	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul
		Kepanjenlor
		Kauman
		Bendo
		Tanggung
		Sentul
		Ngadirejo
3	Sukorejo	Tlumpu
		Karangsari
		Turi
		Blitar
		Sukorejo

No	Kecamatan	Kelurahan
		Pakunden
		Tanjungsari

5. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kelembagaan dan Struktur Perangkat daerah di Kota Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan

No	Unit Kerja	Dasar Hukum
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
7	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
14	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
15	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
16	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
18	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
19	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
24	Kecamatan Sananwetan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
25	Kecamatan Kepanjenkidul	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021

No	Unit Kerja	Dasar Hukum
1	2	3
26	Kecamatan Sukorejo	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
27	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021

6. Rincian Aparatur Sipil Negara

Pada tahun 2024, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar sebanyak 30 unit kerja ASN sebanyak 3.174 orang yang tersebar di keseluruhan unit kerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.6
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN ASN TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Struktural	Fungsional		Total
			JFT	JFU	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	12	38	47	97
2	Sekretariat DPRD	4	6	12	22
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	21	9	36
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	15	9	30
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	7	8	20
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	8	9	6	23
7	Inspektorat Daerah	5	29	2	36
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	9	541	60	610
9	Satuan Polisi Pamong Praja	10	16	21	47
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	17	5	26
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	8	12	23
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	7	10	23
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	21	8	31	60
14	Dinas Sosial	6	9	9	24
15	Dinas Kesehatan	8	255	34	297
16	Dinas Pendidikan	13	1041	64	1118
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	8	20	37
18	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	35	48
19	Dinas Perhubungan	15	6	20	41
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8	33	11	52

No	Unit Kerja	Struktural	Fungsional		Total
			JFT	JFU	
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	11	36	54
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	11	10	28
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	7	10	10	27
24	Kecamatan Sananwetan	40	8	33	81
25	Kecamatan Kepanjenkidul	42	5	32	79
26	Kecamatan Sukorejo	40	6	30	76
27	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	7	16	10	33
28	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	4	9	17
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	9	22	37
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	5	3	7	15
Jumlah Keseluruhan		330	2.163	624	3.117

Sumber: BKPSDM Kota Blitar 2025

Sedangkan untuk PNS berdasarkan jabatan fungsional diluar guru dan kesehatan termasuk hasil penyetaraan jabatan sebanyak 325 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.7
ASN Pejabat Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)
Kota Blitar Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
1	Administrator Database Kependudukan Ahli	4	-
2	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli	3	-
3	Analisis Akuakultur Ahli	1	-
4	Analisis Hukum Ahli	1	-
5	Analisis Kebijakan Ahli	29	14
6	Analisis SDM Aparatur Ahli	13	10
7	Pranata SDM Aparatur Terampil	3	3
8	Analisis Ketahanan Pangan Ahli	1	
9	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli	5	
10	Analisis Perdagangan Ahli	1	
11	Arsiparis Ahli	8	3
12	Arsiparis Terampil	10	1
13	Auditor Ahli	11	3
14	Auditor Terampil	4	4
15	Mediator Hubungan Industrial Ahli	1	
16	Medik Veteriner Ahli	4	
17	Pamong Budaya Ahli	2	
18	Pekerja Sosial Ahli	7	

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
19	Pembina Jasa Konstruksi Ahli	1	
20	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli	3	
21	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli	3	
22	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	4	
23	Penata Penanggulangan Bencana Ahli	1	
24	Penata Ruang Ahli	2	
25	Penera Terampil	1	1
26	Pengamat Tera Terampil	2	2
27	Pengantar Kerja Ahli	2	
28	Pengawas Bibit Ternak Ahli	3	
29	Pengawas Koperasi Ahli	3	1
30	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Ahli	13	13
31	Pengawas Perdagangan Ahli	2	
32	Pengawas Perikanan Ahli	2	
33	Pengawas Perikanan Terampil	1	
34	Pengawas Sekolah Ahli	12	
35	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli	9	9
36	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli	2	
37	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli	3	3
38	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	4	2
39	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	5	5
40	Penilik Ahli	3	
41	Penata Perijinan	3	
42	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	1	
43	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	7	
44	Penyuluh Pertanian Ahli	8	2
45	Penyuluh Pertanian Terampil	3	1
46	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	3	2
47	Perencana Ahli	17	8
48	Perisalah Legislatif Ahli	2	
49	Polisi Pamong Praja Ahli	1	1
50	Polisi Pamong Praja Terampil	2	2
51	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2	1
52	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	4	
53	Pranata Komputer Ahli	7	3
54	Pranata Komputer Terampil	7	2
55	Pranata Pemadam Kebakaran	9	6

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
56	Pustakawan Ahli	7	1
57	Pustakawan Terampil	3	
58	Sandiman Ahli	2	2
59	Statistisi Ahli	1	
60	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	3	
JUMLAH		281	105

7. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.939.919.974.898,84 atau 99,35% dari target yang telah ditetapkan (data sebelum diaudit BPK-RI). Rincian target realisasi dan capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2024

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	175.385.104.298,18	169.566.032.116,42	96,68
1.2	Pendapatan Transfer Lain-Lain	733.587.394.531,45	748.146.273.907,22	101,98
1.3	Pendapatan Daerah	9.338.187.768,02	9.180.873.676,42	98,32

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Yang Sah			
	Jumlah Pendapatan Daerah	946.035.561.117,14	939.919.974.898,84	99,35

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

Secara umum realisasi pendapatan daerah sebesar 99,35% dengan komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 169.566.032.116,42 atau 96,68%, Pendapatan Transfer Rp. 748.146.273.907,22 atau mencapai 101,98% dari target yang direncanakan dan realisasi atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.180.873.676,42 atau mencapai 98,32%.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.54.317.062.603,87 atau mencapai 109,49% dari target; Retribusi Daerah sebesar Rp. 107.140.294.908,00 atau 90,93%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.979.436.641,76 atau 66,67%; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 7.129.237.962,79 atau 110,02% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Rincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1	Pajak Daerah	49.606.982.952,82	54.317.062.603,87	109,49
1.1.2	Retribusi Daerah	117.828.811.800,00	107.140.294.908,00	90,93

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain	1.469.069.219,00	979.436.641,76	66,67
1.1.4	Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.480.240.326,36	7.129.237.962,79	110,02
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		175.385.104.298,18	169.566.032.116,42	96,68

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp.748.146.273.907,22 atau mencapai 101,98% dari target yang ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10
Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	733.587.394.531,45	748.146.273.907,22	101,98
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	624.917.549.050,94	621.315.474.706,00	99,42
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	89.258.553.000,00	89.902.080.000,00	100,72
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus - Fisik	443.225.689.700,00	443.238.812.000,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	30.349.577.000,00	26.140.002.027,00	86,13
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62.083.729.350,94	62.034.580.679,00	99,92
1.2.2.1	Insentif Fiskal Pendapatan	32.033.190.000,00	32.033.190.000,00	100,00
1.2.3	Transfer Antar Daerah	104.361.530.000,00	107.824.404.400,00	103,32
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	102.620.000.000,00	106.082.874.400,00	103,37

Kode	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.741.530.000,00	1.741.530.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer		733.587.394.531,45	748.146.273.907,22	101,98

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar diperoleh dari Lain-lain pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut.

Tabel 1.11
Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	9.338.187.768,02	9.180.873.676,42	98,32
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		9.338.187.768,02	9.180.873.676,42	98,32

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama Pemerintah Kota Blitar dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak, sangat prioritas dan terus meningkat. Kebijakan Pemerintah Pusat atas dana-dana transfer menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah daerah, karena sampai saat ini tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Blitar atas pendapatan transfer masih sangat tinggi.

Dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Blitar harus cermat, tepat dan sangat hati-hati dalam mengelola seluruh anggaran

pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah harus mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan daerah secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi aktual kehidupan perekonomian ditingkat nasional, regional dan internal Kota Blitar sendiri, termasuk dalam peningkatan inovasi dalam rangka menggali potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pemerintah Kota Blitar menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai Upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Kebijakan belanja Kota Blitar diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 serta belanja mandatory spending yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadani pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pada umumnya belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mencapai pemenuhan dan peningkatan standard pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 tetap berpijak pada proporsionalitas yang sehat antara pendapatan daerah dengan belanja daerah berdasar pembagian urusan wajib dan urusan pilihan baik atas dasar indikator capaian visi dan misi Kota Blitar maupun atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi neraca anggaran keuangan Kota Blitar tetap dapat dipertahankan pada kondisi yang tetap sehat, seimbang dan proporsional dan disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (performance budgeting) berorientasi pada pencapaian output dan outcomes serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan dengan skala prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai dan pegawai baru dengan mempertimbangan kenaikan gaji serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah;
- 2) Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar tahun 2024; dan
- 3) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang ditengah masyarakat dan yang telah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar.
- 4) Dukungan pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka

Pilkada Serentak pada tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan.

c. Target dan realisasi anggaran belanja daerah

Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebesar Rp.975.570.870.535,71 atau terealisasi 94,25%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1	BELANJA OPERASI	879.766.609.146,11	841.137.364.606,71	95,61
2.1.1	Belanja Pegawai	353.329.342.992,00	346.522.094.817,00	98,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.244.364.145,11	429.540.637.872,71	93,13
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	46.498.000.409,00	46.424.274.932,00	99,84
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	99,76
2.2	BELANJA MODAL	143.404.431.418,89	132.322.030.494,00	92,27
2.2.1	Belanja Tanah	6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	43,85
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	91,54
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.865.301.373,71	55.789.927.363,00	94,78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.978.167.378,54	51.349.969.945,00	95,13
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	99,50
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	200.429.440,00	199.622.250,00	99,60
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.035.078.484.265,00	975.570.870.535,71	94,25

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.879.766.609.146,11 dan terealisasi sebesar Rp.841.137.364.606,71 atau 95,61%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.13

**Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1.1	Belanja Pegawai	353.329.342.992,00	346.522.094.817,00	98,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.244.364.145,11	429.540.637.872,71	93,13
2.1.5	Belanja Hibah	46.498.000.409,00	46.424.274.932,00	99,84
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.694.901.600,00	18.650.356.985,00	99,76
JUMLAH BELANJA OPERASI		879.766.609.146,11	841.137.364.606,71	95,61

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi dan belanja aset tetap lainnya. Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.143.404.431.418,89 dan terealisasi sebesar Rp.132.322.030.494,00 atau 92,27%. Adapun rincian Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14

**Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.2.1	Belanja Tanah	6.150.000.000,00	2.696.905.689,00	43,85
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.661.241.936,64	20.744.067.013,00	91,54
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.865.301.373,71	55.789.927.363,00	94,78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.978.167.378,54	51.349.969.945,00	95,13
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.549.291.290,00	1.541.538.234,00	99,50
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	200.429.440,00	199.622.250,00	99,60
JUMLAH BELANJA MODAL		143.404.431.418,89	132.322.030.494,00	92,27

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.11.907.443.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.111.475.435,00 atau 17,73%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.907.443.700,00	2.111.475.435,00	17,73

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga penyerapan anggaran masih rendah antara lain :

a) Dokumen perencanaan belum tersedia/tidak lengkap

Proses penyusunan dokumen perencanaan yang kurang matang (tidak lengkap dan/atau belum tersedia), baik dokumen perencanaan teknis konstruksi ataupun dokumen pendukung lainnya yang belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.

b) Belum taat/tertib schedule/jadwal pencairan anggaran

Masih terjadi penumpukkan pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan di triwulan ke-3 dan ke-4, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun anggaran tidak berjalan lancar sehingga mengganggu kinerja penyerapan anggaran.

d. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD Tahun Anggaran 2024, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi di Tahun Anggaran 2023. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SILPA 100,00% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.16

**Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.042.923.147,86	89.101.667.564,44	100,07
6.1.1	Penggunaan SILPA	73.994.318.147,86	73.994.318.147,86	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.1.10	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	48.605.000,00	107.349.416,58	220,86

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

e. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.17

**Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

**8. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan
Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

Tabel 1.18

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	570.882.703.690,00	541.466.257.110,71
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	211.618.449.139,00	205.959.015.515,00
1 01 1 01 01 00	Dinas Pendidikan	201.447.468.720,00	196.644.344.754,00
1 01 1 01 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.766.050.810,00	126.956.581.878,00
1 01 1 01 01 00 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.929.835.520,00	62.316.928.226,00
1 01 1 01 01 00 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	636.251.990,00	616.404.100,00
1 01 1 01 01 00 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.095.169.500,00	6.735.323.300,00
1 01 1 01 01 00 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	20.160.900,00	19.107.250,00
1 01 1 01 01 01	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1.116.448.800,00	973.064.512,00
1 01 1 01 01 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	506.824.800,00	443.310.742,00
1 01 1 01 01 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	609.624.000,00	529.753.770,00
1 01 1 01 01 02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.248.811.460,00	1.126.392.697,00
1 01 1 01 01 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	558.929.460,00	517.563.298,00
1 01 1 01 01 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	689.882.000,00	608.829.399,00
1 01 1 01 01 03	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	920.352.145,00	861.922.686,00
1 01 1 01 01 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.537.430,00	201.926.969,00
1 01 1 01 01 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	695.814.715,00	659.995.717,00
1 01 1 01 01 04	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.147.205.380,00	952.968.984,00
1 01 1 01 01 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	452.702.872,00	344.389.921,00
1 01 1 01 01 04 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	694.502.508,00	608.579.063,00
1 01 1 01 01 05	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.435.279.583,00	1.364.597.584,00
1 01 1 01 01 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.017.707.883,00	971.087.934,00
1 01 1 01 01 05 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	417.571.700,00	393.509.650,00
1 01 1 01 01 06	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.055.682.725,00	989.669.901,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1 01 1 01 01 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	402.469.125,00	376.550.401,00
1 01 1 01 01 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	653.213.600,00	613.119.500,00
1 01 1 01 01 07	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.020.508.300,00	958.091.329,00
1 01 1 01 01 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	366.239.600,00	332.011.079,00
1 01 1 01 01 07 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	654.268.700,00	626.080.250,00
1 01 1 01 01 08	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.097.089.300,00	1.019.197.223,00
1 01 1 01 01 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	468.346.000,00	443.345.223,00
1 01 1 01 01 08 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	628.743.300,00	575.852.000,00
1 01 1 01 01 09	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.129.602.726,00	1.068.765.845,00
1 01 1 01 01 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.754.860,00	233.774.168,00
1 01 1 01 01 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	876.847.866,00	834.991.677,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	246.806.465.289,00	228.087.821.151,71
1 02 1 02 01 00	Dinas Kesehatan	86.247.427.226,00	83.596.596.302,00
1 02 1 02 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.492.277.533,00	30.937.612.888,00
1 02 1 02 01 00 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.130.186.777,00	49.100.778.272,00
1 02 1 02 01 00 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	698.275.900,00	671.706.400,00
1 02 1 02 01 00 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	400.567.045,00	399.725.910,00
1 02 1 02 01 00 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.526.119.971,00	2.486.772.832,00
1 02 1 02 01 01	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.369.810.369,00	1.279.648.420,00
1 02 1 02 01 01 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.319.488.269,00	1.230.670.320,00
1 02 1 02 01 01 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.322.100,00	48.978.100,00
1 02 1 02 01 02	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1.528.181.182,00	1.477.561.828,00
1 02 1 02 01 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.474.685.782,00	1.425.866.428,00
1 02 1 02 01 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.495.400,00	51.695.400,00
1 02 1 02 01 03	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1.572.095.549,00	1.501.364.736,00
1 02 1 02 01 03 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.535.721.749,00	1.465.483.936,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1 02 1 02 01 03 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.373.800,00	35.880.800,00
1 02 1 02 01 04	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	156.088.950.963,00	140.232.649.865,71
1 02 1 02 01 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.088.950.963,00	139.279.649.865,71
1 02 1 02 01 04 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.000.000.000,00	953.000.000,00
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57.345.084.314,00	53.590.925.423,00
1 03 1 03 01 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.345.084.314,00	53.590.925.423,00
1 03 1 03 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.585.495.464,82	6.345.237.531,00
1 03 1 03 01 00 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.999.063.457,00	10.993.006.398,00
1 03 1 03 01 00 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	152.400.000,00	121.382.000,00
1 03 1 03 01 00 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.650.218.800,00	3.376.097.860,00
1 03 1 03 01 00 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.961.759.000,00	4.629.432.000,00
1 03 1 03 01 00 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.748.964.300,00	9.534.982.900,00
1 03 1 03 01 00 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.967.190.692,18	16.730.810.876,00
1 03 1 03 01 00 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	807.224.600,00	699.882.540,00
1 03 1 03 01 00 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.472.768.000,00	1.160.093.318,00
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.378.875.631,00	12.036.829.598,00
1 04 1 04 01 00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.378.875.631,00	12.036.829.598,00
1 04 1 04 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.905.388.371,00	4.675.910.111,00
1 04 1 04 01 00 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	991.895.479,00	930.165.943,00
1 04 1 04 01 00 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.009.760.179,00	1.977.179.023,00
1 04 1 04 01 00 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.064.942.000,00	3.048.376.885,00
1 04 1 04 01 00 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.406.889.602,00	1.405.197.636,00
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.175.289.597,00	17.489.568.276,00
1 05 1 05 01 00	Satuan Polisi Pamong Praja	13.593.261.291,00	13.280.984.996,00
1 05 1 05 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.941.731.645,00	6.861.867.883,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
1 05 1 05 01 00 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.055.438.186,00	5.854.300.168,00
1 05 1 05 01 00 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	596.091.460,00	564.816.945,00
1 05 1 05 02 00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.582.028.306,00	4.208.583.280,00
1 05 1 05 02 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.601.266.482,00	3.347.783.721,00
1 05 1 05 02 00 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	980.761.824,00	860.799.559,00
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.558.539.720,00	24.302.097.147,00
1 06 1 06 01 00	Dinas Sosial	24.558.539.720,00	24.302.097.147,00
1 06 1 06 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.556.869.498,00	4.467.138.878,00
1 06 1 06 01 00 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	816.454.323,00	811.330.900,00
1 06 1 06 01 00 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	996.128.850,00	965.543.000,00
1 06 1 06 01 00 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.920.163.949,00	17.821.446.515,00
1 06 1 06 01 00 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	216.343.400,00	185.472.275,00
1 06 1 06 01 00 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52.579.700,00	51.165.579,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	166.631.754.113,00	156.702.905.785,00
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.690.432.750,00	2.604.814.842,00
2 07 2 17 01 00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	2.690.432.750,00	2.604.814.842,00
2 07 2 17 01 00 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.281.661.150,00	2.256.067.392,00
2 07 2 17 01 00 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	232.772.300,00	210.305.200,00
2 07 2 17 01 00 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	175.999.300,00	138.442.250,00
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.523.933.044,00	6.101.947.952,00
2 08 2 08 01 00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.523.933.044,00	6.101.947.952,00
2 08 2 08 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.505.746.980,00	4.358.001.788,00
2 08 2 08 01 00 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.120.024.994,00	1.080.467.802,00
2 08 2 08 01 00 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.317.420,00	209.785.892,00
2 08 2 08 01 00 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160.231.200,00	156.105.380,00
2 08 2 08 01 00 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	404.612.450,00	297.587.090,00
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.377.327.106,00	9.283.713.009,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
2 09 2 09 01 00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.377.327.106,00	9.283.713.009,00
2 09 2 09 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.199.095.706,00	9.108.254.559,00
2 09 2 09 01 00 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	114.775.500,00	113.480.550,00
2 09 2 09 01 00 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53.205.700,00	51.727.700,00
2 09 2 09 01 00 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.250.200,00	10.250.200,00
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.262.673.000,00	3.093.066.153,00
2 10 1 03 01 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.262.673.000,00	3.093.066.153,00
2 10 1 03 01 00 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	23.850.000,00	8.320.000,00
2 10 1 03 01 00 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	4.238.823.000,00	3.084.746.153,00
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.950.533.170,00	25.196.902.307,00
2 11 2 11 01 00	Dinas Lingkungan Hidup	25.950.533.170,00	25.196.902.307,00
2 11 2 11 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.494.345.016,00	6.453.009.701,00
2 11 2 11 01 00 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	273.880.790,00	240.060.228,00
2 11 2 11 01 00 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	477.668.350,00	475.343.299,00
2 11 2 11 01 00 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.699.443.619,00	6.082.037.357,00
2 11 2 11 01 00 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.444.800,00	13.208.000,00
2 11 2 11 01 00 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.724.800,00	64.087.500,00
2 11 2 11 01 00 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	453.595.900,00	444.009.500,00
2 11 2 11 01 00 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	416.009.800,00	413.315.050,00
2 11 2 11 01 00 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4.240.000,00	4.180.000,00
2 11 2 11 01 00 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.052.180.095,00	11.007.651.672,00
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.305.495.104,00	7.115.183.420,00
2 12 2 12 01 00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.305.495.104,00	7.115.183.420,00
2 12 2 12 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.538.240.351,00	5.427.673.951,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
2 12 2 12 01 00 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	465.014.444,00	460.692.969,00
2 12 2 12 01 00 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.231.500,00	269.171.700,00
2 12 2 12 01 00 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	943.753.609,00	908.449.600,00
2 12 2 12 01 00 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.255.200,00	49.195.200,00
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.302.000,00	21.197.500,00
2 13 4 01 01 01	Bagian Pemerintahan	21.302.000,00	21.197.500,00
2 13 4 01 01 01 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	21.302.000,00	21.197.500,00
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.258.995.389,00	2.934.617.394,00
2 14 2 08 01 00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.258.995.389,00	2.934.617.394,00
2 14 2 08 01 00 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	197.600.000,00	162.931.175,00
2 14 2 08 01 00 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.054.957.978,00	1.788.148.019,00
2 14 2 08 01 00 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.437.411,00	983.538.200,00
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.989.040.830,00	23.481.825.697,00
2 15 2 15 01 00	Dinas Perhubungan	26.989.040.830,00	23.481.825.697,00
2 15 2 15 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.341.540.550,64	6.909.534.017,00
2 15 2 15 01 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.647.500.279,36	16.572.291.680,00
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.522.216.846,00	14.278.644.570,00
2 16 2 16 01 00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14.522.216.846,00	14.278.644.570,00
2 16 2 16 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.488.349.036,00	5.351.241.123,00
2 16 2 16 01 00 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.847.801.500,00	2.783.031.827,00
2 16 2 16 01 00 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.186.066.310,00	6.144.371.620,00
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.331.670.546,00	7.092.377.891,00
2 17 2 17 01 00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	7.331.670.546,00	7.092.377.891,00
2 17 2 17 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.001.789.177,00	4.893.684.668,00
2 17 2 17 01 00 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	293.945.300,00	277.611.200,00
2 17 2 17 01 00 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	18.685.000,00	18.632.800,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
2 17 2 17 01 00 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	65.705.300,00	64.499.900,00
2 17 2 17 01 00 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	239.800.000,00	237.890.700,00
2 17 2 17 01 00 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	391.784.311,00	391.216.000,00
2 17 2 17 01 00 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	887.776.458,00	801.234.119,00
2 17 2 17 01 00 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	432.185.000,00	407.608.504,00
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.782.942.491,00	9.491.673.117,00
2 18 2 18 01 00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.782.942.491,00	9.491.673.117,00
2 18 2 18 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.280.195.391,00	8.107.914.069,00
2 18 2 18 01 00 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	163.831.000,00	159.353.500,00
2 18 2 18 01 00 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	376.624.400,00	375.138.816,00
2 18 2 18 01 00 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	555.473.700,00	528.831.328,00
2 18 2 18 01 00 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	406.818.000,00	320.435.404,00
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.536.537.950,00	18.261.948.806,00
2 19 2 19 01 00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.536.537.950,00	18.261.948.806,00
2 19 2 19 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.908.000.164,00	4.784.631.177,00
2 19 2 19 01 00 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.990.664.757,00	1.959.400.088,00
2 19 2 19 01 00 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.209.195.829,00	11.090.293.076,00
2 19 2 19 01 00 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	428.677.200,00	427.624.465,00
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	340.838.700,00	335.834.550,00
2 20 2 16 01 00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	340.838.700,00	335.834.550,00
2 20 2 16 01 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	340.838.700,00	335.834.550,00
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	256.147.000,00	247.746.950,00
2 21 2 16 01 00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	256.147.000,00	247.746.950,00
2 21 2 16 01 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	256.147.000,00	247.746.950,00
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.619.934.661,00	11.380.995.567,00
2 22 2 22 01 00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.619.934.661,00	11.380.995.567,00
2 22 2 22 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.785.506.879,00	8.589.441.695,00
2 22 2 22 01 00 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	854.196.582,00	847.118.900,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
2 22 2 22 01 00 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.891.906.200,00	1.856.139.972,00
2 22 2 22 01 00 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88.325.000,00	88.295.000,00
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	17.501.438.226,00	15.423.678.560,00
2 23 2 23 01 00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.501.438.226,00	15.423.678.560,00
2 23 2 23 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.974.117.552,00	4.740.862.833,00
2 23 2 23 01 00 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	12.527.320.674,00	10.682.815.727,00
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	360.295.300,00	356.737.500,00
2 24 2 23 01 00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	360.295.300,00	356.737.500,00
2 24 2 23 01 00 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	360.295.300,00	356.737.500,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.184.776.682,00	27.852.981.456,00
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.239.580.892,00	2.231.874.999,00
3 25 2 09 01 00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.239.580.892,00	2.231.874.999,00
3 25 2 09 01 00 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	307.238.378,00	301.152.900,00
3 25 2 09 01 00 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.932.342.514,00	1.930.722.099,00
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.524.860.800,00	2.455.273.057,00
3 26 2 22 01 00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.524.860.800,00	2.455.273.057,00
3 26 2 22 01 00 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.530.764.500,00	1.477.565.656,00
3 26 2 22 01 00 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	927.357.900,00	916.197.401,00
3 26 2 22 01 00 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	66.738.400,00	61.510.000,00
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.768.422.314,00	4.700.068.985,00
3 27 2 09 01 00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.768.422.314,00	4.700.068.985,00
3 27 2 09 01 00 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	718.574.000,00	706.062.000,00
3 27 2 09 01 00 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.841.987.020,00	1.800.025.370,00
3 27 2 09 01 00 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.345.244,00	223.435.750,00
3 27 2 09 01 00 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	16.041.000,00	16.041.000,00
3 27 2 09 01 00 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39.335.250,00	38.357.100,00
3 27 2 09 01 00 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.927.139.800,00	1.916.147.765,00
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.573.442.362,00	15.440.569.026,00
3 30 3 30 01 00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.573.442.362,00	15.440.569.026,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
3 30 3 30 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.706.953.382,85	7.634.251.412,00
3 30 3 30 01 00 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.410.667.479,15	7.359.476.325,00
3 30 3 30 01 00 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	294.261.100,00	288.426.889,00
3 30 3 30 01 00 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	161.560.400,00	158.414.400,00
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.078.470.314,00	3.025.195.389,00
3 31 3 30 01 00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.078.470.314,00	3.025.195.389,00
3 31 3 30 01 00 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.078.470.314,00	3.025.195.389,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	78.407.145.724,00	72.788.486.677,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	41.448.472.014,00	40.676.185.109,00
4 01 4 01 01 01	Bagian Pemerintahan	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00
4 01 4 01 01 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.125.266.458,00	2.123.882.191,00
4 01 4 01 01 02	Bagian Hukum	765.139.900,00	745.728.950,00
4 01 4 01 01 02 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	765.139.900,00	745.728.950,00
4 01 4 01 01 03	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	10.418.448.616,00	10.106.620.997,00
4 01 4 01 01 03 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.507.099.696,00	9.349.547.640,00
4 01 4 01 01 03 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	911.348.920,00	757.073.357,00
4 01 4 01 01 04	Bagian Umum	26.555.953.230,00	26.151.607.951,00
4 01 4 01 01 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.555.953.230,00	26.151.607.951,00
4 01 4 01 01 05	Bagian Organisasi	865.298.710,00	851.679.625,00
4 01 4 01 01 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	865.298.710,00	851.679.625,00
4 01 4 01 01 06	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	718.365.100,00	696.665.395,00
4 01 4 01 01 06 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	718.365.100,00	696.665.395,00
4 02	SEKRETARIAT DPRD	36.958.673.710,00	32.112.301.568,00
4 02 4 02 01 00	SEKRETARIAT DPRD	36.958.673.710,00	32.112.301.568,00
4 02 4 02 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.554.655.105,00	20.833.250.909,00
4 02 4 02 01 00 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.404.018.605,00	11.279.050.659,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	51.617.823.612,00	39.773.044.270,00
5 01	PERENCANAAN	7.689.900.304,00	7.361.655.012,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
5 01 5 01 01 00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.689.900.304,00	7.361.655.012,00
5 01 5 01 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.331.553.304,00	5.258.971.632,00
5 01 5 01 01 00 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.601.048.200,00	1.374.054.080,00
5 01 5 01 01 00 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	757.298.800,00	728.629.300,00
5 02	KEUANGAN	30.977.381.117,00	20.179.469.614,00
5 02 5 02 01 00	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	30.977.381.117,00	20.179.469.614,00
5 02 5 02 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.592.679.055,00	11.911.591.153,00
5 02 5 02 01 00 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.977.968.280,00	4.101.101.846,00
5 02 5 02 01 00 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.835.575.498,00	1.734.310.760,00
5 02 5 02 01 00 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.571.158.284,00	2.432.465.855,00
5 03	KEPEGAWAIAN	11.106.495.019,00	10.522.900.311,00
5 03 5 03 01 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.106.495.019,00	10.522.900.311,00
5 03 5 03 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.091.964.011,00	8.740.130.536,00
5 03 5 03 01 00 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.014.531.008,00	1.782.769.775,00
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.115.717.372,00	1.035.883.605,00
5 04 5 03 01 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.115.717.372,00	1.035.883.605,00
5 04 5 03 01 00 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.115.717.372,00	1.035.883.605,00
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	728.329.800,00	673.135.728,00
5 05 5 01 01 00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	728.329.800,00	673.135.728,00
5 05 5 01 01 00 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	728.329.800,00	673.135.728,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.400.348.656,00	10.168.402.316,00
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	10.400.348.656,00	10.168.402.316,00
6 01 6 01 01 00	Inspektorat	10.400.348.656,00	10.168.402.316,00
6 01 6 01 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.648.963.756,00	7.512.680.098,00
6 01 6 01 01 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.027.234.200,00	1.945.832.569,00
6 01 6 01 01 00 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	724.150.700,00	709.889.649,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	100.904.461.427,00	99.706.301.381,00
7 01	KECAMATAN	100.904.461.427,00	99.706.301.381,00
7 01 7 01 01 00	Kecamatan Kepanjenkidul	20.219.663.982,00	19.948.744.585,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
7 01 7 01 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.468.818.959,00	15.266.290.514,00
7 01 7 01 01 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.354.200,00	449.264.691,00
7 01 7 01 01 00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.706.171.123,00	3.648.984.480,00
7 01 7 01 01 00 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	589.319.700,00	584.204.900,00
7 01 7 01 01 01	Kelurahan Kepanjenkidul	3.131.399.966,00	3.123.336.678,00
7 01 7 01 01 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.223.416,00	154.750.178,00
7 01 7 01 01 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.975.000,00	30.539.000,00
7 01 7 01 01 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.839.764.050,00	2.839.645.000,00
7 01 7 01 01 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98.437.500,00	98.402.500,00
7 01 7 01 01 02	Kelurahan Ngadirejo	1.382.499.996,00	1.374.310.912,00
7 01 7 01 01 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.527.596,00	94.909.912,00
7 01 7 01 01 02 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.072.000,00	14.070.000,00
7 01 7 01 01 02 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.202.750.400,00	1.199.971.000,00
7 01 7 01 01 02 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.150.000,00	65.360.000,00
7 01 7 01 01 03	Kelurahan Sentul	2.240.409.118,00	2.226.153.155,00
7 01 7 01 01 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.787.312,00	112.544.055,00
7 01 7 01 01 03 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.401.700,00	26.601.700,00
7 01 7 01 01 03 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.011.964.106,00	2.011.753.400,00
7 01 7 01 01 03 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.256.000,00	75.254.000,00
7 01 7 01 01 04	Kelurahan Kauman	2.152.900.000,00	2.146.153.224,00
7 01 7 01 01 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.376.642,00	94.422.424,00
7 01 7 01 01 04 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.697.800,00	31.697.800,00
7 01 7 01 01 04 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.956.179.558,00	1.953.387.000,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
7 01 7 01 01 04 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.646.000,00	66.646.000,00
7 01 7 01 01 05	Kelurahan Tanggung	2.271.600.000,00	2.257.874.932,00
7 01 7 01 01 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.752.800,00	108.530.733,00
7 01 7 01 01 05 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.054.800,00	29.654.800,00
7 01 7 01 01 05 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.043.719.900,00	2.041.676.899,00
7 01 7 01 01 05 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.072.500,00	78.012.500,00
7 01 7 01 01 06	Kelurahan Bendo	2.045.599.200,00	2.029.241.374,00
7 01 7 01 01 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.600.800,00	142.246.274,00
7 01 7 01 01 06 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.420.700,00	29.420.700,00
7 01 7 01 01 06 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.786.492.300,00	1.786.489.100,00
7 01 7 01 01 06 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	71.085.400,00	71.085.300,00
7 01 7 01 01 07	Kelurahan Kepanjenlor	1.986.745.200,00	1.977.246.788,00
7 01 7 01 01 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.882.300,00	109.888.210,00
7 01 7 01 01 07 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.259.500,00	23.059.500,00
7 01 7 01 01 07 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.750.822.500,00	1.748.564.100,00
7 01 7 01 01 07 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	95.780.900,00	95.734.978,00
7 01 7 01 02 00	Kecamatan Sukorejo	16.971.690.864,00	16.667.156.388,00
7 01 7 01 02 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.324.218.666,00	12.103.165.833,00
7 01 7 01 02 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.640.100,00	362.974.308,00
7 01 7 01 02 00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.880.935.348,00	3.813.796.386,00
7 01 7 01 02 00 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	389.896.750,00	387.219.861,00
7 01 7 01 02 01	Kelurahan Pakunden	2.415.764.265,00	2.407.988.052,00
7 01 7 01 02 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.056.165,00	125.298.107,00
7 01 7 01 02 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	48.923.200,00	48.923.200,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
7 01 7 01 02 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.148.094.900,00	2.147.595.000,00
7 01 7 01 02 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.690.000,00	86.171.745,00
7 01 7 01 02 02	Kelurahan Blitar	1.329.936.309,00	1.321.117.294,00
7 01 7 01 02 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.254.493,00	63.967.894,00
7 01 7 01 02 02 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.899.800,00	29.899.800,00
7 01 7 01 02 02 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.176.624.316,00	1.173.107.100,00
7 01 7 01 02 02 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.157.700,00	54.142.500,00
7 01 7 01 02 03	Kelurahan Tlumpu	1.264.703.781,00	1.254.858.861,00
7 01 7 01 02 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.653.967,00	124.193.386,00
7 01 7 01 02 03 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.119.704,00	16.117.200,00
7 01 7 01 02 03 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.037.302.610,00	1.035.970.975,00
7 01 7 01 02 03 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.627.500,00	78.577.300,00
7 01 7 01 02 04	Kelurahan Turi	1.069.121.030,00	1.048.212.978,00
7 01 7 01 02 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.538.717,00	95.384.178,00
7 01 7 01 02 04 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.608.000,00	15.808.000,00
7 01 7 01 02 04 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	876.886.313,00	876.004.800,00
7 01 7 01 02 04 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.088.000,00	61.016.000,00
7 01 7 01 02 05	Kelurahan Karang Sari	1.501.049.854,00	1.479.577.104,00
7 01 7 01 02 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.510.639,00	153.009.889,00
7 01 7 01 02 05 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.000.000,00	17.000.000,00
7 01 7 01 02 05 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.261.375.315,00	1.255.926.315,00
7 01 7 01 02 05 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.163.900,00	53.640.900,00
7 01 7 01 02 06	Kelurahan Sukorejo	3.516.693.766,00	3.502.899.486,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
7 01 7 01 02 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.507.466,00	127.774.286,00
7 01 7 01 02 06 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.986.800,00	58.986.800,00
7 01 7 01 02 06 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.201.437.500,00	3.199.578.900,00
7 01 7 01 02 06 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.762.000,00	116.559.500,00
7 01 7 01 02 07	Kelurahan Tanjungsari	2.734.333.495,00	2.724.542.450,00
7 01 7 01 02 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.455.995,00	112.801.355,00
7 01 7 01 02 07 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.520.800,00	40.520.800,00
7 01 7 01 02 07 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.476.356.700,00	2.473.685.495,00
7 01 7 01 02 07 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98.000.000,00	97.534.800,00
7 01 7 01 03 00	Kecamatan Sananwetan	17.170.913.410,00	16.814.186.356,00
7 01 7 01 03 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.020.263.781,00	12.751.225.755,00
7 01 7 01 03 00 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	318.447.500,00	318.088.416,00
7 01 7 01 03 00 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.335.466.229,00	3.256.794.535,00
7 01 7 01 03 00 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	496.735.900,00	488.077.650,00
7 01 7 01 03 01	Kelurahan Gedog	3.350.480.200,00	3.326.412.125,00
7 01 7 01 03 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.700.473,00	108.308.425,00
7 01 7 01 03 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.884.000,00	36.054.800,00
7 01 7 01 03 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.079.020.927,00	3.078.225.900,00
7 01 7 01 03 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.874.800,00	103.823.000,00
7 01 7 01 03 02	Kelurahan Plosokerep	1.712.184.400,00	1.705.812.130,00
7 01 7 01 03 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.299.800,00	122.640.330,00
7 01 7 01 03 02 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.985.900,00	33.385.900,00
7 01 7 01 03 02 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.475.139.400,00	1.475.026.600,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
7 01 7 01 03 02 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.759.300,00	74.759.300,00
7 01 7 01 03 03	Kelurahan Klampok	1.808.188.600,00	1.796.525.485,00
7 01 7 01 03 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.956.000,00	132.036.160,00
7 01 7 01 03 03 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.670.200,00	20.070.200,00
7 01 7 01 03 03 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.577.722.600,00	1.577.589.625,00
7 01 7 01 03 03 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.839.800,00	66.829.500,00
7 01 7 01 03 04	Kelurahan Sananwetan	3.973.600.700,00	3.950.894.392,00
7 01 7 01 03 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	124.870.000,00	118.481.752,00
7 01 7 01 03 04 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.648.988,00	80.606.040,00
7 01 7 01 03 04 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.638.493.712,00	3.637.922.500,00
7 01 7 01 03 04 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	121.588.000,00	113.884.100,00
7 01 7 01 03 05	Kelurahan Rembang	1.151.124.600,00	1.137.763.682,00
7 01 7 01 03 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.225.700,00	109.183.582,00
7 01 7 01 03 05 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.847.700,00	20.247.700,00
7 01 7 01 03 05 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	945.763.800,00	945.695.000,00
7 01 7 01 03 05 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.287.400,00	62.637.400,00
7 01 7 01 03 06	Kelurahan Karangtengah	2.412.818.900,00	2.409.417.046,00
7 01 7 01 03 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.538.500,00	128.007.346,00
7 01 7 01 03 06 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.730.700,00	34.330.300,00
7 01 7 01 03 06 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.168.161.700,00	2.167.691.400,00
7 01 7 01 03 06 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.388.000,00	79.388.000,00
7 01 7 01 03 07	Kelurahan Bendogerit	3.091.039.791,00	3.075.875.904,00
7 01 7 01 03 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.887.000,00	102.481.792,00
7 01 7 01 03 07 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	42.721.800,00	35.521.800,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	2	3	4
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
7 01 7 01 03 07 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.852.340.591,00	2.852.258.912,00
7 01 7 01 03 07 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87.090.400,00	85.613.400,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	28.049.470.361,00	27.077.482.777,00
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.049.470.361,00	27.077.482.777,00
8 01 8 01 01 00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.049.470.361,00	27.077.482.777,00
8 01 8 01 01 00 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.092.141.185,00	4.749.428.476,00
8 01 8 01 01 00 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.597.157.800,00	2.389.609.324,00
8 01 8 01 01 00 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.738.497.709,00	16.450.099.259,00
8 01 8 01 01 00 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	81.175.500,00	59.821.500,00
8 01 8 01 01 00 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	287.958.000,00	268.177.900,00
8 01 8 01 01 00 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.252.540.167,00	3.160.346.318,00
Total		1.035.078.484.265,00	975.535.861.772,71

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2025 (data unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah **“Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**. Penentuan prioritas pembangunan di dasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan

perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang yang berkelanjutan
- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Peningkatan Kelayakhunian
- d. Zero kemiskinan ekstrim
- e. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
- f. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan investasi
- g. Peningkatan Kualitas kesehatan dan SDM Berdaya Saing
- h. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital
- i. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai suatu kondisi yang akan dituju atau diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu nilai-nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Kota Blitar adalah kota bersejarah yang terletak di bagian Selatan Jawa Timur, dengan gaung dan nama besar Kota Blitar terus tercatat dalam catatan emas perjuangan bangsa. Sejak Aryo Blitar mengusir tentara Tar tar kembali ke negaranya pada abad 13 M, masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi sejarah patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian sebagai pemantik perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai Kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Karno yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di Kota Blitar inilah Bung

Karno tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir Putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia Presiden Pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai “Bumi Bung Karno” dan “Kota Proklamator”. Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik di bidang pariwisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan ringan, industri kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya. Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang sejahtera di Jawa Timur.

Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong dan Kerukunan tetap diutamakan. Potensi - potensi tersebut yang menjadi modal besar dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai – nilai religius memperkuat Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam keberagaman. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 adalah Terwujudnya “KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

- **KOTA BLITAR KEREN:** Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas KEberagaman tetap dalam kondisi RELigius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.
- **UNGGUL :** Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai– nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- **MAKMUR :** Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota

yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

- **BERMARTABAT** : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

1) Misi

Berdasarkan visi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”, terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

Misi Pertama :

Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi pertama ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Blitar religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai– nilai kearifan lokal.

Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi ini juga memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Misi Kedua :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi kedua ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis.

Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

Misi Ketiga :

Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

Misi ketiga ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan

sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain.

Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi Keempat :

Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi keempat ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi ke-4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Misi Kelima :

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi kelima ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

3. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembauran dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan
- c. Program Pendidikan Non Formal dan PAUD
- d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- i. Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
- j. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- l. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
- m. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
- n. Program Pengembangan Pasar Tradisional
- o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan)
- p. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
- q. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
- r. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- s. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian)

- t. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
- u. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- v. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian
- w. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
- x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
- y. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- z. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Peternakan)
- aa. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
- bb. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)
- cc. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- dd. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ee. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- ff. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- gg. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- hh. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- ii. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- jj. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
- kk. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
- ll. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
- mm. Program Pemberdayaan Perempuan
- nn. Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
- oo. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- pp. Program Penataan Ruang
- qq. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- rr. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ss. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
- tt. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

- uu. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan
- vv. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- ww. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- xx. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- yy. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- zz. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
- aaa. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
- bbb. Program Pengendalian Penyakit
- ccc. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
- ddd. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyehatan Lingkungan
- eee. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
- fff. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan)
- ggg. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- hhh. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- iii. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- jjj. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
- kkk. Program Pengelolaan Persampahan
- lll. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- mmm. Program Pengembangan Perumahan
- nnn. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundang Daerah
- ooo. Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
- ppp. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- qqq. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- rrr. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- sss. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi

- ttt. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- uuu. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- vvv. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- www. Program Dukungan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- xxx. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- yyy. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
- zzz. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- bbbb. Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- cccc. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
- dddd. Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- eeee. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
- ffff. Program Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
- gggg. Program Penelitian dan Pengembangan
- hhhh. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- iiii. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- jjjj. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
- kkkk. Program Penyelenggaraan e-Governance
- llll. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- mmmm. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- nnnn. Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara
- oooo. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- pppp. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qqqq. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

- rrrr. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah
- ssss. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- tttt. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
- uuuu. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
- vvvv. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD
- www. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
- xxxx. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- yyyy. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- zzzz. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- aaaaa. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- bbbbb. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
- ccccc. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan
- ddddd. Program Pelayanan Perkantoran
- eeee. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
- ffff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Tahun 2024 **Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar** adalah sebagai berikut :

No	Nama Program
1	2
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Nama Program
1	2
3.	Program Pengembangan Kurikulum
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
14.	Program Penataan Bangunan Gedung
15.	Program Penyelenggaraan Jalan
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
18.	Program Pengembangan Perumahan
19.	Program Kawasan Permukiman
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
22.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
24.	Program Penanggulangan Bencana
25.	Program Pemberdayaan Sosial
26.	Program Rehabilitasi Sosial
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
28.	Program Penanganan Bencana
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja

No	Nama Program
1	2
32.	Program Hubungan Industrial
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
34.	Program Perlindungan Perempuan
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
36.	Program Perlindungan Khusus Anak
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
41.	Program Penatagunaan Tanah
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50.	Program Pengelolaan Persampahan
51.	Program Pendaftaran Penduduk
52.	Program Pencatatan Sipil
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
56.	Program Pengendalian Penduduk
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Nama Program
1	2
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
60.	Program Informasi dan Komunikasi Publik
61.	Program Aplikasi Informatika
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
68.	Program Pengembangan UMKM
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
70.	Program Promosi Penanaman Modal
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
78.	Program Pengembangan Kebudayaan
79.	Program Pembinaan Sejarah
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
81.	Program Pembinaan Perpustakaan
82.	Program Pengelolaan Arsip
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
86.	Program Pemasaran Pariwisata
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No	Nama Program
1	2
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian
93.	Program Penyuluhan Pertanian
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
106.	Program Kepegawaian Daerah
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Nama Program
1	2
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar belakang

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga

Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar bertujuan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2021-2026. Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran program prioritas Kota Blitar. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang terpadu di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas pada

setiap strategi merupakan program pembangunan daerah terpilih untuk dapat mencapai secara langsung sasaran pembangunan daerah, adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar sebagai berikut :

a. Pendidikan

SPM urusan Pendidikan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan anak usia dini
- 2) Pendidikan dasar
- 3) Pendidikan kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Target 2024
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	100%
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,80%
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

b. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diatur jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan Balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar.	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2024
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi.	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	100%
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%

c. Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diatur secara teknis Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	100%

d. Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	100%

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target 2024
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

f. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, diatur secara rinci jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran pelaksanaan pemerintah daerah dan capaian kinerja sebagaimana termuat pada pasal 2 (dua), LPPD disebutkan memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan sebagaimana sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 di bawah ini.

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro Kota Blitar meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2023 - 2024 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2023 - 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,78	81,44	0,8170 %
2.	Angka Kemiskinan	7,30%	6,75%	-0,75342 %

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian kinerja (%)
3.	Angka Pengangguran	5.24%	5.11%	-2,4809 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,29%	5,33%	0,756%
5.	Pendapatan per Kapita ADHB	55,52	59,33	6,86%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.397	0.353	-11,136%

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2025

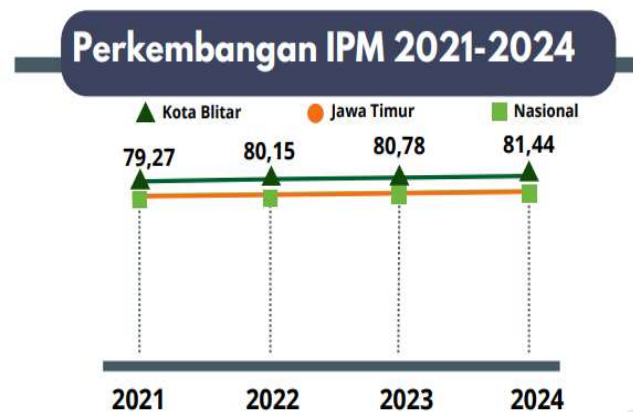
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM dibentuk oleh beberapa dimensi, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur setelah Kota Mojokerto sebesar 81,76 dan termasuk status “sangat tinggi” dengan range nilai >80.

IPM Kota Blitar dari tahun 2024 mencapai 81.44 meningkat 0,66 poin (0,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (80,78). Selama 2022-2024, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 1,61 persen pertahun. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan terutama standar hidup layak. Pada dimensi umur Panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 75,20 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 14,57 menjadi 14,81 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,04 tahun dari 10,78 tahun menjadi 10,82 tahun pada tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 385 ribu rupiah (2,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya

bersumber dari data Susenas Maret. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut.

Tabel 2.1.2
IPM Kota Blitar Tahun 2021 s.d 2024



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.1
IPM Kota Blitar Kota Blitar
Tahun 2021 s.d 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024

Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,46	74,71	74,97	75,2
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,33	14,56	14,57	14,81
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,35	10,65	10,78	10,82
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	13.816	14.058	14.548	14.933
IPM		79,27	80,15	80,78	81,44

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

2. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada Maret 2024 sebesar 6,75 persen, turun 0,55 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Blitar pada bulan Maret 2024

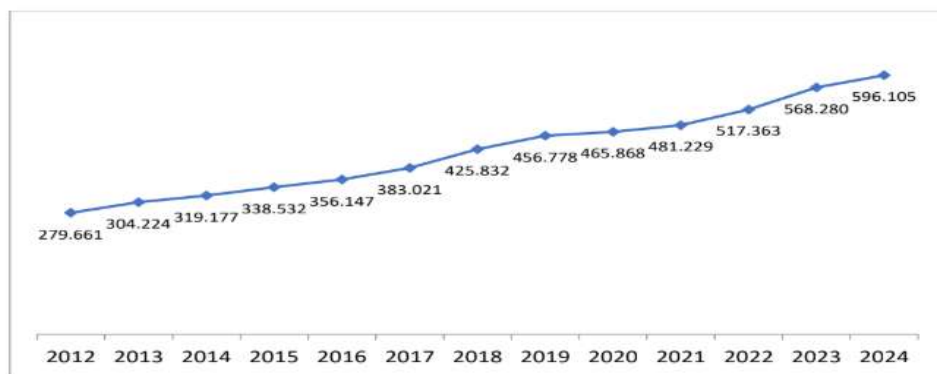
mencapai 9,86 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,75 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 10,61 ribu jiwa. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan penurunan kemiskinan di Kota Blitar selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain adalah: Ekonomi Kota Blitar tumbuh positif sebesar 5,29 % pada tahun 2023, berbagai program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kota Blitar diantaranya pengendalian harga kebutuhan pokok, program pengurangan beban pengeluaran dan program peningkatan pendapatan

Tabel. 2.1.3
**Angka Kemiskinan
Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka kemiskinan	7,78	7,89	7,37	7,30	6,75
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11.100	11.330	10.650	10.610	9.860
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	465.868	481.229	517.363	568.280	596.105

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.2
**Angka Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2012 s.d 2024**



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Garis Kemiskinan Kota Blitar pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 596.105,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 27.825,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,90 persen. Bahkan jika diamati dalam satu decade terakhir, GK Kota Blitar tercatat

sudah meningkat hampir dua kali lipat sejak GK pada Tahun 2012 yang berada pada posisi Rp 279.661,- per kapita per bulan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 5,11 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang pengangguran. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan dan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

TPT merupakan bagian dari TPAK. TPT mencerminkan dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sedangkan TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas

Tabel 2.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPT	4,54	6,68	6,61	5,39	5,24	5.11
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,15	69,53	69,96	67,78	72,26	70,44
3.	Penduduk yang Bekerja (orang)	77.018	73.201	74.339	73.616	82.605	81.652
4.	Pengangguran (orang)	3.659	5.244	5.264	4.192	4.571	4.394
5.	Penduduk Usia Kerja (orang)	111.819	112.822	113.786	114.797	120.644	122.158

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar tahun 2023 sebesar 72,26 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen sehingga menjadi 70,44 persen, sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar tahun 2024 sebesar 5,11 persen atau turun 0,13 persen dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 5,24 persen. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 81.652 orang, berkurang sekitar 953 orang dari tahun 2023.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS Kota Blitar terkait Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar menurut Lapangan Usaha 2019-2024, ekonomi Kota Blitar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,33 % lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,29 %.

Dari sisi produksi, kategori lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,84 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,44 persen.

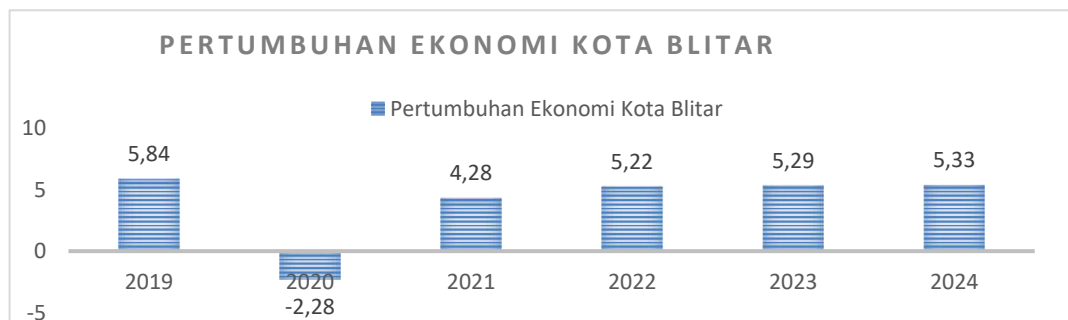
Struktur perekonomian dari sisi pengeluaran pada tahun 2024 didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 66,92 persen dan terbesar kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 19,24 persen.

Tabel 2.1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pertumbuhan Ekonomi	5,84	-2,28	4,28	5,22	5,29	5,33

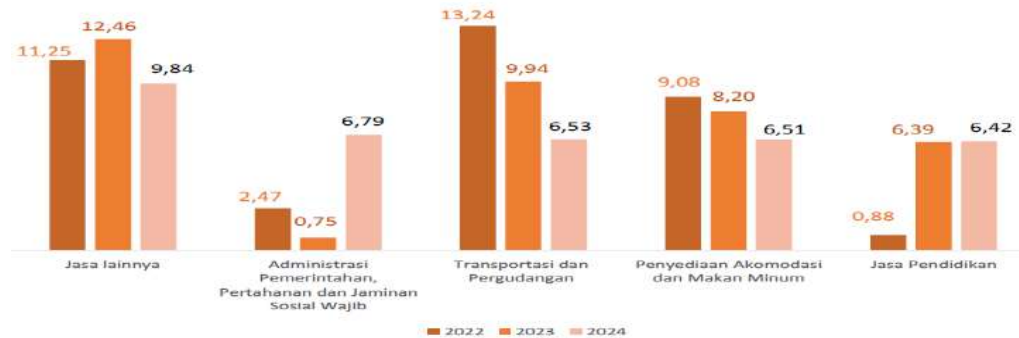
Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 - 2024



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022-2024



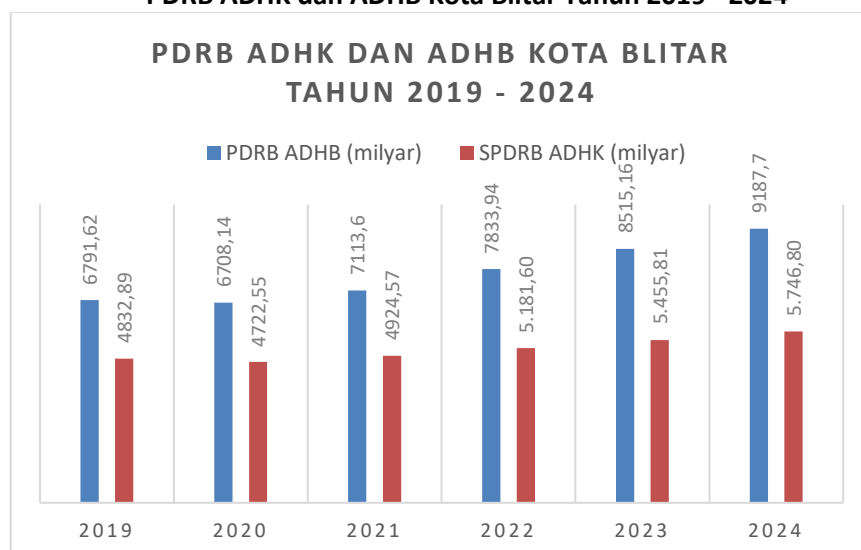
Sumber : BPS Kota Blitar 2025

Tabel 2.1.6
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB ADHB (milyar)	6791,62	6708,14	7113,60	7833,94	8515,16	9187,70
2	PDRB ADHK (milyar)	4832,89	4722,55	4924,57	5.181,60	5.455,81	5.746,80

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.5
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 - 2024



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Tabel. 2.1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Distribusi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(6,97)	1,54	(7,19)	2,56	2,51	2,18
B. Pertambangan dan Penggalian	(9,73)	0,73	(20,40)	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	6,63	2,57	5,11	10,10	9,86	9,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,47	5,36	2,75	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,90	5,39	3,60	0,14	0,14	0,14
F. Konstruksi	7,46	6,50	5,96	7,07	7,17	7,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	4,69	5,08	25,11	25,03	24,69
H. Transportasi dan Pergudangan	13,24	9,94	6,53	4,61	5,01	5,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,08	8,20	6,51	5,48	5,71	5,89
J. Informasi dan Komunikasi	2,39	6,45	5,11	10,73	10,63	10,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,79	3,12	4,90	10,66	10,42	10,22
L. Real Estat	3,88	3,35	3,77	3,69	3,55	3,47
M,N. Jasa Perusahaan	4,68	5,97	6,18	0,72	0,72	0,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,47	0,75	6,79	5,97	5,78	6,12
P. Jasa Pendidikan	0,88	6,39	6,42	6,45	6,44	6,58
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	6,17	2,40	2,03	2,05	1,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	11,25	12,46	9,84	4,62	4,92	5,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,22	5,29	5,33	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Dilihat dari data PDRB ADHB Tahun 2024 Perekonomian Kota Blitar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9187,70 triliun dan atas dasar harga konstan 2024 mencapai Rp 5,7 triliun. Ekonomi Kota Blitar tahun 2024 tumbuh sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,29 persen.

Tabel. 2.1.8
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 Dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2022 s.d 2024**

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	200,34	213,52	200,43	114,55	116,31	107,95
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,32	0,33	0,26	0,21	0,21	0,17
C.	Industri Pengolahan	791,27	839,09	910,35	479,53	491,85	517,00
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,05	5,42	5,55	3,74	3,94	4,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,23	12,11	12,84	8,93	9,41	9,75
F.	Konstruksi	554,04	610,30	677,86	349,13	371,82	393,98
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.967,25	2.130,93	2.268,88	1.268,53	1.327,99	1.395,40
H.	Transportasi dan Pergudangan	361,05	426,83	467,06	227,68	250,32	266,66
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	429,55	486,12	540,95	266,86	288,75	307,55
J.	Informasi dan Komunikasi	840,55	905,17	964,71	720,97	767,46	806,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	835,00	887,43	939,09	502,10	517,77	543,12
L.	Real Estat	288,70	302,38	318,95	212,36	219,47	227,74
M,N.	Jasa Perusahaan	56,51	61,48	66,11	39,48	41,83	44,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,34	492,13	562,24	297,56	299,79	320,15
P.	Jasa Pendidikan	504,67	548,35	604,21	332,84	354,12	376,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,07	174,75	179,39	109,54	116,30	119,09
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	362,00	418,83	468,83	247,61	278,48	305,88
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7.833,94	8.515,16	9.187,70	5.181,61	5.455,81	5.746,40

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

5. Pendapatan PDRB Per Kapita

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tahun 2022 - 2024, pendapatan perkapita Kota Blitar terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020

PDRB perkapita ADHK Kota Blitar mengalami kontraksi sebesar 2,91% dibandingkan tahun 2019, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. PDRB Kota Blitar Tahun 2021 (ADHB) mencapai sebesar 47,31 juta dengan peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan tahun 2020. PDRB Perkapita Kota Blitar tahun 2022 mencapai 51,55 juta rupiah naik 4,24 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 47,31 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 55,52 juta atau naik sebesar 3,93 juta, pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 59,33 juta. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita Kota Blitar tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

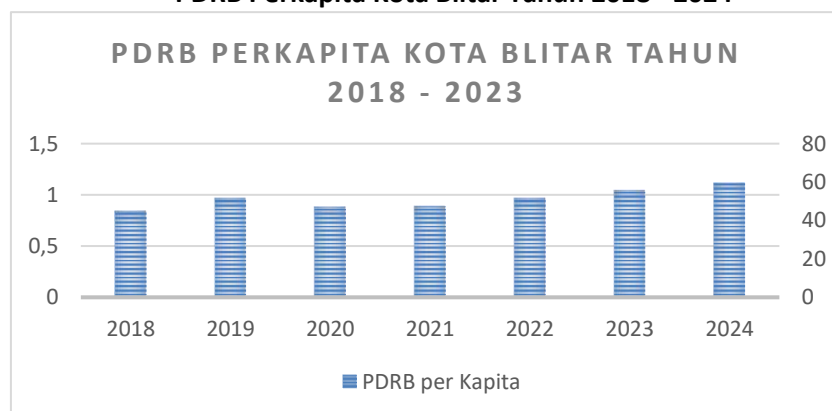
Tabel 2.1.9

PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2024

Uraian	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	44.82	51.60	46.98	47.31	51,55	55,52	59,33

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

Gambar 2.6

PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2024

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2025

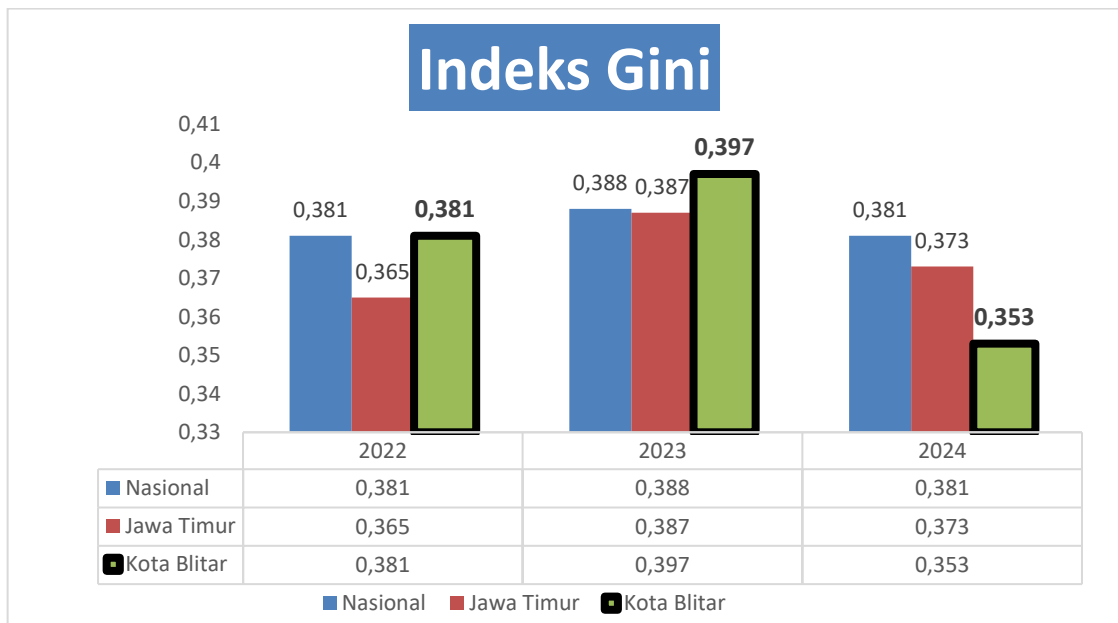
6. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,381, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,373. Indeks Gini Kota Blitar lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353 dengan tingkat capaian yaitu sebesar 106,54%. Angka ini mengalami penurunan 0,044 poin dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,397.

Gambar 2.7

Indeks Gini



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Apabila dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Madiun, indeks gini Kota Blitar lebih rendah yaitu 0,069 dari Kota Malang dan 0,082 dari Kota Madiun.

Tabel 2.3.10
Indeks Gini Kota Blitar dan sekitarnya Tahun 2022 – 2024

No	Indeks Gini	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kota Blitar	0,381	0,397	0,353
2	Kota Malang	0,421	0,413	0,422
3	Kota Madiun	0,398	0,416	0,435

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

2.2. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja sesuai dengan indikator pada masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Data dan informasi tersebut diisi dengan lengkap dan benar oleh pemerintah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

1. Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,205851	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PU PR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PU PR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	Dinas PU PR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	Dinas PU PR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,9125278	Dinas PU PR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	Dinas PU PR
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	92,47115	Dinas PU PR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	Dinas PU PR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	67,084688	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,342203	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,47	Satpol PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,7293982	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	55.063.242.621,694	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	21,4574899	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	51,4503817	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	28,0419567	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	19,7951205	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	194,7761194	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas PU PR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Dinas PU PR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas PU PR
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	Dinas PU PR
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	64,94	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98,0099265	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	31,9148936	Dinas Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perekaman KTP elektronik	99,8697809	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,5429593	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	99,590242	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	63,3333333	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Bagian Pemerintahan
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Bagian Pemerintahan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,7458444	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) .	8,1185257	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15.Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,28	Dinas Perhubungan

16.Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	97,6744186	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah da pemerintah daerah kabupaten/kota	86.2581	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,9354839	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	9,2862345	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18. Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	12,3813653	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9,2395298	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	82,3265456	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21. Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60,2396514	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22. Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23. Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	47,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	88,68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,5664243	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26. Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	97,2332016	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	471,3509755	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	40,0010527	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,887763	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,0869633	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1,4589266	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	87,8923767	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28.Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1		100	Tidak Melaksanakan

29.Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kota	0	Tidak Melaksanakan

30.Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	73,6191812	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	48,1663298	Dinas Industri dan Perdagangan

31.Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	1,0370655	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	95,3	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Industri dan Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Industri dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0	Dinas Industri dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Dinas Industri dan Perdagangan

32. Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100	Tidak Melaksanakan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	25,9884516	BPKAD
2	Rasio PAD	18,0404754	BPKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures).	79,5496008	BPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD

2. Pengadaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Layanan Pengadaan
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	80,1792536	Bagian Layanan Pengadaan
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63,0485842	Bagian Layanan Pengadaan
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	48,6876091	Bagian Layanan Pengadaan

3. Kepegawaian

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,3902439	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,8455285	BKPSDM

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37,366548	BKPSDM

4. Manajemen Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,0300	BPKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9,5310	BPKAD
3	Manajemen Aset	4	BPKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,5749776	BPKAD

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	94,9845026	BPKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BPKAD

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Adapun Visi Kota Blitar adalah: "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat" yang akan dicapai dengan Misi-Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar, Kepala Daerah berkomitmen dalam mencapai target pencapaian kinerja utama dan sasaran RPJMD melalui target tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan dukungan anggaran program dan dilaporkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar. Perjanjian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun merupakan tahapan perwujudan janji politik saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah berkampanye, yang saat telah ditetapkan janji politik ini dijadikan dokumen perencanaan jangka menengah. Untuk memonitoring pentahapan pencapaian janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, maka target tersebut diturunkan pencapaiannya setiap tahun. Hal ini dikandung maksud agar diketahui capaian tiap tahun, sehingga bila ada target yang kurang memenuhi akan segera diketahui permasalahan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai ketertinggalan tersebut, begitu pula bila ada target yang telah terpenuhi akan dilakukan evaluasi terhadap perbandingan dengan dokumen perencanaan jangka panjang.

Penjelasan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar yang menggambarkan hal dimaksud tertuang dalam informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang selengkapnya sebagai berikut:

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	86,315	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,155	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,8	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,74 – 81,38	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,765	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,795	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,670%	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	7,16 - 6,25	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
		Indeks Gini	0,3022 – 0,3777	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22 – 3,74	
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,23	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	79,260	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
11.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,270%	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
12.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6% – 6,2%	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
13.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	11,550%	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,055	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
15.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
16.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,60	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
17.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	74,795 (BB)	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3534)	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota
18.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,650	Indikator Sasaran RPJMD yang merupakan kewenangan Walikota

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Sasaran RPJMD untuk pencapaian target 2022 – 2026

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Tahun 2024
Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	557.515.538.525,31
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	70.850.303.909,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	636.251.990,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.095.169.500,00
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	20.160.900,00
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.460.082.577,00
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	698.275.900,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	400.567.045,00
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.666.311.271,00
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.999.063.457,00
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	152.400.000,00
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.650.218.800,00
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00
15.	Program Penyelenggaraan Jalan	17.967.190.692,18
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	807.224.600,00
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.472.768.000,00
18.	Program Pengembangan Perumahan	991.895.479,00
19.	Program Kawasan Permukiman	2.009.760.179,00
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.064.942.000,00
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.406.889.602,00
22.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.055.438.186,00
23.	Program Penanggulangan Bencana	980.761.824,00
24.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	596.091.460,00
25.	Program Pemberdayaan Sosial	816.454.323,00
26.	Program Rehabilitasi Sosial	996.128.850,00
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.920.163.949,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
28.	Program Penanganan Bencana	216.343.400,00
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52.579.700,00
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.281.661.150,00
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja	232.772.300,00
32.	Program Hubungan Industrial	175.999.300,00
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.120.024.994,00
34.	Program Perlindungan Perempuan	333.317.420,00
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.231.200,00
36.	Program Perlindungan Khusus Anak	404.612.450,00
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114.775.500,00
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	53.205.700,00
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.250.200,00
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.850.000,00
41.	Program Penatagunaan Tanah	4.238.823.000,00
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	273.880.790,00
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	477.668.350,00
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.699.443.619,00
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.444.800,00
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.724.800,00
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	453.595.900,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	416.009.800,00
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.240.000,00
50.	Program Pengelolaan Persampahan	11.052.180.095,00
51.	Program Pendaftaran Penduduk	465.014.444,00
52.	Program Pencatatan Sipil	309.231.500,00
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	943.753.609,00
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	49.255.200,00
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	21.302.000,00
56.	Program Pengendalian Penduduk	197.600.000,00
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.054.957.978,00
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.006.437.411,00
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.647.500.279,36
60.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.847.801.500,00
61.	Program Aplikasi Informatika	6.186.066.310,00
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	293.945.300,00
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.685.000,00
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	65.705.300,00
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	239.800.000,00
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	391.784.311,00
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	887.776.458,00
68.	Program Pengembangan UMKM	432.185.000,00
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	163.831.000,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
70.	Program Promosi Penanaman Modal	376.624.400,00
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal	555.473.700,00
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.818.000,00
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.990.664.757,00
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.209.195.829,00
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	428.677.200,00
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	340.838.700,00
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	256.147.000,00
78.	Program Pengembangan Kebudayaan	854.196.582,00
79.	Program Pembinaan Sejarah	1.891.906.200,00
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	88.325.000,00
81.	Program Pembinaan Perpustakaan	12.527.320.674,00
82.	Program Pengelolaan Arsip	360.295.300,00
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	307.238.378,00
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.932.342.514,00
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.530.764.500,00
86.	Program Pemasaran Pariwisata	927.357.900,00
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66.738.400,00
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	718.574.000,00
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.841.987.020,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.345.244,00
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.041.000,00
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian	39.335.250,00
93.	Program Penyuluhan Pertanian	1.927.139.800,00
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.410.667.479,15
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	294.261.100,00
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	161.560.400,00
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.078.470.314,00
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12.397.506.054,00
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.629.714.020,00
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.404.018.605,00
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.601.048.200,00
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	757.298.800,00
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.977.968.280,00
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.835.575.498,00
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.571.158.284,00
106.	Program Kepegawaian Daerah	2.014.531.008,00
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.115.717.372,00
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	728.329.800,00
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.027.234.200,00
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	724.150.700,00

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.929.870.892,00
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	52.428.985.898,00
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.175.697.450,00
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.597.157.800,00
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.738.497.709,00
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81.175.500,00
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	287.958.000,00
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.252.540.167,00
	Jumlah	1.035.078.484.265,00

Sumber: BPKAD Kota Blitar, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas (2.3.2) maka terdapat 118 program pendukung utama perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan total pagu Rp. 1.023.171.040.565,00 atau sebesar 98,85% dari total P-APBD Kota Blitar Tahun 2024 sebesar Rp. 1.035.078.484.265,00. Dari 118 program tersebut, terdapat 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebagian anggaran sebesar Rp. 11.907.443.700,00 yang tidak mendukung langsung pelaksanaan kinerja utama yaitu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sedangkan yang dipergunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahunan, dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah ini, yaitu program beserta anggaran yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja tahunan..

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

Tabel 2.3.3

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Realisasi s.d 2024	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	86,315	90,53*	104,88%	90,53*	84,25**	107,45%
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,155	85,49	100,39%	85,49	84,25**	101,47%
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,8	97,49*	99,68%	97,49*	98	99,48%
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,74 – 81,38	81,44	102,13%	81,44	78,62**	103,59%

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Realisasi s.d 2024	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,765	0,772	100,92%	0,772	0,74**	104,32%
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,795	75,20	100,54%	75,20	74,30**	101,21%
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,670%	0,6025%	110,07%	0,6025%	0,65%**	107,31%
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	7,16 - 6,25	6,75	105,73%	6,75	7,06	104,39%
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,23	0,24	95,65%	0,24	0,21	85,71%
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	79,26	80,80	101,94%	80,80	76,18**	106,06%
11.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,3022 – 0,3777	0,353	106,54%	0,353	0,341	96,48%
12.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22 – 3,74	4,19	119,73%	4,19	7,04**	140,48%

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Realisasi s.d 2024	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,270%	70,44%	97,47%	70,44%	72%**	97,83%
14.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6% – 6,2%	5,33%	115,87%	5,33%	5,5%**	96,91%
15.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	11,55%*	12,38%	107,19%	57,49%	133,85%***	110,7%
16.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,055	63,41	102,18%	63,41	58,67%**	108,19%
17.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20	64,94	91,21%	64,94	73,54	88,31%
18.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,60	0,47	78,33%	0,47	0,65	72,31%
19.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	74,795 (BB)	80,06 (A)	107,04%	80,06 (A)	BB (72,35)**	110,66%

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Realisasi s.d 2024	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3534)	Tinggi (3,4243)*	102,11%	Tinggi (3,4243)	Sangat Tinggi (3,3538)**	102,10%
20.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP	100,00%
21.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,650	89,23	104,18%	Sangat Baik (89,23)	Baik (85,00)**	104,98%

Sumber: Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan tahun 2024

*) data sementara

**) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024

***) kondisi akhir 2026 menyesuaikan dengan perubahan metode penghitungan dari Instansi Pembina serta capaian 2022 dimana perubahan target ini tertuang pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

C. PENGUKURAN REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam RPJMD 2021– 2026 terdapat 9 (sembilan) tujuan dan 35 (tiga puluh lima) sasaran dimana sebagian ditetapkan menjadi kinerja utama dengan perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.4

**PENGUKURAN REALISASI KINERJA UTAMA/SASARAN RPJMD TAHUN 2024
DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2022-2023**

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (IKU)	86,31* (disamakan dengan IDI Tahun 2020)	90,53	90,53* (masih menggunakan data capaian 2023)
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,88	85,15	85,49
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	97,37	97,49	97,49* (masih menggunakan

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	
					n data capaian 2023)
4.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (IKU)	80,15	80,78	81,44
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,764	0,772
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,71	74,97	75,20
7.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,617%	0,6104%	0,6025%
8.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan (IKU)	7,37%	7,30%	6,75%
9.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,12	0,24
10.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,57	79,25	80,80
11.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini (IKU)	0,381	0,397	0,353

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	
12.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)	5,49%	4,88%	4,19%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,78%	72,26%	70,44%
14.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (IKU)	5,22%	5,29%	5,33%
15.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	33,57%	11,54%	12,38%
16.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah (IKU)	61,10	61,69	63,41
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)	64,15	67,58	64,94
18.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,40	0,43	0,47
19.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP (IKU)	73,73 (BB)	74,79 (BB)	80,06 (A)
		Status EKPPD	Sedang (3,06)	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4243)*
20.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD (IKU)	WTP	WTP	WTP

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	
21.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,50)	Baik (85,60)	Sangat Baik (89,23)

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Realisasi IKU/Indikator Sasaran Kota Blitar Tahun 2022-2024

**masih menggunakan data capaian tahun sebelumnya sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang*

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama/sasaran RPJMD yang realisasi di tahun 2024 menurun di banding tahun 2023 yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), hal ini dilatarbelakangi karena:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Minimnya ketersediaan lapangan kerja dan akses kesempatan berusaha sehingga kedepan Pemerintah Kota Blitar perlu untuk merumuskan kebijakan perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan wirausaha mandiri sektor informal yang berbasis kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan swasta

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan yang berperan besar dalam mempengaruhi kualitas badan air
- Sedangkan rendahnya nilai Indeks Tutupan Lahan di tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan Indeks Kualitas Lahan dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas

Ruang Terbuka Hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan

- Selain itu belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR dan car free day tidak diselenggarakan secara rutin, kedepan akan berpengaruh pada Indeks Kualitas Udara

Untuk itu Pemerintah Kota Blitar kedepan perlu melakukan berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dilakukan demi menunjang ketercapaian nilai IKLH sesuai dengan target yang ditetapkan, diantaranya melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup melalui talkshow di media penyiaran atau media sosial
- b. Melakukan sosialisasi pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti pemasangan PJU panel surya
- c. Pengelolaan sampah dengan baik, dengan membentuk bank sampah dimasing-masing kelurahan serta kader sampah
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan limbah domestik
- e. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin
- f. Pengadaan alat uji emisi transportasi
- g. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin sesuai yang diamanatkan dalam Perwali Nomor 37 Tahun 2012
- h. Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh entitas. Jika *output* yang dihasilkan entitas lebih besar dibandingkan dengan *input* yang diterima entitas, maka entitas tersebut dikatakan efisien. Makin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin efisien suatu entitas. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Buku Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah** karya **Tri Rakhmawati** penerbit LIPI Press tahun 2017 pada halaman 13 *"Pada dasarnya, efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya masukan yang digunakan (Ramanathan 2003; Ozcan 2014). Sebuah Organisasi dikatakan efisien jika rasio keluaran dan masukan aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan standar.*

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
1.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	100,39%	97,32%	1,03	Efisien
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	99,68%	86,41%	1,15	Efisien
3.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	102,13%	94,12%	1,09	Efisien

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
4.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Angka Kemiskinan)	105,73%	96,59%	1,09	Efisien
5.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Gini)	106,54%	98,03%	1,09	Efisien
6.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat (TPT)	119,73%	96,82%	1,24	Efisien
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	115,87%	97,9%	1,18	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	102,18%	91,39%	1,12	Efisien
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	91,21%	96,02%	0,95	Tidak Efisien
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	104,58%	95,39%	1,10	Efisien
11.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100,00%	95,27%	1,05	Efisien
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	104,18%	95,36%	1,09	Efisien

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2024

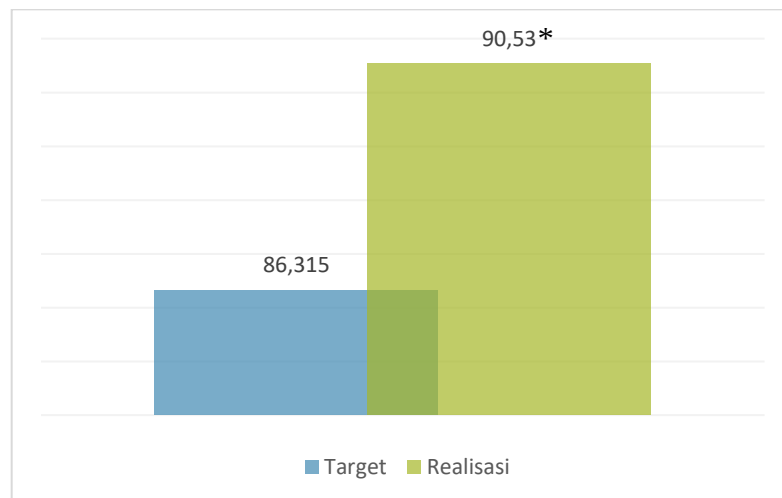
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. **Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.**

D.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA/SASARAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DISANDINGKAN DENGAN TINGKAT EFISIENSI

KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Indikator Kinerja:
Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
86,315	90,53*	104,88%	84,25**	107,45%



Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, dari target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 86,315 terealisasi 90,53* berada pada kategori "BAIK" dengan capaian kinerja 104,88%. Adapun nilai tersebut berdasarkan perhitungan skor dan indeks masing-masing indikator yaitu aspek kebebasan 96,67 (kategori tinggi), aspek kapasitas lembaga demokrasi 88,17 (kategori tinggi) dan aspek kesetaraan 87,29 (kategori tinggi). Berdasarkan

capaian tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar berhasil mengembangkan praktik demokrasi tidak hanya dalam penerapan esensi demokrasi namun juga kinerja kelembagaan yang baik dan tepat sasaran. Selain itu, realisasi tahun 2024 yang bertepatan dengan akhir masa jabatan Walikota periode 2021-2025 sudah mampu melebihi target akhir RPJMD yang ditetapkan dengan capaian sebesar 107,45%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sudah melebihi target, dan mampu mendukung pencapaian Visi ke-1 Pemerintah Kota Blitar “Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”.

Hal tersebut dapat digambarkan pada 3 aspek capaian utama dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

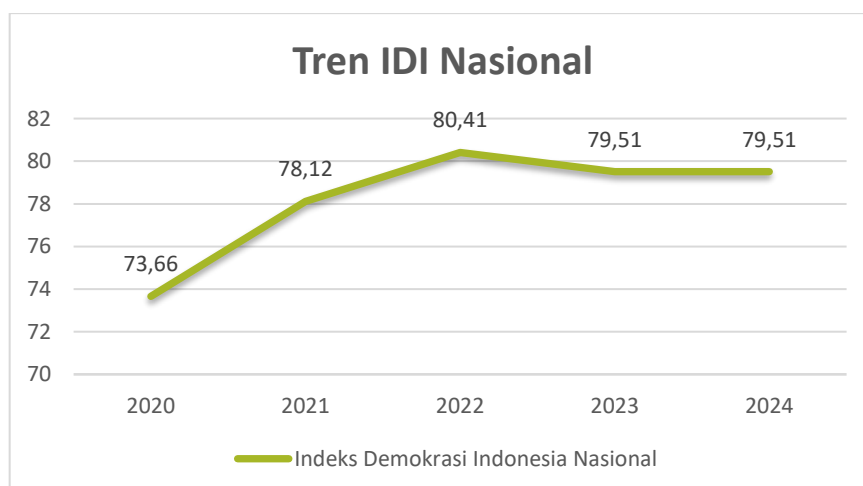
1. **Aspek Kebebasan**, menggambarkan proses sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingannya sendiri. Dimana didalamnya terdapat 7 indikator yaitu: 1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara, 2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat, 3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan, 4) terjaminnya kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, 5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat, 6) pemenuhan hak-hak pekerja dan 7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data ke tujuh indikator tersebut diperoleh Indeks Aspek Kebebasan sebesar 96,67 hal ini mengindikasikan bahwa Kota Blitar memiliki ruang demokratis yang luas dan terbuka bagi segenap masyarakat untuk turut berpartisipasi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa telah terjaminnya hak-hak warga untuk berkumpul, berpendapat, berekspresi dan menjalankan keyakinannya dengan sangat baik.
2. **Aspek Kesenjangan**, menggambarkan proses sejauh mana kelompok minoritas dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Dalam Aspek Kesenjangan terdapat 7 indikator yaitu: 1) kesetaraan gender, 2) partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi

kebijkan publik melalui Lembaga perwakilan, 3) anti monopoli sumber daya ekonomi, 4) akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, 5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, 6) akses masyarakat terhadap informasi publik dan 7) kesetaraan dalam pelayanan dasar. Dari indikator-indikator tersebut diperoleh jumlah Indeks Aspek Kesetaraan sebesar 88,17 hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan perlakuan dan kesempatan antar warga dalam Kota Blitar terwujud dengan baik. Adapun dari ke tujuh indikator tersebut dua skor terendah yaitu terdapat pada indikator anti monopoli sumber daya ekonomi dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Hal ini mengisyaratkan meskipun kesetaraan dan perlakuan sudah baik namun perlu menciptakan sumber daya ekonomi yang lebih adil dan kompetitif serta meningkatkan tersedianya informasi yang lebih transparan bagi publik.

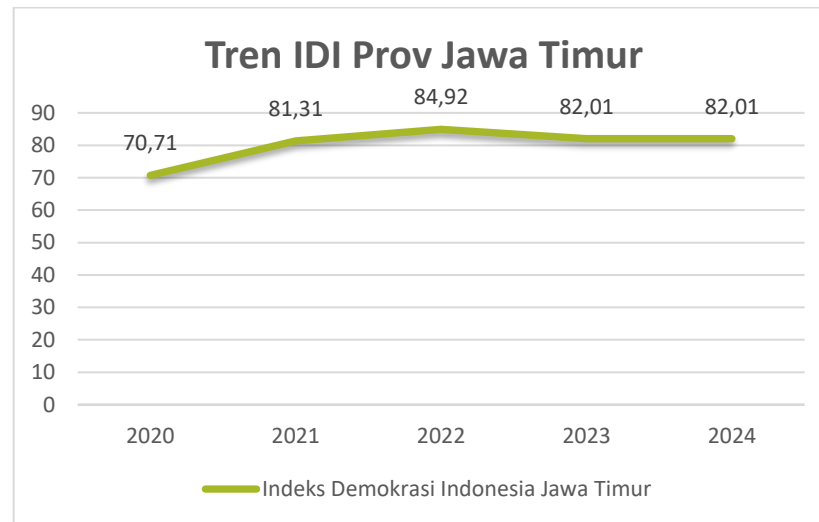
- 3. Aspek Lembaga Demokrasi** memberikan gambaran proses sejauh mana lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata Kelola politik, ekonomi, sosial. Untuk mendapatkan Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi diperlukan pembobotan pada tujuh indikator yaitu: 1) kinerja lembaga legislatif, 2) kinerja lembaga yudikatif, 3) keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, 4) jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, 5) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, 6) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan 7) pendidikan politik pada kader partai politik. Berdasarkan pembobotan indikator tersebut diperoleh jumlah Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 87,29 menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan demokratis Kota Blitar relatif solid, berfungsi dengan sangat baik dan memenuhi standar ideal. Meskipun demikian terdapat dua skor terendah yaitu pada indikator jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat serta pendidikan politik pada kader partai politik. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup, selain itu juga harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan politik.



Berdasarkan data tren Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Kota Blitar diatas dapat diketahui adanya peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah dari tahun 2022 sampai 2024 dimana mengalami peningkatan dari 86,31 menjadi 90,53 atau terjadi kenaikan sebesar 4,22. Kenaikan yang cukup signifikan merefleksikan bahwa adanya progres yang baik dalam upaya menumbuhkembangkan iklim dan kondisi demokrasi Kota Blitar. Tidak hanya itu tercapainya angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar telah berhasil mengembangkan praktik demokrasi yang substansial, tidak hanya sekadar prosedural yakni pelaksanaan esensi demokrasi yang sesungguhnya.



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru terdiri dari **tiga aspek** yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian **indikator pada IDI metode baru berbeda dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode lama**, sehingga angka IDI mulai tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Pada tahun 2023-2024, jika dibandingkan antara Indeks Demokrasi Indonesia Nasional sebesar 79,51 (kategori sedang) dengan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur sebesar 82,01 (kategori tinggi) masih lebih tinggi nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur dan menempati urutan keenam nasional berdasarkan data BPS yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2024. Tingginya Indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek Kebebasan sebesar 87,29 poin, aspek Kesetaraan sebesar 83,24 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,34.

Sedangkan indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

Kemudian untuk dimensi politik meliputi Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Serta juga jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Pendidikan politik pada kader partai politik dan Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial. Untuk itu bahwa meskipun disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif.

Adapun kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mempertahankan ketercapaian **Indeks Demokrasi Indonesia Daerah** yakni disamping komitmen pemerintah untuk menjaga proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik masyarakat, budaya politik masyarakat dan kebebasan sipil, maka langkah lain yang dilaksanakan yaitu 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan, seperti keikutsertaan dalam musrenbang, forum konsultasi public serta memperbanyak diskusi dengan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah, 2) meningkatkan kualitas Pendidikan demokrasi dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui langkah-langkah sosialisasi pentingnya demokrasi ditingkat Pendidikan dasar dan menengah serta masyarakat, 3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan lembaga public melalui penyampaian program kegiatan yang dilaksanakan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, 4) meningkatkan Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga demokrasi dan masyarakat sipil, dan 5) meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan. Langkah-langkah ini perlu dimasifkan untuk peningkatan nilai IDI pada periode pemerintahan kedepannya.

Selain langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas, maka salah satu cara untuk meningkatkan IDI yaitu mempertahankan kerukunan umat beragama melalui IKUB. Berbicara mengenai keterkaitan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) keduanya tidak dapat dipisahkan mengingat aspek terukur dalam IDI yaitu kebebasan dan kesetaraan beririsan dengan variabel terukur dalam IDI yaitu Toleransi dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya kebebasan berarti, bebas mengemukakan pendapat, bebas berekspresi dengan penuh toleransi serta memeluk dan

menjalankan agama sebagaimana hak dan kebebasannya. Demokrasi yang berkaitan dengan hak untuk memilih maupun dipilih, melingkupi kehidupan umat beragama dalam memilih agamanya dan memiliki hak yang sama dalam implementasi demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Begitupun keberagaman agama tidak menjadi penghalang tercapainya demokrasi sebab dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Dengan demikian, IDI maupun IKUB tidak dapat terpisahkan melainkan apabila keduanya dapat tercapai dengan optimal sudah dapat dipastikan terciptanya lingkungan demokrasi yang harmonis, damai dan penuh toleransi.

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kerukunan Antar
Umat Beragama

Indikator Kinerja:
Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
85,155	85,49	100,39%	84,25**	101,47%

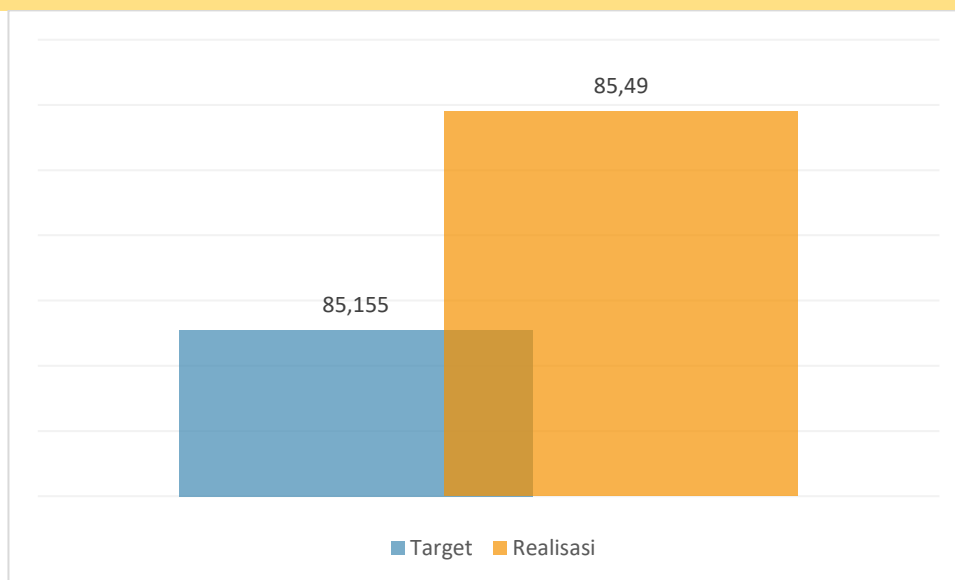


Diagram dan tabel di atas menunjukkan perbandingan target dan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar. **Pada tahun 2024 atau masa akhir jabatan**

Walikota periode 2021-2025 realisasi IKUB sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,49 dari target 85,155 dengan capaian sebesar 101,47%. serta mampu melebihi target akhir RPJMD 84,25 dengan capaian 101,47%.

Berdasarkan kategori kerukunan beragama angka tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, hal ini mencerminkan kondisi sosial yang sangat harmonis dimana kelompok agama dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Tidak hanya itu, capaian tersebut menunjukkan komitmen bersama masyarakat Kota Blitar dalam menjaga kerukunan umat beragama juga sebagai wujud capaian positif dari upaya pemerintah daerah, tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perdamaian lingkungan sosial. Bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2024 juga membawa kabar baik yakni capaian 2024 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 100,39%.

Nilai akhir IKUB tahun 2024 terbentuk dari capaian indeks variabel yang meliputi variabel toleransi, variabel kesetaraan, variabel kerjasama dan variabel peran pemerintah. Adapun penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

a) Variabel toleransi dengan indeks: 85,01 dengan kategori Sangat Tinggi

Pada tahun 2024 didapatkan Indeks Toleransi sebesar 85,01 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini merefleksikan tingginya toleransi atas keberagaman agama dan budaya. Dimana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai hak dan kewajiban dalam menjalankan agamanya masing-masing. Tingginya indeks toleransi tersebut mendorong solidaritas antarindividu dalam masyarakat yang beragam sehingga dapat memperkuat kohesi sosial.

b) Variabel kesetaraan dengan indeks: 89,05 kategori Sangat Tinggi

Indeks kesetaraan di Kota Blitar pada tahun 2024 mencapai 89,05 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Nilai tersebut secara menyeluruh mengindikasikan rendahnya potensi diskriminasi maupun ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan meliputi pendidikan, pekerjaan maupun kebebasan beragama. Tingginya nilai indeks kesetaraan menjadi pertanda bahwa masyarakat Kota Blitar telah mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, hal ini juga sebagai sinyal positif bahwa Pemerintah Kota Blitar bersama masyarakat berhasil berkolaborasi mewujudkan

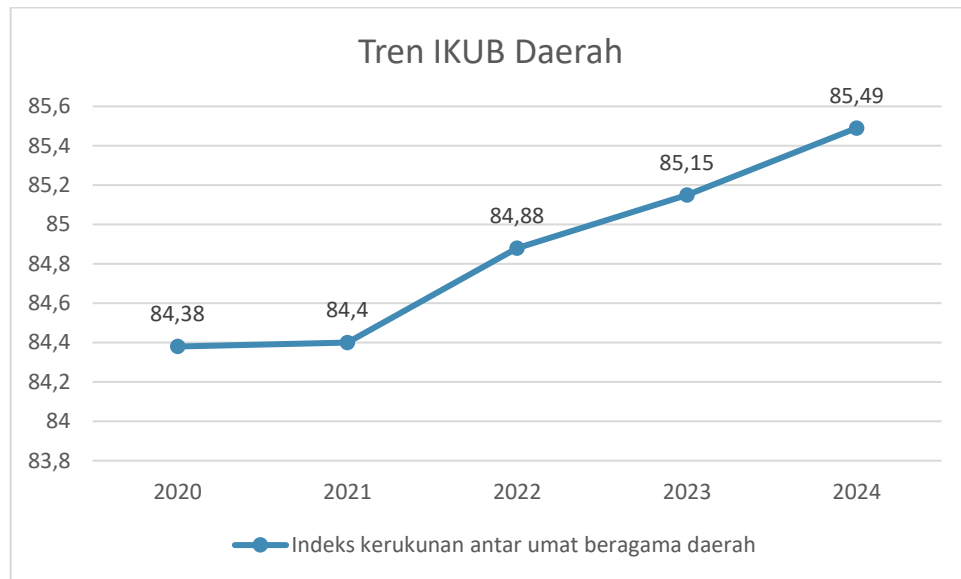
lingkungan yang aman dan nyaman serta minim diskriminasi. Capaian yang sudah baik ini perlu ditingkatkan lagi guna memperkuat identitas kolektif sebagai warga negara tanpa membedakan dan memandang latar belakang.

c) Variabel Kerjasama dengan indeks: 88,55 dengan kategori Sangat Tinggi

Selain variabel toleransi dan variabel kesetaraan, variabel Kerjasama menjadi penting dalam tercapainya indeks IKUB di Kota Blitar. Pada tahun 2024 indeks kerjasama sebesar 88,55 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Indeks kerjasama mencerminkan masyarakat untuk bersama meskipun memiliki perbedaan baik dalam keyakinan, budaya maupun pandangan hidup. Dengan demikian capaian indeks kerjasama tersebut menggambarkan adanya upaya kebersamaan antara umat beragama dalam membangun lingkungan yang damai dan aman. Kebersamaan tersebut tercermin dalam kegiatan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti gotong royong, kegiatan kemanusiaan dan perayaan hari besar agama. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Kota Blitar bersama masyarakat untuk terus meningkatkan persatuan dan kerukunan seluruh umat beragama.

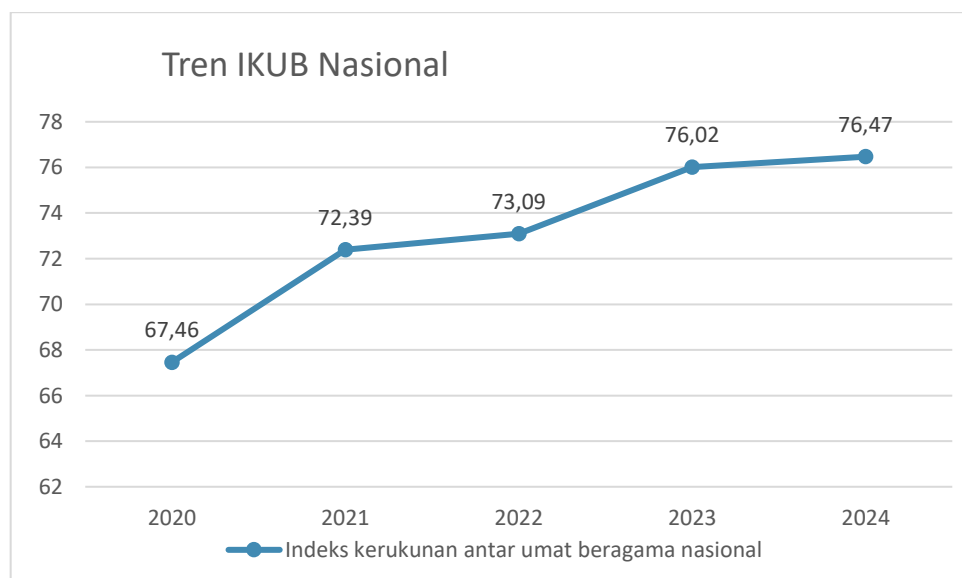
d) Variabel Peran Pemerintah Daerah dengan indeks: 83,30 dengan kategori Sangat Tinggi

Variabel Peran Pemerintah Daerah mengambil peranan penting dalam tercapainya indeks IKUB, dimana pada tahun 2024 nilai indeks peran pemerintah daerah sebesar 83,30 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Kota Blitar berhasil menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Tentu saja capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan tokoh agama yang bekerja sama menjaga kerukunan dan solidaritas. Namun meskipun demikian, apabila disandingkan dengan variabel yang lain variabel ini memiliki nilai yang paling kecil, sehingga menjadi PR kedepannya untuk meningkatkan peran penting pemerintah daerah dalam mendorong dan memberikan wadah tercapainya lingkungan yang damai dalam keberagaman.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2024

Grafik di atas menunjukkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar, hal yang menarik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yakni nilai IKUB di Kota Blitar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Demikian pula kenaikan pada tahun 2023 menuju tahun 2024 sebesar 0.335, hal ini menunjukkan tingginya kerukunan umat beragama di Kota Blitar, hubungan yang harmonis antar umat beragama dan saling menghormati antar kelompok agama. Hal ini mengindikasikan semua variabel saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, adil dan damai.



Sumber: Diolah dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Berdasarkan grafik tren Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional di atas, dapat diketahui bahwa terjadi tren yang positif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 tercapai nilai IKUB Nasional sebesar 76,47 naik sebesar 0,45 dari tahun sebelumnya yang berarti sikap toleransi beragama di Indonesia cenderung membaik. Dikutip dalam sambutan Wamenag pada peluncuran Sekretariat Bersama dan API-MB menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ini adalah berbagai upaya Kementerian Agama dalam menyosialisasikan dan menginternalisasikan penguatan moderasi beragama melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun rincian skor IKUB Nasional tahun 2024 yaitu toleransi (74,83), kesetaraan (77,42) dan kerjasama antarumat beragama (77,15).

Kenaikan IKUB Nasional ini menjadi cerminan suasana di Indonesia yang selalu terjaga interaksi sosialnya, toleransinya, guyub rukun dan harmonis dengan berbagai keanekaragaman agama yang dianut. Begitu pula, kestabilan kerukunan umat beragama di daerah khususnya di Jawa Timur tercatat pada tahun 2023 mencapai 77,55 melampaui rata-rata nasional. Hal ini menjadi gambaran Jawa Timur membangun mutual respect sehingga dapat tercapainya kepercayaan satu sama lain. Apabila dibandingkan IKUB Nasional dengan IKUB Kota Blitar keduanya sama-sama memiliki tren positif yang signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun, capaian IKUB Kota Blitar menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2024 IKUB Kota Blitar tercapai sebesar 85,49 sementara IKUB Nasional sebesar 76,47.

Kemenag menilai Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekaligus dinamika keagamaan aktual mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Dari data Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) dapat menggambarkan keagamaan di Indonesia yang sangat dinamis. Tetapi juga mulai muncul berbagai gejala seperti gejala intoleransi, ekstremisme, dan ketidakrukunan terjadi di beberapa daerah.

Adanya Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) diharapkan dapat membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan di masyarakat.

Beberapa solusi yang dapat dijalankan adalah melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan yang bertujuan mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga dapat meningkatkan peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama. Harapannya dengan menjalankan solusi yang ada dapat lebih meningkatkan kerukunan umat beragama.

Begitu pula yang diterapkan di Kota Blitar, dimana perlu untuk dilakukan strategi atau kebijakan-kebijakan agar Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar tetap terjaga yakni melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui pencegahan konflik baik di tingkat masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintahan.
2. Memberikan pelatihan litigasi hukum dan advokasi kepada masyarakat dan organisasi-organisasi keagamaan sebagai upaya mencegah konflik antar umat beragama di Kota Blitar.
3. Melakukan penguatan dan sinergitas antar lembaga keagamaan yang ada di Kota Blitar melalui forum kerukunan umat beragama, serta membuat program kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan kepercayaan dan sebagai upaya saling mengenalsatu sama lain.
4. Membuat program dialog yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu:
 - a) Dialog Kehidupan: Program ini mengacu pada hidup berdampingan secara harmonis antara individu-individu yang memiliki latar belakang agama berbeda. Dalam dialog ini, individu secara aktif terlibat dalam interaksi terbuka dan saling menghormati, merasakan kegembiraan dan tantangan yang terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Upaya ini juga bisa disebut dengan kolaborasi, dimana mereka berupaya secara kolektif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
 - b) Dialog Perbuatan: Dalam dialog ini, peserta yang mewakili berbagai kelompok agama saling berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Dialog ini bertujuan untuk membahas berbagai upaya umat beragama yang secara kolektif mendorong pembangunan nasional dan daerah yang dalam konteks ini adalah Kota Blitar dalam menghadapi berbagai tantangan yang menjadi ancaman.

- c) Dialog Teologis: Dialog ini dilakukan oleh para pemuka agama yang ada di Kota Blitar. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran dalam kerangka teologis masing-masing, sekaligus sebagai upaya untuk mengakui dan menghormati prinsip-prinsip spiritual yang dianut oleh masing-masing agama.
 - d) Dialog Pengalaman Agamis: Dialog ini dilakukan dalam lingkup wacana seputar pengalaman beragama karena menurut dialog ini terdapat asumsi bahwa individu yang mempertahankan hubungan kuat dengan keyakinan dan tradisi agamanya sering kali memasukkan aspek-aspek tertentu dari kekayaan spiritual yang ditemukan dalam praktik keagamaan lainnya.
 - e) Dialog antar Monastik: dialog ini dilakukan sebagai proses timbal balik dalam menafsirkan dan memahami ajaran agama lain, serta mengamati dan belajar dari pengalaman hidup mereka dalam kerangka ajaran agama. Dialog ini secara khusus menyoroti kekayaan spiritual mendalam yang melekat pada masing-masing agama
5. Memanfaatkan media sosial sebagai upaya meredam konten-konten berbentuk debat agama yang dapat menyesatkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, dan juga menjaga ketertiban. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai alat promosi kegiatan-kegiatan diskusi atau dialog lintas keyakinan dan budaya, agar masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Membuat kebijakan atau kurikulum lokal (kearifan lokal) di tingkat sekolah dasar (SD dan SMP) yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif, toleransi, dan moderasi beragama bagi generasi penerus Kota Blitar. Selama ini, dalam pemahaman mengenai kerukunan, dimana konsep menghormati, lebih banyak dipahami sebagai “membiarkan”. “tidak mengganggu”, dan “mempersilahkan”. Oleh sebab itu, kurikulum yang dibuat nantinya harus berorientasi pada keterlibatan aktif, sehingga pemahaman kerukunan perlu didorong pada “memfasilitasi”, dibandingkan dengan “membiarkan”, seperti yang selama ini kerap diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah.
7. Menggunakan pendekatan multikulturalisme dalam menjalankan semua rekomendasi. Pendekatan ini menekankan pada upaya setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik, dan selanjutnya juga mengkritisi jalinan hubungan kekuasaan yang ada agar menjamin hak, keadilan, dan kesempatan yang

sama bagi semua warga negara dengan latar belakang ikatan budayanya yang harus dihormati.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5/ 9
1	Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis (IDI)	85,155	85,49	100,39 %					
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.597.157.800	2.389.609.324		
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.738.497.709	16.450.099.259		
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	81.175.500	59.821.500		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5/9
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	287.958.000	268.177.900		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.252.540.167	3.160.346.318		
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.055.438.186	5.872.850.168		
					Program Pengembangan Kebudayaan	854.196.582	847.118.900		
					Program Pembinaan Sejarah	1.891.906.200	1.856.139.972		
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	88.325.000	88.295.000		
					TOTAL	31.847.195.144	30.992.458.341	97,32	1,03

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar tahun 2024, terdapat efisiensi baik secara kinerja maupun anggaran. Hal ini dapat tercapai atas kerja keras dan usaha yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat yang

terlibat. Perencanaan yang matang diimbangi dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran yang terstruktur dan terukur. Banyak aktivitas yang dilakukan agar IKUB tercapai secara efektif dan efisien antara lain: peran aktif FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama, pelaksanaan sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat dalam menangani Konflik sosial yang terjadi dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah mampu menciptakan lingkungan harmonis tanpa ada indikasi diskriminatif pada pihak maupun kelompok tertentu.

KINERJA UTAMA 2

**Meningkatnya Kesenjangan Gender,
Perlindungan Perempuan dan Anak**

Indikator Kinerja:
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
97,8	97,49*	99,68%	98	99,48%

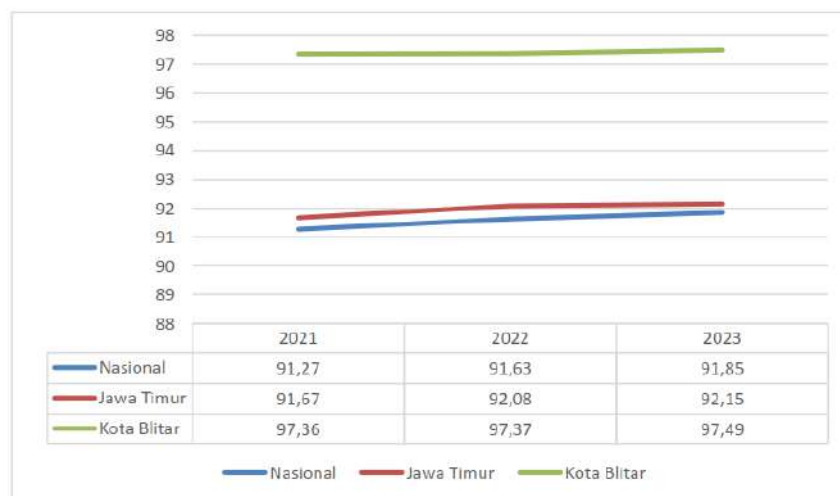
*data BPS Tahun 2023

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender, diantaranya meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan. Pengukurannya bertujuan untuk melihat kesetaraan gender dalam pembangunan, identifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan dan mendorong kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2024 sebesar 97,8, dari target tersebut terealisasi sebesar 97,49 dengan capaian kinerja sebesar 99,68%. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota

Blitar untuk tahun 2024 masih menggunakan data 2023 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur (Kementerian PPPA RI), dikarenakan realisasi IPG tahun 2024 masih dalam tahap pengumpulan data yang akan dipublikasikan pada bulan Maret – April 2025.

Pembangunan gender di Kota Blitar selalu mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. IPG Kota Blitar pada tahun 2021 sebesar 97,36. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar sedikit mengalami kenaikan mencapai 97,37. Angka ini meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar mencapai 97,49 atau mengalami peningkatan sebesar 0,12 dari tahun sebelumnya. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di Kota Blitar karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 selama periode tahun 2021-2023.



*Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2021- 2023*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pencapaian IPG di Kota Blitar pada tahun 2021-2023 selalu lebih tinggi daripada pencapaian IPG di tingkat provinsi dan nasional. IPG di Kota Blitar mencapai 97,49 pada tahun 2023, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang mencapai 92,15 tahun 2023 dan Nasional yang mencapai 91,85 tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan Kota Blitar yang selalu berada pada posisi di atas provinsi dan nasional.

Pencapaian Pembangunan Gender di Eks Karisidenan Kediri

Tujuan dari pembangunan nasional salah satunya adalah terwujudnya pemerataan pembangunan. Diharapkan tujuan tersebut dapat diwujudkan secara berkesinambungan dengan adanya otonomi daerah. Namun, untuk mewujudkan pemerataan tersebut tidaklah mudah. Kondisi geografis yang tidak sama, faktor ketersediaan sarana dan prasarana, faktor perekonomian wilayah, serta kuantitas dan kualitas SDM antar wilayah yang tidak sama menimbulkan kendala adanya kesenjangan antar wilayah.

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan gender di tingkat Eks Karisidenan Kediri cukup bervariasi. IPG tertinggi dicapai oleh Kota Blitar yaitu mencapai 97,49 dan IPG terendah dicapai oleh Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 92,57. Kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di tingkat Eks Karesidenan Kediri karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 selama tahun 2023.

Tabel 2.3.6
IPG Kabupaten/Kota wilayah Eks Karesidenan Kediri
Tahun 2022-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2022	2023
Trenggalek	92,41	92,57
Tulungagung	95,63	95,45
Blitar	93,22	93,4
Kediri	92,85	93,25
Nganjuk	93,89	94,08
Kota Kediri	94,53	94,58
Kota Blitar	97,37	97,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pencapaian IPG di Kota Blitar pada tahun 2022-2023 lebih tinggi daripada pencapaian IPG di tingkat provinsi dan nasional. IPG di Kota Blitar mencapai 97,49 (2023) lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang mencapai 92,15 (2023) dan Nasional yang mencapai 91,85 (2023). Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2022, yaitu IPG Kota Blitar yang mencapai 97,37, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang mencapai 92,08 dan tingkat Nasional yang mencapai 91,63.

Pencapaian IPG sebagian besar kabupaten/kota se eks-Karesidenan Kediri mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2023. Walaupun demikian tercatat 1 (satu) kabupaten yang mengalami penurunan IPG, yaitu Kabupaten Tulungagung (0,18 poin). Penurunan pembangunan gender di Kabupaten Tulungagung didorong oleh pertumbuhan IPM perempuan lebih rendah dibanding pertumbuhan IPM laki-laki.

Tabel 2.3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se eks-Karesidenan Kediri
Tahun 2020 - 2023

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF)							
		Laki-laki				Perempuan			
		2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
1	Trenggalek	76,55	75,90	74,79	74,26	71,33	70,64	69,90	69,64
2	Tulungagung	77,61	76,80	76,00	75,83	74,44	73,94	73,00	72,83
3	Blitar	76,58	75,98	75,52	75,09	71,90	71,31	70,49	70,02
4	Kediri	78,41	78,03	77,14	76,63	73,62	73,07	72,21	71,86
5	Nganjuk	78,61	78,00	77,09	76,95	74,48	73,69	72,69	72,15
6	Kota Kediri	83,97	83,18	82,42	81,88	80,41	79,48	78,49	78,12
7	Kota Blitar	82,21	81,63	80,72	80,17	80,64	79,95	79,03	78,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar sebesar 0,188, turun 0,006 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,194. Penurunan sebesar 0,006 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,005 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai IKG turun maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu unsur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Blitar terus mengalami peningkatan.

Memperhatikan capaian IPG selama periode 2021-2023 diatas yang selalu meningkat, maka pada periode pembangunan kedepan (2025-2030) perlu adanya langkah konkrit sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender melalui Sosialisasi kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan agar Perempuan di Kota Blitar

berpartisipasi aktif dalam berbagai Bidang Pembangunan (baik di Bidang Politik, Hukum, Sosial termasuk Bidang Ekonomi)

- 2) Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender
- 3) Pelatihan penyusunan data terpilah gender dengan sasaran seluruh Perangkat Daerah
- 4) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Langkah konkrit yang patut ditingkatkan yaitu prosesntase keikutsertaan perempuan dalam setiap event pengambilan keputusan seperti musrenbang, rapat koordinasi, keanggotaan dalam parlemen.
- 5) Mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Tahapan ini sedianya bisa dilaksanakan mengingat bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak Tahun 2024 telah memiliki UPT PPA yang salah satu tugasnya yaitu mitigas kekerasan perempuan dan anak melalui sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang kekerasan perempuan dan anak.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5/ 9
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (IPG)	97,8	97,49*	99,68 %					
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.120.024.994	1.080.467.802		

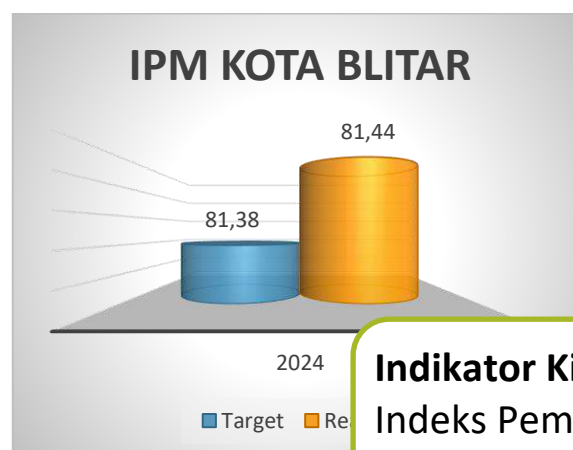
					Program Perlindungan Perempuan	333.317.420	209.785.892		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.231.200	156.105.380		
					Program Perlindungan Khusus Anak	404.612.450	297.587.090		
					TOTAL	2.018.186.064	1.743.946.164	86,41	1,15

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan capaian keuangan program program yang mendukung dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,15 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 3

Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
79,74 – 81,38	81,44	102,13%	78,62	103,59%

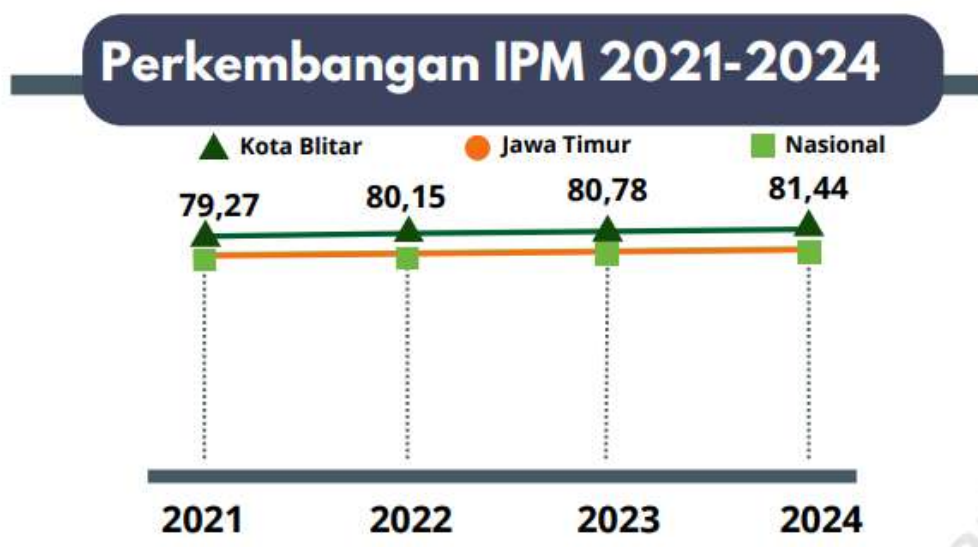


Indikator Kinerja:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM dibentuk oleh beberapa dimensi, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak**. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. **IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur** setelah Kota Mojokerto sebesar 81,76 dan termasuk status “sangat tinggi” dengan range nilai >80.

IPM Kota Blitar Tahun 2024 mencapai 81,44 meningkat 0,66 poin (0,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (80,78). Selama 2022-2024, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 1,61 persen pertahun. Seluruh indikator IPM mengalami peningkatan terutama standar hidup layak. Pada indikator umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 75,20 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada indikator pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 14,57 menjadi 14,81 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,04 tahun dari 10,78 tahun menjadi 10,82 tahun pada Tahun 2024. Indikator standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 385 ribu rupiah (2,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya bersumber dari data Susenas di Bulan Maret. Perkembangan IPM dan indikator penyusunnya selama tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.3.1 dan Tabel 2.3.8 berikut

Gambar 2.3.1
Perbandingan IPM Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional (2021-2024)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024



Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,46	74,71	74,97	75,2
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,33	14,56	14,57	14,81
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,35	10,65	10,78	10,82
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	13.816	14.058	14.548	14.933
IPM		79,27	80,15	80,78	81,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2024

Selama tiga tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori sangat tinggi dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Perubahan tren IPM beserta komponen pembentuknya selama tahun 2022 – 2024 Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuk IPM Jawa Timur dan Kabupaten Kota, 2022-2024 (Lanjutan)

Provinsi	Pengeluaran Riil per Kapita			IPM		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pacitan	9.184	9.681	10.099	70,19	70,94	71,49
Ponorogo	10.199	10.658	11.065	72,59	73,18	73,70
Trenggalek	10.042	10.465	10.872	71,28	71,96	72,47
Tulungagung	11.162	11.565	11.966	74,14	74,65	75,13
Blitar	11.001	11.499	12.020	72,25	72,84	73,44
Kediri	11.565	11.952	12.388	74,20	74,68	75,18
Malang	10.326	10.791	11.190	72,23	73,00	73,53
Lumajang	9.466	9.720	10.124	68,48	69,37	70,31
Jember	9.840	10.277	10.700	69,80	70,42	70,93
Banyuwangi	12.320	12.820	13.320	73,15	73,79	74,30
Bondowoso	10.851	11.255	11.689	69,91	70,56	71,22
Situbondo	10.263	10.702	11.216	69,76	70,65	71,22
Probolinggo	11.254	11.756	12.258	69,56	70,36	70,85
Pasuruan	10.726	11.239	11.617	71,29	71,91	72,36
Sidoarjo	14.808	15.311	15.710	81,37	81,88	82,67

Provinsi	Pengeluaran Riil per Kapita			IPM		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mojokerto	13.051	13.467	13.903	75,61	76,23	76,69
Jombang	11.579	11.999	12.454	74,66	75,16	75,67
Nganjuk	12.349	12.821	13.376	73,95	74,70	75,24
Madiun	11.848	12.259	12.668	73,51	74,02	74,81
Magetan	12.031	12.495	12.915	75,76	76,30	76,77
Ngawi	11.563	11.897	12.414	72,62	73,28	73,91
Bojonegoro	10.323	10.776	11.204	71,15	71,80	72,75
Tuban	10.703	11.174	11.579	70,79	71,40	72,31
Lamongan	11.648	12.019	12.419	74,83	75,29	75,90
Gresik	13.384	13.870	14.356	77,62	78,44	78,93
Bangkalan	8.971	9.438	9.841	66,11	66,82	67,33
Sampang	8.944	9.363	9.782	65,44	66,19	66,72
Pamekasan	8.967	9.420	9.811	69,35	70,32	70,85
Sumenep	9.388	9.807	10.156	68,49	69,13	69,78
Kota Kediri	12.762	13.276	13.670	80,12	80,97	81,88
Kota Blitar	14.058	14.548	14.933	80,15	80,78	81,44
Kota Malang	16.897	17.222	17.791	83,38	84,00	84,68
Kota Probolinggo	12.571	12.999	13.405	76,08	76,93	77,79
Kota Pasuruan	13.803	14.250	14.664	77,71	78,30	78,90
Kota Mojokerto	14.054	14.422	14.842	80,19	80,90	81,76
Kota Madiun	16.503	17.115	17.518	83,02	83,71	84,51
Kota Surabaya	18.345	18.977	19.666	83,32	83,99	84,69
Kota Batu	13.094	13.603	14.253	78,13	79,07	79,69
Jawa Timur	11.992	12.421	12.852	74,05	74,65	75,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Memperhatikan perkembangan tren positif IPM Kota Blitar 3 tahun terakhir, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Blitar. Kemiskinan dan IPM memiliki keterkaitan yang sangat erat. IPM adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan pembangunan manusia sedangkan kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan pembangunan manusia.

Persentase penduduk miskin di Kota Blitar pada Maret 2024 sebesar 6,75 persen, turun 0,55 persen poin dibandingkan Bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Blitar pada bulan Maret 2024 mencapai 9,86 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 0,75 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 sebesar 10,61 ribu jiwa. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan penurunan kemiskinan di Kota Blitar selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain adalah: Ekonomi Kota Blitar tumbuh positif sebesar 5,29 % pada tahun 2023, berbagai program intervensi kemiskinan terus

dilakukan di Kota Blitar diantaranya pengendalian harga kebutuhan pokok, program pengurangan beban pengeluaran dan program peningkatan pendapatan.

Dengan demikian maka peningkatan IPM dapat menurunkan angka kemiskinan, yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Namun jika kelebihan populasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan, yang dapat berdampak negatif jangka panjang pada pembangunan ekonomi. Untuk itu laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga pembangunan ekonomi tetap stabil dan meningkat. Kesejahteraan dan IPM berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengatur laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memperhitungkan faktor-faktor seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, membuat masyarakat menjadi lebih terampil dan produktif, sehingga meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan pribadi. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga meningkat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan kelahiran. Dengan pendidikan yang lebih baik dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi, keluarga cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit lebih mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, interaksi antara indeks pembangunan manusia, kesejahteraan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Memperhatikan pencapaian IPM di tahun 2022 s.d 2024 mengalami tren positif, maka program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam RPJMD 2025-2030 agar komponen **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak** di Kota Blitar tetap terjaga yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pendidikan melalui: (1) optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) serta (2) optimalisasi pengelolaan data
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui upaya: (1) pengembangan kurikulum muatan lokal (2) fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) (3) peningkatan pemerataan layanan

pendidikan yang berkualitas (4) fasilitasi peningkatan kualitas siswa (5) peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (6) peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- 3) Peningkatan akses pendidikan melalui: (1) jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan (2) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan (3) peningkatan sekolah inklusif (4) pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
- 4) Peningkatan kualitas kesehatan ibu melalui (1) peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan (2) peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan (3) peningkatan kunjungan K1 dan K4
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita melalui (1) peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (2) Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) serta (3) penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- 6) Peningkatan penanganan stunting melalui upaya (1) peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang (2) pemenuhan gizi ibu hamil serta (3) peningkatan gizi balita
- 7) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (1) penguatan fasilitas pelayanan kesehatan (2) peningkatan sistem pelayanan rujukan (3) pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit (4) peningkatan layanan kegawatdaruratan (5) peningkatan kualitas sumber daya kesehatan (6) pengembangan layanan *home care*
- 8) Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui: (1) optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular serta (2) peningkatan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 9) Peningkatan peran organisasi kepemudaan, kompetensi pemuda dan profesionalisme pemuda melalui sosialisasi bagi pemuda, pembinaan, peningkatan keimanan, pelatihan ketrampilan, pelatihan dasar kepemimpinan, dan peningkatan kapasitas kepramukaan dan pemberian dana hibah untuk

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan pramuka

- 10) Peningkatan peran organisasi olahraga serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras olahraga melalui pembinaan dan pengembangan Cabor prestasi/rekreasi/tradisional, pelatihan Cabor/Sport Science, penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Peningkatan Pembangunan Sarpras dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga, pemberian dana Hibah untuk KONI dan *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) serta peningkatan promosi olahraga
- 11) Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera melalui (1) peningkatan partisipasi peserta KB aktif (2) pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB (3) peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun) serta (4) optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
- 12) Peningkatan kegemaran membaca dan literasi melalui (1) perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan (2) peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan (3) Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM) (4) peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital, serta (5) peningkatan koleksi buku perpustakaan
- 13) Peningkatan penghasilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan hingga menciptakan wirausaha baru serta memfasilitasi pemasaran produk pelatihan dengan produsen atau pembeli produk pelatihan
- 14) Peningkatan kesempatan kerja melalui program bursa kerja melalui Kerjasama dengan Pendidikan menengah yang ada di Kota Blitar sebagai peserta (selain terbuka untuk umum) dan menarik investor dengan mengoptimalkan pekerja lokal

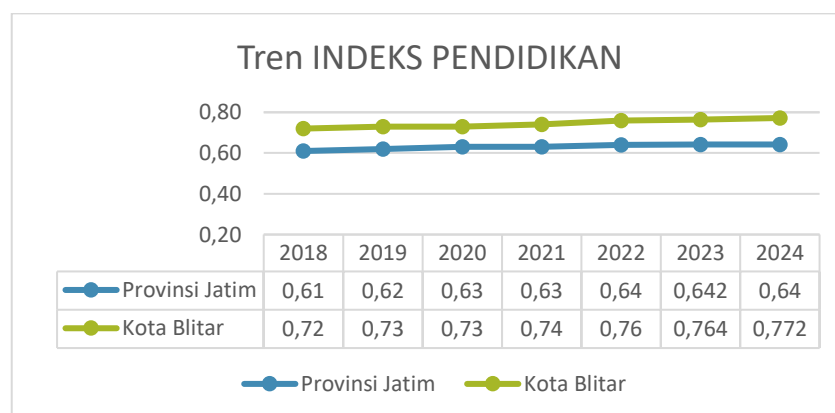
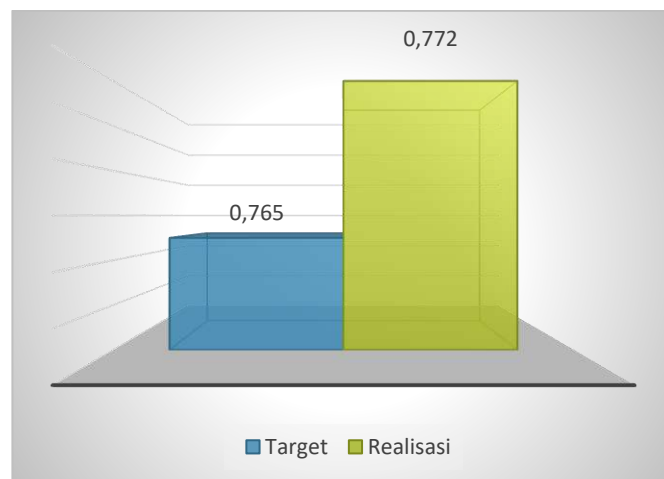
KINERJA SASARAN

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Kinerja: Indeks Pendidikan

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,765	0,772	100,92%	0,74**	104,32%

****)** kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024



Sumber: BPS Kota Blitar, 2024

Indeks Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata penjumlahan Indeks Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, HLS Kota Blitar sebesar 14,56 tahun, sedikit meningkat di tahun 2023 (14,57 tahun) dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 14,81 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang Pendidikan formal diharapkan akan menikmati pendidikan hingga 14,81 tahun atau setara dengan Diploma III. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Blitar sebesar 10,82 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Blitar menempuh pendidikan sampai setara kelas 2 SMA.

Adapun pencapaian Indeks Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 0,772 melebihi target yang ditentukan. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,82 lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 10,78 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang telah diduduki oleh penduduk Kota Blitar ialah sampai dengan kelas XI SMA. Sedangkan kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menandakan penduduk Kota Blitar yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2024 diharapkan bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi.

Untuk mendukung capaian rata – rata Lama Sekolah, maka beberapa kebijakan yang dilakukan di Kota Blitar antara lain seperti Program Serenada dan kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF, adanya Media Pembelajaran melalui KOMIDI ELOK (Komik Digital Berbasis Kearifan Lokal), Seri Animasi Aryo dan Nada, adanya Klinik Pendidikan, Program Sekolah Gratis (Kebijakan Bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik PAUD), Bantuan Kain Seragam Sekolah, keterjangkauan pembiayaan pendidikan, pengembangan model-model pembelajaran yang terus berubah, perancangan penguatan pendidikan berkarakter, penerapan dan pengembangan sekolah sebagai rumah kedua dengan terus meningkatkan daya dukungnya, dan penerapan pendidikan keluarga.

Selain upaya itu, sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa pengukuran IPM juga dari program pendidikan non formal (paket C) dan pendidikan *life skill* (vokasi),

maka dilakukan kerjasama dengan lembaga kesetaraan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjaring yang putus sekolah agar diikutkan ke Paket C dan menginstruksikan ke kelurahan agar warganya menyelesaikan jenjang pendidikan minimal setara SMA melalui jalur Pendidikan Non Formal jika tidak ingin mengikuti Pendidikan Formal.

Tingkat kegemaran membaca juga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dimana realisasinya berada pada angka 52,40 melampaui target sebesar 48,5. Dari sisi peningkatan kegemaran membaca masyarakat sebagai daya ungkit peningkatan kualitas Pendidikan, maka beberapa kegiatan yang dilakukan di Tahun 2024 antara lain :

- 1) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat: layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi: LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan *Bulk Loan* (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
- 4) Layanan online: keanggotaan online, katalog online, e-book, layanan pesan antar (PETA), CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui akun Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar serta webinar kepenulisan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).
- 5) Pembudayaan gemar membaca: Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Parenting Literasi yang dilaksanakan pada beberapa TK dengan peserta wali murid, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, Bimbingan Pemustaka SMP/ MTs, Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat dengan narasumber Arumi Bachsin, S.E. (Ketua Tim

Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Heraldha Savira, Dip.ABRSM, S.Psi., mbak Shasha (Duta Baca Provinsi Jawa Timur), Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi) dengan tema “Pemuda Keren, Pasti Berliterasi” yang dibuka oleh Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd bersama narasumber Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. (Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM. (Wakil Walikota Blitar).

- 6) Pengembangan Lokal Konten: Bedah Buku Lokal Konten, Zoom Meeting Kepenulisan, Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi menulis tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Lokal Konten pada ruang Blitar Corner. Bedah buku local content mengambil tema “Bosho Camondan: Bahasa Perjuangan dan Pergaulan” yang ditulis oleh Yanu Aribowo — juara pertama Lomba Menulis Lokal Konten tahun 2022.
- 7) Pembinaan Perpustakaan meliputi:
 - a) sosialisasi kepustakawanan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, monev perpustakaan sekolah dan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/ MI. Adapun pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah sebagai berikut: Perpustakaan MI Perwanida (Juara 1), Perpustakaan Pustaka Alam SD Alam Al Ghifari (Juara 2), Perpustakaan Baiturahman SDI Tanjungsari (Juara 3), Perpustakaan Cemerlang MIN Kota Blitar (Harapan 1), dan Skajendra Pustaka SDN 2 Kepanjenlor (Harapan 2).
 - b) Sebagai upaya mewujudkan terbentuknya perpustakaan kelurahan sesuai standar dan merealisasikan layanan perpustakaan kelurahan berbasis inklusi sosial dilaksanakan pembinaan bertajuk “Seminar Perpustakaan Kelurahan” dengan narasumber Ir. H. Tjutjuk Sunario MM. (Wakil Walikota Blitar) dan Yuli Asmawati, S.Pd. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi) yang diikuti oleh Lurah se Kota Blitar, Ketua Pokja II PKK Kelurahan, dan pengelola perpustakaan kelurahan.
 - c) Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diberikan kepada 3 (tiga) Perpustakaan Kelurahan tersebut masing-masing berupa 3 unit komputer, 1 unit server, 1

printer, 1 unit modem, dan 2 unit rak buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

Dari berbagai keberhasilan capaian diatas tentunya juga masih dijumpai hambatan antara lain:

1. Adanya mutu layanan sarana prasarana yang belum merata terpenuhi
2. Adanya mutu layanan dasar yang belum terpenuhi dari tenaga kependidikan dan pendidik
3. Adanya mindset masyarakat yang masih terkotak pada sekolah favorit
4. Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar masuk kategori SEDANG karena masih belum optimalnya peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar.
 - b. Kurangnya pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM)
 - c. Belum optimalnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi social

Untuk mengatasi permasalahan terkait kegemaran membaca, maka langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan dan Identifikasi sarana prasarana
- 2) Apresiasi pemberian penghargaan bagi lembaga dengan evaluasi Diri Sekolah terbaik
- 3) Pemetaan dan Identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
- 4) Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan
- 5) Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait dengan mengimplementasikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

- 6) Mengoptimalkan promosi literasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempermudah akses dan penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan bahwa indeks pendidikan memberikan kontribusi dari indikator pengetahuan dalam pencapaian IPM Kota Blitar yang rata-rata meningkat sebesar 0,80 persen per tahun selama 2022–2024 serta mampu mensukseskan capaian salah satu Sapta Program Prioritas Walikota Blitar periode 2021-2025 yakni **“BLITAR CERDAS”**.

Memperhatikan pencapaian indeks pembangunan Kota Blitar selama Tahun 2021 s.d 2024 mengalami tren yang positif dibandingkan daerah lain maupun target yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah yang dapat diambil dan dimodifikasi untuk peningkatan indeks Pendidikan pada periode pembangunan 2025 s.d 2030 sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan dasar, seperti peningkatan sarana prasarana Pendidikan dasar mulai dari Gedung, keterjangkauan akses, pemerataan tenaga Pendidik dan kependidikan. Selain itu perlu kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan akses Pendidikan menengah bagi masyarakat Kota Blitar. Pendidikan menengah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, namun dalam prakteknya kondisi sekolah menengah berada di dikawasan pemerintah daerah, dan ironisnya terdapat anak didik yang tidak mendapatkan sekolah menengah.
- 2) Keberlanjutan program beasiswa berprestasi jenjang Pendidikan menengah dan tinggi bagi warga kurang mampu
- 3) Program Pendidikan non formal seperti:
 - a) memberikan pelatihan ketrampilan, pelatihan *entrepreneurship* dan pelatihan teknologi bagi masyarakat
 - b) membangun pusat Pendidikan dan Pelatihan Non Formal beserta galeri pemasaran hasil Pendidikan dan pelatihan non formal

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja: Angka Harapan Hidup (AHH)

Target 2024 : 74,795

Realisasi 2024
(akhir masa jabatan): 75,20

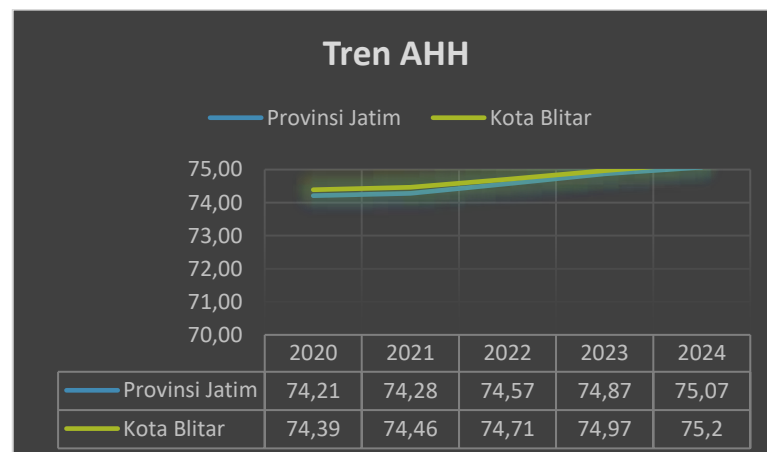
Capaian 2024
(akhir masa jabatan): 100,54%

CAPAIAN terhadap
RPJMD 2021-2026

Target 74,30**

Capaian 101,21%

**) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tahun 2024 mencapai 75,20 melebihi pencapaian Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur sebesar 75,07 dan melebihi capaian tahun 2023. Angka Harapan Hidup di Kota Blitar menyentuh angka 73 tahun sejak tahun 2015. Angka ini masuk pada range Angka Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu dimensi penyusun tercapainya IPM Kota Blitar sebesar 81,44. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,81 tahun atau

rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH adalah 74,39 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,20 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 (0,21 persen per tahun), sebagaimana gambar diatas.

Hal tersebut menjadi cerminan keberhasilan pembangunan Kota Blitar di bidang kesehatan serta menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Blitar akan kesehatan sangat tinggi, yang juga didukung dengan sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup tidak lepas dari wujud komitmen Pemerintah Kota Blitar beserta gerakan sadar dari masyarakat antara lain:

1. Perilaku hidup sehat
2. Adanya kelahiran hidup
3. Peran pemerintah daerah terkait kebijakan kesehatan
4. Keaktifan kader kesehatan
5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
6. Akses pelayanan kesehatan mudah
7. Kualitas pelayanan kesehatan baik
8. Media sosial kesehatan mudah diakses
9. Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu

Wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas kesehatan melalui program prioritas yang mendukung pencapaian Indeks Kesehatan yang didalamnya terdapat unsur AHH yakni antara lain:

1. Program Keluarga Sehat (Home Care, UHC)
2. Pendampingan Bumil dan Baduta
3. Konvergensi Stunting
4. Program Kota Sehat
5. Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan

Namun keberhasilan tersebut juga diiringi dengan hambatan dalam pencapaiannya yang menyebabkan perlu perbaikan dalam proses pencapaiannya. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan derajat kesehatan yaitu:

1. Adanya angka kematian
2. Adanya angka kesakitan
3. Adanya kehamilan beresiko karena usia kehamilan dan penyakit penyerta pada ibu hamil yang menjadi faktor resiko kematian ibu
4. Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil yang dapat menjadi penyebab faktor resiko kematian pada bayi dan kelahiran bayi dengan kondisi stunting
5. Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal
6. Pengumpulan data pada usia pra sekolah belum optimal
7. Kesadaran keluarga untuk memeriksakan dan mendampingi ODGJ masih kurang
8. Masih ada beberapa populasi kunci (selain ibu hamil) yang masih sulit dijangkau untuk pelayanan kesehatan resiko HIV
9. Meningkatnya penyakit degeneratif

Ketercapaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tidak terlepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Jumlah kematian ibu berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin yang sesuai standar dapat dibuktikan dengan pencapaian akreditasi puskesmas se-Kota Blitar pada kategori Paripurna. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada kesehatan ibu hamil dan bersalin dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan dan kesehatan ibu hamil dan bersalin.
2. Jumlah kematian bayi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas penanganan bayi baru lahir sampai usia 28 hari yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan bayi baru lahir.
3. Pencapaian kinerja terhadap capaian pelayanan kesehatan jauh lebih besar daripada target. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

baik pada kondisi sakit maupun kondisi sehat dalam rangka preventif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.

4. Jumlah fasyankes yang terakreditasi pada tahun 2024 lebih banyak dari pada target dikarenakan adanya perubahan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan

Selain beberapa faktor pendukung tersebut, masih adanya indikator sasaran yang belum tercapai, salah satunya yaitu cakupan pelayanan kesehatan tahun 2024 berdasarkan data per-31 Desember 2024 sebesar 33,15 dari target sebesar 46,1 dengan capaian 71,90%, hal ini disebabkan belum semua fasilitas kesehatan melaporkan pelayanan kesehatan ke perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini maka Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi secara bertahap aplikasi RME (rekam medik elektronik) untuk meningkatkan cakupan pelaporan kesehatan setiap fasilitas kesehatan.

Untuk mempertahankan pencapaian UHH Tahun 2024 serta dilaksanakan peningkatan di periode 2025 s.d 2030, maka terdapat beberapa program atau kegiatan yang dapat dilanjutkan seperti:

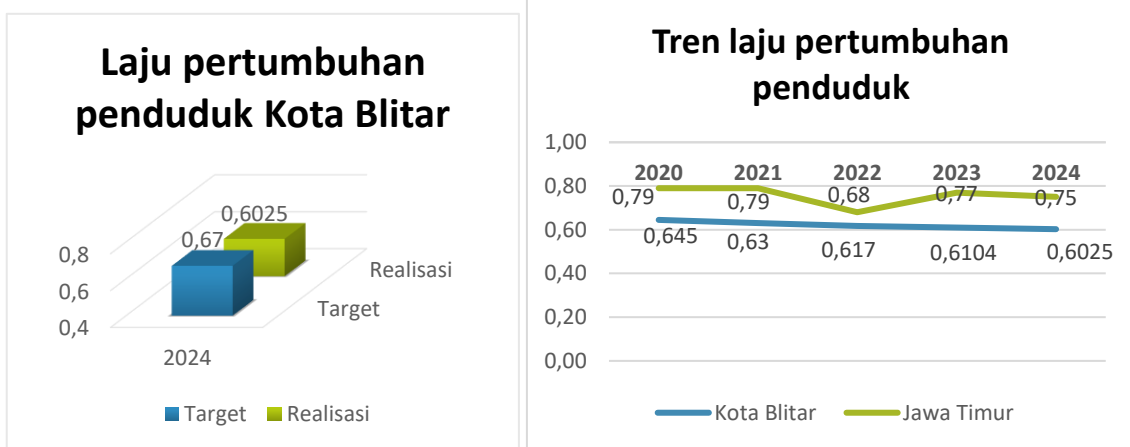
- 1) Peningkatan akses layanan Kesehatan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki layanan Kesehatan yang berkualitas, mulai layanan dasar, penanganan penyakit dan pencegahan penyakit
- 2) Peningkatan kualitas layanan Kesehatan, memastikan ketercukupan secara kualitas dan kuantitas tenaga medis dan non medis yang ada di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan
- 3) Peningkatan akses air bersih dan sanitasi, yaitu memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai, untuk mengurangi resiko terkena penyakit
- 4) Meningkatkan kerjasama antar lembaga formal maupun non formal yang bergerak dibidang Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Kesehatan dan derajat Kesehatan masyarakat.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja: Laju Pertumbuhan Penduduk

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,67%	0,6025%	110,07%	0,65%	107,31%



Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, **laju pertumbuhan penduduk**, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. **Laju pertumbuhan penduduk** per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.

Berdasarkan data hasil **Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)** yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2020 sebesar 142.920 jiwa. Meningkat menjadi 143.840 jiwa di tahun 2021 atau mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 0,645% menjadi 0,63% di tahun 2021 dan menurun lagi di tahun 2022 sedikit dibawah pertumbuhan tahun 2021 menjadi 144.727 jiwa atau mengalami pertumbuhan 0,617%. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Blitar meningkat menjadi 145.583 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,6104% dan sedikit

menurun lagi pertumbuhannya di tahun 2024 menjadi 0,6025% dengan jumlah penduduk sebesar 146.404 jiwa.

Dari laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2024 sebesar 99,00 persen yang artinya dari setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.906 penduduk per km². Terdapat beberapa sebab rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen, diantaranya adalah angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki, serta karena faktor migrasi penduduk laki-laki lebih tinggi terutama pada penduduk usia produktif.

Laju pertumbuhan penduduk turun melandai dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera antara lain: (1) peningkatan partisipasi peserta KB aktif (2) pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB (3) pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja dalam rangka pendewasaan usia pernikahan (4) peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun) serta (5) optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera.

Kinerja sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk, pada tahun 2024 terealisasi 0,6025% dari target 0,67% ini menghasilkan capaian sebesar 110,07% dan masuk dalam atribut **Sangat Berhasil**. Nilai tersebut **diatas capaian Jawa Timur** dimana berada pada kisaran 0,75.

Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selama tahun 2024 keempat faktor tersebut mengalami penurunan.

Namun disisi lain juga perlu diminimalisir faktor penghambat yang membuat laju pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan yakni antara lain:

1. Tingginya migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar karena adanya program Zonasi Sekolah

2. Kurang optimalnya KB Pasca Persalinan yang merupakan pengungkit terbesar dalam metode kontrasepsi modern

Sehingga perlu diupayakan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor serta pengendalian jumlah kelahiran melalui inovasi yang bisa menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan **Promosi dan KIE** (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan juga Ketahanan Keluarga dengan inovasi "GeMeS KB" Gerakan Mengajak PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB serta fasilitasi Layanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Non MKJP.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
3.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM				Program Pengelolaan Pendidikan	70.850.303.909,00	67.767.639.252,00		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,74 – 81,38	81,44	102,13%	Program Pengembangan Kurikulum	636.251.990,00	616.404.100,00		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.095.169.500,00	6.735.323.300,00		
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	20.160.900,00	19.107.250,00		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.460.082.577,00	54.210.807.719,00		

					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	698.275.900,00	671.706.400,00		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	400.567.045,00	399.725.910,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.666.311.271,00	2.623.327.132,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.990.664.757,00	1.959.400.088,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	428.677.200,00	427.624.465,00		
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.209.195.829,00	11.090.293.076,00		
					Program Pengendalian Penduduk	197.600.000,00	162.931.175,00		
					Program Pembinaan Keluarga	2.054.957.978,00	1.788.148.019,00		

					Berencana				
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.006.437.411,00	983.538.200,00		
					Program Pembinaan Perpustakaan	12.527.320.674,00	10.682.815.727,00		
					TOTAL	168.241.976.941,00	158.350.643.794,00	94,12%	1,09

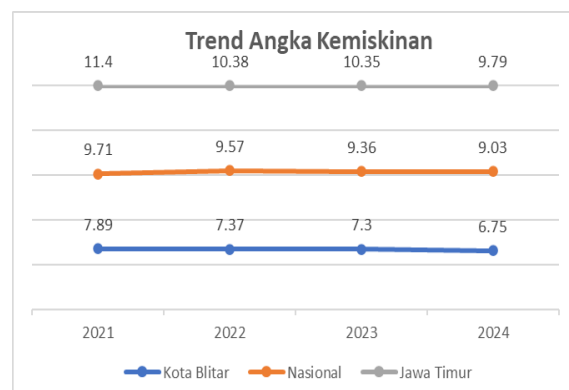
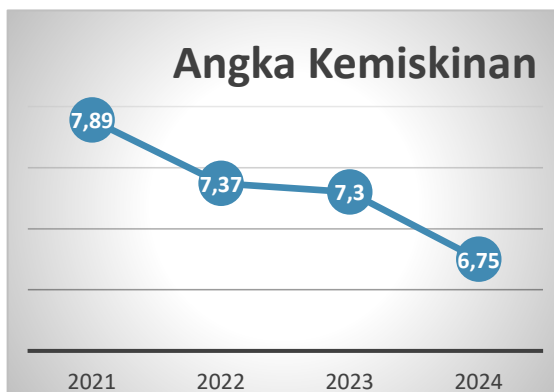
Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,09 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 4

Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja: Angka Kemiskinan

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
7,16-6,25	6,75	105,73%	7,06	104,39%



Sumber Data: BPS, 2025

data dan grafik diatas diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Blitar sebesar 6,75 atau tercapai sebesar 105.73% dari target tahun 2024 dan tercapai 104.39% dari target akhir tahun RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selama tahun 2021 s.d 2024, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021, turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022 dan terus turun menjadi 6,75 di tahun 2024 atau turun sebesar 0.55 poin dari tahun 2023. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6%, menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38% dari tahun 2022 dan terus turun menjadi 9.860 jiwa di tahun 2024 atau turun sebesar 0.04%. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin atau 0.01 lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,56 poin dan 0.22 lebih tinggi daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional yaitu sebesar 0,33 poin.

Sementara itu, dibandingkan dengan Pemerintah Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur angka kemiskinan Kota Blitar lebih tinggi 0,6 poin daripada Kota Kediri dan lebih tinggi 2,37 poin dari Kota Madiun. Sedangkan Pemerintah Kota di Jawa Timur dengan angka kemiskinan terendah tahun 2024 adalah Kota Batu sebesar 3,06. Apabila dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan pada kurun waktu 2023 sampai dengan 2024 penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar lebih tinggi daripada Kota Madiun. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar pada kurun waktu tersebut adalah 0,55 poin sedangkan penurunan angka kemiskinan pada Kota Madiun sebesar 0,36 poin. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Blitar dibandingkan dengan Kota Madiun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar adalah:

- a. peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,29% pada 2023 menjadi 5,33% pada 2024 dan PDRB dari 8.515,16 Miliar di tahun 2023 menjadi 9.187,70 Miliar di tahun 2024.
- b. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,13 poin atau dari 5,24 pada 2023 menjadi 5,11 di tahun 2024.
- c. Penurunan laju inflasi bulanan sebesar 2.48 poin atau dari 2,64 di tahun 2023 menjadi 0,16 di tahun 2024. Penurunan laju inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa menjadi lebih stabil atau bahkan turun. Sehingga menyebabkan masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.
- d. Realisasi penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastrada setiap empat bulan sekali dengan total beras 40 kilogram per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdampak positif pada turunnya tingkat kemiskinan.
- e. Pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait (Dinas Sosial, Dinkop, UKM dan Naker) memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Selain itu, kebijakan lainnya yang memberikan kontribusi menurunnya angka kemiskinan yaitu kebijakan program RT KEREN dengan kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan dengan memberdayakan warga sekitar dimana pelaksanaan kegiatan fisik itu dikerjakan, sedangkan untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan warga tiap RT yang diharapkan pasca pelatihan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh peserta pelatihan.
- f. Adanya program Blitar Cerdas yang dapat menurunkan pengeluaran penduduk, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi murni jenjang SD/ MI yaitu dari 99.01 di tahun 2023 menjadi 99.27 di tahun 2024.
- g. Adanya program Blitar Sehat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat juga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan masyarakat dari

30.15% di tahun 2023 menjadi 33.15% di tahun 2024 serta Indeks keluarga sehat dari 0.41 di tahun 2023 menjadi 0.79 di tahun 2024.

h. Menurunnya indeks gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Penurunan dari 0,397 di tahun 2023 menjadi 0,353 di tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Blitar menjadi lebih merata, yang dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin secara keseluruhan

Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kota Blitar tidak turun drastis yaitu disebabkan:

a. Penurunan rata-rata pengeluaran perkapita

Pengeluaran per kapita bulanan mengalami penurunan dari Rp1.626.624 di tahun 2023 menjadi Rp1.468.379 di tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi bagi masyarakat, yang mungkin menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun.

b. Meningkatnya garis kemiskinan dari tahun 2023 sebesar Rp568.280,00 menjadi Rp596.105 per kapita per bulan atau naik sebesar 4,90% di tahun 2023.

Garis kemiskinan adalah Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Dampak dari kenaikan garis kemiskinan secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah individu atau rumah tangga yang dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena sebagian individu atau rumah tangga yang sebelumnya di atas garis kemiskinan menjadi dianggap sebagai miskin setelah kenaikan garis kemiskinan tersebut. Kenaikan garis kemiskinan menandakan bahwa standar hidup minimum yang dianggap layak juga meningkat. Ini berarti individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kenaikan garis kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan kesulitan bagi mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelumnya.

c. Meningkatkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 0,81 pada Maret 2023 menjadi 1,06 pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,12 menjadi 0,24, yang berarti ketimpangan di antara masyarakat miskin semakin tinggi.

Angka kemiskinan tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, didukung oleh sinergitas program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun belum diperkuat dengan profil data/karakteristik penduduk miskin. Profil data/karakteristik penduduk miskin tersebut diperlukan agar intervensi program pengentasan kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian realisasi angka kemiskinan telah melampaui target yaitu sebesar 104.39% hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama pembangunan untuk meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Sejalan dengan misi ketiga pembangunan yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

a. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat yang lebih tinggi akan meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga, yang pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyesuaikan upah minimum dengan inflasi dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat
- 2) Meningkatkan efektivitas program bantuan social agar lebih tepat sasaran

- 3) Memberikan bantuan modal dan pendampingan bagi keluarga miskin agar bisa menjalankan usaha kecil secara berkelanjutan.
- 4) Mengendalikan harga bahan pokok
- 5) Mengoptimalkan peran koperasi
- 6) Meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, Pendidikan
- 7) Mendorong literasi keuangan agar masyarakat bisa mengelola pendapatannya dengan lebih baik

b. Perluasan Kesempatan Kerja

Lapangan kerja yang luas dan inklusif akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan, yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengembangkan sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama penciptaan lapangan kerja
- 2) Mengembangkan potensi wisata lokal dan produk kreatif sebagai sumber pendapatan masyarakat
- 3) Memberikan pelatihan dan akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata, dan ekonomi kreatif
- 4) Mendorong digitalisasi usaha kecil
- 5) Memberikan pelatihan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk.
- 6) Mendorong sertifikasi dan standarisasi produk agar lebih kompetitif di pasar domestik dan internasional.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Angka kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya mengukur aspek yang berbeda dari kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, semakin sulit bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kondisi ini adalah ketahanan pangan, yang mencerminkan

kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya secara stabil, terjangkau dan bergizi. Ketahanan pangan yang rendah dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin

KINERJA SASARAN

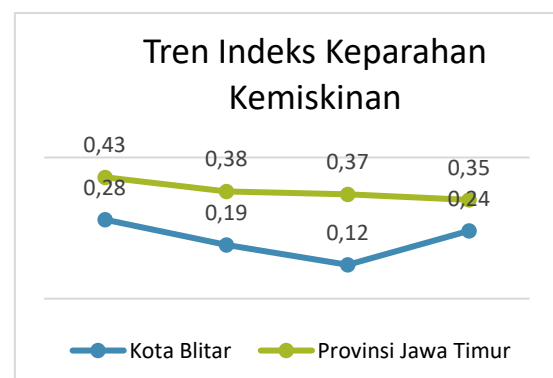
**Menurunnya Ketimpangan
Antar Penduduk Miskin**

**Indikator Kinerja:
Indeks Keparahan Kemiskinan**

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
0,23	0,24	95,65%	0,21	85,71%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,792,0163,949.00	17,821,446,515.00	99,45%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	95.65%	99.45%	0.96	In Efisien



Indeks Keparahen Kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,28. Setelah dampak pandemic Covid-19 menurun di tahun 2022, perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2021 dan terus menurun sampai dengan tahun 2023. Namun, di tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu naik 0,12 poin dari tahun 2023 menjadi 0,24 atau sebesar 95.65% dari target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi yang kurang dari target yang ditetapkan tersebut diikuti oleh adanya in efisiensi. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi fluktuasi signifikan dalam Indeks Keparahen Kemiskinan Kota Blitar yaitu Tahun 2023 mengalami penurunan tajam menjadi 0,12, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat miskin pada tahun tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tahun 2024 mengalami lonjakan menjadi 0,24, lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,21.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin semakin besar, dengan kondisi yang lebih ekstrem di antara mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan menurun dari 7,3% di tahun 2023 menjadi 6,75% di tahun 2024, peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 0,81 menjadi 1,06 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin yang tersisa mengalami kesulitan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, Garis Kemiskinan meningkat dari Rp568.280,00 menjadi Rp596.105,00 per kapita per bulan atau naik 4,90%, menandakan bahwa kebutuhan hidup minimum meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan penduduk miskin. Namun, di sisi lain, Indeks Gini menurun dari 0,397 di tahun 2023 menjadi 0,353 di tahun 2024, yang berarti terjadi sedikit perbaikan dalam distribusi pendapatan secara keseluruhan. Indeks Ketahanan Pangan juga meningkat dari 79,25 di tahun 2023 menjadi 80,8 di tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pangan bagi sebagian besar masyarakat

Jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar lebih rendah 0,01 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar juga lebih rendah 0,11 poin serta lebih rendah 0,08 poin dari Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar Kota Kediri dan Propinsi Jawa Timur.

Faktor pendorong menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin diantaranya sebagai berikut:

1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan cara pemberian program perlindungan sosial berupa Rastrada, Bansos, BPNT, PKH dan JKN.
2. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan.
3. Meningkatkan akses layanan dasar mulai infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan, infrastruktur air minum layak serta bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni.
4. Menurunnya indeks gini dari 0.397 pada tahun 2023 menjadi 0.353 di tahun 2024 serta meningkatnya upah minimum dari Rp2.239.024,00 pada tahun 2023 menjadi Rp2.330.000,00 di tahun 2024 dapat mengurangi ketimpangan.
5. Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dari 79,25 pada tahun 2023 menjadi 80,8 di tahun 2023 mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan. Hal ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Faktor penyebab belum optimalnya penurunan ketimpangan antar penduduk diantaranya sebagai berikut:

1. Kenaikan garis kemiskinan sebesar 4.90% yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin. Ini membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.
2. Inefisiensi anggaran dalam pengentasan keparahan kemiskinan, yang disebabkan:

- a) Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar Perangkat Daerah
- b) Pendekatan penyusunan strategi kemiskinan belum secara komprehensif. Selama ini penyusunan strategi kemiskinan adalah lebih ditekankan program jangka pendek penurunan angka kemiskinan, menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan serta daya beli penduduk miskin. Belum menyentuh dengan pendekatan penyebab kemiskinan itu sendiri.
- c) Ketergantungan pada bantuan langsung tunai yang tidak mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan

Dalam rangka memaksimalkan penurunan ketimpangan antar penduduk miskin, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

- 1. Mendorong program padat karya, pelatihan ketrampilan, dan dukungan usaha kecil untuk kelompok miskin ekstrim agar dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
- 2. Mengendalikan inflasi pangan dan kebutuhan dasar agar daya beli masyarakat miskin tidak semakin menurun.
- 3. Memastikan bahwa program bantuan sosial menjangkau hingga kelompok yang paling rentan
- 4. Mengkaji ulang efektivitas program pengentasan kemiskinan agar dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- 5. Meningkatkan efisiensi dengan cara:
 - a) Meningkatkan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan program berjalan efektif
 - b) Memprioritaskan investasi jangka panjang dalam bentuk Pendidikan, pelatihan dan penciptaan lapangan kerja.
 - c) Mengoptimalkan sistem pendataan penerima manfaat agar alokasi bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya ketahanan pangan daerah

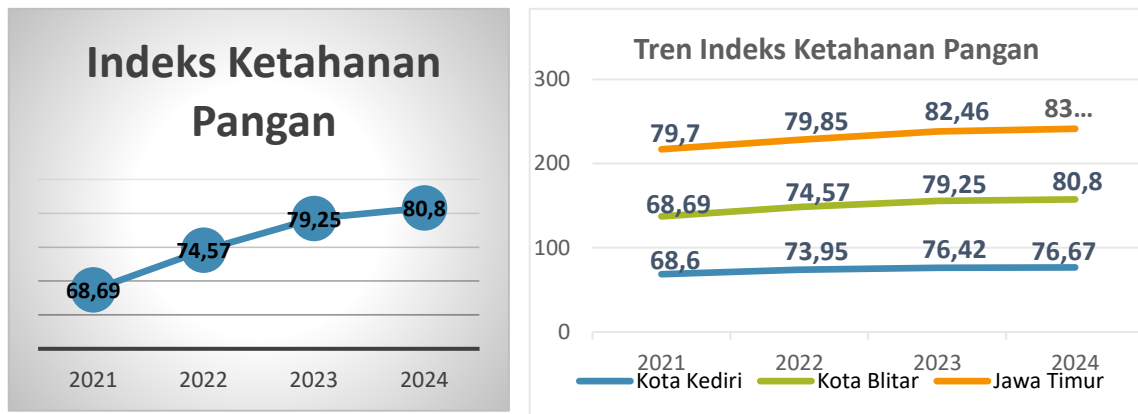
Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Pangan

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
79,26	80,80	101,94%	76,18**	106,06%

**) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	114,775,500.00	113,480,550.00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	53,205,700.00	51,727,700.00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10,250,200.00	10,250,200.00	
TOTAL		175,458,450.00	98,44%
	178,231,400.00		

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	101,94%	98,44%	1.04	Efisien



Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dalam suatu wilayah atau negara, baik dalam jumlah, kualitas, keamanan, maupun aksesibilitasnya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan memiliki empat pilar utama yang harus terpenuhi agar suatu wilayah dapat dianggap memiliki ketahanan pangan yang baik, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan, merujuk pada jumlah pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang diperoleh melalui impor. Dipengaruhi oleh faktor produksi pertanian, iklim, teknologi, dan distribusi pangan
2. Akses terhadap Pangan merupakan Kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan, baik melalui produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan pangan. Faktor ekonomi seperti pendapatan, harga pangan, dan infrastruktur berperan dalam aksesibilitas pangan.
3. Pemanfaatan Pangan yaitu bagaimana pangan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Dipengaruhi oleh faktor sanitasi, pola konsumsi, tingkat pengetahuan gizi, dan layanan kesehatan
4. Stabilitas Ketahanan Pangan harus terjaga secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh faktor eksternal seperti bencana alam, konflik, atau fluktuasi harga pangan. Memastikan bahwa individu memiliki akses terhadap pangan setiap saat, bukan hanya dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Index Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar 80.80% atau tercapai 101.94% dari target kinerja yang

telah ditetapkan dan tercapai 106,06% dari target akhir RPJMD 2021-2026. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan layanan di bidang pertanian, perikanan dan pangan pada masyarakat di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan peningkatan layanan di bidang pertanian, perikanan dan pangan bagi masyarakat Kota Blitar. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih serta didukung adanya inovasi dalam peningkatan layanan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi instansi pemerintah. Pelatihan yang tepat, pengembangan keterampilan, dan penempatan personel yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Selain itu, Efisiensi pelaksanaan anggaran dalam pencapaian Indeks Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, optimalisasi sumber daya, pengawasan ketat, digitalisasi, serta faktor eksternal seperti stabilitas harga dan kondisi iklim. Dengan strategi yang tepat, capaian yang lebih tinggi dari target bisa dicapai dengan anggaran yang lebih efisien

Dalam kurun waktu 2021 s.d 2024, Indeks Ketahanan Pangan mengalami kenaikan yaitu dari 68,69 di tahun 2021 naik menjadi 74,57 di tahun 2022 dan mencapai angka 79,25 di tahun 2023 serta pada tahun 2024 naik menjadi 80.8. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar pada tahun 2024 unggul 4,13 poin. Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur berada di angka 83,86 dan Indeks Ketahanan Pangan Nasional berada pada point 76.2, dengan demikian Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan diatas Nasional. Apabila diperingkat, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2024 berada di peringkat 67 dari 98

Kota di Indonesia. Peringkat Pertama diraih oleh Kota Denpasar dengan nilai 96,37 dan peringkat terendah ditempati Kota Subulussalam dengan nilai 41.12.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, melalui:
 - a. Pemanfaatan teknologi pertanian: Adopsi teknologi seperti sistem irigasi yang lebih baik, penggunaan pupuk organik, serta mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
 - b. Pengembangan urban farming: Program pertanian perkotaan (urban farming) dan hidroponik yang membantu meningkatkan ketersediaan pangan di daerah perkotaan.
2. Aksesibilitas pangan yang lebih baik, yaitu:
 - a. Stabilitas harga pangan, Pemerintah Kota Blitar secara aktif mengelola harga pangan melalui operasi pasar, subsidi bahan pokok, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga pasokan pangan.
 - b. Peningkatan daya beli masyarakat seiring adanya pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang mencapai 5,29%, sehingga akses terhadap pangan lebih terjangkau. Selain itu, Laju inflasi bulanan di Kota Blitar pada tahun 2024 hanya 0,16%, yang berarti harga pangan relatif stabil.
 - c. Infrastruktur distribusi pangan yang baik didukung jalan dan transportasi yang mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dari daerah produksi ke konsumen
3. Program Intervensi Pemerintah dan Dukungan Kebijakan, yaitu:
 - a. Bantuan sosial dan pangan bersubsidi melalui Program bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan program ketahanan pangan lainnya yang memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses pangan.
 - b. Regulasi dan kebijakan daerah dimana Pemerintah Kota Blitar menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengembangan kawasan pertanian dan UMKM berbasis pangan.

- c. Sistem pengawasan pangan yang ketat melalui Pengawasan terhadap keamanan pangan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan suplai pangan di daerah
4. Edukasi gizi dan pola makan sehat, program penyuluhan dan kampanye gizi yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang serta meningkatkan konsumsi pangan local melalui pemberian sosialisasi pola pangan sehat dan pemberian bantuan bahan pangan tambahan kepada kelompok rawan pangan (Bumil KEK) sebagai upaya pencegahan stunting. Pemberian bahan pangan tambahan dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berupa bahan pangan telur, susu, dan abon.
5. Pemberian pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok tani, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.
6. Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pengelola Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan budidaya sayur, pengolahan/pengemasan hasil pertanian, budidaya anggrek dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan pangan tingkat keluarga dan bisa memberikan manfaat secara ekonomi.
7. Pembangunan yang terintegrasi dari berbagai lini (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pangan) baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar didorong oleh kombinasi produksi pangan yang meningkat, akses pangan yang lebih baik, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi masyarakat, serta stabilitas ekonomi dan inflasi yang terkendali. Faktor-faktor ini menciptakan ekosistem yang lebih kuat dalam menjamin ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat di Kota Blitar.

Faktor penyebab belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya adalah:

a. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah

Kota Blitar bukan merupakan daerah dengan lahan pertanian yang luas, sehingga masih mengandalkan pasokan pangan dari daerah lain, terutama untuk komoditas tertentu seperti beras dan sayuran

b. Lahan pertanian yang semakin berkurang

Urbanisasi dan alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri menyebabkan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian.

c. Produktivitas pertanian yang masih bisa ditingkatkan

Walaupun ada kemajuan dalam sektor pertanian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan hasil produksi melalui inovasi teknologi dan dukungan pemerintah

d. Daya beli masyarakat yang masih beragam

Meskipun ekonomi Kota Blitar tumbuh 5,29%, namun masih ada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pangan berkualitas.

e. Fluktuasi harga pangan

Harga bahan pokok tertentu seperti beras, daging, dan minyak goreng masih mengalami fluktuasi yang dapat memengaruhi keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan melakukan peningkatan ketersediaan pangan local melalui optimalisasi lahan perkotaan, peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi modern yaitu irigasi pintar, pupuk organik dan bibit unggul, memastikan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Raskin tepat sasaran dan tepat waktu, pemantauan secara rutin harga pasar dan stok pangan di gudang toko pangan. Selain itu juga diperlukan koordinasi intensif antar Perangkat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan daerah melalui Rakor Tribulanan.

Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan di Kota Blitar menjadi 80,8% di tahun 2024, yang jauh melampaui target akhir RPJMD sebesar 76,18%, menunjukkan

kemajuan positif dalam ketahanan pangan daerah dan telah mencapai kondisi yang diinginkan pada Misi ketiga RPJMD yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan digital serta tujuan keempat RPJMD yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,09 atau masuk kategori efisien.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Targ et 2024	Realis asi 2024	% Capai an 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penye rapan	Ting kat Efisi en si
1	2	3	4	$5=2 \times \frac{3-4}{3} \times 100$	6	7	8	$9=\frac{8}{7} \times 100$	$10=\frac{5}{9}$
4	Meningkatn ya tingkat kesejahtera an masyarakat (Angka Kemiskinan)	7,16 - 6,25	6,75	105,7 3%	Pengelolaan Pendidikan	70,850,303,90 9	67,767,639,2 52		
					Penyelengga raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,545,315,400	1,529,130,85 0		
					Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	400,567,045	399,725,910		
					Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	2,666,311,271	2,623,327,13 2		
					Pemenuhan Upaya Kesehatan	55,460,082,57 7	53,257,807,7 19		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Targ et 2024	Realis asi 2024	% Capai an 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penye rapan	Ting kat Efisi en si
					Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
					Rehabilitasi Sosial	996,128,850	965,543,000		
					Program Pemberdaya an Sosial	816,454,323	811,330,900		
					Perlindunga n Dan Jaminan Sosial	17,920,163,94 9	17,821,446,5 15		
					Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	114,775,500	113,480,550		
					Penanganan Kerawanan Pangan	53,205,700	51,727,700		
					Pengawasan Keamanan Pangan	10,250,200	10,250,200		
					Pengemban gan Perumahan	991,895,479	930,165,943		
					Kawasan Permukiman	200,976,0179	1,977,179,02 3		
					Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3,064,942,000	3,048,376,88 5		
					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11,999,063,45 7	10,993,006,3 98		

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Targ et 2024	Realis asi 2024	% Capai an 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penye rapan	Ting kat Efisi en si
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4,961,759,000	4,629,432,000		
					Penataan Bangunan Gedung	9,748,964,300	9,534,982,900		
					Penyelenggaraan Jalan	17,967,190,692.18	16,730,810,876		
					Pengembangan Jasa Konstruksi	807,224,600	699,882,540		
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	152,400,000	121,382,000		
					Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3,078,470,314	3,025,195,389		
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	887,776,458	801,234,119		
					Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,120,024,994	1,080,467,802		
					Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga	1,006,437,411	983,538,200		

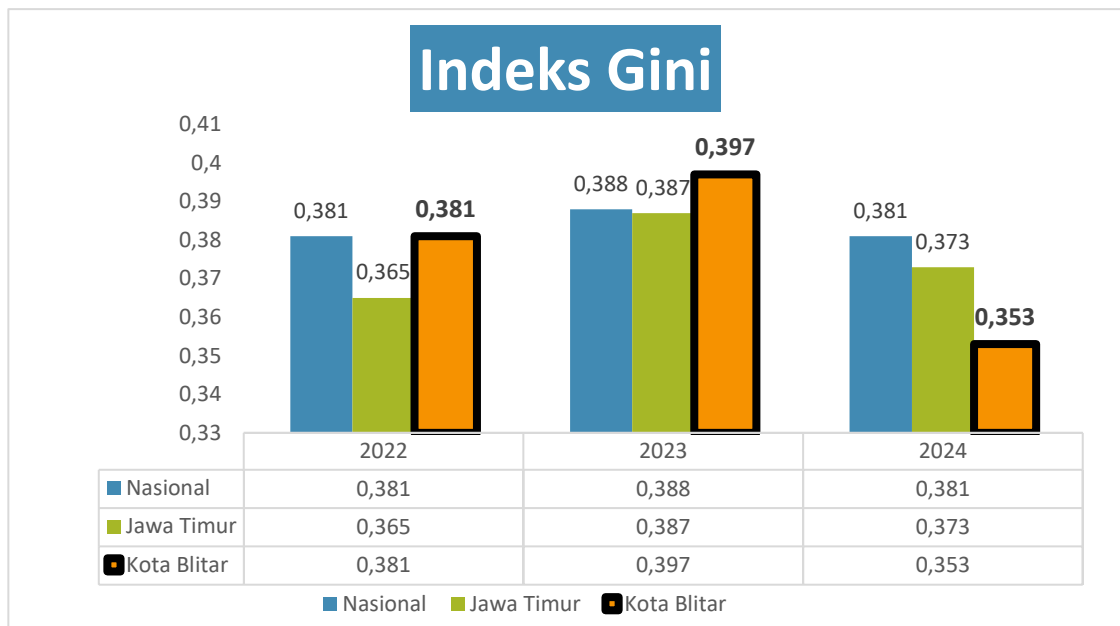
No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Targ et 2024	Realis asi 2024	% Capai an 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penye rapan	Ting kat Efisi en si
					Sejahtera (KS)				
					Penyuluhan Pertanian	1,927,139,800	1,916,147,765		
					Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5,2428,985,898	52,197,340,422		
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,281,661,150	2,256,067,392		
					Penempatan Tenaga Kerja	232,772,300	210,305,200		
					Hubungan Industrial	175,999,300	138,442,250		
Capaian Kinerja				105,73%	TOTAL	265.676.026.056,18	256.625.366.832	96,59%	1,09

KINERJA UTAMA 5:

Meningkatnya Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja: Indeks Gini

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,3022 – 0,3777	0,353	106,54%	0,341	96,48%



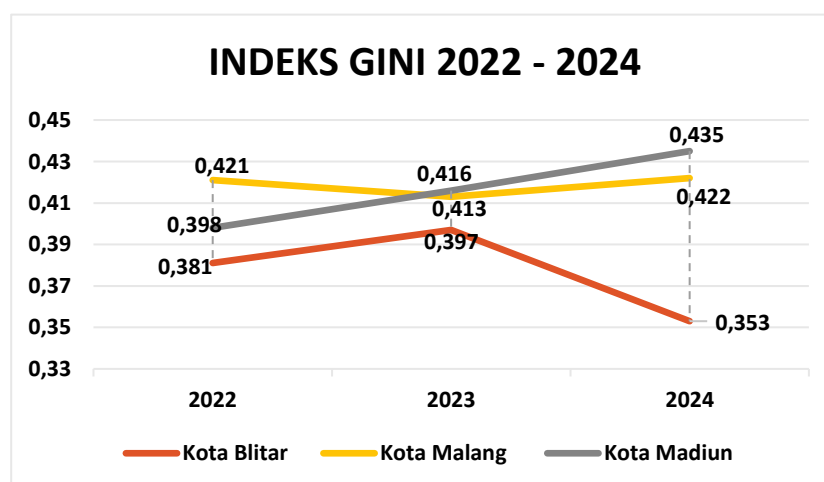
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Tabel 2.3.10

Indeks Gini Kota Blitar dan sekitarnya Tahun 2022 – 2024

No	Indeks Gini	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kota Blitar	0,381	0,397	0,353
2	Kota Malang	0,421	0,413	0,422
3	Kota Madiun	0,398	0,416	0,435

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,381, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,373. Indeks Gini Kota Blitar lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353 dengan tingkat capaian yaitu sebesar 106,54%. Angka ini mengalami penurunan 0,044 poin dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,397. Apabila dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Madiun, indeks gini Kota Blitar lebih rendah yaitu 0,069 dari Kota Malang dan 0,082 dari Kota Madiun. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial optimis bahwa di tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 target Indeks Gini sebesar 0,341 dapat tercapai. Penurunan angka ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kota Blitar pada tahun 2024 serta mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, di akhir masa jabatan Walikota 2021-2025.

Sebagai langkah antisipasi kedepannya, dirumuskan rencana tindak lanjut agar angka indeks gini mencapai target akhir tahun RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 sebesar 0,341 dengan **peningkatan pendapatan masyarakat miskin** melalui **pemberdayaan masyarakat miskin** dengan berbagai program diantaranya yaitu:

- a. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan:
 - Merumuskan kebijakan perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan wira usaha mandiri sektor informal
 - Meningkatkan akses pasar hasil usaha melalui fasilitasi usaha mikro masyarakat ke *e-commerce*
 - Program padat karya
 - Pengembangan *home industry* terutama untuk ibu rumah tangga

- Fasilitasi penyediaan kredit usaha dengan bunga yang murah dan persyaratan yang mudah serta pendampingan untuk usaha mikro
- b. Bagi pekerja miskin yang tidak memiliki skil khusus:
 - Bantuan pendampingan kredit usaha untuk perempuan kepala keluarga
 - Pelatihan peningkatan skill berupa pemberian bantuan modal kerja (mesin jahit, mesin pengolah makanan)
 - Penyelenggaraan pelatihan berbasis potensi ekonomi lokal
 - Pembuatan data base ketenagakerjaan yang menghubungkan para pencari kerja dengan perusahaan pencari pekerja
 - Pengembangan sistem informasi pasar kerja
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ketenagakerjaan

Langkah sebagaimana tersebut tentunya juga harus didukung dengan adanya keterpaduan data. Pemerintah Kota Blitar sejak Tahun 2024, melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, telah membangun sebuah aplikasi yang memadukan satu data untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu aplikasi **Blitar Sejahtera**. Melalui aplikasi ini diharapkan setiap program pengurangan angka kemiskinan, sasarannya menggunakan data yang ada pada aplikasi ini, sehingga keterpaduan dalam mengurangi angka kemiskinan dapat terwujud (termasuk dalam hal penurunan indeks gini).

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyelesaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
5.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	0,3022 – 0,3777	0,353	106,54%					

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyelesaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
	t (Indeks Gini)								
					Program Rehabilitasi sosial	996.128.850,00	965.543.000,00		
					Program Pemberdayaan sosial	816.454.323,00	811.330.900,00		
					TOTAL	1.812.583.173,00	1.776.873.900,00	98,03	1,09

Dari tabel diatas, capaian Indeks Gini di Kota Blitar tahun 2024, terdapat efisiensi baik secara kinerja maupun anggaran. Hal ini tak lepas dari strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mengurangi angka kemiskinan melalui upaya pemerataan pendapatan penduduk dan pengurangan kantong kemiskinan yang dilakukan secara bersama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KINERJA UTAMA 6:

Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
5,22 – 3,74	4,19	119,73%	7,04**	140,48%

****)** kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,19 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang pengangguran. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan dan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

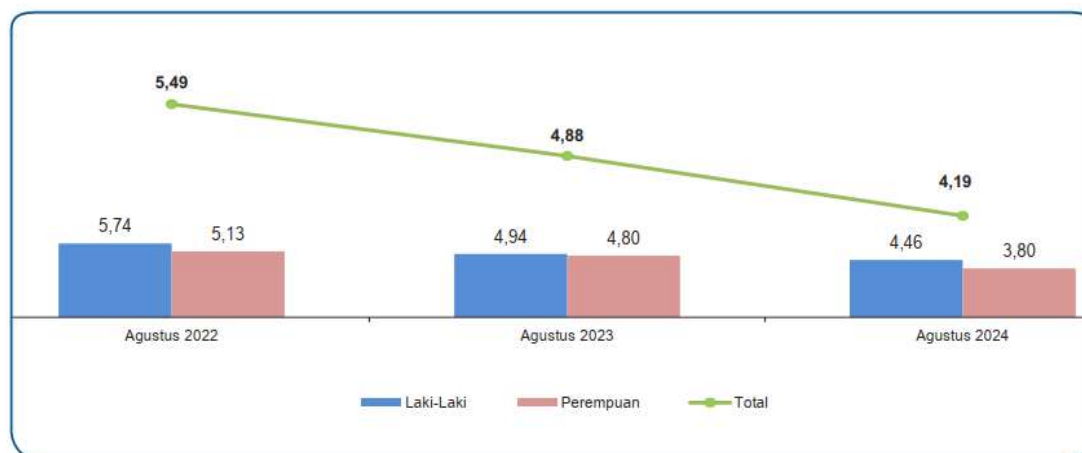


*Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur, Agustus 2024,
BPS Provinsi Jawa Timur*

TPT menurut Jenis Kelamin

Pola penganggur di Jawa Timur masih menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan, yaitu 4,46 persen berbanding 3,80 persen. Laki-laki masih cenderung sebagai *breadwinner* atau diberikan peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dibandingkan perempuan yang cenderung lebih mendapatkan peran mengurus rumah tangga. Meski demikian, TPT baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2024 sama-

sama menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2023. Meski demikian penurunan TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan penurunan TPT laki-laki.



***Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen),
Agustus 2022–Agustus 2024
BPS Kota Blitar***

TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 6,81 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 6,69 persen, dan TPT lulusan DIV/S1/S2/S3 sebesar 5,33 persen. Meski demikian, penurunan TPT lulusan SMK merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang Pendidikan lainnya. Dibandingkan Agustus 2023, hanya TPT lulusan DIV/S1/S2/S3 yang menunjukkan peningkatan sementara jenjang pendidikan lainnya menunjukkan penurunan. TPT penduduk dengan pendidikan SD ke bawah masih tetap menunjukkan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan pendidikan di atasnya. Pada Agustus 2024, dari setiap 100 angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, terdapat sekitar 1-2 di antaranya yang menganggur.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen), Agustus 2022- Agustus 2024
Perbandingan TPAK dan TPT Kota Blitar dengan Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Jawa Timur yang mencapai 73,45 persen, TPAK Kota Blitar pada Agustus 2024 lebih rendah yaitu 70,44 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur tahun 2023 sebesar 72,56 persen dan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar tahun 2023 sebesar 72,26 persen dan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen, artinya secara capaian TPAK Kota Blitar dibanding TPAK Jawa Timur belum cukup signifikan.

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tahun 2024 sebesar 4,19 persen atau turun 0,69 persen poin dibandingkan Agustus 2023 yaitu sebesar 4,88 sedangkan TPT Kota Blitar tahun 2024 sebesar 5,11 persen atau turun 0,13 persen dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 5,24 persen

**Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Jawa Timur
dan Jawa Timur, 2019 - 2024**

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3501 Pacitan	0,91	2,28	2,04	3,65	1,83	1,56
3502 Ponorogo	3,50	4,45	4,38	5,51	4,66	4,19
3503 Trenggalek	3,36	4,11	3,53	5,37	4,52	3,90
3504 Tulungagung	3,29	4,61	4,91	6,65	5,65	4,12
3505 Blitar	3,05	3,82	3,66	5,45	4,91	4,77
3506 Kediri	3,58	5,24	5,15	6,83	5,79	5,10
3507 Malang	3,70	5,49	5,40	6,57	5,70	5,13
3508 Lumajang	2,73	3,36	3,51	4,97	3,67	3,28
3509 Jember	3,69	5,12	5,44	4,06	4,01	3,23
3510 Banyuwangi	3,95	5,34	5,42	5,26	4,75	4,03
3511 Bondowoso	2,86	4,13	4,46	4,32	4,15	3,63
3512 Situbondo	2,77	3,85	3,68	3,38	3,27	3,15
3513 Probolinggo	3,77	4,86	4,55	3,25	3,24	3,00
3514 Pasuruan	5,22	6,24	6,03	5,91	5,48	5,02
3515 Sidoarjo	4,62	10,97	10,87	8,80	8,05	6,49
3516 Mojokerto	3,61	5,75	5,54	4,83	4,67	3,87
3517 Jombang	4,28	7,48	7,09	5,47	4,66	3,75
3518 Nganjuk	3,16	4,80	4,98	4,74	4,68	3,87
3519 Madiun	3,52	4,80	4,99	5,84	5,14	4,34
3520 Magetan	2,98	3,74	3,86	4,33	4,16	3,28
3521 Ngawi	3,60	5,44	4,25	2,48	2,41	2,40
3522 Bojonegoro	3,56	4,92	4,82	4,69	4,63	4,42
3523 Tuban	2,70	4,81	4,68	4,54	4,40	4,28
3524 Lamongan	3,89	5,13	4,90	6,05	5,46	4,34
3525 Gresik	5,40	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45
3526 Bangkalan	5,62	8,77	8,07	8,05	6,18	5,35
3527 Sampang	2,71	3,35	3,45	3,11	2,72	2,50
3528 Pamekasan	2,26	3,49	3,10	1,40	1,74	1,64
3529 Sumenep	2,08	2,84	2,31	1,36	1,71	1,69
3571 Kota Kediri	4,15	6,21	6,37	4,38	4,06	3,91
3572 Kota Blitar	4,54	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
3573 Kota Malang	5,88	9,61	9,65	7,66	6,80	6,10
3574 Kota Probolinggo	4,25	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
3575 Kota Pasuruan	4,89	6,33	6,23	6,18	5,64	4,63
3576 Kota Mojokerto	2,63	6,74	6,87	5,05	4,73	3,76
3577 Kota Madiun	3,96	8,32	8,15	6,39	5,85	4,30
3578 Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
3579 Kota Batu	2,42	5,93	6,57	8,43	4,52	3,63
Provinsi Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

**Perbandingan TPAK Kabupaten/Kota di Jawa Timur
dan Jawa Timur, 2019 - 2024**

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3501 Pacitan	79,62	80,36	80,57	82,99	81,64	86,62
3502 Ponorogo	71,15	71,51	72,63	72,92	75,88	78,75
3503 Trenggalek	73,45	75,72	72,36	72,01	80,72	80,08
3504 Tulungagung	70,48	73,17	72,26	71,95	74,70	75,57
3505 Blitar	72,93	70,83	70,44	72,79	73,50	72,36
3506 Kediri	71,76	70,65	69,34	68,73	68,74	71,31
3507 Malang	70,07	71,62	68,49	70,38	70,66	72,90
3508 Lumajang	66,14	66,92	66,19	69,75	68,49	70,86
3509 Jember	67,16	68,04	68,97	69,44	72,30	73,76
3510 Banyuwangi	72,13	71,80	72,32	72,00	79,04	75,36
3511 Bondowoso	76,01	75,09	73,89	74,61	74,39	75,10
3512 Situbondo	72,40	73,17	71,63	72,15	75,28	76,66
3513 Probolinggo	68,88	72,89	73,24	71,56	69,48	73,18
3514 Pasuruan	68,82	67,67	69,03	70,19	71,21	75,31
3515 Sidoarjo	66,98	67,17	66,47	72,87	69,62	68,37
3516 Mojokerto	69,46	69,79	70,47	71,34	72,51	73,94
3517 Jombang	71,04	70,23	70,69	66,65	71,91	71,88
3518 Nganjuk	66,78	65,75	64,24	66,79	66,89	69,79
3519 Madiun	70,47	71,42	67,77	72,72	72,49	72,34
3520 Magetan	72,34	73,23	73,31	74,03	78,48	77,04
3521 Ngawi	72,48	72,69	72,88	78,60	69,43	75,73
3522 Bojonegoro	71,29	74,60	71,84	72,16	74,29	73,86
3523 Tuban	68,76	71,84	73,77	73,63	74,73	74,55
3524 Lamongan	68,96	70,81	70,72	69,30	75,08	74,80
3525 Gresik	65,83	66,53	69,43	68,30	70,12	71,61
3526 Bangkalan	63,44	67,00	68,66	73,86	71,49	70,48
3527 Sampang	66,74	69,93	70,19	73,37	73,54	73,62
3528 Pamekasan	68,50	69,82	65,88	73,59	77,14	79,13
3529 Sumenep	75,33	75,02	75,63	75,12	78,86	78,16
3571 Kota Kediri	64,81	66,00	67,35	69,93	71,83	70,74
3572 Kota Blitar	72,15	69,53	69,96	67,78	72,26	70,44
3573 Kota Malang	66,10	66,41	67,59	63,08	67,58	67,52
3574 Kota Probolinggo	64,12	69,07	69,71	68,39	70,61	67,55
3575 Kota Pasuruan	68,12	70,05	71,66	68,05	75,65	72,72
3576 Kota Mojokerto	65,09	68,21	67,09	69,41	72,50	72,68
3577 Kota Madiun	66,86	68,63	66,87	66,85	69,29	70,60
3578 Kota Surabaya	68,76	68,05	67,30	69,99	68,73	70,49
3579 Kota Batu	71,22	72,33	73,74	71,51	78,99	73,53
Provinsi Jawa Timur	69,61	70,33	70,00	71,23	72,56	73,45

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

TPT merupakan bagian dari TPAK. TPT mencerminkan dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sedangkan TPAK **merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas.** Harapannya jika jumlah pengangguran berkurang maka otomatis tingkat partisipasi Angkatan kerja naik. **Adapun keberhasilan penurunan TPT yakni** disebabkan oleh:

- 1) Sebagian lapangan kerja sudah sesuai dengan kompetensi Pencari kerja atau berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Pemerintah Kota Blitar telah berhasil memfasilitasi Pencari kerja terdaftar dan sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya
- 3) Penduduk bekerja di Kota Blitar tahun 2024, pekerja yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 51,69% (42.209 orang) dan 48,31% (39.443 orang) pekerja yang bekerja pada kegiatan informal. *(Sumber: Sakernas, 2024)*

Sedangkan faktor penghambat/kendala yang masih dihadapi dan harus dicarikan solusi adalah:

- 1) Angkatan kerja yang cenderung memilih dalam tersedianya lapangan kerja
Mendapatkan pekerjaan layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan Pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka memilih untuk menganggur sementara waktu sambil menunggu pekerjaan dengan keahlian dan penghasilan yang sesuai
- 2) Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan ketrampilan/kewirausahaan belum menindaklanjuti/belum mengimplementasikan ilmu yang didapat

- 3) Belum terserapnya secara optimal angkatan kerja pada program padat karya
- 4) Berkurangnya jumlah penduduk angkatan kerja, yang bisa disebabkan orang yang tadinya aktif mencari pekerjaan turun karena tidak lagi masuk ke angkatan kerja karena isu gender (perempuan) atau kembali menjadi siswa (melanjutkan sekolah) menjadi mahasiswa (S1/S2)

Untuk mengatasi hambatan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan beberapa strategi untuk menurunkan TPT di Kota Blitar. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Strategi ekonomi melalui upaya peningkatan investasi yaitu mengoptimalkan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja
- 2) Strategi pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan pelatihan vokasional, peningkatan program magang, pemberian pembekalan ketrampilan / kewirausahaan dan monitoring hasil pelatihan yang berkelanjutan
- 3) Strategi ketenagakerjaan melalui peningkatan pembukaan lapangan kerja, program pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan industri, optimalisasi publikasi kerja *online* dan *offline* serta peningkatan program padat karya.

KINERJA SASARAN

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target 2024	: 72,27%	RPJMD 2026	
Realisasi 2024		Target : 72,00%	Capaian : 97,83%
(akhir masa jabatan): 70,44%			
Capaian 2024			
(akhir masa jabatan): 97,47%			

TPAK merupakan indikator

ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang

berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara.

Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit sedangkan jika Nilai TPAK naik mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. TPAK Kota Blitar pada tahun 2024 sebesar 70,44 persen atau turun sebesar 1,82 poin dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 72,26 persen. Capaian ini perlu untuk menjadi perhatian penyebab turunnya ketersediaan penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi semakin sedikit, yang bisa dilatarbelakangi : naiknya jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal tahun 2024 sejumlah 48,31% lebih banyak dari jumlah tahun 2023 sebesar 46,67%, angkatan kerja yang cenderung memilih dalam tersedianya lapangan kerja, belum terserapnya secara optimal angkatan kerja pada program padat kerja serta berkurangnya jumlah penduduk angkatan kerja, yang bisa disebabkan orang yang tadinya aktif mencari pekerjaan turun karena tidak lagi masuk ke angkatan kerja karena isu gender (perempuan) atau kembali menjadi siswa (melanjutkan sekolah) menjadi mahasiswa (S1/S2).

Berdasarkan jenis kelamin masih terdapat perbedaan yang mencolok antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,02 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 59,23 persen yang artinya kesempatan laki-laki untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibanding kesempatan perempuan. Ketimpangan TPAK laki-laki dan perempuan masih tetap terlihat. TPAK pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan karena umumnya laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan lebih banyak fokus mengurus rumah tangga.

Tabel 2.3.11

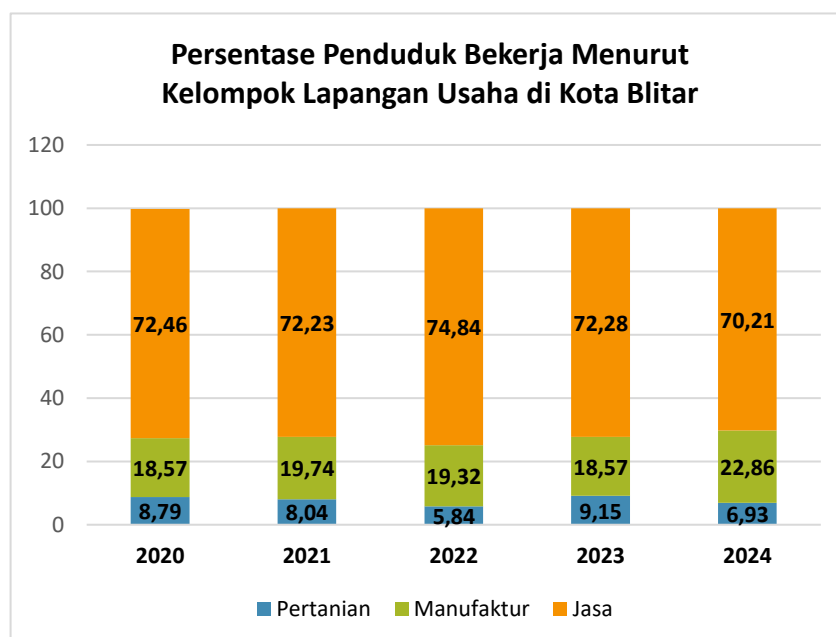
**Status Ketenagakerjaan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2023 - 2024**

Status Ketenagakerjaan	2023	2024
	Orang	Orang
Penduduk Usia Kerja	120.644	122.158

Angkatan Kerja	87.176	86.046
Bekerja	82.605	81.652
Pengangguran	4.571	4.394
Bukan Angkatan Kerja	33.468	36.112
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Persen
Laki-laki	5,13	4,82
Perempuan	5,38	5,5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Persen
Laki-laki	80,91	82,02
Perempuan	63,87	59,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2024

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 81.652 orang, berkurang sekitar 953 orang dari tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen dari 18,57 persen menjadi 22,86. Berbeda kondisinya di sektor jasa dan pertanian yang terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dibanding sektor manufaktur. Sektor jasa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,07 poin dari 72,28 persen menjadi 70,21 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian menurun sebesar 2,22 poin dari 9,15 persen menjadi 6,93 persen. Penurunan tenaga kerja pada kedua sektor ini diduga beralih ke sektor manufaktur sebagai pekerjaan utama.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Penduduk bekerja di sektor formal pada tahun 2024 di Kota Blitar sebanyak 51,69 persen sedangkan 48,31 persen bekerja pada kegiatan informal. Capaian ini perlu untuk menjadi perhatian penyebab turunnya ketersediaan penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi semakin sedikit dibanding tahun 2023.

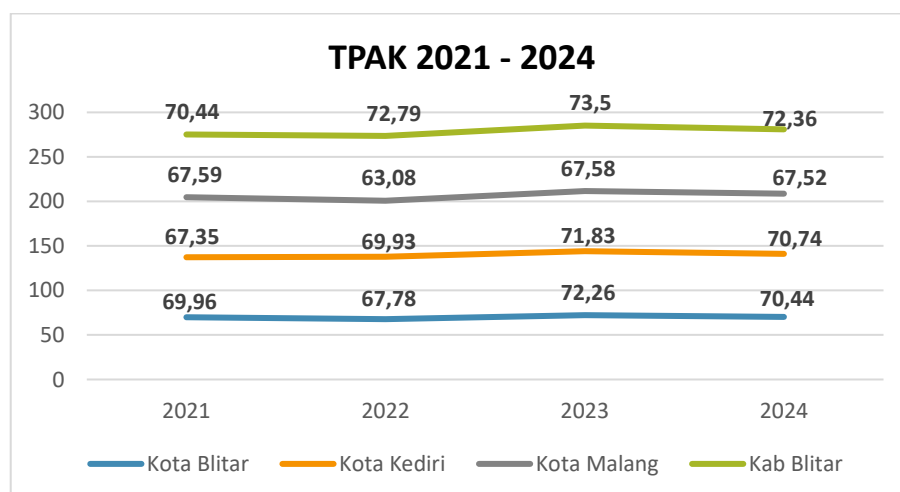
Tabel 2.3.12

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, 2020–2024

Status Pekerjaan Utama (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)
Kegiatan Formal	47,46	50,41	51,37	53,53	51,69
- Berusaha dibantu buruh tetap	4,57	6,04	3,47	5,54	5,61
- Buruh/karyawan	42,88	44,37	47,9	47,99	46,08
Kegiatan Informal	52,54	49,59	48,63	46,47	48,31
- Berusaha sendiri	23,9	24,64	20,19	20,52	24,63
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap	13,31	10,42	12,62	10,85	9,69
- Pekerja bebas	4,28	4,42	2,44	4,9	4,29
- Pekerja keluarga/tak dibayar	11,05	10,11	13,38	10,21	9,7
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas, 2020-2024, Badan Pusat Statistik

Perbandingan TPAK Kota Blitar dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan TPAK Kota Malang dalam 4 (empat) tahun terakhir yang mencapai 67,59 pada tahun 2021; 63,08 pada tahun 2022; 67,58 pada tahun 2023, dan 67,52 pada tahun 2024, Kota Blitar berada diatasnya yakni 69,96 pada tahun 2021; 67,78 pada tahun 2022; 72,26 pada tahun 2023 dan 70,44 pada tahun 2024.

Namun jika dibandingkan dengan Kota Kediri pada tahun 2021 dan tahun 2023 Kota Blitar lebih tinggi 2,61 poin dan 0,43 poin. Sedangkan pada tahun 2022 dan tahun 2024 Kota Blitar lebih rendah capaiannya dimana Kota Blitar berada 2,15 poin dan 0,3 poin dibawah capaian Kota Kediri.

Berbeda lagi dengan daerah yang terdekat dengan Kota Blitar yakni Kabupaten Blitar dalam 4 (empat) tahun terakhir ini capaian TPAKnya selalui diatas capaian Kota Blitar yakni 70,44 pada tahun 2021; 72,79 pada tahun 2022; 73,5 pada tahun 2023 dan 72,36 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Blitar lebih banyak mempunyai potensi Lapangan Usaha yang mampu menyerap tenaga kerja atau kelompok usia 15 tahun keatas yang bekerja. Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,24 atau masuk kategori efisien.

No	Kinerja Utama/ Sasaran RPJMD/ Indikator	Targ et 2024	Realis asi 2024	% Capai an 2024	Program	Anggaran	Realisasi	% Peny erapa n	Tingk at Efisie n si
1	2	3	4	5 = (2*3)- 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
6.	Meningkat nya tingkat kesejahter aan masyaraka t								
	TPT	5,22 – 3,74	4,19	119,7 3%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.281.661.15 0,00	2.256.067.39 2,00		

					Program Penempatan Tenaga Kerja	232.772.300,00	210.305.200,00		
					Program Hubungan Industrial	175.999.300,00	138.442.250,00		
					TOTAL	2.690.432.750,00	2.604.814.842,00	96,82 %	1,24

Tingkat efisiensi diperoleh karena Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar aktif melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pengembangan *softskill* bagi penduduk yang masuk pada Angkatan Kerja, banyaknya lowongan pekerjaan yang dipublish di papan pengumuman ataupun medsos Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga memudahkan pencari kerja untuk mengakses lowongan kerja tersebut serta adanya pendataan pencari kerja secara berkelanjutan.

KINERJA UTAMA 7

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Realisasi s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
4,6% – 6,2%*	5,33%	115,87%	5,5%**	96,91%

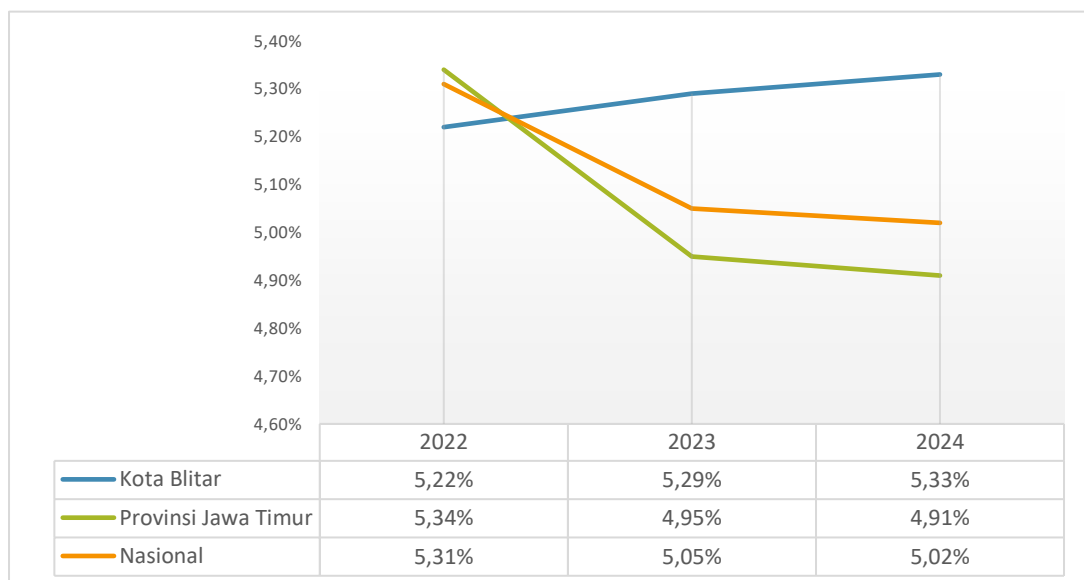
*target yang telah dinaikan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024

** target berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar digunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi

dalam satu kurun waktu tertentu sehingga besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam 4 tahun terakhir, pasca pandemic Covid-19, terus membaik dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai sebesar 5,33% naik 0,11 poin dibandingkan tahun 2022. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sebesar 5,02% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,91% yang mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar terus mengalami pertumbuhan dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, <https://www.bps.go.id/id>, <https://jatim.bps.go.id/id>, diolah.

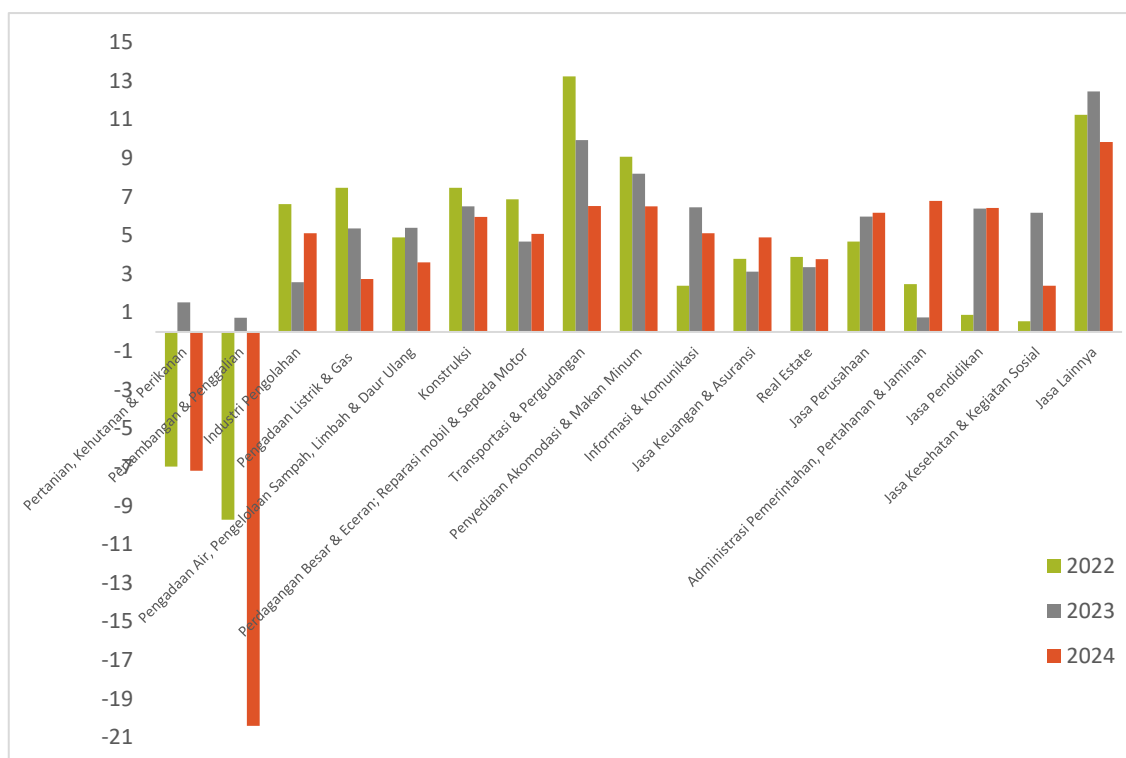
Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi pada 17 sektor/lapangan usaha pada tahun 2022-2024, pertumbuhan terjadi pada 15 kategori lapangan usaha walaupun pada beberapa lapangan usaha terjadi pelambatan, sementara terdapat dua kategori yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2022 dan 2024 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024 adalah Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen, Administrasi Pemerintah sebesar 6,79 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar

6,53 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,51 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 6,42 persen.

Tabel 2.3.13
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2022 s.d 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-6,97	1,54	-7,19
2	Pertambangan & Penggalan	-9,73	0,73	-20,40
3	Industri Pengolahan	6,63	2,57	5,11
4	Pengadaan Listrik & Gas	7,47	5,36	2,75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,9	5,39	3,60
6	Konstruksi	7,46	6,50	5,96
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	6,87	4,69	5,08
8	Transportasi & Pergudangan	13,24	9,94	6,53
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,08	8,20	6,51
10	Informasi & Komunikasi	2,39	6,45	5,11
11	Jasa Keuangan & Asuransi	3,79	3,12	4,90
12	Real Estate	3,88	3,35	3,77
13	Jasa Perusahaan	4,68	5,97	6,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	2,47	0,75	6,79
15	Jasa Pendidikan	0,88	6,39	6,42
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,56	6,17	2,40
17	Jasa Lainnya	11,25	12,46	9,84
KOTA BLITAR		5,22	5,29	5,33

Sumber: BPS Kota Blitar, 202



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Ditinjau dari nilai PDRB selama kurun waktu tahun 2022 – 2024, PDRB Kota Blitar terus mengalami pertumbuhan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9,18 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2024 mencapai Rp 5,74 triliun.

Tabel 2.3.14

PDRB Kota Blitar Tahun 2022 s.d 2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
PDRB dalam juta rupiah (ADHK)	5.181.610	5.455.810	5.746.400
PDRB dalam juta rupiah (ADHB)	7.833.940	8.515.160	9.187.700

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Sedangkan dari kontribusi sektor/lapangan usaha dalam PDRB Kota Blitar Tahun 2024, struktur perekonomian Kota Blitar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Perekonomian Kota Blitar tahun 2024 masih didominasi oleh

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,69 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,50 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,22 persen, Industri Pengolahan sebesar 9,91 persen, serta Konstruksi sebesar 7,38 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Blitar mencapai 62,70 persen.

Tabel 2.3.15

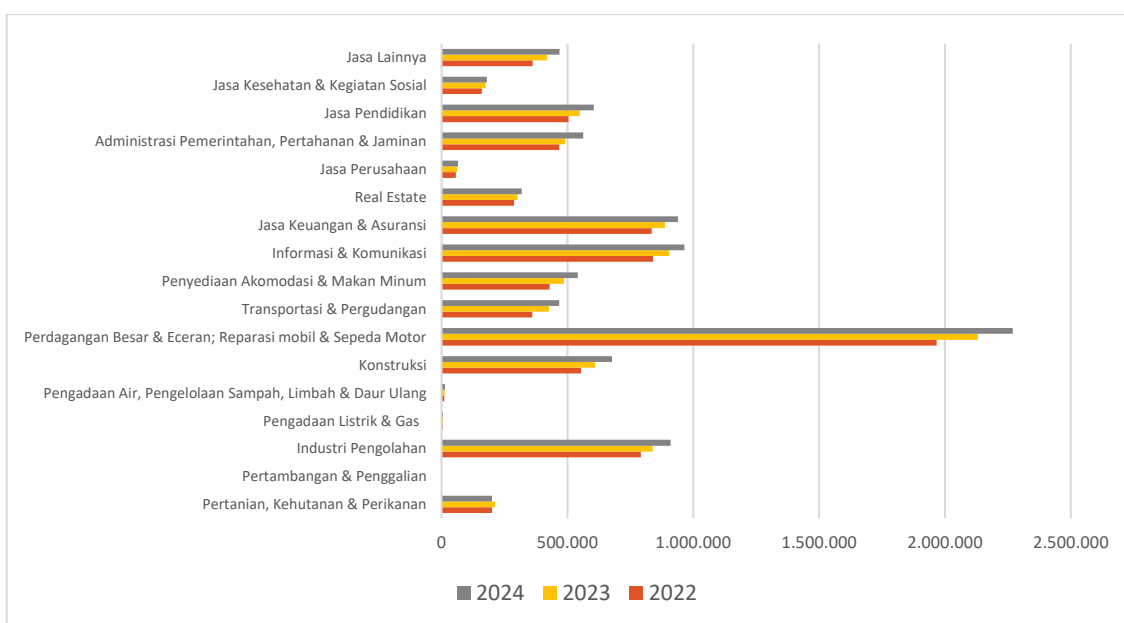
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2022 s.d 2024

Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	200.340	2,56	213.521	2,51	200.403	2,18
2	Pertambangan & Penggalian	320	0,00	330	0,00	260	0,00
3	Industri Pengolahan	791.270	10,1	839.088	9,85	910.350	9,91
4	Pengadaan Listrik & Gas	5.050	0,06	5.419	0,06	5.550	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	11.230	0,14	12.107	0,14	12.840	0,14
6	Konstruksi	554.040	7,07	610.296	7,17	677.860	7,38
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	1.967.250	25,11	2.130.932	25,03	2.268.880	24,69
8	Transportasi & Pergudangan	361.050	4,61	426.831	5,01	467.060	5,08
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	429.550	5,48	486.119	5,71	540.950	5,89
10	Informasi & Komunikasi	840.550	10,73	905.165	10,63	964.710	10,50
11	Jasa Keuangan & Asuransi	835.000	10,73	887.432	10,42	939.090	10,22
12	Real Estate	288.700	3,69	302.376	3,55	318.950	3,47
13	Jasa Perusahaan	56.510	0,72	61.480	0,72	66.110	0,72

No	Sektor / Lapangan Usaha	2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	467.340	5,97	492.126	5,78	562.240	6,12
15	Jasa Pendidikan	504.670	6,44	548.348	6,44	604.210	6,58
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	159.070	2,03	174.754	2,05	179.390	1,96
17	Jasa Lainnya	362.000	4,62	418.825	4,92	468.830	5,10
KOTA BLITAR		7.833.940	100	8.515.157	100	9.187.700	100

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, diolah



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Sepanjang pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, kinerja meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi, mengalami kenaikan target pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 3,5% menjadi 4,6% - 6,2%. Tingkat capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 telah mencapai (masuk dalam range) target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100% berdasarkan perbandingan target tahun 2024 sebesar 4,6% - 6,2% dan realisasi tahun 2024 yaitu 5,33%. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tidak akumulasi atas realisasi per tahun sehingga capaian tersebut sekaligus menggambarkan evaluasi terhadap akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota (sampai dengan tahun 2024). Sedangkan ditinjau dari target sampai dengan tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi mempunyai tingkat capaian sebesar

96,91% dengan perbandingan target sampai dengan tahun 2026 sebesar 5,5% dibandingkan dengan realisasi laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2024 sebesar 5,33%.

Sampai dengan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, dengan tingkat capaian laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2024 sebesar 96,91% laju pertumbuhan ekonomi telah melampaui rencana target yang ditetapkan setiap tahun. Pelampauan capaian tersebut sangat didukung dengan komitmen Pemerintah Kota Blitar dan peran masyarakat dan swasta dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di Kota Blitar yang terlihat dari peningkatan PDRB Kota Blitar pada sebagian besar sektor ekonomi, disaat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang mengalami pelambatan, melalui kegiatan peningkatan layanan penanaman modal, serta peningkatan nilai tambah sektor ekonomi prioritas (perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian).

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang mengalami tren positif sejak Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Blitar akan berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diseluruh sektor/lapangan usaha berbasis lingkungan dan teknologi, utamanya pada sektor ekonomi prioritas, melalui:

1. Penguatan layanan perijinan dan pengawasan perizinan untuk mendorong peningkatan investasi daerah;
2. Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penguatan daya tarik wisata baru dan peningkatan pemasaran berbasis teknologi dan informasi;
3. Peningkatan nilai tambah perdagangan dan industri dengan peningkatan produksi dan pemasaran berbasis teknologi dan informasi;
4. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha; dan
5. Peningkatan produktivitas pertanian dengan model *urban farming* dan pola tanam organik.

Dengan prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian target akhir jangka menengah daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sasaran pencapaian kinerja daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, adalah Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah. Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi.

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator: Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Realisasi s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
11,55%*	12,38%	107,19%	12,21%*	57,49%	470,84%	133,85%**	110,7%***

*target yang telah dinaikan berdasarkan Perubahan RKPD

** target berdasarkan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan asumsi nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 167,2 Milyar dan target tahun 2026 sebesar Rp. 391 Milyar

*** dihitung dari perbandingan target nilai investasi sampai dengan tahun 2026 Rp. 391 Milyar dengan realisasi investasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 432,7 Milyar

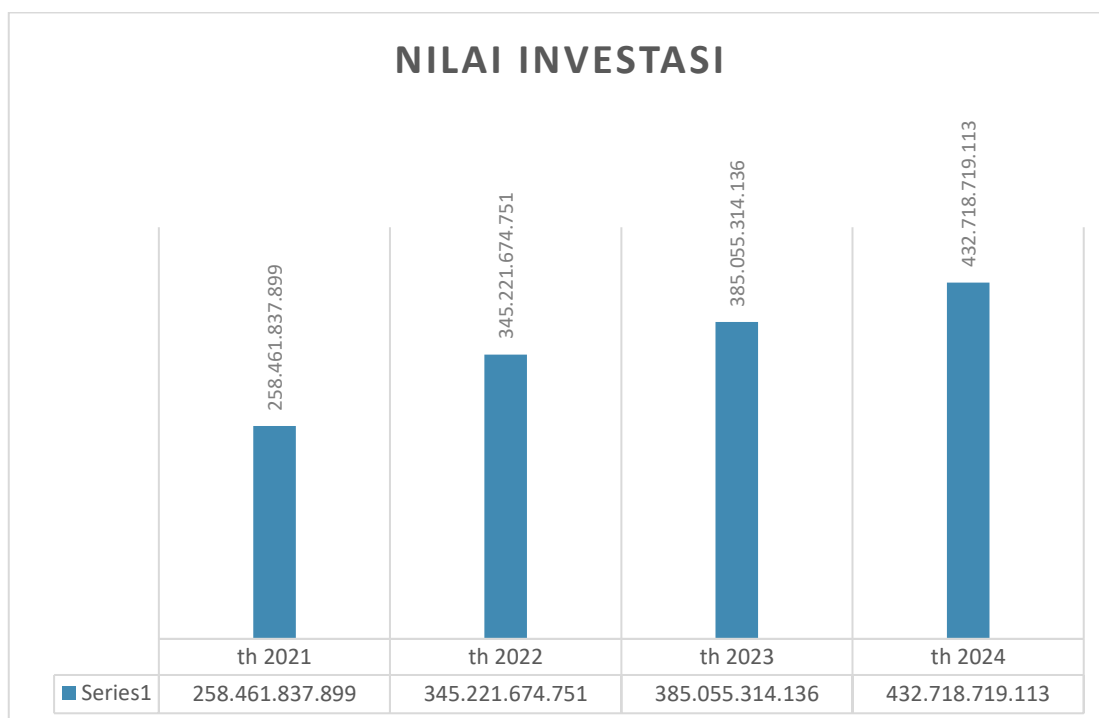
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perhitungan nilai investasi di Kota Blitar berdasarkan data pelaporan penanaman modal pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nilai investasi Kota Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 432,7 Milyar yang tersebar pada 16 bidang usaha dengan jumlah unit usaha sebanyak 3.257 unit. Tiga bidang usaha dengan nilai investasi paling banyak *secara* berurutan terdapat pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi sebesar Rp. 219,1 Milyar atau 50,64 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 1.178 unit; investasi pada bidang usaha Industri Pengolahan dengan nilai investasi sebesar Rp. 121,7 Milyar atau 28,13 persen dengan jumlah unit usaha sebanyak 548 unit; dan investasi pada bidang usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dengan nilai investasi sebesar Rp. 44,2 Milyar atau 10,23 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 43 unit.

Dibandingkan dengan investasi tahun 2023, nilai investasi Kota Blitar tahun 2024 mengalami kenaikan investasi sebesar Rp. 47,6 Milyar atau meningkat 12,38%. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dengan nilai investasi meningkat Rp. 109,8 Milyar atau meningkat sebesar 927 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan investasi secara signifikan pada sektor industri pengolahan ini terjadi karena adanya investasi baru dari PT. H.M. Sampoerna yang bergerak pada bidang usaha industri sigaret kretek tangan yang mulai beroperasi tahun 2024.





Sumber: DPMPTSP, 2025, diolah.

Tabel 2.3.16

Data Realisasi PMDN dan PMA Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2021 – 2024

No	Bidang Usaha	2021		2022		2023		2024	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5	91.868.253.368	12	155,200,000	10	75.500.000	54	32.440.000
2	Pertambangan dan Penggalan	4	0	19	85,500,000	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	18	49.480.398.264	222	4,682,489,711	325	11.846.977.144	548	121.719.534.227
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8	0	6	359,619,239	3	50.000.000	2	100.000.000
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah,	0	0	0	0	2	0	1	0

No	Bidang Usaha	2021		2022		2023		2024	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
	dan Aktivitas Remediasi								
6	Konstruksi	85	2.151.951.918	346	33,072,722,417	411	43.908.678.367	609	20.506.968.981
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	181	101.682.814.719	577	196,033,876,172	842	226.675.715.271	1178	219.149.447.531
8	Pengangkutan dan Pergudangan	23	4.409.272.986	46	768,759,996	46	6.145.190.087	64	731.450.000
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	13	2.465.110.452	37	3,668,089,440	96	5.444.613.000	148	8.436.525.858
10	Informasi dan Komunikasi	17	441.230.338	61	1,649,296,774	55	26.530.796.322	71	3.566.023.126
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0	3	416.000.000
12	Real Estate	0	0	4	7,370,860,000	9	1.052.894.296	9	38.100.000
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	22	561.000.000	77	3,323,862,759	118	1.677.750.000	153	3.784.600.000
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	13	665.625.000	118	168,764,700	170	2.706.700.000	246	5.026.174.226
15	Administrasi Pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Bidang Usaha	2021		2022		2023		2024	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
	an, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib								
16	Pendidikan	2	420.000.000	2	60,000	79	2.641.523.373	50	3.990.378.899
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	12	4.220.180.854	21	93,248,216,609	39	55.700.376.276	43	44.269.826.265
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4	0	1	194,166,934	6	10.000.000	23	48.000.000
19	Aktivitas Jasa Lainnya	7	96.000.000	43	440,190,000	51	588.600.000	55	903.250.000
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	414	258.461.837.899	1592	345.221.674.751	2262	385.055.314.136	3257	432.718.719.113

Sumber: DPMPTSP, 2025

Kinerja meningkatnya nilai investasi daerah dengan indikator persentase peningkatan nilai investasi daerah, telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian

tahun 2024 sebesar 107,19% berdasarkan perbandingan target tahun 2024 sebesar 11,55% dan realisasi tahun 2024 yaitu 12,38%. Sepanjang pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, target persentase peningkatan nilai investasi daerah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 0,42% menjadi 11,55%. Jika ditinjau dari evaluasi terhadap akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota (sampai dengan tahun 2024), persentase peningkatan nilai investasi daerah telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 470,84% berdasarkan perbandingan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 12,21% dan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 57,49%. Sedangkan ditinjau dari target sampai dengan tahun 2026 sebagai target akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, persentase peningkatan nilai investasi telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 110,7% dengan perbandingan target sampai dengan tahun 2026 sebesar 133,85% (dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp. 391 Milyar) dibandingkan dengan realisasi nilai investasi sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 432,7 Milyar.

Pelampauan capaian tersebut sangat didukung dengan kondisi Kota Blitar yang kondusif sehingga menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor baik berupa investasi baru atau penambahan asset usaha, serta tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan berbasis digital yang memudahkan masyarakat, utamanya investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Namun dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal masih ditemui beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Salah satu bentuk pengendalian penanaman modal adalah kegiatan pemantauan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Kewajiban melaporkan LKPM tercantum di Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah Kota Blitar telah secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada perusahaan, namun upaya tersebut masih perlu dioptimalkan dengan memaksimalkan pemberian informasi mengenai waktu pelaporan kepada pelaku usaha melalui berbagai media, seperti media sosial, chat WhatsApp dan email, serta

melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan dan menyediakan klinik LKPM secara online maupun offline;

2. Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara online melalui SIM IJIN, sehingga masih perlu dilakukan pengembangan SIM IJIN sesuai pemetaan kebutuhan layanan perizinan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
3. Belum semua pelaku usaha mempunyai Nomor Ijin Berusaha (NIB) terutama bagi pelaku usaha mikro kecil. Ketentuan kepemilikan NIB bagi pelaku usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB secara rutin bahkan dengan melakukan jemput bola dalam program Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha). Namun untuk meningkatkan kepemilikan NIB perlu terus dilakukan sosialisasi, pendampingan dan menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,18.

N o	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Targ et	Realis asi	% Capai an	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyera pan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/ 9
7.	Meningkatn ya pertumbuha n ekonomi				Program Pengemba ngan Iklim Penanama n Modal	163.831.000, 00	159.353.500, 00	97,27	
	Laju Pertumbuha n Ekonomi	4,6 % – 6,2 %	5,33	115,8 7%	Program Promosi Penanama n Modal	376.624.400, 00	375.138.816, 00	99,61	
					Program Pelayanana n Penanama n Modal	555.473.700, 00	528.831.328, 00	95,20	
					Program Pengendali	406.818.000, 00	320.435.404, 00	78,77	

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	TARGET	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					an Penanaman Modal				
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.530.764.500,00	1.477.565.656,00	96,52	
					Program Pemasaran Pariwisata	927.357.900,00	916.197.401,00	98,80	
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66.738.400,00	61.510.000,00	92,17	
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.410.667.479,15	7.359.476.325,00	99,31	
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	294.261.100,00	288.426.889,00	98,02	
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	161.560.400,00	158.414.400,00	98,05	
					Program Perencanaan	3.078.470.314,00	3.025.195.389,00	98,27	

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					n dan Pembangunan Industri				
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	307.238.378,00	301.152.900,00	98,02	
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.932.342.514,00	1.930.722.099,00	99,92	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	718.574.000,00	706.062.000,00	98,26	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.841.987.020,00	1.800.025.370,00	97,72	
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.345.244,00	223.435.750,00	99,15	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.041.000,00	16.041.000,00	100	

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					Program Perizinan Usaha Pertanian	39.335.250,00	38.357.100,00	97,51	
					Program Penyuluhan Pertanian	1.927.139.800,00	1.916.147.765,00	99,43	
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	293.945.300,00	277.611.200,00	94,44	
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.685.000,00	18.632.800,00	99,72	
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	65.705.300,00	64.499.900,00	98,17	
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	239.800.000,00	237.890.700,00	99,20	
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	391.784.311,00	391.216.000,00	99,85	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	887.776.458,00	801.234.119,00	90,25	
					Program Pengemba	432.185.000,00	407.608.504,00	94,31	

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
					ngan UMKM				
Rata-rata				115,87%	TOTAL	24.310.451.768,15	23.801.182.315,00	97,9%	1,18

KINERJA UTAMA 8

Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Daerah

Indikator Kinerja:
Indeks Infrastruktur Daerah

Target s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Realisasi s/d 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
62,055	63,41	102,18%	58,67	108,19%

Kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur daerah di Kota Blitar diukur dengan Indeks Infrastruktur Daerah yang merupakan ultimate outcomes dari kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang diukur dengan indeks infrastruktur pekerjaan umum, dan meningkatnya kualitas perhubungan yang diukur dengan *Level Of Service (LOS)*. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran kinerja infrastruktur pekerjaan umum yang meliputi infrastruktur bina marga (jaringan jalan, jembatan dan trotoar), infrastruktur sumber daya air (jaringan irigasi dan sumber mata air), dan infrastruktur cipta karya (sarana sanitasi, air minum, gedung pemerintah dan jaringan drainase). Indeks infrastruktur pekerjaan umum Kota Blitar tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan tren peningkatan dengan realisasi 2022 sebesar 87,08 meningkat 3,38 pada 2024 menjadi 90,46. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, indeks infrastruktur bina marga dan indeks infrastruktur sumber daya air mengalami peningkatan kinerja pada seluruh sarana pada kedua bidang tersebut, namun untuk indeks infrastruktur cipta karya, realisasi fluktuatif. Level of

Service (LOS) merupakan ukuran kinerja jalan atau simpang jalan yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas. LOS semakin kecil menunjukkan kinerja semakin baik, dengan level tingkat pelayanan F ($LOS > 1$) ke tingkat pelayanan A ($LOS 0-0,19$). LOS Kota Blitar tahun 2022-2024 terlihat fluktuatif namun menunjukkan kinerja semakin baik dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,283 (tingkat pelayanan B yang berarti arus lalu lintas stabil, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk beralih gerak) meningkat 0,1948 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,4778 (tingkat pelayanan C yang berarti arus lalu lintas stabil namun pengemudi dibatasi dalam memiliki kecepatan). Perhitungan indeks infrastruktur daerah diperoleh dari 70% indeks infrastruktur pekerjaan umum ditambah dengan 30% LOS. Dalam hasil perhitungan tersebut, diketahui indeks infrastruktur daerah Kota Blitar tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan kinerja dengan realisasi tahun 2024 sebesar 63,41 naik 2,31 poin dibandingkan tahun 2022, yang berarti bahwa kenaikan indeks infrastruktur daerah Kota Blitar diperoleh atas kontribusi dari kenaikan indeks infrastruktur pekerjaan umum dan kenaikan LOS.

Tabel 2.3.16

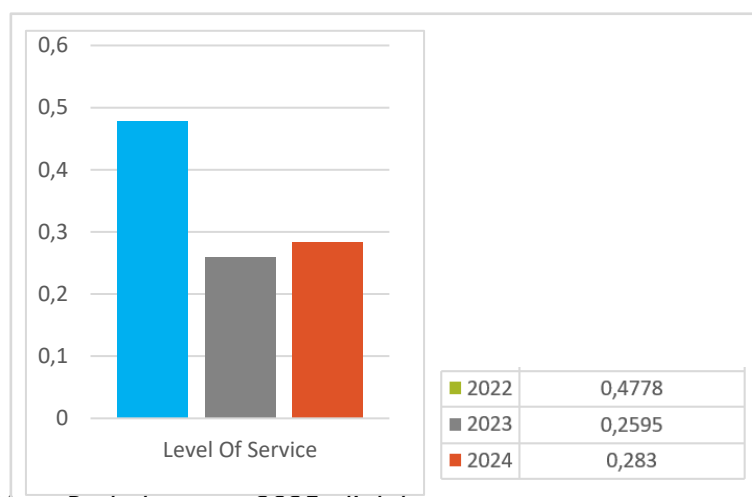
Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja		2022	2023	2024
1. Indeks Infrastruktur Daerah		61,10	61,69	63,41
1.1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		87,08	88,02	90,46
1.1.1. Indeks Infrastruktur Bina Marga		77,10	79,05	82,76
	1.1.1.1. Persentase Jalan dalam Kondisi mantap dan berkeselamatan	73,66	78,42	86,23
	1.1.1.2. Persentase Jembatan dalam Kondisi baik	95,71	96,43	97,86
	1.1.1.3. Persentase Trotoar dalam kondisi baik	61,92	62,30	64,18
1.1.2. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air		97,00	98,42	98,61
	1.1.2.1. Persentase Irigasi dalam kondisi baik	98,00	99,51	99,89
	1.1.2.2. Persentase Sumber mata air dalam Kondisi baik	96,00	97,33	97,33
1.1.3. Indeks Infrastruktur Cipta Karya		97,31	91,28	96,37
	1.1.3.1. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98,27	83,00	99,62

Indikator Kinerja		2022	2023	2024
	1.1.3.2. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,38	88,90	100
	1.1.3.3. Persentase gedung pemerintah sesuai standar	94,60	94,70	96,91
	1.1.3.4. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	98,00	98,50	88,96
1.2. Level Of Service		C v/c rasio 0,4778	B v/c rasio 0,2595	B v/c rasio 0,283

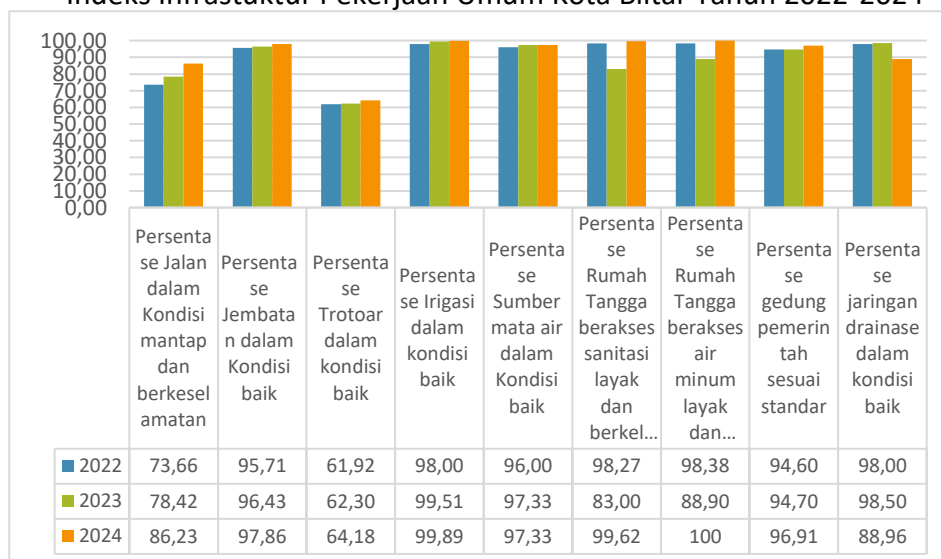
Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, 2025, diolah

Level of Service Kota Blitar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas Perhubungan, 2025, diolah

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kota Blitar Tahun 2022-2024



Sumber: Dinas PUPR, 2025, diolah

Kinerja meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dengan indikator indeks infrastruktur daerah, telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian tahun 2024 sebesar 102,18% berdasarkan perbandingan target tahun 2024 sebesar 62,055 dan realisasi tahun 2024 yaitu 63,41. Mengingat indeks infrastruktur daerah tidak akumulasi atas realisasi per tahun sehingga capaian tersebut sekaligus menggambarkan evaluasi terhadap akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota (sampai dengan tahun 2024). Sepanjang pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, target indeks infrastruktur daerah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 58,47 menjadi 62,055. Sedangkan ditinjau dari target sampai dengan tahun 2026 sebagai target akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, indeks infrastruktur daerah telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 108,18% dengan perbandingan target sampai dengan tahun 2026 sebesar 58,67 dibandingkan dengan realisasi indeks infrastruktur daerah tahun 2024 sebesar 63,41.

Pelampauan capaian tersebut sangat didukung dengan komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Blitar terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan pelayanan perhubungan, tertibnya perijinan dan administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kemudahan pelayanan yang didukung penerapan teknologi aplikasi, koordinasi aktif antar pelaku pembangunan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Namun dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perhubungan ini masih ditemui beberapa permasalahan yaitu:

1. Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga perlu melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan
2. Terjadinya kerusakan di beberapa ruas jalan karena beban overload kendaraan melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga perlu dilakukan pemeliharaan jalan secara berkala dan mengkoordinasikan penertiban lalu lintas kendaraan sesuai kelas jalannya

3. Perlunya penambahan kapasitas Instalansi Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPLT) untuk menuju sanitasi aman sehingga sebagai langkah awal perlu dilakukan penyusunan dokumen kajian perluasan IPLT
4. Belum jelasnya pembagian kewenangan penanganan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) oleh masyarakat dan PDAM sehingga perlu merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM
5. Beberapa bangunan gedung tidak memadai untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta secara bertahap melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung sesuai hasil monev
6. Terjadinya kemacetan utamanya di wisata religi Masjid Arrohman yang dapat menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya tempat parkir khusus bagi pengunjung, sehingga kendaraan pengunjung maupun jamaah masjid parkir pada badan jalan. Hal tersebut menyebabkan naiknya V/C rasio karena banyaknya kendaraan tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai kondisi eksisting dan penertiban arus kendaraan secara berkala
7. Belum tertibnya penataan parkir di beberapa ruas jalan dengan masih terlihatnya pengguna jalan yang menggunakan *parkir on street* di badan jalan sehingga perlu sosialisasi penataan dan penertiban parkir secara berkala
8. Kurangnya fasilitas perambuan dan marka baik berupa di rambu peringatan, rambu larangan, rambu petunjuk, *warning light*, marka zebra cross dan marka parkir di beberapa ruas jalan sehingga perlu penyediaan fasilitas perambuan dan marka sesuai kebutuhan.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,12.

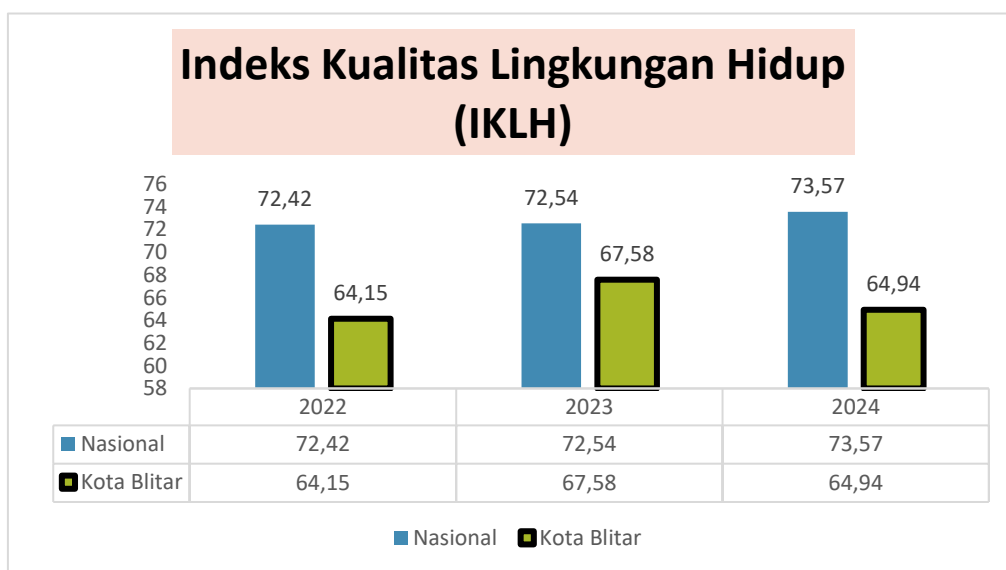
No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
8.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah								
	Indeks Infrastruktur Daerah	62,055	63,41	102,18%	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	11.999.063.457,00	10.993.006.398,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	152.400.000,00	121.382.000,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.650.218.800,00	3.376.097.860,00		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.961.759.000,00	4.629.432.000,00		
					Program Penataan Bangunan Gedung	9.748.964.300,00	9.534.982.900,00		
					Program Penyelenggaraan Jalan	17.967.190.692,18	16.730.810.876,00		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	807.224.600,00	699.882.540,00		
					Program Penyelenggaraan Penataan	1.472.768.000,00	1.160.093.318,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
					Ruang				
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.647.500.279,36	16.572.291.680,00		
					Program Kawasan Permukiman	2.009.760.179,00	1.977.179.023,00		
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.064.942.000,00	3.048.376.885,00		
					Program Pengembangan Perumahan	991.895.479,00	930.165.943,00		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.406.889.602,00	1.405.197.636,00		
Rata-rata				102,18%	TOTAL	77.880.576.388,54	71.178.899.059,00	91,39%	1,12

KINERJA UTAMA 9
Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup

Indikator Kinerja:
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
71,20	64,94	91,21%	73,54	88,31%



Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2024



Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2022 - 2024

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2024

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Berturut-turut nilainya 72,42; 72,54 dan tahun ini sebesar 73,57 poin. IKLH tahun 2024 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,76 poin; Indeks Kualitas Udara: 90,17; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 62,25; dan Indeks Kualitas Air Laut: 81,61. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Indeks Kualitas Air naik dari tahun 2023 sebesar 54,59 poin menjadi 54,76 poin pada 2024. Indeks Kualitas Udara tahun 2023 dari 88,67 poin naik menjadi 90,17 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 61,79 menjadi 62,25. Sedangkan Indeks Kualitas Air Laut naik dari 78,84 menjadi 81,61.

Berdasarkan data diatas, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 64,94 dengan capaian sebesar 91,21% terhadap target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan sebesar 71,20. **Belum tercapainya target IKLH ini dipengaruhi terutama oleh masih rendahnya Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan**, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Kab/Kota	Luas Wilayah (HA)	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1	2022	Kota Blitar	32.58	85.9	59.73	23.96	62.5	SEDANG
2	2023	Kota Blitar	32.58	85.83	67.78	33.51	67.58	SEDANG
3	2024	Kota Blitar	32.58	89.79	56.11	34.13	64.94	SEDANG

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2024 termasuk ke dalam kategori **SEDANG**. Peringkat IKLH Kota Blitar secara nasional yaitu peringkat ke 374 dari 514 kabupaten/kota dan peringkat 19 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan yang berperan besar dalam mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan

rendahnya nilai Indeks Tutupan Lahan di tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan Indeks Kualitas Lahan dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Namun disisi lain nilai **Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan program reboisasi dan penanaman pohon skala klaster.** Walaupun mengalami kenaikan namun masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR dan *car free day* tidak diselenggarakan secara rutin.

Berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dilakukan demi menunjang ketercapaian nilai IKLH sesuai dengan target yang ditetapkan, diantaranya melalui:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup melalui talkshow di media penyiaran atau media sosial
2. Melakukan sosialisasi pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti pemasangan PJU panel surya
3. Pengelolaan sampah dengan baik, dengan membentuk bank sampah dimasing-masing kelurahan serta kader sampah
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan limbah domestik
5. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin
6. Pengadaan alat uji emisi transportasi
7. Mendorong pelaksanaan *car free day* secara rutin sesuai yang diamanatkan dalam Perwali Nomor 37 Tahun 2012
8. Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar
- 9.

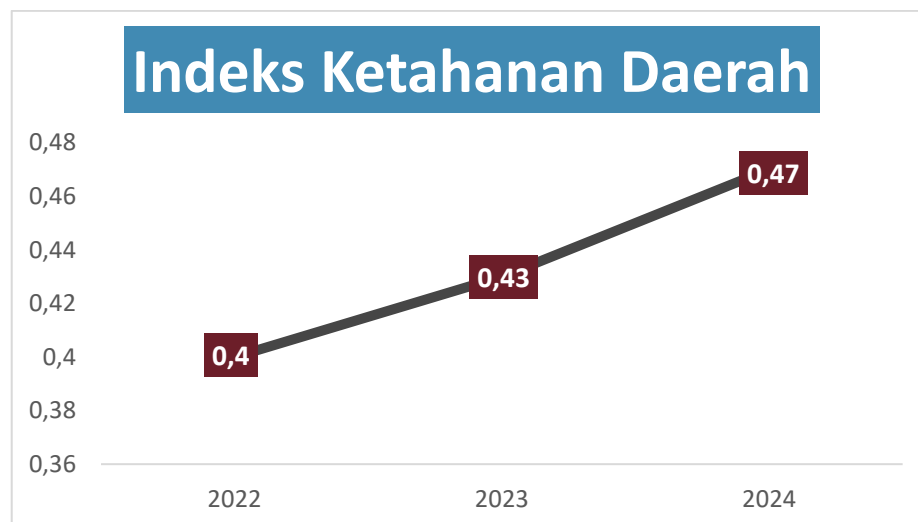
Jika dikaitkan dengan ketahanan daerah, tercapainya IKLH sangat tergantung dari kemampuan suatu daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan terpadu. Dengan tidak adanya banjir, longsor dan kekeringan air itu sangat terkait dengan terpenuhinya tutupan lahan di suatu wilayah.

KINERJA SASARAN
Meningkatnya Kapasitas
Ketangguhan terhadap Bencana

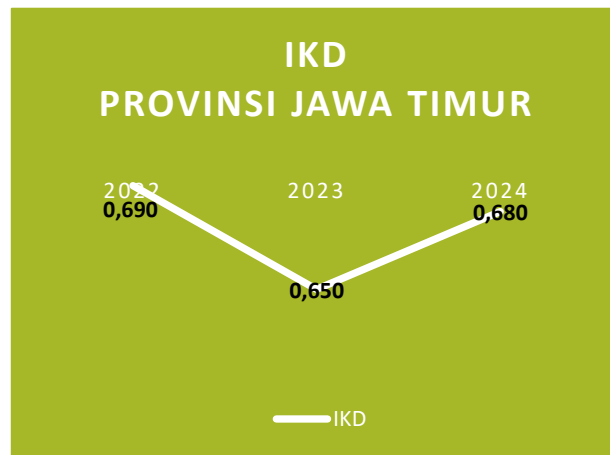
Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Daerah
(IKD)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,60	0,47	78,33%	0,65	72,31%

**Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana Kota Blitar
Tahun 2024**



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2024

Tabel 2.3.18
HASIL PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-
JAWA TIMUR TAHUN 2018 - 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	0,70	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,50	0,54	0,53	0,55	0,56
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,60	0,63	0,71
4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65	0,66
5	BLITAR	0,40	0,43	0,52	0,56	0,58	0,60	0,55
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,50	0,54	0,59	0,63	0,67
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,70	0,76	0,75	0,75	0,78	0,78
9	JEMBER	0,46	0,40	0,71	0,55	0,56	0,55	0,65
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,60	0,62
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74
13	PROBOLINGGO	0,71	0,30	0,55	0,60	0,60	0,59	0,61
14	PASURUAN	0,32	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79	0,80
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,70	0,76	0,79
17	JOMBANG	0,32	0,40	0,35	0,42	0,47	0,41	0,51
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64	0,63
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35	0,51
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66	0,67
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,50	0,62
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59	0,60
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51	0,53
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,70	0,65	0,64
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65	0,71
26	BANGKALAN	0,43	0,40	0,51	0,56	0,58	0,58	0,66
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62	0,63
28	PAMEKASAN	0,32	0,20	0,30	0,63	0,79	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63	0,68
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77	0,50
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,40	0,43	0,47
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61	0,63
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,50	0,59	0,55	0,38	0,41	0,43
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48	0,52
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42	0,37
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46	0,51
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56	0,63
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64	0,68
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61	0,63

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2024

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk Kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas OPD/Instansi/Lembaga Kabupaten Kota (C1) dan kapasitas Provinsi OPD/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2).

$$\text{Kapasitas Jawa Timur} = (60\% \times C1) + (40\% \times C2)$$

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-beda, meliputi:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas:

IKD < 0,4	: Rendah
0,4 < IKD < 0,8	: Sedang
IKD > 0,8	: Tinggi

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot: 0,96%)
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot: 0,77%)
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot: 0,40%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot: 0,55%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot: 0,55%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot: 0,35%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot: 0,26%).

sehingga capaian Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah Kota Blitar tahun 2024: **0,47**. Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Sedangkan untuk hasil pengukuran terhadap IKD Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 – 2024 mengalami fluktuasi yakni 0,69 pada tahun 2022, turun 0,04 poin menjadi 0,65 pada tahun 2023; dan kembali naik lagi 0,03 poin menjadi 0,68 pada tahun 2024, dimana capaian ini diatas capaian Kota Blitar sebesar 0,40 pada tahun 2022; 0,43 pada tahun 2023 dan 0,47 pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian Kota Mojokerto yang sama-sama kategori Kota Kecil dengan karakter, luas wilayah dan jumlah penduduk yang hampir sama IKD Kota Blitar kurun waktu 2023 – 2024 berada diatas capaian IKD Kota Mojokerto, dan berada dibawah capaian Kota Mojokerto pada tahun 2022.

Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target, sehingga perlu adanya upaya yang lebih untuk meningkatkan IKD minimal setara dengan capaian Kabupaten/Kota di Jawa Timur yangmana rata-rata capaiannya pada tahun 2024 adalah sebesar 0,63. Adapun permasalahan dan tindak lanjut yang sekaligus menjadi faktor pendorong pencapaian Indeks Ketahanan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.19
Permasalahan dan Tindak Lanjut atas Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Permasalahan	Tindak Lanjut	Faktor Pendukung
1. Belum adanya kebijakan/regulasi/peratu	1. Pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan pembahasan Perda	1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan

Permasalahan	Tindak Lanjut	Faktor Pendukung
2. ran daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana 3. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD 2. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2025 3. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator	penanggulangan bencana 2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD 3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / dokumen data IKD

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20	64,94	91,21 %	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	477.668.350	475.343.299		

N o	Sasaran RPJMD/ Indikator	Tar get	Real isasi	% Capa ian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyer apan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5 /9
					Lingkunga n hidup				
					Program Penangana n Pengadua n Lingkunga n Hidup	4.240.000	4.180.000		
					Program Pembinaa n dan Pengawas an terhadap Izin Lingkunga n dan Izin Perlindung an dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup (PPLH)	64.724.80 0	64.087.50 0		
					Program Perencana an Lingkunga n Hidup	4.240.000	4.180.000		
					Program Pengelolaa n Keanekara ga man Hayati (KEHATI)	6.699.443. 619	6.082.037. 357		
					Program Pengelolaa n	11.052.180 .095	11.007.651 .672		

N o	Sasaran RPJMD/ Indikator	Tar get	Real isasi	% Capa ian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyer apan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5 /9
					Persampa han				
					Program Peningkata n Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluha n Lingkunga n Hidup untuk Masyaraka t	453.595.9 00	444.009.5 00		
					Program Pengharga an Lingkunga n Hidup untuk Masyaraka t	416.009.8 00	416.009.8 00		
					Program Pengendali an Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14.444.80 0	13.208.00 0		
					Program Penanggul angan Bencana	980.761.8 24	860.799.5 59		

N o	Sasaran RPJMD/ Indikator	Tar get	Real isasi	% Capaia n	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyer apan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5 /9
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	596.091.460	564.816.945		
					TOTAL	20.763.400.648	19.936.323.632	96,02%	0,95

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan capaian keuangan program-program yang mendukung dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,95 atau masuk kategori tidak efisien.

KINERJA UTAMA 10

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

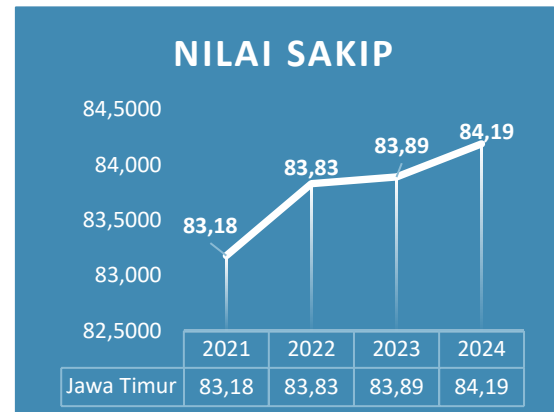
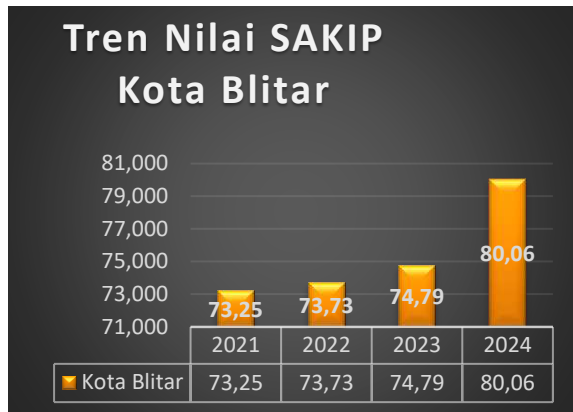
1.

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target 2024	: BB (74,795)
Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	: A (80,06)
Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	: 107,04%

RPJMD 2026	
Target 72,35**	Capaian 110,66%

****) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024**



Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator Kementerian PAN dan RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2024 tercapai 107,04% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 74,795 terealisasi sebesar 80,06. Hal ini sangat didukung adanya:

DAYA DUKUNG DARI KOMPONEN PENILAIAN SAKIP

1) Komponen Perencanaan

- Pemerintah Kota Blitar telah melakukan pendampingan dan perbaikan penjenjangan kinerja di level Kota dan level Perangkat Daerah
- Pemerintah Kota Blitar telah mereviu dokumen perencanaan yang dimiliki mulai dari Renstra, IKU, maupun PK seluruh jenjang jabatan dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang telah diperbaiki sebelumnya
- Pemerintah Kota Blitar telah menyusun Rencana Hasil Kerja (RHK) setiap individu dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang sudah diperbaiki

2) Komponen Pengukuran

Pemerintah Kota Blitar telah mengintegrasikan sistem perencanaan kinerja Perangkat Daerah, pengukuran kinerja, evaluasi internal yang sudah dimiliki sebelumnya

3) Komponen Pelaporan

Pemerintah Kota Blitar telah melakukan desk penyusunan laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah guna menyamakan persepsi dan kualitas informasi yang akan dituangkan dalam laporan kinerja

4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Seluruh Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP internal dan telah menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai kalender kegiatan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP internal tersebut

DAYA DUKUNG SECARA UMUM

- 1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas
- 2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal
- 3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- 4) Seluruh indikator pendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat dijadikan satu kedalam satu aplikasi yaitu SAKIP dengan alamat www.sakip.blitarkota.go.id sehingga keseluruhan indikator AKIP bisa dipantau secara *realtime*

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih jauh dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas implementasinya. Berdasarkan LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka SAKIP Kota Blitar di tahun 2024 memperoleh predikat A dengan skor 80,06 atau meningkat 5,27 dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian ini merupakan wujud

konsistensi komitmen Pimpinan tertinggi sampai level terbawah dalam mengimplementasikan SAKIP lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil, setelah 7 (tujuh) tahun berturut-turut berada pada kategori “BB”.

Berdasarkan LHE ini maka terdapat 9 (sembilan) rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB yang perlu ditindaklanjuti dan segera dilakukan perbaikan oleh tim pendamping SAKIP tingkat kota maupun perangkat daerah. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut:

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kota Blitar** mendapatkan nilai sebesar **80,06** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,60	26,98
2. Pengukuran Kinerja	30	21,67	23,07
3. Pelaporan Kinerja	15	11,02	12,16
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	17,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	74,79	80,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2024 dari KemenPAN RB

Adapun penjelasan dan hasil evaluasi keempat komponen pendukung SAKIP untuk Pemerintah Kota Blitar dapat kami jelaskan sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA

- Pemerintah Kota Blitar telah berupaya untuk melakukan reviu pada target kinerja pada perencanaan tahun 2024, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan beberapa target kinerja pada perencanaan tahun berjalan lebih rendah dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya

- b) Penjabaran kinerja yang telah dilakukan belum menginformasikan secara lengkap potensi CSF (*Critical Success Factor*) terutama kinerja dari level taktikal ke level operasional sehingga hasilnya belum dapat digunakan sepenuhnya untuk penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kota dan PD dan berdampak pada pemilihan aktivitas dalam rencana hasil kerja belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja di atasnya.

B. PENGUKURAN KINERJA

- a) Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memiliki Definisi Operasional yang spesifik. Bukan dari definisi saja, tapi juga dilihat dari formulasi dan sumber data, sehingga indikator kinerja yang ada belum sepenuhnya menjelaskan yang jelas dalam meningkatkan keandalan data dan alasan penggunaan indikator kinerja tersebut
- b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja tiap triwulan masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme verifikasi data yang disampaikan seluruh PD kepada Bappeda melalui aplikasi
- c) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian rencana aksi PD serta penyesuaian RHK (Rencana Hasil Kerja) setiap pegawai

C. PELAPORAN KINERJA

- C. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja sebagian PD belum secara spesifik menyampaikan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan, terutama kinerja yang belum tercapai sesuai target
- D. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a) Temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator internal dalam laporan hasil evaluasi AKIP belum menginformasikan secara spesifik permasalahan maupun rekomendasi yang menjadi akar permasalahan dari implementasi SAKIP setiap PD, terutama yang nilainya dibawah rata-rata keseluruhan hasil evaluasi internal
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

Terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan melalui rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 2.3.20

Rencana Aksi Perbaikan SAKIP Kota Blitar

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
1	Bappeda	1) Terus melakukan perbaikan terhadap penetapan target dokumen perencanaan maupun dalam Renaksi PD dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya 2) Mereviu Pokin berdasarkan CSF (<i>Critical Success Factor</i>) terutama kinerja dari level taktikal ke level operasional sehingga hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kota dan PD 3) Mereviu dan menyempurnakan definisi operasional seluruh indikator kinerja agar menguatkan keandalan data 4) Melaksanakan monev dengan menambah fitur verifikasi data atas hasil realisasi kinerja seluruh PD 5) Mendorong pemanfaatan hasil monev untuk menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek
2	BKPSDM	Mendorong pemanfaatan hasil monev untuk penyesuaian rencana aksi Perangkat Daerah serta penyesuaian RHK (Rencana Hasil Kerja) setiap pegawai
4	Diskominfotik	1) Mendorong kepada PD pengampu untuk memanfaatkan aplikasi SAKIP dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal 2) Mendorong kepada PD pengampu untuk memanfaatkan aplikasi blitar sejahtera dalam

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		perencanaan, pengukuran dan pelaporan penanganan kemiskinan di Kota Blitar
5	Bagian Organisasi	1) Meningkatkan kualitas informasi dalam laporan kinerja PD dengan menyajikan informasi yang spesifik hasil analisis faktor pendorong atau penghambat terutama kinerja yang belum tercapai sesuai target 2) Berkoordinasi dengan Bappeda terkait pemanfaatan informasi LPPD maupun laporan kinerja seluruh PD sebagai dasar perbaikan strategi perencanaan kinerja kedepannya
6	Inspektorat Daerah	1) Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui penjabaran spesifik masalah di tiap PD dan rekomendasi yang mampu menyelesaikan temuan terutama pada komponen AKIP yang masih rendah nilainya 2) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar mampu meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja terutama kinerja yang belum tercapai dalam dokumen perencanaan
7	Seluruh Perangkat Daerah	1. Melakukan review dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2. Mereviu Pokin berdasarkan CSF (Critical Success Factor) terutama kinerja dari level taktikal ke level operasional sehingga hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah 3. Mereviu dan menyempurnakan definisi operasional seluruh indikator kinerja agar menguatkan keandalan data 4. Memanfaatkan hasil monev untuk menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, penyesuaian Renaksi PD serta penyesuaian RHK (Rencana Hasil Kerja) setiap pegawai 5. Memanfaatkan aplikasi SAKIP dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal 6. Memanfaatkan aplikasi blitar sejahtera dalam perencanaan, pengukuran dan pelaporan penanganan kemiskinan di Kota Blitar (bagi Perangkat Daerah Pengampu) 7. Meningkatkan kualitas informasi dalam laporan kinerja PD dengan menyajikan informasi yang spesifik hasil analisis faktor pendorong atau penghambat terutama kinerja yang belum tercapai sesuai target 8. Berkoordinasi dengan Bappeda terkait pemanfaatan informasi laporan kinerja PD sebagai dasar perbaikan strategi perencanaan kinerja kedepannya 9. Melaksanakan rekomendasi SAKIP 2024 dari hasil evaluasi Inspektorat guna perbaikan SAKIP 2025

2.

Indikator Kinerja: Status EKPPD

**Target 2024 : Sangat Tinggi
(3,3534)**

**Realisasi 2024 : Tinggi
(akhir masa jabatan) (3,4243)***

Capaian 2024 : 102,11%

RPJMD 2026

**Target:
Sangat Tinggi
(3,3538)****

**Capaian
102,10%**

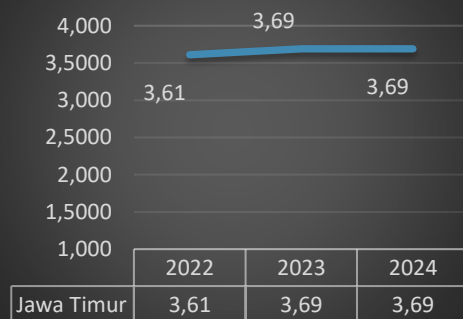
****)** kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan

Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2024

Tren Status EKPPD Kota Blitar



STATUS EKPPD



Pencapaian Status EKPPD Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Kemendagri dan/atau melalui Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur pada tahun yang ditentukan, dimana pada tahun 2022 terdapat perubahan kebijakan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya terkait penetapan “Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yakni dengan nilai yang sama akan turun statusnya karena adanya kenaikan range dari kebijakan

sebelumnya. Sehingga capaian Kota Blitar tahun 2022 dari target 3,3531 (kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009) terealisasi sebesar 3,06 (kategori Sedang berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020). Sehingga realisasi 2022 ini tidak bisa disandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Jika disandingkan dengan capaian Kota Blitar Tahun 2024 (yang sementara masih menggunakan data capaian tahun 2023, karena belum keluar dari Kemendagri) yang berasal dari target 3,3534 (kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009) terealisasi sebesar 3,4243 (kategori Tinggi berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020). Capaian angka ini terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Secara umum jika ditinjau dari sisi internal Pemda, maka sejauh ini keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung adanya:

- 1) Sebagian Indikator telah terakomodir dalam dokumen perencanaan
- 2) Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah disesuaikan dengan Indikator
- 3) Kolaborasi antar Perangkat Daerah pelaksana urusan untuk mendukung salah satu indikator, meskipun belum keseluruhan
- 4) Dilakukan desk data pencapaian kinerja Perangkat Daerah di awal tahun 2025 bersama dengan bidang yang menangani

Sedangkan faktor penghambat dalam proses penyajian pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diminimalisir yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap data dukung IKK LPPD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sehingga belum menjadikan prioritas pencapaian IKK oleh Perangkat Daerah
- 2) Kurangnya kolaborasi antar sektor dikarenakan adanya data dukung yang dilaksanakan di Perangkat Daerah lain
- 3) Waktu yang sangat terbatas, mengingat: awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Seperti: Penyusunan Perencanaan 2026 (Renja 2026, Renstra 2025-2029), Audit Keuangan dan Pertanggungjawaban BPK, LKj IP, LKD, LKPJ, LPPD.

- 4) Publikasi Daerah Dalam Angka (Biasanya rilis akhir Februari) sehingga capaian kinerja pemerintah daerah yang bersifat makro sebagian belum bisa dilaporkan *real time*
- 5) Masih lemahnya monev berjenjang di Perangkat Daerah atas penyajian data capaian kinerja yang bersifat strategis

Disamping faktor pendukung keberhasilan internal Pemda serta adanya kendala dalam penyusunan LPPD, maka dari sisi evaluator Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri mengungkapkan uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap LPPD Kota Blitar, antara lain:

- 1) Terdapat data dukung IKK yang belum rinci
- 2) Terdapat data dukung IKK tidak valid (tidak ada pengesahan dari Sekretaris Daerah)
- 3) Terdapat data dukung IKK yang tidak jelas, kurang lengkap dan formulasi perhitungan kurang tepat
- 4) Capaian Kinerja IKK urusan non pelayanan dasar belum optimal
- 5) Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) IKK yang mengalami perubahan elemen data pada KKE klarifikasi

Sehingga guna mempertahankan capaian Status EKPPD Pemerintah Kota Blitar, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui SI LPPD berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi
- 2) Perbaikan data kinerja dan data dukung yang dihasilkan selama proses evaluasi EPPD harus dijadikan dasar perbaikan di SI LPPD
- 3) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan
- 4) Membangun sistem pengukuran kinerja secara periodik (triwulan/semester) serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung
- 5) Mengintegrasikan IKK seluruh Perangkat Daerah pada waktu penyusunan dokumen pohon kinerja yangmana sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah								
	- Nilai SAKIP	74,795 (BB)	80,06 (A)	107,04 %	Program penunjang urusan pemerintahan an daerah kabupaten/ kota	557.515.538.525,46	531.665.126.233,46		
					Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	1.601.048.200,00	1.374.054.080,00		
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	757.298.800,00	728.629.300,00		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	728.329.800,00	673.135.728,00		

No	Kinerja Utama/Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	724.150.700,00	709.889.649,00		
	- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3534)	Tinggi (3,4243)	102,11 %	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	12.397.506.054,00	12.219.158.781,00		
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	21.302.000,00	21.197.500,00		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	1.629.714.020,00	1.453.738.752,00		
Rata-rata capaian				104,58 %	TOTAL	575.374.888.099,46	548.844.930.023,46	95,39%	1,10

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,10 atau masuk kategori efisien.

KINERJA UTAMA 11

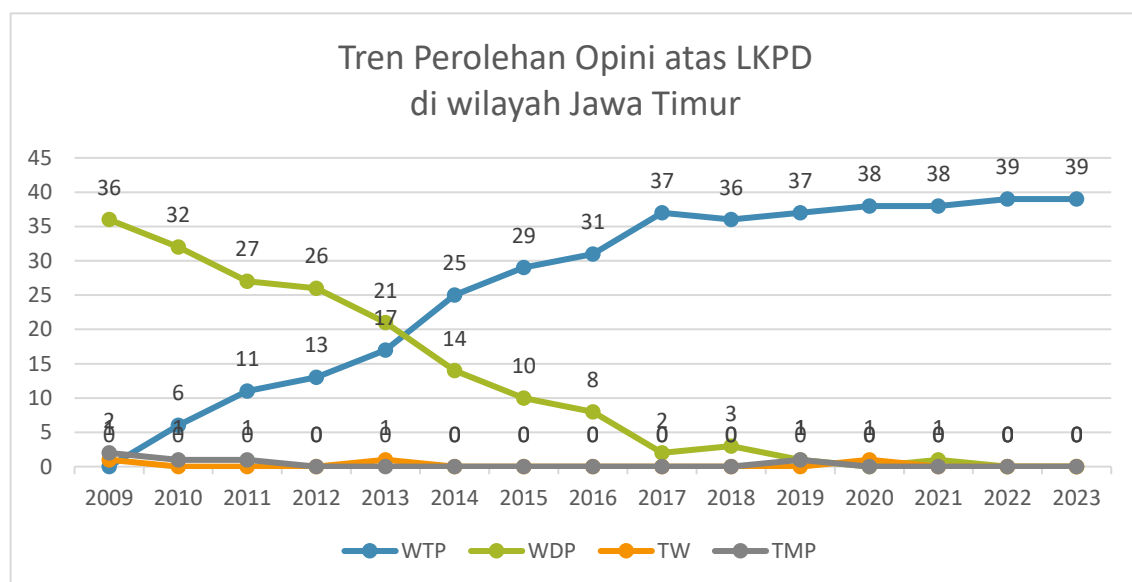
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
WTP	WTP	100%	WTP	100%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengelolaan keuangan daerah	2,070,524,580.00	1,989,626,411.00	
Program penyelenggaraan pengawasan	2,027,234,200.00	1,945,832,569.00	
Program pengelolaan pendapatan daerah	2,571,158,284.00	2,432,465,855.00	
Program pengelolaan barang milik daerah	1,835,575,498.00	1,734,310,760.00	
Jumlah	8,504,492,562.00	8,102,235,595.00	95.27%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100%	95,27%	1,05	Efisien



Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sumber: BPK RI, 2023

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Namun tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen. Diantaranya adalah; *pertama*, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh *auditor* atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti pendukung yang akurat dan akuntabel. *Kedua*, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI. *Ketiga*, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 14 kali berturut-turut. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antar instansi pemerintah baik Pemerintah Daerah, Propinsi, Kementrian, Aparat Penegak Hukum, BPKP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya,

membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar. Adanya konsistensi kebijakan perencanaan pengawasan berbasis risiko, SDM yang berkualitas, terlatih dan ketepatan penempatan SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan pemantauan tindak lanjutnya dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

Sedangkan Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Atas LKPD Tahun 2023, BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur telah memberikan Opini WTP pada seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Blitar 14 kali berturut-turut adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*.
2. Adanya sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian intern.
3. Rekonsiliasi realisasi anggaran, laporan persediaan dan neraca barang dilakukan secara berkala
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester II tahun 2023 sebesar 94.54%.
5. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan

bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi SIPD pada pengelolaan keuangan masih belum stabil.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam implementasinya, SIPD masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, di antaranya:

- c. Sering terjadi gangguan teknis seperti server lambat, sistem down, atau gagal akses, terutama saat beban penggunaan tinggi (misalnya saat input APBD). Hal ini mengakibatkan informasi keuangan tidak dapat diperoleh secara cepat dan tepat.
- d. Beberapa fitur dalam SIPD masih kurang fleksibel dan tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah.
- e. Kesulitan dalam penyusunan dan revisi anggaran, terutama jika ada perubahan regulasi atau kebijakan di tengah tahun berjalan.
- f. Kurangnya fitur analisis dan pelaporan yang mendalam, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dengan cepat

2. Pengelolaan pendapatan dan aset belum sepenuhnya optimal

3. Adanya temuan berulang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern.

4. Waktu penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP memerlukan waktu yang relatif lebih lama.

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan didominasi oleh penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar, maka *action plan*nya sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sistem informasi yang sudah ada (sebelum kewajiban implementasi SIPD) agar pemerintah daerah dapat lebih cepat dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan menyusun laporan keuangan.
2. Penguatan koordinasi dengan Kemendagri untuk meningkatkan fleksibilitas SIPD sesuai kebutuhan daerah, termasuk penyesuaian fitur yang lebih *user-friendly*.
3. Memperkuat SOP pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan pendapatan, pencatatan dan penyelesaian piutang secara berkala.
4. Melakukan optimalisasi pendapatan pajak melalui pemeriksaan pajak daerah.
5. Melaksanakan identifikasi secara menyeluruh atas aset yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar namun belum tercatat di daftar asset terutama atas asset yang disewakan.
6. Melaksanakan rekonsiliasi antara PPKD dengan SKPD secara berkala terkait pertanggungjawaban fungsional.
7. Mendorong SKPD untuk mengimplementasikan budaya risiko dalam setiap aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi
8. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko
9. Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
10. Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja dan Ketaatan berbasis risiko, reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
11. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan dan Si PATRIAWAS
12. Meningkatkan kompetensi APIP minimal 120 JP/ tahun

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,05 atau masuk kategori efisien.

N o	Kinerja Utama/Sa saran RPJMD/ Indikator	Targ et	Real isasi	% Capai an	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyer apan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5 = 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
1	Meningka tunya kualitas tata kelola kuangan dan aset daerah				Program Pengelolaa n keuangan daerah	2,070,524, 580.00	1,989,626, 411.00		
	Opini BPK atas LKPD	WT P	WTP	100,0 0%	Program penyeleng garaan pengawasa n	2,027,234, 200.00	1,945,832, 569.00		
					Program pengelolaa n pendapata n daerah	2,571,158, 284.00	2,432,465, 855.00		
					Program pengelolaa n barang milik daerah	1,835,575, 498.00	1,734,310, 760.00		
Rata-rata capaian				100,0 0%	TOTAL	8,504,492,5 62.00	8,102,235,5 95.00	95,27%	1,05

KINERJA SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target 2024	Realisasi 2024 (akhir masa jabatan)	Capaian 2024 (akhir masa jabatan)	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
Baik (85,650)	Baik (89,23)	104,18%	Baik (85)	104,98%

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan *feedback*/ umpan balik atas kuliatas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota Blitar kepada para pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat juga digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengamanatkan dalam pelaksanaan survey dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan
 - a) Kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh pelayanan
 - b) Apakah prosedur dan dokumen yang dibutuhkan jelas dan tidak berbelit-belit
2. Prosedur Pelayanan
 - a) Kejelasan dan kepastian prosedur dalam memberikan pelayanan
 - b) Apakah prosedur yang ada mudah dipahami dan dilaksanakan
3. Waktu Pelayanan
 - a) Kepastian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pelayanan
 - b) Apakah layanan diberikan sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan
4. Biaya/ tarif
 - a) Kewajaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan
 - b) Apakah biaya layanan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Produk Layanan
 - a) Kesesuaian antara produk layanan yang diberikan dengan standar yang ditetapkan
 - b) Apakah hasil layanan memenuhi harapan masyarakat
6. Kompetensi/kemampuan Petugas Pelayanan
 - a) Kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan
 - b) Apakah petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai
7. Perilaku Petugas Pelayanan
 - a) Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan

- b) Apakah petugas memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan profesional
- 8. Sarana dan Prasarana
 - a) Ketersediaan fasilitas yang mendukung pelayanan
 - b) Apakah fasilitas mendukung kenyamanan pengguna layanan
- 9. Pengaduan Pelayanan
 - a) Respons unit pelayanan terhadap keluhan dan saran dari masyarakat
 - b) Apakah ada mekanisme yang jelas untuk menangani pengaduan dan masukan masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survey IKM/SKM pada tahun berkenaan, dimana capaian pada tahun 2024 adalah 104,17% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target Baik (85,650) terealisasi dengan kategori Sangat Baik (89,23) meningkat sebesar 3,63 poin dari realisasi tahun 2023 sebesar 85,60 dan meningkat 4,73 poin dari realisasi tahun 2022 sebesar 84,50.

Nilai IKM Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 89,23 (Sangat Baik) didapatkan dari penggabungan nilai IKM Semester 1 dan 2 Tahun 2024. Dimana Nilai IKM Semester 1 sebesar 87,16, sedangkan untuk nilai IKM semester 2 sebesar 89,16. Dari perolehan nilai IKM ini tidak terlepas dari hasil pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah yang ada di Kota Blitar. Pada setiap perangkat daerah yang ada di Kota Blitar memiliki nilai IKM masing-masing. Untuk nilai IKM pada tahun 2024 per Perangkat Daerah bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.21

Nilai IKM per Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM			MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	TAHUN 2024		
1	Bagian Umum	92,38	96,92	94,65	A	Sangat Baik
2	Kecamatan Sukorejo	95,77	90,89	93,33	A	Sangat Baik
3	Kecamatan Kepanjenkidul	91,14	94,64	92,89	A	Sangat Baik
4	Bagian Pemerintahan	99	86,59	92,79	A	Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan	91,22	91,56	91,39	A	Sangat Baik
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	97,78	84,38	91,08	A	Sangat Baik

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM			MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	TAHUN 2024		
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	86,96	94,11	90,54	A	Sangat Baik
8	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	91,3	89,36	90,33	A	Sangat Baik
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman	88,15	92,27	90,21	A	Sangat Baik
10	Bagian Organisasi	84,41	94,64	89,53	A	Sangat Baik
11	Sekretariat DPRD	87,73	91,32	89,52	A	Sangat Baik
12	Bagian Hukum	87,31	91,06	89,19	A	Sangat Baik
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	88,11	89,51	88,81	A	Sangat Baik
14	DP3AP2KB	86,65	90,68	88,67	A	Sangat Baik
15	Dinas Sosial	88,04	89,21	88,63	A	Sangat Baik
16	Kecamatan Sananwetan	86,03	91,16	88,59	A	Sangat Baik
17	BKPSDM	86,85	89,60	88,22	B	Baik
18	Inspektorat	85,42	90,48	87,95	B	Baik
19	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	84,79	89,73	87,26	B	Baik
20	Dinas Pendidikan	85,04	89,41	87,22	B	Baik
21	Bappeda	85,87	88,5	87,19	B	Baik
22	DPMPSTP	85,43	88,23	86,83	B	Baik
23	UPTD Puskesmas Sukorejo	86,48	86,99	86,74	B	Baik
24	Dinas Koperasi, Ukm Dan Tenaga Kerja	84,46	88,78	86,62	B	Baik
25	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	86,11	87,00	86,55	B	Baik
26	UPTD Puskesmas Sananwetan	84,59	88,37	86,48	B	Baik
27	BPBD	87,17	85,6	86,40	B	Baik
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	85,11	87,41	86,26	B	Baik
29	Dinas Lingkungan Hidup	84,72	86,34	85,53	B	Baik
30	Dinas Perhubungan	81,58	89,17	85,37	B	Baik
31	Dinas PUPR	79,84	90,08	84,96	B	Baik
32	Satpol PP	82,81	86,58	84,70	B	Baik
33	RSUD Mardi Waluyo	82,93	85,98	84,45	B	Baik
34	Bag. Layanan Pengadaan Barang/Jasa	86,74	82,06	84,40	B	Baik
35	Bagian Kesra	82,23	81,91	82,07	B	Baik
TOTAL		87,16	89,16	89,23	A	Sangat Baik

Sumber: Sukma E Jatim dan Hasil Kuesioner SKM, Diolah Semester II, Tahun 2024

Dari Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sukma-e Jatim, pada Tahun 2024 menghasilkan nilai rata-rata **89,23** masuk kategori **Sangat Baik** dan capaian tersebut sudah melampaui target akhir RPJMD 2026 yaitu **87 (Baik)**. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan Standar Pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya standarisasi penggunaan *tools* pengukuran SKM, terdapat sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung penyusunan SKM serta saran/ rekomendasi SKM tahun lalu dipergunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan tahun berikutnya.

Berdasarkan pelaksanaan SKM Tahun 2024, kendala (3 nilai terendah dalam survey) yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan antara lain:

- 1) Waktu penyelesaian layanan masih belum sesuai dengan standar pelayanan
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan masih belum memadai dan menimbulkan kesulitan bagi penerima layanan
- 3) Produk/ hasil layanan belum mampu memenuhi harapan penerima layanan.

Sehingga kedepan perlu ditempuh langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan kepada petugas pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditentukan
- 2) Mengevaluasi kembali prosedur layanan yang memakan waktu lama dalam proses pelayanan dan melakukan penyederhanaan prosedur untuk mempersingkat waktu pelayanan
- 3) Mengoptimalkan dan memelihara sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan pelayanan melalui pemeliharaan yang intensif
- 4) Meningkatkan sistem pelayanan yang mudah digunakan
- 5) Menyediakan fasilitas pelayanan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas
- 6) Melakukan perbaikan hasil layanan dan melakukan penyesuaian hasil layanan yang dapat memenuhi harapan penerima layanan.
- 7) Melakukan sosialisasi atas produk pelayanan agar penerima layanan lebih paham sekaligus dapat menjaring masukan untuk perbaikan produk layanan

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari pembandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1,09, yang artinya dalam menghasilkan kinerja sebesar 104,18% memerlukan realisasi anggaran sebesar 95,36%.

N o	Kinerja Utama/Sa saran RPJMD/ Indikator	Targe t	Realis asi	% Capai an	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyera pan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5 = (2*3)- 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
1	Meningkat nya kualitas pelayanan publik				Program Penyelengg araan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	1.929.870.8 92,00	1.802.843.4 55,00		
	- Indeks Kepuasa an Masyara kat (IKM)	Baik (85,6 50)	Sanga t Baik (89,2 3)	104,1 8%	Program Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	52.428.985. 898,00	52.197.340. 422,00		
					Program Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum	3.175.697.4 50,00	3.144.575.1 34,00		
					Program Pendaftara n Penduduk	465.014.444 ,00	460.692.969 ,00		
					Program Pencatatan Sipil	309.231.500 ,00	269.171.700 ,00		

N o	Kinerja Utama/Sa saran RPJMD/ Indikator	Targe t	Realis asi	% Capai an	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyera pan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5 = (2*3)- 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
					Program Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	943.753.609 ,00	908.449.600 ,00		
					Program Pengelolaa n Profil Kependudu kan	49.255.200, 00	49.195.200, 00		
					Program Dukungan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD	14.404.018. 605,00	11.279.050. 659,00		
					Program Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik	2.847.801.5 00,00	2.783.031.8 27,00		
					Program Aplikasi Informatik a	6.186.066.3 10,00	6.144.371.6 20,00		
					Program Penyelengg araan Statistik Sektoral	340.838.700 ,00	335.834.550 ,00		
					Program Penyelengg araan Persandian	256.147.000 ,00	247.746.950 ,00		

N o	Kinerja Utama/Sa saran RPJMD/ Indikator	Targe t	Realis asi	% Capai an	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyera pan	Tingk at Efisie nsi
1	2	3	4	5 = (2*3)- 4/3 *100	6	7	8	9	10 = 5/9
					untuk Pengaman an Informasi				
					Program Kepegawai an Daerah	2.014.531.0 08,00	1.782.769.7 75,00		
					Program Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	1.115.717.3 72,00	1.035.883.6 05,00		
					Program Pengelolaa n Arsip	360.295.300 ,00	356.737.500 ,00		
					TOTAL	86.827.224. 788,00	82.797.694. 966,00	95,36%	1,09

E. ANALISIS PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1) erwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis														
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	86,315	90,53*	104,88%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	%	100	1.788.198.541	100	1.729.204.010	100%	96,7%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase kampung berkarakter Pancasila	%	9,5		4,7		49,5%			
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%	100	10.817.774.760	100	10.775.985.399	100%	99,61 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	68	28.883.107	87,05	22.640.945	128,01%	78,39%		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%	77	281.569.384	80	252.341.000	103,9%	89,62%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	2.189.084,694	100	2.115.195,084	100%	96,62 %		

				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	96,89	6.055.438.186	97,99	5.872.850.168	101,13%	96,98%	✓ Kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang masih rendah, ✓ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang, ✓ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan	✓ Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat ✓ Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													n dan ketertiba n masyarak at masih rendah	

					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	96,39		96,89		100,52%		✓ Pelanggaran perda dan perkara masih tinggi disebabkan kurang optimalnya beberapa Perda yang berlaku ✓ Kurangnya petugas PPNS penegak Perda, ✓ Kurangnya koordinasi dengan OPD yang bersangkutan	Me lakukan perubahan Perda Trantibum ✓ Me ngusulkan Diklat PPNS melalui BKPSDM ✓ Ko ordinasi yang lebih intens dengan OPD terkait

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	85	854.196.582	85	847.118.900	100%	99,17 %	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	%	90	1.891.906.200	90	1.856.139.972	100%	98,11 %	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	%	70	88.325.000	70	88.295.000	100%	99,97 %	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
2) Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,8	97,49*	99,68%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	1.120.024.994	100	1.080.467.901	100%	96.47 %	Belum keseluruhan OPD menyadari tentang pentingnya penyusunan dokumen PPRG	Rapat Koordinasi dengan Tim Driver, Penyusunan Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2023
					Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%	47		47		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase komposisi perempuan and sector bisnis	%	0,33		0,33		100%	-		
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%	100	333.317.420	100	209.785.892	100%	62,94 %	Untuk Layanan Rujukan menyesuaikan kebutuhan Klien sesuai hasil Asesmen	Mensosialisasikan keberadaan UPT PPA

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembaan pemenuhan hak anak	%	100	160.231.200	100	156.105.380	100%	97.43 %		

				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih		100	404.612.450	100	297.597.090	100%	73.55 %	Rumah aman sudah tersedia tapi belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang membutuhkan sehingga anggaran untuk rumah aman tidak bisa diserap	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak kekerasan untuk memanfaatkan rumah aman; Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
3) Meningkatnya derajat kesehatan														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
dan daya saing SDM														
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,74 – 81,38	81,44	102,13%	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi i SD/MI)	%	95,86	64.929.835.520	62,80%	62.316.928.226	100%	95,98%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	%	84,62	5.920.468.389	85	5.470.711.026	100,45%	92,40%		
					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	%	100 %	636.251.990	100 %	616.404.100	100%	96,88 %		
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	31,60	7.095.169.500	31,6	6.735.323.300	100%	94,93 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	76.83 %	20.160.900	76.8 %	19.107.250	100%	94,77		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	55.460.082.577	98,8	52.597.240.619	98,8%	94,84 %	Masih ada kematian ibu, masih ada kasus keguguran, masih ada ibu hamil yang belum mencapai kehamilan trimester 3	Drill emergency kegawat daruratan pada FKRTL Pendampingan ibu hamil risti (risiko tinggi)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,97		98,97 %		Masih adanya kasus keguguran, masih ada kematian ibu	Drill emergency kegawatdaruratan pada FKRTL Pendampingan ibu hamil risti (risiko tinggi)

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e bayi baru lahir mendapat kan pelayana n kesehata n bayi baru lahir (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Cakupan Pelayanan Kesehatannya Balita sesuai standar (SPM)	%	100		99,67		99,67 %		Masih ada kasus kematian balita, mobilitas balita, bbelum semua Lembaga PAUD/TK/RA rutin melaporkan	Pendampingan dan pembinaan rutin pelaporan pada lembaga PAUD dan TK/RA

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e anak usia pendidika n dasar yang mendapat kan pelayana n kesehata n sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e orang usia 15- 59 tahun mendapat kan skrining kesehata n sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		99,5		99,5%		Data pelayanan kesehatan lansia masih belum termasuk layanan di klinik dan praktik dokter mandiri	Meningkatkan kerjasama dengan klinik dan praktik dokter mandiri untuk mengakses data layanan kesehatan lansia

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapat kan pelayana n kesehata n sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e ODGI berat yang mendapat kan pelayana n kesehata n jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		98,9 8		98,98 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e Orang terduga TBC mendapat kan pelayana n TBC sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat kan pelayana n deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan	%	100		100		100%			
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e lingkunga n yang memenuh i standar kesehata n	%	69,8 2		54,1 3		77,53 %		Masih ada masyarakat yang belum melaksanak an PHBS	Upaya pemicuan perubahan perilaku hidup sehat

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	46,15		77,78		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	698.275.900	100	671.706.400	100%	96,9%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%	100	399.930.386	100	399.093.410	100%	99.79 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	%	92.67		92.03		99.31%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	85,71	2.666.311.271	85,71	2.623.421.132	100%	98,38%		

				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	%	80	1.990.664.757	80	1.959.400.088	100%	98.43 %	1. Organisasi Kepemudaan yang ada belum sesuai dengan ketentuan. 2. Komunitas kepemudaan belum terorganisasi secara legal formal. 3. Kurang optimalnya peran KNPI sebagai induk organisasi	1. Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI. 2. Penguatan kelembagaan komunitas. 3. Penguatan peran KNPI

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													i kepemudaan.	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	%	64	428.677.200	64	427.624.465	100%	99,75 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e pemuda yg mendapat pelatihan kader pengemb angan kepemim pinan, kepe dulian, kesukarel awanan dan kepelopor an pemuda	%	6		3		50%			

				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda	%	41	11.209.195.829	43	11.090.293.076	104%	98,94 %	1. Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi. 2. Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediaan akan	1. Melakukan pendampingan konsultan olahraga, puslatkot dan latihan tanding 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													tempat latihan tetap)	di Sekolah

													3. Minat olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas masih kurang	3. Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas. 4. Melakukan Sosialisasi secara masif. 5. Memberikan reward kepada atlet yang berprestasi

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Cakupan pelatih yang tersertifikasi	%	70		69		98,57 %			
					Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	%	70		67		95,71 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	25,1	197.600.000	25,99	162.931.175	103,19 %	82,46 %	Belum optimalnya Kapasitas dan Pengetahuan SDM Pengelola Program Pengendalian Penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk	Pelatihan SDM Pengelola Pengendalian Penduduk dan Mitra Kerja

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	indeks	8,55	2.054.957.978	8,1	1.788.148.019	105,26 %	87,02 %	Belum optimalnya peran motivator KB dalam peningkatan kesertaan KB Pria	Perumusan strategi optimalisasi peningkatan KB Pria
					Persentase peserta KB aktif	Persen	74,4		67,4		90,59%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB		74,4	1.006.437.411	74,4	983.538.20	100,36 %	97,73 %	Belum optimalnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting	Pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	83,00	12.527.320.674	86,39	10.682.815.727	104,08 %	85,28 %		
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,40 : 1		3,48 : 1		102,35 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat														

Angka Kemiskinan	7,16 - 6,25	6,75	105,73%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	1,4	17.920.163.949	0,73	17.821.446.515	52,14 %	99,45 %	Rendahnya graduasi mandiri dan penerima bantuan Rastrada cenderung stagnan dikarenakan belum ada indikator yang jelas sehingga warga yang kondisinya diatas miskin dan rentan miskin tetap menerima Bansos	Rendahnya graduasi mandiri dan penerima bantuan Rastrada cenderung stagnan dikarenakan belum ada indikator yang jelas sehingga warga yang kondisinya diatas miskin dan rentan miskin tetap menerima Bansos

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.150	114.775.500	2.158	113.480.550	100,37 %	98,87 %	Masih tingginya preferensi beras sebagai sumber pangan utama, sehingga penganebaran agaman pangan masih belum optimal.	Melaksanakan sosialisasi pola pangan B2SAH, pemantauan ketersediaan pangan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Angka ketersediaan energi perkapita / hari	(kkal/kap/hari)	2.200		2.413		109,68 %			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangan	%	14.52	53.205.700	20,8	51.727.700	143,11 %	97,22 %	Masih kurangnya pengetahuan orangtua dalam pola konsumsi pangan yang bergizi dan seimbang	Memberikan bantuan PMT dan pelaksanaan penyuluhan pola pangan B2SAH kepada orang tua balita

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100.00	10.250.200	100	10.250.200	100%	100%		
5) Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat														

Indeks Gini	0,3022 – 0,3777	0,353	106,54%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	0,89	996.128.850	0,89	965.543.000	100%	96,93%	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS/PPKS Di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan	PMKS/PPKS yang diidentkan (dipesankan tempat) ke UPT Dinsos Provinsi atau Sentra Terpadu Kemensos, untuk sementara dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta baik di Kota Blitar maupun Kab/Kota sekitar

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	816.454.323	100	811.330.900	100,00%	99,37%	Kurang optimalnya kapasitas PSKS dalam memenuhi tuntutan pelayanan kesejahteraan sosial yang permasalahan semakin kompleks	Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pembinaan /Bimtek secara kontinyu dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan/permasalahan sosial yang menonjol

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	216.343.400	100,00	185.472.275	100,00%	85,75%	Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu	Tetap dialokasikan anggaran program dan kegiatan yang bersifat penyediaan /penjagaan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	52.579.700	100,00	51.165.579	100%	97,31%	Jumlah yang dimakamkan tidak bisa diprediksi	Tetap dialokasikan anggaran program dan kegiatan yang bersifat rutin
6) Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22 – 3,74	4,19	119,73%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	%	48	2.281.661.150	48,65	2.256.067.392	101,35	98,88		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	81	232.772.300	83,67	211.305.200	103,30%	90,78%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	%	16		16,32		102,00 %			
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%	100	175.999.300	100	138.442.250	100,00 %	78,66 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi														
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6% – 6,2%	5,33%	115,87%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	%	55	163.831.000	57,2	159.353.500	104%	97,27 %		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	%	99,6	555.473.700	99,74	528.831.328	100,13 %	95,20 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	%	50	376.624.400	50	375.138.816	100%	99,61 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	80	406.818.000	83,15	320.435.404	104%	78,77 %		

				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	72%	7.410.667.479	72%	7.359.476.325	100%	99,30 %	1. Ba ngunan pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi 2. Dal am rangka pengembangan pasar rakyat yg presentatif dan menindak lanjuti penyusunan dokumen yang ada	Masih memerlukan anggaran untuk pemeliharaan rutin pasar rakyat

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													maka perlu adanya anggaran revitalisas i pasar wage	

				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	179.557.600	110	177.584.300	110%	99,87 %	1. Ter dapat kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Jumlah pupuk bersubidi yang diterima petani kuotanya kurang dari 1 sak, sehingga untuk menebus 1 sak pupuk harus	1. Dilakukan Operasi Pasar, Penyaluran Beras SPHP dan monitoring secara rutin 2. Diterapkan aturan mengenai boleh membuka sak pupuk di distributor sehingga petani tetap bias terlayani

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													bersama dengan petani lain	

				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTPP bertanda tera sah	%	45%	161.560.400	97.98%	154.067.400	217,73%	95,36%	Rendahnya kesadaran pemilik UTPP untuk menterakan alat ukurnya sehingga masih banyak yang mempunyai pemikiran alat UTPP masih bagus dan tidak perlu ditera ulang	1. Dengan melakukan sosialisasi metrologi kepada pemilik UTPP 2. Melakukan pengawasan UTPP dan pembinaan terhadap pemilik UTPP (jelante r)

				Program Perencanaan Dan Pembanguna n Industri	Persentas e Peningkat an IKM	%	3,5 %	3.078.470.314	4,25 %	3.024.107.389	121,43 %	98,23 %	Pengemba ngan variasi produk yang rendah, manajeme n pemasaran kurang, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, kurang sesuainya branding produk dengan pangsa pasar untuk IKM	1. Perlu adanya pelayana n terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat mefasilita si permasal ahan usaha IKM. Di tahun 2024 direncan akan akan dibentuk Klinik Industri dan

Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM

2. Pengembangan database data IKM dan penamba

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														han kelengkapan informasi
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata a Makam Bung Karno	%	50	1.530.764.500	50	1.517.550.456	100%	99,14 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%	0,08	927.357.900	0,08	916.197.401	100%	98,80 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%	3,90	66.738.400	3,90	61.510.00	100%	92,17 %	Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan mendatangkan narasumber profesional.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	36	391.784.311	37,10	391.216.000	103,06 %	99,85 %		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,9	887.785.958	2,0	801.234.119	105,26	90,25		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2,4		2,83		117,92 %			
				Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	1,8	432.185.000	2,00	407.609.500	111,11 %	94,31 %		

				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	24	293.945.300	0	277.611.200	0%	94,44 %	1. Per menkop No.8 Tahun 2023 tentang USP Koperasi salah satu pasal menyebutkan bahwa syarat mendirikan KSP/USP, modal awal minimal 500 juta 2. Pengelola KSP/USP harus memiliki sertifikat	1. Menyampaikan kepada KSP/USP untuk menaikkan modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus dan lainnya) 2. Pengelola wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang USP

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													kompetensi	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	35	18.685.000	36,1	18.632.800	103,14 %	99,72 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajemen)	%	31	65.705.300	34,96	64.499.900	122,77%	98,17%		
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	37,1	239.800.000	21,04	227.888.700	57,68%	99,20%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	73	718.574.000	73,10	706.062.000	100,14 %	98,26 %		
					Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	97,75		97,87		100,12 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pengawasan peredaran obat hewan	%	50		51		102%			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	69,55	1.841.987.020	69,99	1.800.025.350	100,63%	97,72%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	100.00		100		100		Terjadinya kekeringan sebagai dampak fenomena 'el – nino yang terjadi tahun 2023 s/d	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi persawahan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													pertengah an 2024 menyebabk an debit air tidak mencukupi untuk kebutuhan optimal pertanama n sehingga terjadi penurunan produktivit as.	Melakukan percepatan tanam, terutama untuk tanaman padi.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	16.041.000	100	16.041.000	100%	100%	Cuaca ekstrim (el nino ke el nina) meningkatkan resiko terjadinya outbreak serangan HPT	Melakukan pemantauan OPT secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya outbreak serangan HPT

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	41,66	39.335.250	42,11	38.362.100	101,08 %	97,53 %	Masih kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pertanian tentang	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan secara berkala

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	44,62		52,05		116,65		perizinan pertanian	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93	1.927.139.800	2,05	1.916.147.765	220,43 %	99,43 %	Masih kurangnya kesadaran petani terhadap pentingnya akses teknologi dalam peningkatan kualitas hasil pertanian dan pemasaran	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan secara menyeluruh kepada kelompok tani
					Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	14,29		14,49		101,40 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase produk tanaman pangan dan hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	30,56		40,91		133,87%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol	%	44	225.345.244	56	223.435.750	127,27 %	99,15 %	Jangkauan pemasaran produk hasil peternakan masih didominasi pasar lokal, sehingga masih banyak pelaku usaha beranggapa	Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan mutu hasil peternakan (NKV) Melakukan vaksinasi LSD dan PMK serta

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	55,56		60		107,99%		n bahwa NKV bukan merupakan suatu kebutuhan.	pelayanan hewan ternak terpadu

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100		100		100%		Terjadinya kembali serangan PMK pada akhir tahun 2024 yang kemungkinan berdampak pada produksi hasil ternak (terutama harga jual ternak dan produksi susu).	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	21,55	307.238.378	23,68	301.152.900	109,88 %	98,02 %	Kekeringan panjang sebagai dampak fenomena el – nino, menyebabkan penurunan debit air sehingga sebagian pembudidaya mengurangi populasi ikan yang dibudidayakan	Melakukan pemantauan berkala kepada pembudidaya melalui pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan manajemen budidaya perikanan air tawar.
					Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	%	15,07		16,87		111,94 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	34.572	1.932.342.514	34.572,168	1.905.078.049	109,42 %	98,59 %	Masih kurangnya jangkauan pemasaran hasil produksi perikanan (masih didominasi pasar lokal)	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kualitas produk dan fasilitasi promosi pemasaran
8) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Infrastruktur Daerah	62,055	63,41	102,18%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentasi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	98	11.999.063.457	98	10.741.961.851	100%	89,52 %		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	%	90	152.400.00	90	121.382.00	100%	79,65 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	84	3.650.218.800	84	3.376.072.696	100%	92,49 %		
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	98	4.961.753.000	98	4.623.432.000	100%	93,30 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	91,67	9.748.964.300	91,67	9.534.982.900	100%	97,81%		
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	%	91,3		91,3		100%			
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99,6	17.967.190.69	99,6	16.730.810.87	100%	93,12%		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99,8		99,8		100%			
				Program pengembangan jasa konstruksi	Presentase Pekerjaan konstruksi yang sesuai standart	%	100	807.224.600	100	699.882.540	100	86,70 %		
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	%	86,84	1.472.768.000	86,84	1.156.853.318	100%	78,55 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,5	10.383.901.807,36	98,62	10.241.845.805	99,07 %	98,63 %	Kurangnya ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan	
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	96,97	109.979.400	94,85	109.738.571	97,81 %	99,78 %	Belum optimalnya pengembangan Terminal Tipe C	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	84,26	435.114.068	92,20	431.339.002	100%	99,13%	Kurang optimalnya kualitas sarpras uji berkala	
					IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	87,92	1.545.315.400	87,92	1.529.130.850	100%	98,95%	Kurangnya armada angkutan sekolah yang memadai	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	3.064.942.000	30,65	3.051.376.885	152,41%	99,56%	Dinamika perubahan data dan kondisi sosial ekonomi & Ketidaksiapan calon penerima RTLH melanjutkan peningkatan rumah secara swadaya	Sosialisasi terus dilaksanakan agar calon penerima sanggup/bisa melaksanakan kelanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan RTLH dapat tercapai

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	1,03		1,55		150,485%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	991.895.479	100	930.165.943	100%	93,78 %	Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah di kawasan rawan bencana dan belum memenuhi standart teknis RLH (Rumah Layak Huni	Dilaksanakan penyusunan regulasi daerah; sosialisasi; updating data secara periodik
					Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	13,09	2.009.760.179	2,31	1.983.173.073	17,65 %	98,68 %	Dinamika perubahan data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat & Ketidaksiapan calon penerima RTLH melanjutkan peningkatan rumah secara swadaya	Sosialisasi terus dilaksanakan agar calon penerima sanggup/bisa melaksanakan kelanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan RTLH dapat tercapai

					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	76,17		85,10		111,72%	Penanganan jalan lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menangannya	Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar PD dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman

					Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	78,09		87,48		111,03%		Penanganan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menangannya	Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar PD dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	86	1.406.889,602	87	1.406.408,500	101,16	99,97	Penambahan aset PSU yang berasal dari penyerahan oleh pengembang membawa konsekuensi tanggung jawab pemeliharaan bagi pemkot	Penyusunan prioritas perencanaan kegiatan dan penganggaran perlu dipertimbangkan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	87		92,50		106,32 %			
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	23.850.000	100	8.320.000	100%	34,88 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	%	98	4.238.823.000	93,51	3.084.746.153	95,41 %	72,77 %		
9) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup														

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	71,20	64,94	91,21%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO ₂ eq)	%	8,95	477.668.350	8,95	474.093.299	100%	99,25 %	Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	%	56		59		105,36 %			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	4.240.000	100	4.180.000	100%	98,58 %	Masyarakat belum memahami prosedur pengaduan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	%	65	64.724.800	65	64.087.500	100%	99,02 %	Usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui prosedur izin lingkungan dan izin PPLH	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100	273.880.790	100	240.060.228	100%	87,65 %	Tidak ada permasalahan, pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	%	16,274	6.699.443.619	16,274	6.082.037.357	100%	90,78 %	Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	83,15	11.052.180.095	81,92	11.007.651.672	98,52 %	99,6%	Tidak ada hambatan pada pelaksanaan program ini. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melakukan perencanaan dengan lebih tepat dan cermat
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	%	12,85		16,09		125,21 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibangun	%	100	453.595.900	100	444.009.500	100,00 %	97,89 %	Pemahaman yang belum sama	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adhiwiyata)	%	26,21	416.009.800	54,62	416.009.800	208,39 %	99,35 %	Pemahaman yang belum sama	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Jumlah Predikat pengelola an lingkunga n hidup (adipura)	kali	1		1		100%			
					Persentas e kelurahan berseri	%	50,7 9		82,5 4		162,51 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	%	100	14.444.800	100	13.208.000	100%	91,44 %	Terjadinya perubahan jadwal dikarenakan adanya kepentingan mendadak dari pelaku usaha dan/atau kegiatan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan
				Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Kelurahan	2	980.761.824	2	860.799.559	100%	87,77 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase SDM Penanganan Bencana yang Terlatih	%	93		92,86		99,85%			
					Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	%	60		60		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e Kecepata n Respon Kurang dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangan i	%	100	596.091.460	100	564.816.945	100%	94,75 %	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat
10) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah														

- Nilai SAKIP	74,795 (BB)	80,06 (A)	107,04%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	%	80,00	557.515.538.525,46	80,00	531.665.126.233,46	100%	95,86%	1. Implementasi SAKIP 2024 masih menghadapi kendala, seperti kinerja yang belum sepenuhnya berbasis logical framework, target rencana aksi yang kurang realistis, perlunya monev berjenjang, serta analisis keberhasilan	1. Hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2025 yakni memaksimalkan Pengembangan dan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi 2. Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara

													a/kegagalan yang belum lengkap di LKjIP PD Perlu adanya review sistem kerja berdasarkanPermenpan Nomor 7 Tahun 2023 untuk mewujudkanorgani sasi yang agile dan adanya kebijakan kompensasi bagi yang melaksan	berkesina mbungan dan menjadi budaya ASN 3. Disusun draft perubahan Perwali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja ASN

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													akan rangkap ketua tim kerja	

					Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	%	34,48		45,71		132,57%		Masih 17 PD yang melaksanakan FKP sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik	- Mendorong OPD tepat waktu menyampaikan laporan SKM serta menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya - Mendorong 13 PD yang belum melaksanakan FKP agar segera melaksanakan pada tahun 2025

					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (88,32)	130.765.200	Sangat Baik (88,77)	27.820.000	100,51 %	97,75 %	Dari hasil SKM melalui sukma-e jatim pada pelayanan di lingkungan Setda Kota Blitar yang dilakukan pada Tahun 2024 dihasilkan nilai 88,77 atau masuk kategori Sangat Baik dan Perlu ditingkatkan kembali pada periode	1. indikator Waktu Mengarahkan petugas untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang sudah ditetapkan 2. Indikator Sarana Prasarana Melakukan pemeliharaan dan optimalisasi

													berikutnya. Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan yakni waktu penyelesaian pelayanan, sarana prasarana dan persyaratan Realisasi Kinerja telah melebihi target	fasilitas yang sudah tersedia, Menambah Fasilitas yang ramah disabilitas dan lansia yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan 3. Indikator Persyaratan Menetapkan, Mempublikasikan serta mengarahkan petugas

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														pelayanan agar memberika n pelayanan sesuai persyarata n yang ditetapkan
				Program perencanaan , pengendalia n, dan evaluasi pembangun an daerah	Persentas e Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	%	95.5 6	1.601.048.200	96,0 5	1.374.054.080	100,51 %	85,82 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e Capaian Sasaran RPJMD	%	91,1		95,5 6		104,90 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	%	100	757.298.800	100	728.629.300	100%	96,21 %	Realisasi Kinerja telah melebihi target	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e Capaian Program Perangkat Daerah	%	82		98,8 3		120,52 %			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	728.329.800	100	673.135.728	100%	92,42 %	Pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan	Mengupayakan untuk memanfaatkan hasil litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun selanjutnya

				Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	724.150.700	100,00	709.889.649	100%	98,46 %	1. Komitmen pembangunan ZI pada Perangkat Daerah belum menyeluruh pada semua pegawai di Perangkat Daerah 2. Masih terdapat capaian kinerja organisasi yang belum tercapai 3. Belum optimalnya fungsi pemantau	Mengoptimalkan fungsi pemantauan kinerja secara berjang

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													an kinerja secara berjenjan g	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	30		30		100%			
					Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	1		4		400%			

- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3534)	Tinggi (3,4243)	102,11%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	2.125.266.458	250	2.123.882.191	250%	99,93 %	Sering berubahnya kondisi dan permasalahan di masyarakat dan terbitnya peraturan perundang – undangan diatas sehingga mempengaruhi perubahan dalam merumuskan kebijakan	Rumusan kebijakan disusun berdasarkan kondisi dan realita di masyarakat serta peraturan yang berlaku
					Persentase lembaga kemasyarakatan	%	100		100		100%		Terbitnya peraturan yang mengatur tentang LKK	Segara menerbitkan peraturan yang mengatur pedoman,

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					kelurahan yang aktif								Posyandu dari bidang kesehatan menjadi posyandu 6 (enam) SPM sangat mempenga ruhi dalam kelembaga an posyandu di Kelurahan	petunjuk teknis dalam pengelolaa n LKK Posyandu

					Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	%	100	765.139.900	100	745.728.950	100%	97,46 %	Dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi produk hukum daerah	1. Inventarisasi dan penjadwalan penyusunan produk hukum 2. Kerjasama dengan pihak ketiga terkait harmonisasi produk hukum pusat dengan produk hukum kota blitar

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	%	100	9.507.099,696	100	9.349.547,640	100%	98,34 %	- Belum adanya peta kebijakan kesejahteraan rakyat yang bisa mendukung langsung	- Lebih intensif melakukan koordinasi kepada instansi vertikal sebagai Pembina Bagian

					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100%		pencapaian tujuan kesejahteraan sosial dan masyarakat - Perlunya komitmen bersama dan persamaan persepsi antar stakeholder terkait implementasi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan	Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Meningkatkan koordinasi lintas OPD guna memfasilitasi perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung kegiatan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													masyarak at	kesejahte raan sosial dan kesejahte raan masyarak at

				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kelurahan tertib administrasi	%	71.43	21.302.000	100	21.197.500	140%	99,5%	- minimnya akses data yang diperoleh untuk mengisi profil kelurahan - tidak lolos nya lomba kelurahan ke tahap selanjutnya sehingga jumlah anggaran mengalami perubahan	- meningkatkan koordinasi dengan OPD pemilik data - mengevaluasi data dokumen lomba kelurahan yang dikirimkan ke provinsi sebagai bahan masukan pelaksanaan lomba tahun berikutnya

				Program perekonomi an dan pembangun an	Persentas e rumusan kebijakan bidang perekono mian yang ditindakla njudi	%	100	911.348.920	100	757.073.357	100%	83,07 %	- Perubahan PMK yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan DBHCHT - Belum maksimalnya kinerja BUMD akibat kekosongan jabatan direktur - Kurang optimalnya Koordinasi	- Pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT - Melakukan percepatan restruktur

													i, Sinkronis asi, Monitorin g dan Evaluasi Kebijakan Pengelola an BUMD dan BLUD serta Perencan aan dan Pengawas an Ekonomi Mikro Kecil	isasi melalui penetapa n Organ BUMD dengan penguata n komitme n melalui perjanjian kinerja dan penerapa n ketentua n Perda yang menjadi dasar penyelen ggaraan BUMD - Optimalis asi Koordinas i,

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Sinkronis asi, dan Monev Kebijakan Pengelola an BUMD dan BLUD serta Perencan aan dan Pengawas an Ekonomi Mikro kecil

					Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	718.365.100	100	696.665.395	100%	96,98 %	- Koordinasi antar OPD terkait dalam perumusan kebijakan bidang pembangunan belum optimal - Sistem aplikasi e-monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga paket pengadaan dan penganggaran	- Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev. - Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil revid UKPBJ sesuai SOP. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													belum dapat terpantau secara optimal. - Aplikasi dari LKPP sering error (SIRUP, LPSE, Katalog dan SIKAP) sehingga menghambat proses PBJ. - Pada paket	LPSE dan realisasi PDN secara berkala. - Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.

					Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	%	63,33		65,00		102,64%		pekerjaan konstruksi, perencanaan juga dilaksanakan pada tahun berjalan pembanguan sehingga pelaksanaan pembanguan berjalan lambat menunggu perencanaan selesai	
11)	Meningkatnya													

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah														
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%	100	13.977.968.280	100	4.101.101.846	100%	29,34 %		

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85%	%	96		96,60		100,63%			
					Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	80	2.027.234.200	83,42	1.945.832.569	104,28 %	95,983 %	1. Dokumen Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi	1. Meningkatkan Koordinasi dengan Auditan terkait permintaan data audit
					Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	80		83,42		104,28 %		2. Masih terjadinya temuan yang berulang	2. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	89		92,07		103,45%		setiap tahunnya 3. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun,	an rekomendasi APIP dan BPK 3. Mengoptimalkan pemantauan secara berkala penyelenggaraan manajemen risiko
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	89		92,07		103,45%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	%	90		100,00		111,11 %		sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang 4. Manajemen risiko tingkat kota belum optimal	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentas e peningkat an target pendapat an pajak daerah	%	32,4 5	2.571.158.284	57,6 1	2.432.465.855	177,53 %	94,61 %		

					Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%	32,45		40,67		125,33%		Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak, kurangnya sosialisasi terkait pajak daerah, kurang optimal dalam menggali	1). Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang pada sampai masa jatuh tempo belum membayar pajak.; 2). Melakukan peningkatan softskill SDM khususnya petugas pajak sehingga mampu memberikan data yang akurat; 3). Melakukan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													objek pajak.	Sosialisasi perpajakan, 4) Mengoptim alkan penggalan objek pajak daerah.

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	%	40	1.835.575.498	40	1.734.259.088	100%	94,48 %	Kurang tertibnya OPD dalam mengelola asetnya, masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat	Pembinaan kepada OPD dalam pengelolaan aset, melakukan apel kendaraan, melakukan lelang barang daerah, melakukan Rekonsiliasi setiap triwulan, melakukan pensertifikatan tanah

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik														
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (85,650)	Sangat Baik (89,23)	104,18%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	persen	100	1.929.870.892	100	1.802.843.455	100%	93,42 %	Perlunya menambah kecepatan penyelesaian pelayanan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	52.428.985.898	100	52.197.340.422	100%	99,56 %	Kurangnya koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar kecamatan dengan OPD lain ataupun instansi vertikal	Peningkatan koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar kecamatan dengan OPD lain ataupun instansi vertikal

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e RT Berdaya	persen	100		100		100%		Perlunya peningkata n koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar Kecamatan dengan OPD lain ataupun Instansi Vertikal	Peningkata n koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar Kecamatan dengan OPD lain ataupun Instansi Vertikal

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	persen	100	3.175.697.450	100	3.144.575.134	100%	99,02 %		
				Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	%	0,03	465.014.444	0,24	460.692.969	800%	99,07 %		Mengoptimalkan pengawasan dalam proses layanan

					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	%	2,55		4,57		179%		Masih ada penduduk usia wajib KTP belum melakukan perekaman KTP, dikarenakan yang bersangkutan tidak berdomisili sesuai alamat yang ada di KK	Meningkatkan kualitas pelayanan adminduk dengan mengoptimalkan inovasi layanan, mengoptimalkan SIDAK (Verifikasi Data Administrasi Kependudukan) guna memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat.

					3. Persentase penerbitan dokumen KK	%	100		100		100%			Penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri untuk diusulkan penonaktifan sementara
				Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan	%	2,19	309.231.50	2,23	269.171.7	101,83 %	87,05 %	Masih kurangnya keterlibatan	Meingkatkan kualitas pelayanan adminduk

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					an kepemilikan dokumen akta perkawinan								stakeholder di dalam proses peningkatan pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil	dengan mengoptimalkan inovasi layanan, mengoptimalkan SIDA K (Verifikasi Data Administrasi Kependudukan) guna memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat.

					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	%	2,60		2,03		78,08 %		Masih kurang merata dan masifnya informasi terkait arti pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil	Mengoptimalkan sosialisasi terkait akta pencatatan sipil kepada masyarakat baik melalui sosialisasi langsung di Kecamatan se-Kota Blitar serta sosialisasi melalui media cetak/elektronik / sosial media
					3. Persentase penerbita	%	100		100		100%			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					n dokumen akta kematian									
					4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%	0,30		0,2		66,67 %			Meningkatkan peran serta stakeholder dengan mengoptimalkan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan adminduk

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	%	16	943.753.609	16	908.449.600	100%	96,26 %	Belum semua OPD yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan publik sudah melakukan perjanjian kerja sama	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan kerjasama kepada OPD/lembaga dalam pemanfaatan data kependudukan serta menerbitkan PKS

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	%	100	49.255.200	100	49.195.200	100%	99,88 %	Rilis DKB (data konsolidasi bersih) oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri lambat, sehingga penyusunan buku profil kependudukan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi secara intens dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100%	14.404.018.605	100%	11.279.050.659	100,00 %	78,30 %	Dalam pencapaian target kinerja program, semua kegiatan fasilitasi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD telah dilaksanakan seluruhnya	Dalam upaya meningkatkan fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD, maka akan disampaikan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas agar terdapat keseragaman

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														an adminstras i sehingga pada semua kegiatan dapat memenuhi persyarata n adminstras i serta pelaksanaan sesuai dengan SOP yang berlaku

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													Anggaran bersifat penyediaan untuk fasilitasi pembentuk an Perda dan Peraturan DPRD	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	90	2.847.801.500	90	2.783.031.827	100%	97,73 %	Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan diseminasi informasi menyebabkan sulitnya mengukur keberhasilan kinerja berdasarkan STARKOM	1. Menyusun Indikator Kinerja yang Jelas dan Terukur 2. Mengembangkan Laporan Evaluasi Standar 3. Membentuk Tim Khusus untuk Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	%	80		80		100%		1. Belum ada pemetaan komunitas dan mitra strategis yang menjadi sasaran 2. Belum ada laporan feedback dari mitra yang menyebarkan informasi	1. Melakukan pemetaan target komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah 2. Membuat form laporan diseminasi mitra yang turut menyebarkan informasi

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	92,89	6.186.066.310	92,98	6.144.371.620	100%	99,33 %	beragamnya aplikasi layanan publik yang dibangun secara mandiri	menggunakan aplikasi umum

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	persen	96.71	340.838.700	100	335.834.550	103%	99%	Tidak terisinya data statistik sektoral karena data tidak tersedia	Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah data yang tidak tersedia sehingga elemen datanya dapat dipertimbangkan untuk dihapus

				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persen	64,26	256.147.000	67,5	247.746.950	105%	97%	Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi pada perangkat daerah	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN pengelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tentang pengelolaan keamanan informasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan BSSN

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	46,47	2.014.531.008	37,37	1.782.769.775	80,42 %	88,50 %		
					Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	90,16		92		102,04			

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	91,56		98,9		108,02%			
					Persentase data kepegawaian yang valid	%	68		84,45		124,19%			

					Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	61		80,34		131,70%		- Pelaksanaan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat (KemenPAN RB dan BKN) khususnya pada penetapan formasi, dan waktu pelaksanaan tata kegiatan seleksi - Tahun 2024 terdapat masa larangan mutasi	- melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan pelaksanaan kegiatan penataan - melaksanakan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN dalam pelaksanaan rekrutmen CASN

													dalam rangkaian pilkada, maka mutasi pejabat harus juga mengacu Pasal 71 ayat 2 UU NO. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satunya melarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan	- koordinasi dengan Dinas Kominfotik Kota Blitar jika terapat kendala sistem dan jaringan

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													calon sampai dengan akhir masa jabatan. Untuk itu proses panjang rencana seleksi terbuka harus mendapat rekomenda si Gubernur sebelum mendapat ijin tertulis dari Mendagri.	

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Targe t	Realis asi	% Capaia n	Program	Indikator Kinerja Program	satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasala han	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentas e penempa tan jabatan sesuai kompeten si	%	91,1 8		101, 65		111,48 %	%		

				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,75	1.115.717.372	97,78	1.035.883.605	101,06%	92,84%	- Jabatan Fungsional bersertifikat masih sangat kecil dikarenakan terbatasnya kuota pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga / instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kompetensi - masih terdapat 439 PNS Non Guru	- Membangun Koordinasi dengan Kementerian dan Perangkat Daerah yang memiliki tenaga fungsional agar mudah melakukan fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi fungsional. - Menyampaikan

													dan Non Tenaga Kesehatan yang masih berpendidi kan SMA, SLTP dan SD yang belum mengajuka n tugas belajar untuk meningkatk an kualifikasi pendidikan nya.	informasi terkait prosedur, persyarata n, dan beasiswa (jika ada) bagi OPD yang pegawainy a mengingink an peningkata n pendidikan; - Membangu n aplikasi yang memudahk an ASN untuk mengajuka n Tugas Belajar.

				Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Indeks	84	360.295.300	89,4 2	356.737.500	106,45 %	99,01 %	Berdasarkan data hasil SKM Layanan Kearsipan periode Tahun 2024 Terdapat 3 (tiga) Unsur dengan nilai terendah yaitu : Pertama, Unsur Waktu nilai dengan nilai 3,56 yang Kedua, Unsur Persyarataan nilai 3,62 dan Ketiga adalah Unsur Sarpras	1. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Petugas Layanan 2. Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral guna pemenuhan SDM Layanan 3. Kesiambungan Pemeliharaan Sarpras 4. Penyediaan Alokasi Anggaran

Kinerja Utama/Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													dengan nilai 3.64. Dari ke tiga unsur dengan Nilai terendah tersebut kesemuanya termasuk dalam kategori Sangat Baik	melengkapi/menambahsarprassarprass layanan 5. Review dan penyesuaian atas SOP dan SP sesuai dinamika NSPK yang berlaku

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 19, Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib adalah kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan umum yang bersifat lintas sektoral.

Kewenangan pilihan adalah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kewenangan pilihan pemerintah daerah meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, Pelayanan umum yang bersifat spesifik dan teknis.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat diberikan kewenangan pembantuan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pembantuan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kewenangan yang luas dan utuh tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan, yang meliputi: bagi hasil pajak dan nonpajak antar Daerah, pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah, pinjaman dan/atau hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang – undang.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penugasan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada kabupaten/kota dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tugas pembantuan ini. Sesuai dengan Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Juga, sebagai subsistem Keuangan Negara sebagai Konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Secara pendanaan, tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I). Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Wali Kota, maka selain Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai APBD.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang baik ini tentu saja tidak terlepas dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Pemerintah daerah juga telah meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai tugas pembantuan dan penugasan kepada pemerintah daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, seperti: Kurang tersedianya anggaran, Kurang tersedianya sarana dan prasarana, Kurang tersedianya sumber daya manusia.

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, Pasal 6, Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan di Kawasan perbatasan antarnegara dan pulau – pulau kecil

terluar, maka Pemerintah Kota Blitar TIDAK MENERIMA tugas pembantuan dan penugasan, sebagaimana halnya dengan surat yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Blitar nomor : S-12/KPN.16098/2025 tanggal 6 januari 2025, Data realisasi Tugas Pembantuan (TP) Triwulan IV TA 2024 Kota Blitar yang disalurkan melalui KPPN Blitar adalah NIHIL.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah upaya pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah upaya pemerintah Kota Blitar untuk memastikan warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang minimal sesuai dengan ketentuan.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
- Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standard Minimal

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM 2024

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATU AN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4591	4591	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	100	0	100.00 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	92.5	92.5	0	100.00 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	98.59	98.59	0	100.00 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	100	0	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	93.51	93.51	0	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.87	0.87	0	100.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	165	165	0	100.00 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	13	13	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2024, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung

pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
- Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini
- Pembangunan Unit Sekolah Baru TKN Kepanjenlor Rp. 1.199.004.000,-
- Pembangunan Ruang Kelas Baru TKN Sukorejo Rp. 199.260.000,-
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, TKN Pakunden, TKN Kepanjenkidul, TKN Sananwetan 1 dan TKN Sananwetan 2 Kota Blitar dengan :
 1. Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Pakunden Rp. 139.910.000,-
 2. Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Kepanjenkidul Rp. 155.040.000,-
 3. Rehab sedang/berat Ruang Kelas TKN Sananwetan 1 Rp. 190.060.000,-
 4. Rehab sedang/berat Ruang Guru TKN Sananwetan 2 Rp. 91.800.000,-
- Pembangunan Sarpras dan Utilitas PAUD pada TKN Klampok Kota Blitar, Rehab sedang/berat Sarpras dan Utilitas Paud Rp. 148.311.380,-
- Pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas Sekolah, TKN Kota Blitar, TKN Pembina Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah Rp. 128.759.000,-

- Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, UPT SP TKN Karangtengah Kota Blitar, Rehab sedang/berat Sarpras dan Utilitas Paud TKN Klampok Rp. 76.840.000,-
- Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik, TK Negeri dan TK Swasta Penerima DAK Fisik PAUD se Kota Blitar, yaitu : Pengadaan APE Rp. 226.044.000,- (DAK Fisik Paud), Perlengkapan Pembelajaran (Laptop) 7 Unit Rp. 99.456.000,- (DAK Fisik PAUD), Pengadaan APE Rp. 36.050.000,- (APBD)
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, UPT SP TK Negeri se Kota Blitar
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, APE (DAK FISIK) Rp. 325.500.000,- dan APE TKN (APBD) Rp. 36.521.000,-

5. Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22993	22993	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	SD					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	90.96	90.96	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	82.65	82.65	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	88.87	88.87	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	71.53	71.53	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79.29	79.29	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	79.23	79.23	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.89	60.89	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	89.24	89.24	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	12.6	12.6	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	395	395	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	79	79	0	100.00 %
	SMP					100.00 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	95.48	95.48	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	90.68	90.68	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	91.84	91.84	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	75.2	75.2	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80.62	80.62	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	81.29	81.29	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68.43	68.43	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	94.03	94.03	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	14.47	14.47	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	302	302	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	31	31	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2024 terkait, maka Dinas Pendidikan

Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi berkelanjutan dalam bentuk :
 - Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala UPT Satuan Pendidikan Jenjang SD bertujuan memperkuat kompetensi kepala sekolah pada managerial dan supervise yang ditekankan pada peningkatan pemahaman dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, penilaian praktik kinerja guru oleh kepala sekolah serta model – model kompetensi kepala sekolah. Biaya Rp 25.000.000,-
 - Kegiatan Pelatihan IKM bagi guru kelas 3 dan 6 SD Kota Blitar Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru berkenaan dengan penerapan Kurikulum Merdeka bagi guru kelas 3 dan 6 SD, Biaya Rp 22.700.000,- yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Pebruari 2024 dan 27 – 29 Pebruari 2024 yang dikemas dalam kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
 - Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- Adapun dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar
3.1.1.
Pelatihan
Peningkatan
Kapasitas
Kepala UPT
Satuan
Pendidikan
Jenjang SD



Gambar 3.1.2. Pelatihan IKM bagi guru kelas 3 dan 6 SD Kota Blitar Tahun 2024

- Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan pada Bulan Juli – Desember 2024 bertempat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam rangka Guna peningkatan profesionalisme guru maka Dinas Pendidikan Kota Blitar bekerjasama dengan UIN Maula Malik Ibrahim berupa fasilitasi pembiayaan PPG Dalam Jabatan bagi guru PAI Kota Blitar berjumlah 6 orang dengan total biaya Rp 30.000.000,-.

Dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.1.3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan UIN Maulana Malik Ibrahim

- Kegiatan Penyediaan sarana prasarana untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan, meliputi :
 - Rehabilitasi Toilet (jamban) untuk UPT SP SDN 1 Sentul

- Rehabilitasi Toilet (jamban) untuk UPT SP SDN 2 Plosokerep
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer untuk UPT SP SDN 2 Rembang
- Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya untuk UPT SP SMPN 6



Gambar 3.1.4.
Gambar
Pembangunan
tahap 2 SMP 6

- Pembangunan Ruang Lab.Komputer beserta perabotnya dan Rehab Toilet untuk UPT SP SDN Blitar



Gambar 3.1.5.
Pembangunan
Ruang
Lab.Komputer
dan Rehab
Toilet SDN
Blitar

- Pembangunan Ruang Lab.Komputer dan Ruang UKS beserta perabotnya untuk SMPK Yohanes Gabriel

- Pembangunan Ruang Lab.Komputer dan Ruang Guru beserta perabotnya untuk SD Islam Ma'arif



Gambar 3.1.6.
Pembangunan
Ruang
Lab.Komputer
dan Ruang
Guru SD Islam
Maarif

- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta peabotnya untuk SMP Al Muhafizoh
- Perlengkapan Belajar Peserta Didik untuk SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9
- Peralatan Laboratorium IPA untuk UPT SP SMPN 4, UPT SP SMPN 6, UPT SP SMPN 8, UPT SP SMPN 9 dan SMPK Yos Sudarso
- Pengadaan Peralatan TIK berupa chromebook, converter, proyektor dan router untuk SMP Al Muhafizoh, UPT SP SDN 1 Tanggung, UPT SP SDN 2 Plosokerep, UPT SP SDN 1 Rembang, UPT SP SDN 2 Rembang, UPT SP SDN 1 Bendogerit, UPT SP SDN 1 Kepanjenkidul, SD Islam Ma'arif, SDK Yos Sudarso



Gambar 3.1.7.
Gambar
Pengadaan
TIK

- Kegiatan Pemerataan akses bagi peserta didik dengan dukungan kegiatan antara lain:

- Penyediaan biaya pengurang SPP melalui anggaran hibah bagi warga kota Blitar usia sekolah jenjang pendidikan dasar/ sederajat
- Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah antara lain pemberian seragam, tas, sepatu, atribut, kaos kaki dan pakaian olah raga bagi siswa tingkat 1, 4, dan 7, sedangkan kelas 8 dan 9 khusus mendapat pakaian olah raga
- Pelaksanaan program pinjam pakai sepeda untuk peserta didik jenjang SMP
- Kegiatan pencapaian skor kemampuan literasi dan numerasi dengan bentuk kegiatan :
 - Pemberian bantuan penunjang tugas bagi pegawai Non ASN pada satuan pendidikan negeri
 - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimtek dan workshop
 - Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan
- Peningkatan capaian iklim inklusivitas, iklim keamanan dan iklim kebhinekaan melalui kegiatan

6. Pendidikan Kesetaraan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	841	841	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	75.95	75.95	0	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	71.43	71.43	0	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	59.6	59.6	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	61.61	61.61	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	69.1	69.1	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	65.89	65.89	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.85	59.85	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	23	23	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	100	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%		
3	Pendidikan Kesenjangan	100%	100%	100%		

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2024 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kota Blitar serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran dana sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1.027.240.770.532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	211.618.449.139
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	70.315.380.097
	APBD	69.003.450.097
	A. APBD MURNI	2.956.114.453
	B. APBD DAU	19.549.185.644
	C. APBD DAK FISIK	3.733.480.000
	D. APBD DAK NON FISIK	26.278.900.000
	E. DANA BAGI HASIL	16.485.770.000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	1.311.930.000

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			KOTA BLITAR		70,315,380,09 7	60,913,226,42 8	86.63 %
1			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		70,315,380,09 7	60,913,226,42 8	86.63 %
	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		21,685,889,34 3	19,513,697,94 4	89.98 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	214,321,000	203,509,288	94.96 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	90,000,000	90,000,000	100.0 0 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	1,834,440,000	1,711,050,000	93.27 %
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,030,299,600	1,029,150,000	99.89 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	285,583,200	270,039,800	94.56 %

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	35,483,000	24,489,750	69.02 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	11,734,300,000	10,668,147,957	90.91 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	36,239,000	33,528,200	92.52 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	871,235,400	777,830,525	89.28 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	110,000,000	108,169,450	98.34 %
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	55,713,000	40,639,925	72.95 %
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	15,900,000	14,597,950	91.81 %
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiata n	54,042,000	43,000,000	79.57 %
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	267,990,000	238,408,150	88.96 %
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2,888,410,900	2,806,415,200	97.16 %
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,669,779,043	1,064,836,499	63.77 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	10,600,000	9,091,250	85.77 %
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidi kan	481,553,200	380,794,000	79.08 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				21,685,889,34 3	19,513,697,94 4	89.98 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			36,324,440,18 9	29,958,271,89 6	82.47 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	16,485,770,00 0	12,309,126,53 1	74.67 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	129,500,000	105,428,594	81.41 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	832,690,700	675,985,345	81.18 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Kepala Dinas	Unit	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	490,481,915	433,369,617	88.36 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0%
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	214,514,000	209,991,647	97.89 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	451,449,240	424,404,000	94.01 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	721,285,900	693,788,000	96.19 %
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	348,645,000	339,996,013	97.52 %
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	387,500,000	370,500,000	95.61 %

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	419,363,900	408,770,000	97.47 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	230,348,500	224,021,350	97.25 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	27,631,800	22,971,900	83.14 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	9,924,600,000	8,561,599,661	86.27 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	45,775,000	42,665,100	93.21 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	36,290,000	14,451,300	39.82 %
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokum en	0	0	0%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komuni tas	10,600,000	2,597,500	24.50 %
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiata n	54,400,000	51,600,000	94.85 %
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	512,926,800	435,866,280	84.98 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	444,398,200	426,991,509	96.08 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	37,100,000	23,897,000	64.41 %
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1,259,060,800	1,157,925,200	91.97 %
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3,104,048,434	2,869,877,750	92.46 %
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	156,060,000	152,447,599	97.69 %
	JUMLAH INDIKATOR				36,324,440,18 9	29,958,271,89 6	82.47 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			8,272,058,419	7,768,419,357	93.91 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	471,734,019	346,370,492	73.42 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	320,614,809	315,141,487	98.29 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat	Unit	75,000,600	73,547,704	98.06 %

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	51,712,000	37,600,000	72.71 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	2,110,400,000	1,870,700,000	88.64 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	270,941,991	266,204,000	98.25 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	125,920,400	121,356,300	96.38 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	25,006,600	24,456,500	97.80 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	3,460,200,000	3,459,245,099	99.97 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	24,970,000	22,000,000	88.11 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	27,910,000	27,361,800	98.04 %
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokum en	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	12,432,000	12,210,000	98.21 %
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	225,698,900	219,765,250	97.37 %
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	45,303,000	44,727,000	98.73 %
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	12,788,400	12,376,500	96.78 %
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,011,425,700	915,357,225	90.50 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				8,272,058,419	7,768,419,357	93.91 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			4,032,992,146	3,672,837,231	91.07 %

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1,396,930,000	1,390,400,000	99.53 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	423,552,337	407,235,020	96.15 %
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	651,770,000	598,677,440	91.85 %
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	24,641,700	21,160,400	85.87 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,159,800,000	901,222,817	77.71 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	25,009,300	22,058,000	88.20 %
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	5,158,000	5,093,000	98.74 %
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	127,000,640	119,084,750	93.77 %
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	135,046,169	132,974,304	98.47 %
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	17,400,000	15,410,000	88.56 %
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	66,684,000	59,521,500	89.26 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,032,992,146	3,672,837,231	91.07 %
	JUMLAH PROGRAM				70,315,380,097	60,913,226,428	86.63 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA						

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut :

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan	Peg. UPT PLD
A.	Pegawai	84	2472	27
1.	Jenis kelamin:			
	Laki - Laki	45	726	15
	Perempuan	39	1746	12
2.	Status kepegawaian:			
	PNS	63	685	1
	CPNS	0	0	
	PPPK	1	371	
	Tenaga Jasa Lainnya/Outsorsing	18	0	26
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT, GTY, PTY dan Honorer)	2	1416	
3.	Pendidikan			
	SD/ sederajat	1	27	
	SMP/ sederajat	1	54	
	SMA/SMK/ sederajat	26	428	10
	D1	-	13	
	D2	-	35	1
	D3	2	18	4
	S1/D-IV	39	1816	11
	S2	15	81	1
4	Pangkat /Gol.Ruang			

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan	Peg. UPT PLD
	Tidak ada	22	1679	26
		0	0	
	I/a	-	1	
	I/b		1	
	I/c	-	1	
	I/ d	-	2	
	II/a	2	11	
	II/b	-	9	
	II/c	4	6	
	II/d	4	2	
	III/a	16	133	
	III/b	7	150	
	III/c	4	76	
	III/d	11	208	1
	IV/a	3	62	
	IV/b	4	93	
	IV/c	7	38	
	IV/d	-		
5.	Jenis PTK			
	Pendidik	-	1810	-
	Tenaga Kependidikan	-	662	-
6	Jenis Kepegawaian			
	Outsourcing, Tenaga Jasa Lainnya, Kontrak	18		26
	Struktural	12		1
	Fungsional Khusus	27	2056	
	Fungsional Umum	25	416	
	PTT	2		

4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Pengumpulan data atas angka partisipasi murni (APM, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi sekolah (APS) masih didasarkan atas	Akan dilakukan koordinasi lebih intensif

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
	jumlah peserta didik per usia sekolah yang terdapat pada aplikasi Data pokok Pendidikan, untuk data pada aplikasi DO/LTM masih akan dilakukan survey lebih lanjut	
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Perhitungan capaian dan kebutuhan masih mengandalkan data pada laporan pendidikan dan data pokok pendidikan	Akan dilakukan koordinasi lebih intensif
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Beberapa sub kegiatan untuk pendukung capaian SPM Bidang pendidikan belum dapat diambil karena menyesuaikan kebutuhan yang lebih urgen yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran di daerah	Selalu komunikasi mengenai anggaran dengan stakeholder
4 .	PELAKSANAAN	
	Perlu sinkronisasi data untuk perhitungan APM, APK dan APS antara Dinas pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Selalu komunikasi dengan stakeholder / pihak terkait
5 .	LAIN - LAIN	
	-	

4.2 PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diperbaharui dengan Permen Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terbit pada April 2024.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan Balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan target pencapaian SPM yang diperbaharui dengan Permen Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terbit pada April 2024.

Adapun jenis pelayanan dasar Bidang Kesehatan antara lain :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM 2024

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2311	2311	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2181	2181	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	2326	2326	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	2326	2326	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2078	2078	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2326	2326	0	100.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	2326	2326	0	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	2265	2265	0	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2333	2333	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2183	2183	0	100.00 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah Ibu hamil)	Botol	28	28	0	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)*	Orang	12	12	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	58	58	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	60	60	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	2311	2311	0	100.00 %

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);

- e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

$$1,10 \times \text{Crude Bird Rate} \times \text{Jumlah penduduk} \\ (\text{pada tahun yang sama})$$

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil *antenatal care* (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- b. Kelas ibu hamil
- c. PMT pemulihan ibu KEK
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- e. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kelas ibu hamil, Pendataan ibu hamil P4K, Penyuluhan ibu hamil, Monev Kescatin, dan Supervisi fasilitatif yang dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2024

dengna lokasi kegiatan pada UPT Puskesmas se-Kota Blitar. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 201.362.869,-

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

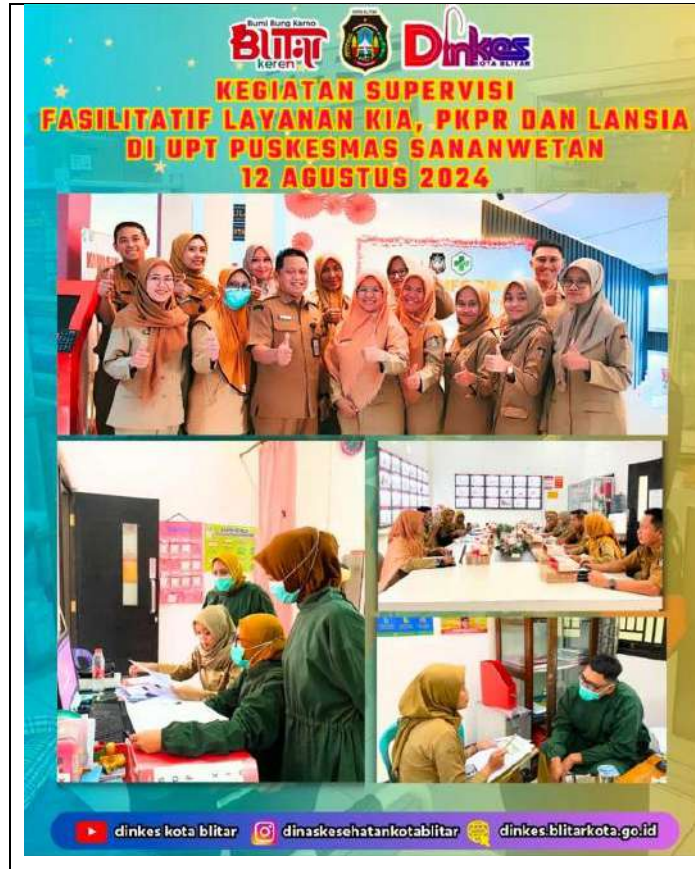
	Gambar 3.2.1. Kegiatan kelas Ibu Hamil di UPT Puskesmas Kepanjenkidul
	



Gambar 3.2.2.
Kegiatan Senam
Ibu Hamil di UPT
Puskesmas
Kepanjenkidul



Gambar 3.2.3.
Kegiatan
Penatalaksanaan
Ibu Hamil di UPT
Puskesmas
Sananwetan



Gambar 3.2.4.
Kegiatan Supervisi
Layanan KIA,
PKPR dan Lansia
di UPT
Puskesmas
Sananwetan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2304	2304	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	273	273	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	365	365	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	222	222	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)					
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	8	8	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	29	29	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	58	58	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	0	100.00 %

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan

klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu dengan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 1. Dokter dan bidan, atau
 2. 2 orang bidan, atau
 3. Bidan dan perawat.

Dan kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

- a. Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- c. Penyuluhan KB pasca salin
- d. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan periode Januari – Desember 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah :

- Rakor dengan masyarakat terkait pemantauan ibu hamil risti
- Rakor dengan perangkat kelurahan dan masyarakat terkait perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
- Monev P4K
- Monev pendampingan ibu hamil risti

- Pemeriksaan IVA dan SADANIS
- Penyuluhan KB pasca salin
- Refreshing kader pendamping ibu hamil
- Pemeriksaan papsmear
- Pendataan PUS KB Aktif dan PUS 4T
- Rakor dan monev program kesehatan keluarga.

Pendataan ibu hamil risti oleh kader dan pemasangan stiker, selanjutnya ibu hamil risti didampingi oleh kader dan tenaga kesehatan.

Pendampingan ibu hamil risiko tinggi (risti) adalah upaya untuk membantu ibu hamil yang berisiko tinggi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan konseling, serta memantau kesehatan ibu hamil. Dengan alokasi Anggaran Rp. 117.776.100,-

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.2.5. Iva dan Sadanis di Pustu Klampok.



Gambar 3.2.6.
Kegiatan Koordinasi
P4K dan Ibu Hamil
Risti di Puskemas
Sanawetan.



Gambar 3.2.7.
Kegiatan Monev
Pendampingan Ibu
Hamil Risti di
Puskemas
Sanawetan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2169	2169	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	2288	2288	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	91	91	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	45	45	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	135	135	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	1542	1542	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1428	1428	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	13	13	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	52	52	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	6	6	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	6	6	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	0	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	12	12	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan)

hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 3. Injeksi vitamin K1.
 4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan

Kegiatan Tahun 2024 dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan alokasi anggaran Rp. 34.403.800 antara lain :

- Pengadaan form pelayanan KIA
- Refreshing drill kegawatdaruratan di poned
- Rakor pelaksanaan SHK
- Evaluasi pelaksanaan SHK
- Pemeriksaan sampel SHK

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.8. pendampingan tim ahli kegawatdaruratan poned di UPT Puskesmas Kepanjenkidul



Gambar 3.2.9. Monev pelaksanaan SHK

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8665	8665	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	2962	2962	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	6171	6171	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	5441	5441	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1647	1647	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	7341	7341	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2130	2130	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2144	2144	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2167	2167	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2144	2144	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	2167	2167	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2273	2273	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2282	2282	0	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	26725	26725	0	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	20	20	0	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	10	10	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	13	13	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	45	45	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	59	59	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	6	6	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	275	275	0	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	850	850	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu)

Pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- 4) pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 5) pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- 6) pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak,

maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d. Pemantauan perkembangan balita.
- e. Pemberian kapsul vitamin A.
- f. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g. Pemberian imunisasi lanjutan.
- h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i. Edukasi dan informasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Kegiatan tahun 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan posyandu balita meliputi penimbangan, pemberian imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan Kesehatan dengan anggaran Rp.6.216.000,- antara lain :

- Posyandu Balita
- Monev Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Rapat pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil, ANC, dan stunting

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.2.10.
Kegiatan Posyandu
Balita



Gambar 3.2.11.
Pendampingan tim ahli
sp.A dan spOG



Gambar 3.2.12.
Kegiatan Monev
Posyandu Balita di
UPT Puskesmas
Kepanjenkidul



Gambar 3.2.13.
Kegiatan Posyandu
Balita di Bendogerit



Gambar 3.2.14.
Kegiatan Monev
MTBS di Dinkes Kota
Blitar.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20014	20014	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	4500	4500	0	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	1800	1800	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	20014	20014	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	1608	1608	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	24	24	0	100.00 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	319200	319200	0	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	3	3	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	4938	4938	0	100.00 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	6	6	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	1093	1093	0	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	3	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3	3	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	134	134	0	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1760	1760	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- 1) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- 2) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- 4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- 5) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala; dan
- 6) pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan

tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a. Penilaian status gizi.
- b. Penilaian tanda vital.
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar :

- a. Monitoring dan evaluasi UKS

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yaitu Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- 1) Skrining Kesehatan dan
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian SPM meliputi Pemeriksaan kesehatan fisik, Pemeriksaan kebersihan diri, Pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan Pemeriksaan kesehatan mental, dengan Anggaran: Rp. 30.318.200,-. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

- Skrining Kesehatan pada anak sekolah
- Posyandu remaja
- Pembinaan posyandu remaja
- Pembinaan kesehatan remaja pada anak didik LPKA
- Monev kegiatan Aksi Bergizi di sekolah
- Rapat koordinasi sekretariat tetap tim pembina usaha kesehatan sekolah

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.2.15.
Screening
Kesehatan di SMAN
2 Blitar



Gambar 3.2.16.
Screening
Kesehatan di SD
Kepanjenkidul



Gambar 3.2.17.
Pemeriksaan HB
pada Siswi SMP

	Gambar 3.2.18. Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan HB dan Pemberian TTD di SMA Muhammadiyah
	Gambar 3.2.19. Kegiatan Posyandu Remaja



Gambar 3.2.20.
Kampanye Aksi
Bergizi

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100148	100148	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3	3	0	100.00 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	18	18	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	29	29	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	18	18	0	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	32065	32065	0	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	3	3	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	4983	4983	0	100.00 %
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	1	1	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen	300	300	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	8	8	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	2228	2228	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	7	7	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	20	20	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	24	24	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	115	115	0	100.00 %

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- a) pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
 - 1) Dokter;
 - 2) Bidan;
 - 3) Perawat;
 - 4) Nutrisiionis/Tenaga Gizi; dan
 - 5) petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.

- b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
 - 1) deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
 - 2) deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
 - 3) deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
 - 4) deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
 - 5) pemeriksaan ketajaman penglihatan;
 - 6) pemeriksaan ketajaman pendengaran;
 - 7) deteksi dini kanker dilakukan melalui:
 - pemeriksaan payudara klinis dan
 - pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pelayanan edukatif
- c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:
 - 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - 2. Pengukuran tekanan darah.
 - 3. Pemeriksaan gula darah.
 - 4. Anamnesa perilaku berisiko
 - 5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan

Kegiatan tahun 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Prolanis adalah program pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit kronis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

Kegiatan Prolanis meliputi: senam bersama, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan gula darah, pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, dan lingkar perut, pemeriksaan penunjang laboratorium, serta konsultasi dengan dokter atau tenaga medis lain. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 30.318.200,-

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.2.21.
Kegiatan prolanis Di
UPT Puskesmas
Kepanjenkidul



Gambar 3.2.22.
Kegiatan
penyuluhan
prolanis Di UPT
Puskesmas
Sananwetan

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21683	21683	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	67	67	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21683	21683	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21683	21683	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	21683	21683	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	21683	21683	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	4500	4500	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	3	3	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3	3	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	3	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	320	320	0	100.00 %

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
- minimal dilakukan satu tahun sekali
- Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abbreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

- a. Posyandu Lansia
- b. PMT penyuluhan
- c. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yaitu Pemberian layanan Kesehatan pada warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi Kegiatan di Posyandu Lansia meliputi pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan aktivitas fisik. Pemeriksaan kesehatannya meliputi: pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran IMT, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Untuk lansia yang tidak datang ke posyandu atau mobiltas rendah, maka dilakukan homecare/kunjungan rumah oleh tenaga Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.031.300,-. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar
3.2.23
Posyandu
lansia di
Wisma Indah

	Gambar 3.2.24 Kegiatan Homecare Lansia di UPT Puskesmas Kepanjenkidul
	Gambar 3.2.25. Kegiatan Homecare Lansia di UPT Puskesmas Sanawetan

	Gambar 3.2.26. Kegiatan posyandu Lansia di UPT Puskesmas Sanawetan
	Gambar 3.2.27. Pemeriksaan Kesehatan Lansia di UPT Puskesmas Sanawetan

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	49633	49633	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	2	2	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	425938	425938	0	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	32	32	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	3	3	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	4	4	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	17	17	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	20	20	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	2	2	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	37	37	0	100.00 %

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- a. sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- b. penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
 - memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
 - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- c. penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- d. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

- Posbindu PTM
- Peningkatan kualitas kader kesehatan
- Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pada tahun 2024 yaitu Posbindu PTM bertujuan untuk mendeteksi dini dan memantau faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). PTM yang dimaksudkan adalah penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma, dan kanker.

Kegiatan Posbindu PTM (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) meliputi: wawancara untuk menggali informasi faktor risiko, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pemeriksaan fungsi paru sederhana, pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asetat), konseling dan penyuluhan, olahraga Bersama, rujukan ke fasilitas kesehatan dasar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran 11.537.900,-. Dokumentasi kegiatan antara lain :



Gambar 3.2.28.
Monev posbindu
dan PTM di UPT
Puskesmas
Sanawetan



Gambar 3.2.29.
Posbindu di
Kelurahan Gedog



Gambar 3.2.30.
Monev Cakupan
PTM di UPT
Puskesmas
Sanawetan

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4061	4061	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	183830	183830	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	11	11	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	33605	33605	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	3	3	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	2	2	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	17	17	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	8	8	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	37	37	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	5	5	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	5	5	0	100.00 %

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

- a. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
- b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 1. Dokter/DLP
 2. Perawat
 3. Nutrisionis/Tenaga Gizi
- e. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - Edukasi
 - Aktivitas fisik
 - Terapi nutrisi medis
 - Intervensi farmakologis
- f. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- g. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu

satu tahun yang sama. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

- a. Posbindu PTM
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
- c. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2024 yang mendukung pencapaian SPM adalah Skrining PTM institusi merupakan kegiatan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan di berbagai lembaga, seperti di OPD-OPD, kejaksaan, masyarakat umum dengan anggaran Rp. 302.032.800,-.

Kegiatan PTM di institusi meliputi :

- Penyuluhan faktor risiko PTM dan cara pencegahannya
- Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan Body Mass Index (BMI)
- Pengecekan tensi dan lingkar perut
- Pemeriksaan kolesterol, GDS, dan asam urat
- Konsultasi gizi

Adapun dokumentasi kegiatan antara lain :



Gambar 3.2.31.
Kegiatan Posbindu
di Kejaksaan
Negeri Blitar



Gambar 3.2.32.
Pemeriksaan
Kesehatan di
Diskominfotik.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	291	291	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik	Buku	7	7	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	117986	117986	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	46570	46570	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	11189	11189	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	104	104	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	7	7	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	16	16	0	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	2	2	0	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	2	2	0	100.00 %

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan

meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.

- b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) Pemeriksaan status mental
 - 2) Wawancara
- c. Edukasi kepatuhan minum obat.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat:

- a. Layanan psikiater
- b. Pos Kesehatan Jiwa
- c. Peningkatan kualitas kader jiwa
- d. Kunjungan rumah ODGJ
- e. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan tahun 2024 yang mendukung capaian SPM ini Kegiatan posyandu jiwa meliputi pemeriksaan kesehatan mental, terapi, pengobatan, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, posyandu jiwa juga melibatkan keluarga dan masyarakat untuk mendukung kesembuhan pasien.

Kegiatan pada posyandu jiwa meliputi: pemeriksaan rutin, terapi dan pengobatan, sesi konseling, pemberdayaan pasien. Pada posyandu jiwa juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa dari RSJ Lawang pada minggu ketiga setiap bulan. Kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 37.780.000,-. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.2.33.
Kegiatan layanan spesialis Jiwa di UPT Puskesmas Sananwetan



Gambar 3.2.34.
Pelatihan kader jiwa di UPT Puskesmas Sananwetan



Gambar 3.2.35.
Monev program
Jiwa di UPT
Puskesmas
Sananwetan



Gambar 3.2.36.
Kegiatan
Poskeswa Damar
Jati

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis					100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2854	2854	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	20	20	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	8100	8100	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	3507	3507	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	2350	2350	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4	4	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	8 . Tuberkuilin	Vial	26	26	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	8	8	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	12	12	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	26	26	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	3	3	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	120	120	0	100.00 %

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat
- b. Pemeriksaan klinis
- c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

- a. Paguyuban MANTAB TOSS TB
- b. Penguatan jejaring PPM Penanggulangan TBC
- c. Kelompok masyarakat peduli TBC
- d. Peningkatan kualitas kader TBC
- e. PMT pasien TBC
- f. Skrining ketuk pintu TBC
- g. Pendampingan pasien TBC
- h. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis melalui Skrining TBC adalah pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan kuman TB di dalam tubuh. Skrining TBC dapat dilakukan dengan tes mantoux atau tes dahak. Tujuan skrining TBC adalah untuk menemukan kasus TBC lebih awal, mengobati TBC lebih cepat, mencegah penularan TBC, mencegah kematian akibat TBC, dan mencegah resistensi obat. Dengan alokasi anggaran Rp. 464.032.501,- melalui kegiatan :

- Grebek TB
- Penemuan kasus TB Aktif
- Investigasi kontak TBC
- PMO Penyakit TBC

- Monev Penanggulangan Penyakit TBC
- Workshop Ditric Public Private Mix
- Monev Kader TBC
- Monev Penanggulangan Penyakit TBC
- Monev Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC
- Pendampingan mantap TBC

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

	Gambar 3.2.37. Skrining TBC di SMK 1 Islam Blitar.
	Gambar 3.2.38. Pengarahan siswa dan walimurid terkait TBC.



Gambar 3.2.39. Penyuluhan Kesehatan dan Skrining TBC di ponpes Bustanul Mutaalim.



Gambar 3.2.40. Monev program TBC.



Gambar 3.2.41. Sosialisasi dan Skrining TBC di Kel Sananwetan

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3410	3410	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terepenuhi	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6	6	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6900	6900	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1750	1750	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1750	1750	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	4	4	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	8	8	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	26	26	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	6	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	5	5	0	100.00 %

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

- a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS
- b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS
- c. Penguatan jejaring populasi kunci
- d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas
- f. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan 2024 yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan VCT mobile adalah kegiatan konseling dan tes HIV/AIDS secara keliling yang menyasar kelompok berisiko. VCT merupakan singkatan dari Voluntary Counseling and Testing.

VCT mobile bertujuan untuk: menemukan penderita HIV/AIDS, mencegah penularan HIV/AIDS, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan penanganan yang baik kepada penderita HIV. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 90.261.100,- meliputi :

- Penyuluhan HIV/AIDS di Kelurahan se-Kota Blitar
- VCT Mobile HIV dan IMS pada LPKA dan populasi kunci
- Pengadaan Reagen HIV-AIDS
- Monev Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
- Pertemuan Pemberdayaan Dukungan Sebaya HIV/AIDS
- Supervisi Layanan Tes HIV-IMS.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

 KEGIATAN UPT PUSKESMAS KEPANJENKIDUL Selasa, 08 Oktober 2024 PENYULIHAN HIV/AIDS DI KELURAHAN SENTUL FIND US www.puskesmas-kepanjenkidul.blitarkota.go.id @pkmkepanjenkidul	Gambar 3.2.42. Penyuluhan HIV/AIDS di Kelurahan Sentul
 KEGIATAN UPT PUSKESMAS KEPANJENKIDUL Selasa, 08 Oktober 2024 PENYULIHAN HIV/AIDS DI KELURAHAN KAUMAN FIND US www.puskesmas-kepanjenkidul.blitarkota.go.id @pkmkepanjenkidul	Gambar 3.2.43. Penyuluhan HIV/AIDS di Kelurahan Kauman

	Gambar 3.2.44. Kegiatan Mobile VCT Populasi Kunci
	Gambar 3.2.45. Quarter Meeting of COC/SUFA

INDEKS PENCAPAIAN SPM TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80XA) + (20XB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PRIPURNA
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4	Pelayanan kesehatan balita	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1.027.240.770.532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	90.717.514.326
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.332.530.570
	APBD	1.332.530.570
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1.332.530.570
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BLITAR				1,332,530,570	1,211,928,599	90.95 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,332,530,570	1,211,928,599	90.95 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,332,530,570	1,211,928,599	90.95 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	201,362,869	198,418,200	98.54 %
		2	Pengelolaan pelayanan	Orang	117,776,100	117,776,100	100.00 %

N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			kesehatan Ibu Bersalin				
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	34,403,800	29,119,000	84.64 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	6,216,000	6,206,000	99.84 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	29,778,000	28,554,857	95.89 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	30,318,200	29,568,200	97.53 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	7,031,300	6,991,300	99.43 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	11,537,900	11,537,900	100.00 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	302,032,800	298,523,800	98.84 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	37,780,000	37,780,000	100.00 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	464,032,501	357,466,450	77.03 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	90,261,100	89,986,792	99.70 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,332,530,570	1,211,928,599	90.95 %
	JUMLAH PROGRAM				1,332,530,570	1,211,928,599	90.95 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN
	TIDAK ADA					

4.2.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kota Blitar yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pegawai	298
1.	Jenis kelamin	298
	Laki - Laki	63
	Perempuan	235
2.	Status kepegawaian:	298
	PNS	230
	CPNS	0
	PTT	6
	PPPK	62
3.	Pendidikan	298
	SD/ sederajat	1
	SMP/ sederajat	1
	SMA/SMK/ sederajat	22
	D1	1
	D2	0
	D3	156
	S1/D-IV	112
	S2	5

4.2.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Belum ada sosialisasi terkait penerapan PMK terbaru	Akan dilakukan penetapan perhitungan kebutuhan berdasarkan target capaian SPM yang ditetapkan oleh Tingkat Kota
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	-	-

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Pada saat penganggaran harga katrid tcm 252.400 / tes. tetapi ada perubahan harga pada saat pengadaan mnjadi 189.255 / tes	
4 .	PELAKSANAAN	
	- Masih ada kasus kematian ibu. - Masih ada kasus keguguran - Adanya kasus kematian balita - Ada 3 org ODGJ yg pindah domisili sehingga tdk mendapat pelayanan optimal sesuai standar - Belum semua lansia mengakses pelayanan kesehatan lansia di puskesmas, pustu dan posyandu lansia	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara berkesinambungan
5 .	LAIN - LAIN	
	Masih ada ibu hamil yg belum mencapai trimester 3. Krn yg masuk capaian itu yg sdh dilayani ANC 6x sampai trimester 3 Balita harus mendapatkan 8 pelayanan kesehatan baru bisa dimasukkan capaian	Koordinasi dengan unit pelayanan Kesehatan untuk pelapora data SPM Koordinasi dengan unit pelayanan Kesehatan untuk pelapora data SPM

4.3 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tersebut juga memuat penjelasan

terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap

warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM 2024

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	531	531	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	531	531	0	100.00 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	531	531	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Kegiatan Penyusunan Database SPAM Jaringan Perpipaan Kota Blitar Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 sd 15 Desember 2024. Pelaksana dari penyedia PT. KARTA DAYA REKSABUMI nilai pekerjaan Rp. 99.345.000, Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pendataan By Name By Address (BNBA) pengguna jaringan perpipaan air minum Kota Blitar

2. Membuat peta jaringan SPA serta saluran PDAM yang berbasis web GIS
3. Menyediakan informasi yang akurat dan real time mengenai kondisi jaringan pipa

Dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.3.1.
Buku hasil
Penyusunan
Database
SPAM Jaringan
Perpipaan Kota
Blitar Tahun
2024

Kegiatan Sosialisasi Sistem Penyediaan Air Minum tanggal 22 Oktober 2024 berupa Pembinaan Teknis Pengelola SPAM dilakukan 1 kali dalam setahun dengan peserta rapat KPSPAM Kota Blitar dan Pemangku Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 52.400.000,- Dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.3.2.
Sosialisasi
Sistem
Penyediaan
Air Minum

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	232	232	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	188	188	0	100.00 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	188	188	0	100.00 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan	Rumah Tangga	188	188	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Kelurahan Gedog lokasi Kelurahan Gedog tanggal 29 Mei 2024 sd 30 Desember 2024. Dana DAK Fisik Reguler Rp. 492.324.000 Dana DAK Fisik Reguler, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV Oleh KSM TIRTA ABADI.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.3.3. Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Kelurahan Gedog

Pembangunan tangki septic komunal (5-10 KK) Kelurahan Karangtengah lokasi Kelurahan Karangtengah tanggal 12 Februari 2024 sd 11 Maret 2024.

Untuk 2 (dua) Unit Tangki Septik Komunal dengan 15 Sambungan Rumah, Rp. 168.000.000 Dana APBD, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV Oleh KSM SUMBER SEHAT. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.3.4.
Pembangunan
tangki septik
komunal (5-10
KK) Kelurahan
Karangtengah

Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) Kelurahan Kauman di Kelurahan Kauman pada tanggal 29 Mei 2024 sd 30 Desember 2024.

Untuk 10 (sepuluh) Unit Tangki Septik Komunal dengan 84 Sambungan Rumah, Rp. 840.000.000 Dana Dana DAK Fisik Reguler, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV oleh KSM CEMPOKO MULYO

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.3.5.
Pembangunan
tangki septik
komunal (5-10
KK) Kelurahan
Kauman

Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) Kelurahan Klampok berlokasi di Kelurahan Klampok tanggal 29 Mei 2024 sd 30 Desember 2024.

Untuk 5 (lima) Unit Tangki Septik Komunal dengan 43 Sambungan Rumah, Rp. 420.000.000 Dana Dana DAK Fisik Reguler, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV oleh KSM SAWAHAN.



Gambar 3.3.6.
Pembangunan
tangki septik
komunal (5-10
KK) Kelurahan
Klampok

Pembinaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sosialisasi awal pelaksanaan kegiatan Pembangunan tangka septic komunal dan IPAL dilakukan di 3 lokasi di Kelurahan Karangtengah, Gedog, Kauman dan Klampok serta Pembinaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan 2 kali dalam setahun dengan anggaran Dana bersumber APBD sebesar Rp. 85.818.900.



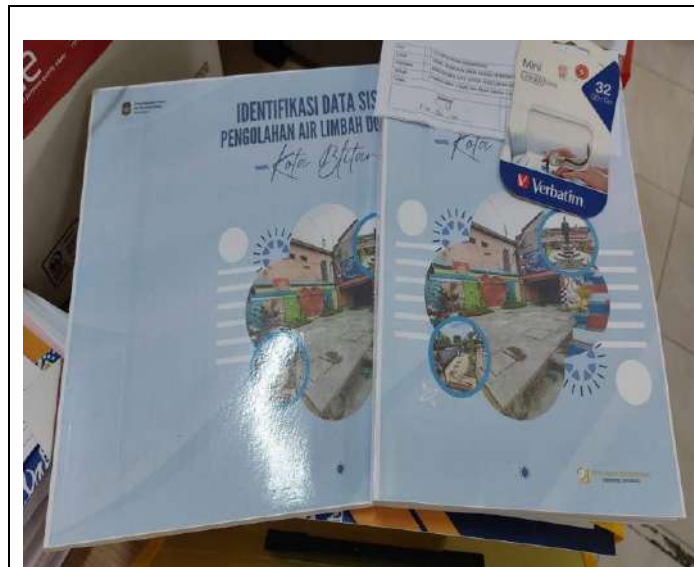
Gambar 3.3.7.
Pembinaan Teknis
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Domestik





Identifikasi Data Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Blitar Kota Blitar tanggal 17 September 2024 – 15 Desember 2024, Pelaksana CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING, Nilai Kontrak Rp. 99.300.000. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Mengidentifikasi Data SPALD yang ada di Kota Blitar
2. Mengidentifikasi By Name By Address penerima manfaat SR dan foto kondisi SPALD
3. Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan pada aplikasi SIINSAN
4. Pendataan Rumah yang belum memiliki jamban



Gambar 3.3.8.
Buku Identifikasi
Data Sistem
Pengolahan Air
Limbah Domestik

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan Pelayanan	100%	100%	100%		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
	Pengolahan air limbah Domestik					

4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1.027.240.770.532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	63.051.923.610
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4.920.195.200
	APBD	3.638.170.200
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1.819.085.100
	C. APBD DAK FISIK	1.819.085.100
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	1.282.025.000

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

N o	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			KOTA BLITAR		5,106,824,100	4,862,549,316	95.22 %
1			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		152,400,000	121,661,000	79.83 %
	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		152,400,000	121,661,000	79.83 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Doku men	152,400,000	121,661,000	79.83 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/p erluasan/perbaikan SPAM	Doku men	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Peny eleng gara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Bada n Usah a	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelo mpok Masy araka t	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%

No	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Peny eleng gara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lemb aga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Oran g	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Doku men	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ Detik	0	0	0%

N o	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				152,400,000	121,661,000	79.83 %
	JUMLAH PROGRAM				152,400,000	121,661,000	79.83 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3,672,399,100	3,458,863,316	94.19 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			3,672,399,100	3,458,863,316	94.19 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Doku men	0	0	0%

N o	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perl _u asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perl _u asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Oran g	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelo mpok Masy araka t	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Oran g	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/pe ningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Doku men	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Ruma h Tangg a	814,649,200	725,576,000	89.07 %
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /H ari	0	0	0%

No	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /H ari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Doku men	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	482,567,000	407,235,816	84.39 %
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /H ari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /H ari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /H ari	522,324,000	519,324,000	99.43 %
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /H ari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /H ari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /H ari	0	0	0%

N o	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /H ari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /H ari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /H ari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /H ari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Ruma h Tangg a	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Peny eleng gara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /H ari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Ruma h Tangg a	1,512,000,000	1,503,000,000	99.40 %
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Oran g	85,818,900	53,995,500	62.92 %

N o	PR OG RA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Doku men	255,040,000	249,732,000	97.92 %
	JUMLAH INDIKATOR				3,672,399,100	3,458,863,316	94.19 %
	JUMLAH PROGRAM				3,672,399,100	3,458,863,316	94.19 %
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Kegiatan PDAM		1,282,025,000	1,282,025,000	100.00 %

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	38
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	29
	Perempuan	9
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	35
	CPNS	-
	Tenaga Lainnya (PTT)	2
	PPPK	1
3.	Pendidikan	
	SD/ sederajat	-
	SMP/ sederajat	3
	SMA/ SMK/ sederajat	8
	D1	-
	D2	-
	D3	6
	S1/ D-IV	16
	S2	5

4.3.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Keterbatasan personil	Koordinasi untuk pemenuhan ketengaan
	Perubahan indikator perlu mematakan ulang atas data yang ada	Koordinasi internal Satker untuk tindaklanjut
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum tersedianya BNBA (by Name By Adress) Kebutuhan	Perencanaan program kegiatan
	Perubahan mutu layanan memerlukan perhitungan ulang kebutuhan berdasarkan indikator	Koordinasi internal Satker untuk tindaklanjut
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Belum tersedianya masterplan perencanaan, pentahapan dan kebutuhan atas anggaran yang dibutuhkan	Perencanaan masterplan dengan menyesuaikan prioritas program kegiatan
	Keterbatasan dana yang tersedia	Perencanaan anggaran dengan menyesuaikan prioritas program kegiatan
4 .	PELAKSANAAN	
	Kurang optimalnya KPP pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun	Melakukan koordinasi secara intensif
	Masih belum terpisahnya regulator dan operator layanan	
	Lemahnyaperan aktif masyarakat	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif
5 .	LAIN - LAIN	

4.4 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

4.4.2.Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya dan Pemerintah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara mendapat pelayanan dasar tersebut. Adapun target capaian pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM 2024

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KI20240222043646300222					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3	3	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Dilayani/ Dipenuhi	/Terpenuhi	/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan

Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

3) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- b. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- c. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Kegiatan Persiapan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Kegiatan ini dilaksanakan di Jum'at, 26 April 2024 yang bertujuan untuk memberikan pengarahan untuk tim satgas dan tim pendamping lapangan untuk selalu siaga, dapat melaksanakan pendataan dan verifikasi apabila terjadi bencana dan relokasi akibat Program Pemerintah Daerah.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.1
Pengarahan
untuk tim
satgas dan tim
pendamping
untuk
kebencanaan

2. Kegiatan Pemantaban Tugas Tim Satgas dan Fasilitator Serta Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memantabkan tugas tim satgas dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya letak rumah, penataan rumah, memperhatikan aspek kesehatan, bahaya kebakaran, dan mewaspadaai rumah apabila terdapat di sempadan sungai. Sosialisasi ini dihadiri oleh LPMK, RW disekitar sungai lahar, Kelurahan, Kecamatan dan materi disampaikan oleh pihak yang yang membidangi mengenai rumah dalam aspek kesehatan, standart teknis rumah sederhana, bahaya bencana yang ada di Kota Blitar serta pertauran tentang sempadan sungai menurut aspek Sumber Daya Alam. Peserta sejumlah ± 75 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 13.760.000.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.2.
Pemantapan Tugas
Tim Satgas dan
Fasilitator serta
Sosialisasi Standart
Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi
Rumah

3. Verifikasi dan Survey lapangan rumah terdampak bencana pada Rabu, 17 Januari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan kelurahan tentang terjadi kerusakan rumah akibat Angin kencang yang

disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Dengan adanya verifikasi dan survey lapangan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.3.
Verifikasi dan Survey
Lapangan Rumah
Terdampak Bencana

4. Kegiatan Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi rumah sehingga dapat dihuni kembali dengan nyaman dan aman. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi yaitu pada bulan Februari 2024. Anggaran Rehabilitasi Rumah akibat bencana ini yaitu Rp. 7.530.000.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

	Gambar 3.4.4. Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan (Sebelum)
	Sesudah

5. Kegiatan Kajian Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perwali SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghasilkan sebuah dokumen Materi Teknis dan Rancangan Peraturan yang menjadi pedoman penanganan rumah masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada 25 Juli 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Anggaran Kegiatan ini yaitu Rp.50.000.000. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.5. FGD Laporan Pendahuluan Kajian Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perwali



Gambar 3.4.6. FGD Laporan Antara Kajian Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perwali



Gambar 3.4.7. FGD Laporan Akhir Kajian Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perwali

2. Fasilitas penyedia rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KI20240222043722300223					100.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8	8	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	1	1	0	100.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	100.00 %
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	1	1	0	100.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	100.00 %
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;

- b. Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

- c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;

2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Sosialisasi Pembangunan Unit Baru Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Blitar

Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi bahwa Kota Blitar mengusulkan Unit Baru Rusunawa sebagai upaya untuk memfasilitasi warga Kota Blitar yang terkena Bencana maupun Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah. Sosialisasi ini dihadiri oleh Perangkat Kecamatan, Kelurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat, Forkopimcam, dan Perwakilan Warga. Sosialisasi dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024. Anggaran kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 20.616.800.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.4.8.
Sosialisasi
Pembangunan
Unit Baru
Rumah Susun
Sederhana
Sewa Kota
Blitar



2. Fasilitas Pembangunan Rumah Layak Huni Masyarakat Terkena Relokasi Program Daerah

Kegiatan Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni bagi Masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Blitar. Rumah direlokasi karena Pemerintah Kota Blitar melaksanakan pembangunan taman. Kegiatan Pembangunan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan anggaran yaitu Rp. 34.974.415.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.9.
Pembangunan
Rumah Layak
Huni
Masyarakat
Terkena
Relokasi
Program
Daerah



INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1.027.240.770.532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	12.378.875.631
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	240.983.950
	APBD	240.983.950
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	240.983.950
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

No	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	KOTA BLITAR				240,983,950	202,955,365	84.22 %
1	PROGRAM PERUMAHAN	PENGEMBANGAN			193,502,150	160,323,365	82.85 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			118,794,800	117,818,450	99.18 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Doku men	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Doku men	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Doku men	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Doku men	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Doku men	118,794,800	117,818,450	99.18 %
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				118,794,800	117,818,450	99.18 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			74,707,350	42,504,915	56.90 %

No	PRO GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	74,707,350	42,504,915	56.90 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEG IAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Ruma h	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Ruma h	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				74,707,350	42,504,915	56.90 %
	JUMLAH PROGRAM				193,502,150	160,323,365	82.85 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		47,481,800	42,632,000	89.79 %

4.4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
	Pegawai	23
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	13
	Perempuan	10

No	Uraian	Jumlah (Orang)
2.	Pendidikan	
	S2	3
	S1	13
	D3	4
	SLTA	2
	SLTP	0
	SD	1
3.	Berdasarkan Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	2
	Penata Tk. I (III/d)	5
	Penata (III/c)	0
	Penata Muda Tk I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	4
	Pengatur Tk I (II/d)	3
	Pengatur Muda (II/a)	1
	PPPK	1
4	Berdasarkan Jabatan	
	Struktural	6
	Fungsional	7
	Pelaksana	10

4.4.6. Permasalahan Dan Solusi

No.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Membutuhkan tenaga yang cukup banyak sehingga perlu melibatkan sumberdaya dari tingkat kelurahan dan badan	Selalu koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait supaya mempunyai data yang valid dan akurat

No.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
	penanggulangan bencana supaya data lebih akurat	
	Disetiap tahun tidak selalu ada rumah rusak, bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota	Selalu koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan BPBD dalam menelusuri data rumah rusak akibat bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota
	Kesulitan dalam pembuatan SK walikota jika rumah rusak akibat bencana kurang daer 20 KK	Selalu koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan BPBD dalam menelusuri data rumah rusak akibat bencana
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Mebutuhkan tenaga untuk memperhitungkan tingkat kerusakan rumah akibat bencana secara keseluruhan	Bekerja sama dengan tim pendamping atau fasilitator dalam membantu perhitungan kebutuhan
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Kesulitan menentukan target kegiatan karena rumah korban bencana adalah kejadian tidak terduga sehingga target yang akan ditangani berdasarkan asumsi (kejadian tahun sebelumnya)	Selalu koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan BPBD dalam menelusuri data rumah rusak akibat bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota
	Anggaran penanganan korban bencana tidak sesuai dengan yang direncanakan karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah sehingga penanganan rumah korban bencana selain menggunakan dana dari Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar juga menggunakan anggaran dari dana tidak terduga	Selalu menyediakan anggaran tahunan dalam penanganan rumah akibat bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah daerah
4.	PELAKSANAAN	
	Permasalahan dalam Pelaksanaan membutuhkan koordinasi dengan unit terkait lintas sektoral	Selalu melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait penanganan bencana atau relokasi

No.	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
5.	LAIN - LAIN	
	Dalam Pelaporan kesulitan apabila tidak terdapat fasilitas rumah bencana atau relokasi akibat program pemerintah kota	Selalu koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan BPBD dalam menelusuri data rumah rusak akibat bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota

4.5 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2.Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM 2024

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	14	14	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	Data Dukung : 3572-20241223091818daftar sop 2022_compressed.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	6	6	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi	Dokumen	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
Data Dukung : 3572-20240720071952SK Reviu Standar Pelayanan.PDF Status : Approved						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- Pelayanan kerugian materil; dan
- Pelayanan pengobatan.

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas :

- Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
- c. Saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024 antara lain :

- Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Penanganan Unjuk Rasa/Kerusuhan Masa
- Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda
- Pembinaan bagi PKL yang menyalahi aturan.
- Pelepasan reklame/banner/APK yang menyalahi aturan dan diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barang bukti.

Dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.5.1.
Petugas mendata identitas PKL dan memberikan Sosialisasi serta menghimbau secara mandiri untuk pindah tempat



Gambar 3.5.2.
Penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan



Gambar 3.5.3.
Patroli Aset
Daerah



Gambar 3.5.4.
Patroli Posko
Linmas dan Pemilu



Gambar 3.5.5.
Pembinaan
Satlinmas dalam
rangka Persiapan
Pemilu

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	195	195	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 3572-2024070501141938-40. Laporan Akhir_Kajian Risiko Kota Blitar.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	474	474	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	195	195	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	50	50	0	100.00 %

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan dalam Bencana di Ruang Rapat BPBD.

Pelaksanaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) oleh BPBD bersama dengan unsur terkait kebencanaan.

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.5.6.
Sosialisasi
Kesiapsiagaan
Anak dalam
Bencana

Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan Dalam Bencana. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dengan memberikan informasi dan edukasi yang disesuaikan.

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:\



Gambar
3.5.7.
Sosialisasi
dan Simulasi
Gempa
Dalam
Rangka Hari
Pramuka di
SMAN 3
Blitar

Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Masing-Masing Wilayah Keltana dan FPRB.

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.5.8.
Rapat Koordinasi
Pengurangan
Risiko Bencana
Hidrometeorologi
di Masing-Masing
Wilayah Keltana
dan FPRB
bertempat di Aula
Polkesma

Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana).

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.5.9.
Pembinaan,
Pendampingan
Monitoring dan
Evaluasi Keltana
(Kelurahan
Tangguh Bencana)
Pakunden



Gambar 3.5.10.
Musyawarah
Masyarakat
Kelurahan
Karangsari Kota
Blitar



Gambar 3.5.11.
Musyawarah
Masyarakat
Kelurahan Tlumpu
Kota Blitar



Gambar 3.5.12.
Pembinaan,
Pendampingan
Monitoring dan
Evaluasi Keltana
(Kelurahan
Tangguh Bencana)
Bendogerit



Gambar 3.5.13.
Pembinaan,
Pendampingan
Monitoring dan
Evaluasi Keltana
(Kelurahan
Tangguh Bencana)
Sukorejo

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	195	195	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	26	26	0	100.00 %
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	27	27	0	100.00 %

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Erupsi Gunung, Gempa bumi, Banjir Lahar, Cuaca Ekstrem (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pelatihan Pelatihan Penanganan Dasar Bencana bagi Forum Pengurangan Risiko Bencana. Pelatihan ini diperuntukkan bagi petugas dari BPBD dan OPD terkait kebencanaan lainnya untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman mengenai penanganan bencana

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.5.14.
Pelatihan
Penanganan Dasar
Bencana di
Kelurahan di
wilayah Kota Blitar



Gambar 3.5.15.
Gladi
Kesiapsiagaan
Hidrometeorologi



4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				-100%	100.00 %
	Tidak Terjadi Bencana - 100% (Dokumen ada pada tahapan SPM)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	148	148	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Penanganan Bencana di Wilayah Kota Blitar pada tahun 2024. Penanganan Bencana meliputi:

1. Angin Kencang
2. Banjir
3. Kebakaran
4. Kekeringan
5. Talud Ambrol
6. Pohon Tumbang : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kel Karangtengah, Kec Sananwetan
7. Dahan Patah : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kec Sananwetan, Pasar Hewan Dimoro
8. Tanah Ambles
9. Saluran Irigasi Ambrol : Kel Karangtengah Kec Sananwetan

10. Kebakaran Rumah Huni
11. Laka Sumur
12. Kebakaran Gudang Engine Diesel Air
13. Kebakaran Pabrik Bubut

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

	Gambar 3.5.16. Penanganan kekeringan
	Gambar 3.5.17. Penanganan Angin Kencang
	Gambar 3.5.18. Kebakaran Gedung dan Permukiman

	Gambar 3.5.19. Cuaca Ekstrim
	Gambar 3.5.20. Gempa Bumi

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	36	36	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	10	10	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
Data Dukung : 3572-20240719040738SOP DAMKAR.pdf Status : Approved						
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	7	7	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	15	15	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas / Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai

tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Adapun kegiatan yang mendukung pemenuhan indicator ini dilakukan kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran periode 1 Januari -31 Desember 2024 dengan seluruh jumlah layanan pemadaman kebakaran sebanyak 35 kasus sebagai berikut :

- Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- Layanan pendataan dan inspeksi peralatan pemadam kebakaran
- Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
- Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran

Adapun dokumentasi kegiatan adalah :

	Gambar 3.5.21. Penanganan kebakaran Pabrik Pengeringan Jagung Kel Tlumpu Tgl 29/02/2024
	Gambar 3.5.22. Penanganan Kebakaran Sekolah Sananwetan Tgl 21 - 02 - 2024
	Gambar 3.5.23. Penanganan kebakaran Rumah Sananwetan Tgl 3/06/2024

	Gambar 3.5.24. Penanganan kebakaran Gudang Pengepul Barang Bekas/Rosok Pakunden Tgl 3/08/2024
	Gambar 3.5.25. Penanganan kebakaran rumah Bendogerit Tgl 13/09/2024

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	TRANSTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi rawan bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
4.		bencana					
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97.00 %	85.00 %	97.00 %	97.00 %	TUNTAS UTAMA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

SATKER BPBD

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,027,240,770,532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	30,750,050,888
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	7,412,165,030
	APBD	7,412,165,030
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	7,412,165,030
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	DANA LAINNYA	0

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	KOTA BLITAR				7,632,291,470	7,256,654,872	95.08%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				6,055,438,186	5,831,038,368	96.29%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			4,865,158,452	4,736,994,318	97.37%
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	634,402,145	633,020,060	99.78%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1,274,811,900	1,223,045,690	95.94%
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	149,177,308	117,724,150	78.92%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan	Unit	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			prasarana ketentraman dan ketertiban umum				
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	59,718,000	58,740,850	98.36 %
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis	Orang	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Satpol PP dan Satlinmas				
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2,697,969,871	2,656,720,008	98.47 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	47,732,028	46,763,560	97.97 %
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan	Laporan	1,347,200	980	72.74 %

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,865,158,45 2	4,736,994,3 18	97.37 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			1,179,918,53 4	1,084,071,2 50	91.88 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokume n	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan	Unit	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokume n	0	0	0%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	636,555,443	592,133,85 0	93.02 %
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	532,468,157	481,221,80 0	90.38 %
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	10,894,934	10,715,600	98.35 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,179,918,53 4	1,084,071,2 50	91.88 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			10,361,200	9,972,800	96.25 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokume n	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Dokume n	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	10,361,200	9,972,800	96.25 %
	JUMLAH INDIKATOR				10,361,200	9,972,800	96.25 %
	JUMLAH PROGRAM				6,055,438,18 6	5,831,038,3 68	96.29 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				980,761,824	860,799,55 9	87.77 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			280,451,000	252,601,05 0	90.07 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	280,451,000	252,601,05 0	90.07 %
	JUMLAH INDIKATOR				280,451,000	252,601,05 0	90.07 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			468,852,324	426,017,26 0	90.86 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	60,858,800	60,144,500	98.83 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana	Dokume n	171,695,384	166,312,81 0	96.87 %

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota				
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	98,221,800	80,252,450	81.71 %
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	138,076,340	119,307,50 0	86.41 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokume n	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokume n	0	0	0%
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Unit	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Terhadap Bencana kabupaten/kota				
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				468,852,324	426,017,260	90.86 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			82,108,400	66,568,049	81.07 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	82,108,400	66,568,049	81.07 %

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				82,108,400	66,568,049	81.07 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			149,350,100	115,613,200	77.41 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	149,350,100	115,613,200	77.41 %
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokume n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				149,350,100	115,613,200	77.41 %
	JUMLAH PROGRAM				980,761,824	860,799,559	87.77 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				596,091,460	564,816,945	94.75 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			81,032,000	76,460,800	94.36 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam	Dokume n	6,856,000	6,829,800	99.62 %

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			daerah Kabupaten/Kota				
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	13,151,600	13,140,000	99.91 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	3,382,000	3,382,000	100.00 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokume n	42,291,600	37,959,000	89.76 %
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokume n	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Dokume n	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	15,350,800	15,150,000	98.69 %
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				81,032,000	76,460,800	94.36 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			368,782,300	345,873,985	93.79 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	363,042,100	340,273,985	93.73 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	5,740,200	5,600,000	97.56 %

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	JUMLAH INDIKATOR				368,782,300	345,873,985	93.79 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			146,277,160	142,482,160	97.41 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	93,800,000	93,800,000	100.00 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	52,477,160	48,682,160	92.77 %
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				146,277,160	142,482,160	97.41 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%

N o	PRO GRA M	KEGI ATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				596,091,460	564,816,945	94.75 %
	KEGIATAN LAINNYA						
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	TIDAK ADA						

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	56
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	52
	Perempuan	4
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	41
	CPNS	-
	PPPK	5

No	Uraian	Jumlah
	PTT Pemerintah Kota Blitar	10
3.	Pendidikan	
	SD/ sederajat	-
	SMP/ sederajat	1
	SMA/SMK/ sederajat	38
	D1	-
	D2	-
	D3	2
	S1/D-IV	14
	S2	1

4.5.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Personil pengumpulan data yang kurang kompeten	Peningkatan kompetensi personil
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Petugas belum memahami rumus penghitungan kebutuhan	Peningkatan kompetensi personil
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk pengadaan sarana prasarana	Sudah dilakukan untuk proses penganggaran
4 .	PELAKSANAAN	
	Warga masyarakat yang belum memahami dan menolak untuk ditertibkan	
5 .	LAIN - LAIN	

4.6 Pencapaian SPM Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM 2024

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	289	289	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	56	56	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	11	11	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	17	17	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	25	25	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	289	289	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	150	150	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18	18	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	7	7	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan.

Kegiatan yang mendukung SPM

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 289 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :
 - Layanan data dan pengaduan.

Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi penyandang disabilitas terlantar untuk diusulkan dalam DTKS dan sebanyak 56 orang telah diusulkan dalam DTKS. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 50.346.900,00

b. Penyediaan sandang.

Kegiatan ini berupa pemberian pakaian sesuai kebutuhan klien dan sebanyak 4 orang telah menerima bantuan pakaian. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 2.129.250

c. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui kegiatan pendampingan perseorangan maupun klasikal dengan jumlah penerima layanan sebanyak 289 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 191.183.900,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

	Gambar 3.6.1. Kegiatan terapi bagi penyandang disabilitas
	

- d. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar. Kegiatan ini dilakukan secara klasikal, bertujuan memberikan pemahaman dan motivasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendampingan terhadap penyandang disabilitas di keluarganya, diikuti sebanyak 150 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.20.151.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.2.
Bimbingan sosial
bagi penyandang
disabilitas

- e. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan

Bagi penyandang disabilitas terlantar yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan maka difasilitasi pembuatannya guna mewujudkan tertib Adminduk secara nasional dan terpadu, serta tersedianya data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Sebanyak 3 orang telah difasilitasi mendapatkan dokumen adminduk.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.3.
Fasilitasi
Pembuatan
Dokumen
Administrasi
Kependudukan
bagi
penyanggah
disabilitas

f. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar

Layanan ini diberikan saat seorang penyanggah disabilitas terlantar sakit dan/atau penyanggah disabilitas yang memerlukan akses layanan pendidikan. Sebanyak 18 orang telah mendapatkan akses layanan pendidikan dan akses kesehatan dasar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 9.968.200,00

g. Layanan penelusuran keluarga

Merupakan layanan yang diberikan untuk menelusuri keberadaan keluarga penyanggah disabilitas terlantar, dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan jejaring pelaku kesejahteraan sosial dan sebanyak 10 orang telah mendapatkan layanan penelusuran keluarga. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.665.000,00

h. Layanan reunifikasi keluarga

Apabila keluarga klien PPKS diketahui keberadaannya maka pengasuhan yang bersangkutan dikembalikan kepada keluarganya dan sebanyak 10 orang telah direunifikasi dengan keluarganya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.988.000,00
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.4.
Kegiatan
reunifikasi
keluarga bagi
penyandang
disabilitas

i. Layanan rujukan

Apabila penyandang disabilitas terlantar memerlukan layanan lanjutan maka akan difasilitasi rujukan ke RSJ/UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya serta kepada keluarga/kerabat dekat dan sebanyak 7 orang telah menerima layanan rujukan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 9.077.900,00 Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.5.
Kegiatan
layanan rujukan
bagi
penyandang
disabilitas

j. Penyediaan Alat Bantu

Dalam upaya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar Dinas Sosial Kota Blitar bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Jatim yaitu berupa pemberian alat bantu kepada 17 orang.

k. Penyediaan Pembekalan Kesehatan

Penyediaan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan penanganan awal antara lain minyak kayu putih, sarung tangan, perban, anti septik, pereda nyeri, masker dan pemanfaatannya sesuai kebutuhan diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang

membutuhkan pembekalan kesehatan. Telah diberikan penyediaan pembekalan kesehatan kepada 25 orang.

l. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat

Merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar sebanyak 2 orang.

m. Penyediaan Permakanan

Penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar telah diberikan sebanyak 2 orang.

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	85	85	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	85	85	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	42	42	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	8	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan

- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Rehabilitasi sosial dasar anak merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak dan lingkungan sosial anak sehingga terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosialnya. Layanan kesejahteraan sosial anak diberikan dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian layanan diberikan kepada 85 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain :

- a. Layanan Data dan Pengaduan

Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi anak terlantar pada DTKS dan sebanyak 2 orang telah terdaftar dalam DTKS.

- b. Penyediaan Layanan Kedaruratan/layanan Reaksi Cepat

Merupakan layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada anak terlantar sebanyak 2 orang.

- c. Penyediaan Sandang

Kegiatan ini berupa pemberian pakaian sesuai kebutuhan klien anak terlantar dan sebanyak 2 orang telah menerima bantuan pakaian. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 2.000.000,00

- d. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 85 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal maupun pendekatan perseorangan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 96.513.100,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

	Gambar 3.6.6. Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social anak terlantar
	

- e. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 42 orang. Dukungan keluarga merupakan motivasi terbesar anak untuk hidup wajar baik sebagai individu maupun makhluk sosial karena pengasuhan keluarga merupakan hal terpenting dalam proses perkembangan mental anak. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 10.953.000,00A. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.6.7.
Kegiatan
bimbingan sosial
kepada keluarga
anak terlantar

- f. Akses layanan pendidikan dan kesehatan diberikan agar anak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan formal dan akses layanan kesehatan yang seharusnya diterima. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan layanan dimaksud sebanyak 2 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 1.080.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.8.
Kegiatan akses
layanan
Kesehatan anak
terlantar

- g. Layanan penelusuran keluarga 2 orang. Layanan ini diberikan agar anak bisa dipertemukan dengan keluarga yang sedarah. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 1.520.000,00
- h. Layanan reunifikasi keluarga 2 orang. Setelah diketemukan keluarganya maka anak terlantar tersebut pengasuhannya dikembalikan lagi kepada keluarga karena pengasuhan keluarga merupakan pengasuhan terbaik

bagi seorang anak. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.1.440.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.9.
Kegiatan
reunifikasi
keluarga anak
terlantar

- i. Layanan rujukan
- j. Layanan ini diberikan apabila klien memerlukan layanan lanjutan. Sebanyak 8 orang telah dirujuk ke UPT/Balai rehabilitasi sosial/LKSA/DP3AP2KB untuk mendapatkan pendampingan sosial sehingga ada perubahan perilaku dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 9.600.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.10.
Kegiatan layanan
rujukan anak
terlantar

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	135	135	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	130	130	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	21	21	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	21	21	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	21	21	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	63	63	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5	5	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diberikan kepada lanjut usia terlanter (berusia 60 tahun keatas), yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan

orang lain. Layanan ini bertujuan agar para Lansia terlantar tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya, diberikan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment pekerja sosial. Penerima layanana pada tahun 2024 sebanyak 135 orang. Jenis layanan rehabilitasi sosial dasar yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 diantaranya :

a. Layanan data dan pengaduan, sebanyak 1 orang telah difasilitasi masuk dalam DTKS.

b. Penyediaan permakanan

Guna pemenuhan gizi bagi Lansia terlantar maka diberikan makanan sehat siap konsumsi untuk 3 kali makan bagi 130 orang melalui kegiatan Rapelan (Ransum Peduli Lansia) yang diberikan setiap hari Jum'at. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 350.044.700

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3.6.11.
Kegiatan
pemberian
Ransum Peduli
Lansia



- c. Layanan sandang berupa penyediaan paket sandang dan kelengkapannya, diberikan sesuai kebutuhan dan telah diberikan kepada 21 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.024.000,00
- d. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan motivasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendampingan terhadap Lansia di keluarganya, diikuti sebanyak 63 orang.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.12.
Kegiatan
Bimbingan
Sosial bagi
Lansia

- e. Pemberian perbekalan kesehatan berupa bahan kebersihan diri dan tambahan nutrisi. Sedangkan vitamin dan obat-obatan ringan diberikan melalui program sinergitas dengan Dinas Kesehatan/UPT Puskesmas setempat. Pemberian perbekalan kesehatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial home care Lansia terlantar kepada 21 orang.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



- f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial agar dapat hidup wajar di masyarakat. Kegiatan ini berupa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan TKSK, PSM, tokoh masyarakat, keluarga/lingkungan serta tokoh agama/petugas dari Kementerian Agama Kota Blitar. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada 21 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 156.368.300,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.14.
Kegiatan
bimbingan fisik,
mental, spiritual
dan social bagi
Lansia

g. Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Layanan ini diberikan saat memerlukan akses layanan kesehatan, telah diberikan kepada 5 orang berupa fasilitasi akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 2.700.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.15.
Kegiatan akses
layanan kesehatan
Lansia terlantar

h. Layanan rujukan bertujuan agar Lansia terlantar lebih terjamin hidupnya dan sebanyak 5 Lansia telah dirujuk ke panti sosial/LKS/lembaga rehabilitasi sosial Lansia lainnya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 6.000.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.16.
Kegiatan rujukan
bagi Lansia
terlantar

i. Penyediaan Layanan kedaruratan /Layanan Reaksi Cepat

Merupakan layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada anak terlantar sebanyak 1 orang.

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16	16	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	8	8	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7	7	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	9	9	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	9	9	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	9	9	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Keberadaan Gepeng disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks antara lain biaya hidup yang terus meningkat, kedisabilitasan, malas berusaha, minimnya lapangan kerja hingga latar belakang keluarga yang berantakan sehingga populasinya selalu berubah-ubah karena mobilitas mereka yang tinggi. Keberadaan gepeng merupakan masalah sosial terjadi terutama di wilayah perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui rehabilitasi sosial yang tujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial sehingga mereka dapat hidup wajar di masyarakat. Jenis layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada Gepeng disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setelah diassessment oleh pekerja sosial. Jumlah yang telah dilayani pada tahun 2024 sejumlah 16 orang. Dalam tahun 2024 ini beberapa jenis layanan rehabilitasi sosial dasar bagi Gepeng diantaranya :

a. Layanan Data dan Pengaduan

Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi tuna sosial di luar panti pada DTKS dan sebanyak 1 orang telah terdaftar dalam DTKS.

b. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat

Merupakan layanan yang diberikan bagi tuna sosial di luar panti yang membutuhkan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat. Telah diberikan kepada anak terlantar sebanyak 1 orang.

c. Penyediaan Permakanan

Penyediaan permakanan, yaitu pemberian makan bagi Gepeng yang ditampung sementara di shelter sebanyak 8 orang.

d. Penyediaan sandang berupa pemberian pakaian dan kelengkapannya diberikan kepada 7 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.550.000,00

e. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diberikan kepada 9 orang. Bimbingan ini diberikan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan TKSK/PSM setempat.

f. Penyediaan Pembekalan Kesehatan

Pembekalan kesehatan bagi tuna sosial di luar panti tahun 2024 telah diberikan kepada 5 orang.

g. Fasilitasi layanan administrasi kependudukan diberikan kepada 1 orang.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.17.
Kegiatan
fasilitasi layanan
administrasi
kependudukan
bagi Gepeng

h. Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Akses layanan kesehatan diberikan jika dijumpai adanya Gepeng yang sakit dan memerlukan layanan kesehatan dan pada tahun 2024 diberikan kepada 2 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 1.080.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.18.
Kegiatan akses
layanan Kesehatan
Gepeng

i. Layanan penelusuran keluarga diberikan agar Gepeng bisa dikembalikan kepada keluarga yang berhak, dilakukan melalui koordinasi dengan jaring-jaring kesejahteraan sosial dan pada tahun 2024 ini diberikan layanan penelusuran keluarga kepada 9 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 5.840.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.19.
Kegiatan
penelusuran
keluarga pada
Gepeng

- j. Layanan reunifikasi keluarga merupakan layanan untuk menyerahkan kembali Gepeng kepada pihak keluarga karena prinsip rehabilitasi sosial diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga. Pada tahun 2024 sebanyak 9 orang telah memperoleh layanan reunifikasi keluarga. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 5.480.000,00



Gambar 3.6.20.
Kegiatan
reunifikasi gepeng

- k. Layanan rujukan merupakan layanan rehabilitasi sosial lanjutan yang ditujukan pada UPT/Balai Rehabilitasi Sosial PPKS, LKS/yayasan/lembaga sosial lainnya maupun pada kerabatnya. Pada tahun 2024 diberikan layanan rujukan kepada 3 orang dengan dukungan anggaran Rp. 3.600.000,00



Gambar 3.6.21.
Kegiatan layanan
rehabilitasi
lanjutan bagi
gepeng

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	73	73	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	13	13	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)					
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	60	60	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	13	13	0	100.00 %

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- jumlah pengungsi / penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Meskipun Kota Blitar tidak termasuk daerah yang rawan bencana namun secara geografis berdekatan dengan gunung Kelud yang merupakan gunung aktif sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap dampaknya yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Disamping itu bencana alam berupa gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor juga merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi, disamping ancaman bencana sosial berupa konflik sosial, kebakaran, wabah/pandemi, kebakaran dll. Oleh karena itu upaya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana perlu dipersiapkan baik SDM, sarana prasarana maupun dukungan anggarannya. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai pengampu SPM bidang sosial mempersiapkan dukungan SDM, sarana prasarana dan penyediaan anggaran yang bersifat penjagaan. Penyediaan anggaran berupa penyediaan bahan makanan bagi korban bencana dan kelompok rentan dalam hal ini warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya serta anggaran untuk kesiapan SDM dan sarana prasarana digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Tagana dan pemeliharaan mobil Dapur Umum Lapangan. Sedangkan dukungan dana lainnya dianggarkan melalui anggaran BTT pada BPKAD Kota Blitar. Tahun 2024 penerima layanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota sejumlah 73 orang berupa :

- a. Bantuan bahan makanan bagi korban bencana pohon roboh sebanyak 8 orang dan kebakaran sebanyak 4 orang dan korban gantung diri sebanyak 1 orang. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan korban bencana pada saat tanggap darurat bencana. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.466.350

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.22.
Kegiatan pemberian bantuan bahan makanan bagi korban bencana



- b. Penanganan khusus kelompok rentan berupa bantuan bahan makanan bagi warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya kepada 60 orang. Selama seseorang sakit dimungkinkan mereka akan kehilangan pendapatan sementara, sehingga perlu dibantu untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya khususnya kebutuhan pangan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 24.840.050

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.6.23.
Kegiatan
penanganan
khusus kelompok
rentan



c. Layanan dukungan psikososial

Ketika terjadi bencana maka orang yang terkena dampak akan mengalami guncangan/trauma sehingga perlu segera dipulihkan secara psikis dan sosial agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis. Oleh karena itu layanan dukungan psikososial menjadi sangat penting untuk menghilangkan trauma dan segera bersemangat kembali. Saat ini layanan ini diberikan bersamaan pada saat pemberian bantuan bagi korban bencana dan dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan Tagana. Pada tahun 2024 sebanyak 13 orang korban bencana telah menerima layanan dukungan psikososial.

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100 %	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100 %		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
	anak telantar di luar panti					
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	100%	100%	100 %		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100 %		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100 %		

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1.027.240.770.532
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	12.378.875.631

NO	PENDANAAN	PAGU
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.212.472.250
	APBD	1.212.472.250
	A. APBD MURNI	971.488.300
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	240.983.950
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
			KOTA BLITAR		1,212,472,250	1,151,015,275	94.93 %
1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1,043,620,450	998,849,400	95.71 %
	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		996,128,850	965,543,000	96.93 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	355,026,200 355,026,200	350,044,700 350,044,700	98.60 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	11,052,250 11,052,250	10,653,250 10,653,250	96.39 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0 0	0 0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	17,170,200 17,170,200	15,908,000 15,908,000	92.65 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	445,571,500 445,571,500	441,241,050 441,241,050	99.03 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	42,402,500 42,402,500	39,248,000 39,248,000	92.56 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0 0	0 0	0%

No	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	17,500,000 17,500,000	14,828,200 14,828,200	84.73 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	56,751,200 56,751,200	50,346,900 50,346,900	88.72 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0 0	0 0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	19,600,000 19,600,000	16,025,000 16,025,000	81.76 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokume n	31,055,000 31,055,000	27,247,900 27,247,900	87.74 %
	JUMLAH INDIKATOR				996,128,850	965,543,000	96.93 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			47,491,600	33,306,400	70.13 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	22,499,800 22,499,800	8,466,350 8,466,350	37.63 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0 0	0 0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0 0	0 0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24,991,800 24,991,800	24,840,050 24,840,050	99.39 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0 0	0 0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				47,491,600	33,306,400	70.13 %
	JUMLAH PROGRAM				1,043,620,450	998,849,400	95.71 %
	KEGIATAN LAINNYA						
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		168,851,800	152,165,875	90.12 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan layanan SPM bidang sosial, Dinas Sosial Kota Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 25 orang terdiri dari 23 PNS, 1 PPPK dan 1 orang PTT. Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan, pendidikan dan jenis jabatan diuraikan pada tabel berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jml
1	Pembina Utama Muda, IV/c	-	1	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	-	1	1
3	Pembina, IV/a	2	1	3
4	Penata Tk. I, III/d	1	6	7
5	Penata, III/c	-	-	-
6	Penata Muda Tk. I, III/b	-	-	-
7	Penata Muda, III/a	2	3	5
8	Pengatur Tk. I, II/d	2	-	2
9	Pengatur, II/c	3	-	3
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	PPPK	-	1	1
13	PTT	1	-	1
	JUMLAH	12	13	25

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
1	S2 (Pasca Sarjana)	-	2	2
2	S1 (Sarjana)	4	6	10
3	Diploma IV	-	2	2
4	Diploma III	-	3	3
5	Diploma II	-	-	-
6	SLTA	8	-	8
7	SLTP	-	-	-
	Jumlah	12	13	25

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
A.	Jabatan Struktural			
1.	Eselon II b	-	1	1
2.	Eselon III a	-	1	1
3.	Eselon III b	2	1	3
4.	Eselon IV a	-	1	1
B.	Jabatan Fungsional			
1.	Jabatan Fungsional Tertentu	1	7	8
2.	Pelaksana	9	2	12
	Jumlah	12	13	25

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jml
1	PNS	11	12	23
2	CPNS	-	-	-
3	PPPK	-	1	1
4	PTT	1	-	1
	Jumlah	12	13	25

Dalam pelayanan SPM bidang sosial, disamping dukungan personil dari Aparatur Sipil Negara juga di dukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak pelayanan kesejahteraan sosial pada tahap paling awal. PSKS dimaksud terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 3 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 44 orang, Tagana 27 orang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 10 lembaga.

4.6.6. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan penerapan SPM bidang sosial tahun 2024 di Kota Blitar sebagaimana Tabel berikut :

N O	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Kurangnya kompetensi petugas pengumpul, pengolah dan penyaji data.	Memberikan pembekalan/Bimtek kepada petugas sebelum pelaksanaan pendataan.
		Bencana alam dan sosial terjadinya sewaktu-waktu.	Pengumpulan data beriringan dengan kejadian bencana yang terjadi.
		PMKS merupakan data dinamis sehingga datanya sering berubah-ubah.	Menggunakan data tahun sebelumnya dan tetap mengakomodir munculnya PMKS baru.
2.	Penghitungan Kebutuhan	Data PMKS bersifat fluktuatif, mudah	Perhitungannya menggunakan data tahun

		terpengaruh oleh perubahan lingkungan yang kurang mendukung sehingga sulit untuk menentukan rencana kebutuhan .	sebelumnya namun tetap menyediakan anggaran untuk permasalahan yang muncul kemudian.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Data PMKS merupakan data dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga sulit untuk menentukan target kinerja dan anggaran.	Perencanaan anggaran menggunakan data tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
		Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu.	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD.
4.	Pelaksanaan	Belum tersedia tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian	Untuk sementara PMKS/PPKS dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Blitar dan sekitarnya
5	Pelaporan	Dari sisi penganggaran belum ada pemilahan kebutuhan dan realisasi anggaran per jenis penerima layanan SPM	Melakukan identifikasi dan perhitungan kembali terkait PAGU dan realisasi anggaran berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan layanan SPM
6	Lain - Lain	-	-

4.7 Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar sebagai perwujudan pembangunan

pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terdiri atas :

A. Program pengelolaan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)
- Persentase Angka Kelulusan SD/MI
- Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
- Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assessment
- Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi

B. Program Pengembangan Kurikulum, dengan indikator kinerja

- Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan
- Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

D. Program pengendalian dan perizinan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku

2. BIDANG KESEHATAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
- Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)

- Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan
- Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
- Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang Tertangani
- Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
- Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

- Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS

C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan indikator kinerja

- Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar

D. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan indikator kinerja

- Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar
- Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

E. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan indikator kinerja

- Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator kinerja

- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator kinerja

- Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik
 - C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,** dengan indikator kinerja
 - Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik
 - D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,** dengan indikator kinerja
 - Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik
 - E. Program Penataan Bangunan Gedung,** dengan indikator kinerja
 - Persentase gedung Ruang pemerintahan yang dibangun
 - Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun
 - F. Program Penyelenggaraan Jalan,** dengan indikator kinerja
 - Persentase jalan dalam kondisi baik
 - Persentase jembatan dalam kondisi baik
 - G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi,** dengan indikator kinerja
 - Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar
 - H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,** dengan indikator kinerja
 - Persentase ketersediaan dokumen tata ruang
- 4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- A. Program Pengembangan Perumahan,** dengan indikator kinerja
 - Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
 - Persentase tingkat hunian Rusunawa
- B. Program Kawasan Permukiman,** dengan indikator kinerja
 - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
 - Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman

- Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh

C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan indikator kinerja

- Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh
- Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan indikator kinerja

- Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik dikawasan perumahan
- Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja

- Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan
- Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan

B. Program Penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja

- Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
- Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih
- Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya
- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

C. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan indikator kinerja

- Persentase kejadian kebakaran yang tertangani

6. BIDANG SOSIAL

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

- A. Program Pemberdayaan sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- B. Program Rehabilitasi sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
- C. Program Perlindungan dan jaminan sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase peningkatan PMKS terlatih
 - Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial
- D. Program Penanganan bencana,** dengan indikator kinerja
 - Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)
- E. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP),** dengan indikator kinerja
 - Persentase TMP dalam kondisi baik

BAB V

PENUTUP

Salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Good Local Governance secara yuridis dan formil, disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan kepada pemerintah pusat.

LPPD Kota Blitar Tahun 2024 sesuai ketentuan telah memuat Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan. Selain itu LPPD Kota Blitar Tahun 2024 ini juga menyajikan capaian kinerja makro, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar selama tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum bisa dilaksanakan dengan optimal.

Keberhasilan Capaian Kinerja pemerintah Kota Blitar pada tahun 2024 juga dapat dilihat dari apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk penghargaan prestasi. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Blitar berhasil menduduki peringkat 2 dari 38 Kab/Kota se-Jawa Timur Pencapaian MCP KPK 2023 sebesar 95,93%. Angka tersebut juga membawa Kota Blitar menduduki ranking 10 dari 546 Kab/Kota/Provinsi se-Indonesia tanggal 17 Januari 2024 di Surabaya.

2. Kota Blitar berhasil meraih nilai Indeks SPI sebesar 82.48 sebagai peraih nilai tertinggi pertama kategori Kota Kecil se-Indonesia dan nilai tertinggi pertama dari 38 Kab/Kota se-Jawa Timur. tanggal 27 Januari 2024.
3. Kota Blitar berhasil meraih kenaikan indeks RB tahun 2023 menjadi 84.68 dengan predikat A- dan masuk 35 besar Kab/Kota predikat tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2022 index RB Kota Blitar yaitu 68.71 dengan predikat B tanggal 13 Februari 2024.
4. Pemerintah Kota Blitar berhasil menduduki posisi kedua se-Jawa Timur terkait jumlah cakupan Sub PIN Polio pada putaran pertama. Sesuai evaluasi dari Pemprov Jawa Timur, cakupan Sub PIN Polio di Kota Blitar capai angka 98.08%. Jika dirinci terdapat 19.521 anak yang sudah menerima vaksin polio dari target 19.758 anak, tanggal 16 Februari 2024.
5. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi dengan dinobatkan sebagai pemerintah daerah yang paling siap PPDB dalam Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2024/2025 tanggal 21 Februari 2024.
6. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja 2024. Dalam acara peringatan HUT ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), HUT ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan HUT ke-105 Damkar tingkat nasional, tanggal 3 Maret 2024.
7. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan Piala Adipura ke 16 kalinya secara berturut-turut tanggal 5 Maret 2024.
8. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar meraih penghargaan Kategori A (Memuaskan) dengan Skor 84.75 dalam Expose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Tahun 2023, Rabu (20/3/ 2024) di Surabaya. Penghargaan diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Jazuli, SH., M. Si dan diterima oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Drs. Suyatno tanggal 21 Maret 2024.
9. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 14 kali secara berturut-turut dan satu-satunya di Jawa Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diterima oleh

Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M. Pd dari Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi S.E., M.M., Ak. CA., CFRA, CSFA, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 Mei 2024.

10. Komitmen Pemerintah Kota Blitar mendorong digitalisasi di berbagai sektor, terbukti dengan diraihnya penghargaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai Pemerintah Daerah yang berhasil dalam penerapan digitalisasi Transaksi Non Tunai 100%. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan diterima oleh Wakil Walikota Blitar, Ir. H. Tjutjuk Sunario, M.M, pada Forum High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara Graha Surabaya, Selasa tanggal 7 Mei 2024.
11. Pemerintah Kota Blitar menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota dari Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. diterima oleh Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M. Pd di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, tanggal 5 Agustus 2024.
12. Kota Blitar membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan terbaik dengan meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah kategori Utama di UHC Award 2024, dengan capaian luar biasa UHC sebesar 101,80%, Dedikasi ini adalah bukti nyata kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat. UHC Award 2024 merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan kepada minimal 95% penduduknya dalam program JKN-KIS. Terdapat tiga kategori penghargaan dalam UHC Award 2024: Pemda Pratama, Madya, dan Utama. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2024 di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, dihadiri oleh 468 Bupati / Walikota, 35 Gubernur, dan Wakil Presiden. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti kepada Wakil Walikota Blitar, Ir. H. Tjutjuk Sunario, M.M.
13. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih penghargaan terbaik ketiga sebagai Kota Paling Berkelanjutan berdasarkan pemeringkatan Universitas Indonesia, Green City Metric,

Penghargaan yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, S. Sos., M. Si. ini diberikan langsung oleh Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, M.T. dan Kepala UI Green City Metric, Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M. M., M. Sc. di Balai Sidang Kampus Universitas Indonesia, tanggal 9 Agustus 2024. Terdapat enam indikator yang digunakan dalam pemeringkatan ini, yakni Penataan Ruang dan Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Tata Kelola Sampah dan Limbah (WS), Tata Kelola Air (WR), Akses dan Mobilitas (TR) serta Tata Pamong / Governance (GV).

14. Walikota Blitar, Drs.H. Santoso, M. Pd yang diwakili Wakil Walikota Blitar, Ir.H. Tjutjuk Sunario, M.M. menerima penghargaan Apresiasi Pembina Proklam (Program Kampung Iklim) Terbaik dan RW 9 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan menerima penghargaan Proklam Lestari dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof.Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc di Jakarta Convention Centre, Melalui penghargaan ini Walikota Blitar dinilai telah berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) tanggal 9 Agustus 2024.
15. Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi dengan penghargaan Anugerah Pandu Negeri Tahun 2024 sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kota Kategori Baik dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) di Jakarta, tanggal 5 September 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Kota Blitar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
16. Pemerintah Kota Blitar raih penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 tingkat nasional, Penghargaan yang diterima oleh Wakil Walikota Blitar, Ir.H. Tjutjuk Sunario ini diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi pada acara Hub Space 2024 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 7 September 2024.
17. Kota Blitar menerima Award sebagai Penyelenggara Kelurahan Cinta Statistik Terbaik Tahun 2021-2023 dari Badan Pusat Statistik RI, tanggal 26 September 2024.

18. Kota Blitar tahun ini kembali menerima penghargaan dari Polda Jawa Timur terkait penerapan kawasan tertib berlalu lintas. Penghargaan tersebut diraih atas sinergi yang baik antara Satlantas Polres Blitarkota dan Pemerintah Kota Blitar. Penghargaan itu diterima dalam rangka peringatan HUT ke 69 Lalu Lintas Bhayangkara di Surabaya, tanggal 28 September 2024.
19. Pemerintah Kota Blitar berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Terdapat tiga sekolah di Kota Blitar yang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata adalah SMPN 6 dan SMPN 8 yang meraih kategori Sekolah Adiwiyata Mandiri, serta SDN 1 Tanjungsari yang meraih kategori Sekolah Adiwiyata Nasional di Jakarta tanggal 2 Oktober 2024.
20. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih Predikat A atau memuaskan pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AWARD Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, diterima langsung oleh Walikota Blitar, Santoso, di Jakarta tanggal 2 Oktober 2024.
21. Kota Blitar meraih prestasi gemilang dengan memborong sejumlah penghargaan dalam ajang Kelurahan Berseri tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 9 Oktober 2024 di Taman Pandan Wilis, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar membawa pulang penghargaan untuk beberapa kelurahan. Penghargaan Kategori Madya berhasil diraih oleh Kelurahan Sananwetan, Tanggung, dan Ngadirejo, sedangkan penghargaan Kategori Mandiri, yang merupakan penghargaan tertinggi, diraih oleh Kelurahan Gedog, Sentul, Karangtengah, dan Rembang.
22. TP PKK Kota Blitar menerima penghargaan sebagai Juara III Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024.
23. Pemerintah Kota Blitar meraih penghargaan peringkat kedua terbaik dalam Program Komunikasi Publik di ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) 2024. Penghargaan ini

diberikan dalam acara Digital Festival Jawa Timur di Tuban pada tanggal 23 Oktober 2024.

24. Radio Mahardhika FM berhasil meraih penghargaan sebagai Juara Program Unggulan Radio LPPL Terbaik, melalui program siaran Talenta MBK (Muda, Berkarya, Keren) Episode Refleksi Pemilu 2024 dalam KPID Award Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya tanggal 12 November 2024.
25. Pemerintah Kota Blitar kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan penilaian kinerja pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Blitar memperoleh skor 82.02 atau kategori SANGAT CETTAR serta menduduki peringkat kedua se Jawa Timur setelah Pemerintah Kota Surabaya tanggal 12 November 2024.
26. Pemerintah Kota Blitar melalui PPID meraih penghargaan sebagai Kota Informatif Peringkat Kedua se-Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk Sunario di Grand Swiss Belhotel Darmo, Surabaya tanggal 13 November 2024.
27. Kota Blitar kembali menorehkan prestasi luar biasa, dengan perolehan nilai nyaris sempurna 98,19, Kota Blitar berhasil meraih Predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretaris Daerah Kota Blitar, di Hotel Le Meridien Jakarta, tanggal 14 November 2024.
28. Kota Blitar menyabet kategori Pelayanan Publik Fiskal Rendah dalam Program Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024, Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Majalah Tempo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri karena Kota Blitar dinilai mampu memberikan pelayanan publik terbaik meski memiliki anggaran APBD yang terbatas tanggal 2 Desember 2024.
29. Pemerintah Kota Blitar berhasil menduduki posisi runner up atau Juara II Kategori The Best Marketing Campaign pada ajang Tourism Marketing Award 2024 yang digelar oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Kesenian Cak Durasim Surabaya tanggal 8 Desember 2024.

30. Kota Blitar menerima Penghargaan Nasional STBM Level Madya, yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Dr. Dante Saksono Harbuwono, di Jakarta tanggal 10 Desember 2024.
31. Kota Blitar meraih Penghargaan Serapan Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2024, Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024.
32. Pemerintah Kota Blitar meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak dan berkomitmen memberikan pelayanan dalam Penanganan Kasus Perempuan Anak Secara Tuntas. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono kepada Wakil Walikota Blitar dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 di Surabaya, tanggal 19 Desember 2024.

Secara kumulatif, cukup banyak penghargaan yang diberikan kepada Kota Blitar, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja di organisasi perangkat daerah yang pencapaiannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Demikian LPPD Kota Blitar Tahun 2024 disusun, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Semoga LPPD ini dapat memberikan informasi yang komprehensif, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan daerah pada tahun berikutnya, dan semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua untuk membawa Kota Blitar semakin KEREN (Keberagaman-Religius-Nasionalis), unggul, Makmur dan bermartabat,.



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/18/HK/410.020.3/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



!

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2024;
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan/Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan (LKPJ) Walikota Blitar Tahun Anggaran 2024 untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

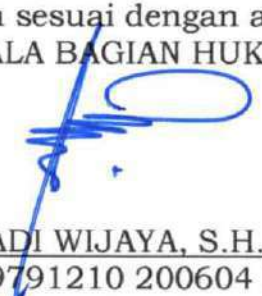
- KETIGA : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tim Pereviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Januari 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/18/HK/410.020.3/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
I.	TIM PEMBINA			
	a. Pengarah	Walikota Blitar.	-	
	b. Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
II.	TIM PENYUSUN			
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	c. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP).	-	
	d. Anggota	1. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN S.E);	BAB I Pendahuluan 1.1 Penjelasan Umum	1. UU pembentukan daerah; 2. Data geografis wilayah; 3. Jumlah penduduk; 4. Jumlah kecamatan dan kelurahan; 5. Jumlah PD dan unit kerja PD dan pegawai pemerintah; dan 6. Realisasi APBD. 7. Pengumpul dan Pengolah Data

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (WIKAN NURTIA ESTIKA, S.T.);	BAB I Pendahuluan 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Permasalahan strategis pemerintah daerah; 2. Visi dan misi Kepala Daerah; 3. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan 4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
			BAB I Pendahuluan 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1 Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2 Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3 Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan 4 Gambaran orientasi komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

8

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		3. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, ST);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.1 Capaian Kinerja Makro	Indikator Kinerja Makro sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia; 2. Angka Kemiskinan; 3. Angka Pengangguran; 4. Pertumbuhan Ekonomi; 5. Pendapatan per Kapita; dan 6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).
			BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan TUGas Pembantuan	Tugas Pembantuan
		4. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Pendidikan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
		5. Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kota Blitar (RIZKI ANASTASIA WIDHIANINGRUM, S.KM);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Kesehatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

8

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
			Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		6. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.
		7. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.
		8. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
			2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		9. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		10. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Sosial, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

8

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
		11. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S. Kom);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal
		12. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		13. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P.,M.P);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren 1. Urusan Wajib Pangan; 2. Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		14. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
		15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		16. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S.Sos);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat

4

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		17. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perhubungan
		18. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

2

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
		19. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. dan Tenaga Kerja Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		20. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (MUHAMAD AGUNG SUTOPO, S.E.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
		21. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar (SUNDARI, S.E)	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
			Penyelenggaraan Urusan Konkuren	
		22. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar (ERY MINTARSIH, S.E);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan
		23. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Konkuren	Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian
		24. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (DINI PURWITASARI SUROSO, S.Sos.)	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Urusan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		25. Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Keuangan Daerah
		26. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
		27. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah
		28. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Daerah
			BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja; 2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
			2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan 7. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
		29. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik

8

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	URAIAN
			BAB / SUB BAB	
		30. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP.)	BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
		31. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (PUGUH ARI SUDHANA,S.E);	BAB III Capaian Pelaksanaan Pembantuan Kinerja Tugas	Tugas Pembantuan
		32. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHYUDIANTO,S.Sos.,M.A.P);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		33. Fasilitator Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (MOCHAMAD RIFANSYAH MEI QIZA S.Tr.I.P.);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		34. Analis Kerja Sama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ROSYIDAH HASANAH, S.IP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		35. Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

Q

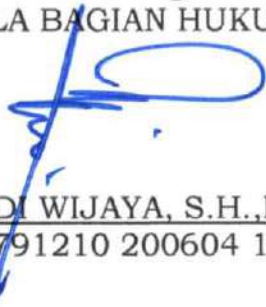
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		36. Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFI'AH).	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/ /HK/410.020.3/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
I.	TIM PEMBINA			
	a. Pengarah	Walikota Blitar.	-	
	b. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
II.	TIM PENYUSUN			
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	c. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHYUDIANTO,S.Sos.,M.A.P).	-	

0

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
	d. Anggota	1. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (WIKAN NURTIA ESTIKA, S.T.);	BAB I Pendahuluan	a) Dasar Hukum b) Visi dan Misi Kepala Daerah c) Data Umum Daerah (Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk).
		2. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Jumlah PNS).
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan.
		3. Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak);	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan).

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Keuangan Daerah
		4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;	BAB II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang disepakati dalam dokumen anggaran.
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Daerah

Q

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		6. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pendidikan
		7. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Blitar (LULUK MARDIANAH, S.KM);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan
		8. Administrator Kesehatan Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (ELLY NUR ISNAINIYAH, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan
		9. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		10. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
		11. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		12. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		13. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Sosial.
		14. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S. Kom);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		15. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	a) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		16. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P.,M.P);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	a) Urusan Wajib Pangan; b) Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.

Q

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		17. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
		18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S.Sos);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		20. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perhubungan
		21. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		22. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		23. Perencana Ahli Pertama Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (MUHAMAD AGUNG SUTOPO, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Q

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
		24. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar (SUNDARI, S.E)	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata
		25. Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar (ERY MINTARSIH, S.E);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan
		26. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.4 Pelaksana Urusan Pilihan	Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		27. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, ST);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.7 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	Kebijakan Strategis Kepala Daerah Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran Sebelumnya	Menyesuaikan dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang ditujukan kepada Masing-masing Perangkat Daerah
		28. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (KHALEDAYEA, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Fungsi Pengawasan

4

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		29. Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (SOLECHAH, S.H.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat.
		30. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul
		31. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sukorejo
		32. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sananwetan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sananwetan

Q

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		33. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik
		34. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, ST);	BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	Tugas Pembantuan
		35. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		36. Fasilitator Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (MOCHAMAD RIFANSYAH MEI QIZA S.Tr.I.P.);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		37. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN S.E);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		38. Analis Kerja Sama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ROSYIDAH HASANAH, S.IP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		39. Pengadministrasi Keuangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		40. Pengadministrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFI'AH).	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/18/HK/410.020.3/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

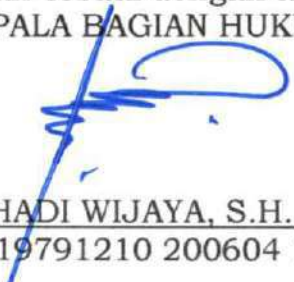
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Daerah Kota Blitar	Melegalisasi Laporan Hasil Reviu
2	WAKIL PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar.	Meneliti dan dan memastikan kebenaran laporan hasil reviu
3	PENGENDALI TEKNIS	Kepala Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Blitar.	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Reviu
4	KETUA	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (Drs. SINGGIH SISWANTO).	Mengkoordinir Anggota dan menyusun laporan hasil reviu
5	ANGGOTA	a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (AINUR ROFIQOH S.STP,M.Si.); b. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (AYU DYAH WULANDARI, S.AB.); dan c. Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (FRIDA KARTIKA PUTRI DEFINA, S.E.).	Melakukan penelaahan, mencermati dan mengoreksi bukti dukung pada Aplikasi LPPD

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008